ISBN 978-602-53460-5-7

PROSIDING

SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (SATIESP 2020)

COVID-19 PANDEMIC, MITIGATE THE SHOCK AND PAVE THE WAY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

SATIESP
IESP UNTAN

Email
jurusaniesp@ekonomi.untan.ac.id
Instagram
@iespfebuntan
Facebook
Iesp Feb Untan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak

PROSIDING

SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU EKONOMI DAN
STUDI PEMBANGUNAN 2020 (SATIESP 2020)

"*Covid-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way for a Sustainable Future*"

Pontianak, 2 Oktober 2020

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PROSIDING

SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 2020 (SATIESP 2020)

"*Covid-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way for a Sustainable Future*"

ISBN: 978-602-53460-5-7

Editor :
Metasari Kartika, S.E., M.E.

Cover Design and Layout :
Ade Ananda Julianto Putra

Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak – Kalimantan Barat (78121)
Website : http://feb.untan.ac.id/
Email : iesp@ekonomi.untan.ac.id

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

SUSUNAN KEPANITIAAN
SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 2020 (SATIESP 2020)

1. Pengarah : Dr. Barkah, SE, M.Si
2. Steering Coomite : Muz'an Sulaiman, S.E., M.M
3. Ketua : Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D
4. Bidang Seminar : Nindya Lestari, S.E., M.Sc
5. Bidang Poster PKM : Eko Supriyanto, S.E., M.E
6. Bidang Konsumsi : Sisi Amalia, S.E., M.EI
7. Bidang Publikasi : Metasari Kartika, S.E., M.E
8. Perlengkapan : Romi Suradi, S.EI., M.E
9. Kesekretariatan : Fara Dina, S.E., M.E

REVIEWER

Ketua : Dr. Memet Agustiar, S.E., M.A

Anggota :

1. Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc
2. Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si
3. Dr. Rosyadi, S.E., M.Si
4. Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si
5. Dr. Jumhur, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 (SATIESP 2020) dengan tema "*Covid-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way for a Sustainable Future*" dapat dipublikasikan. Covid-19 merupakan tragedi kesehatan yang memberikan guncangan luar biasa pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang turut terguncang adalah aspek ekonomi. Wabah ini memaksa dunia untuk mengurangi bahkan membatasi aktifitas sosial dan menjaga jarak fisik satu sama lain guna menghambat penyebaran wabah yang lebih masif. Gerakan pembatasan ini ternyata sangat berpotensi mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Keadaan dimana masyarakat secara luas diminta untuk banyak berdiam diri di rumah (*stay at home*), sesuai dengan *the law of supply and demand*, mendorong terjadinya penurunan *agregat demand* (AD) yang berdampak pada penurunan *agregat supply* (AS) dan berujung pada penurunan jumlah produksi atau *quantitiy* (Q).

Mitigasi dan *recovery* demi menata masa depan berkelanjutan harus dilakukan. Terganggunya *supply, demand* dan *supply-chain* akibat pendemi ini, tidak boleh semakin memperburuk keadaan yang mengarah pada hadirnya krisis ekonomi yang akan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Segala upaya bersama perlu dilakukan termasuk oleh para akademisi melalui sumbangsih ide, gagasan, saran yang diaktualisasikan dalam Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka turut serta berperan menghadirkan berbagai bentuk solusi atau model filantropi dalam Ilmu Ekonomi. Prosiding SATIESP 2020 merupakan salah satu ajang bagi para Akademisi untuk bertukar hasil penelitian dan PKM di bidang ilmu ekonomi dan praktek/ kebijakan pembangunan secara umum serta pengembangan berbagai sektor ekonomi.

Apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemakalah dan pelaksana Seminar serta seluruh pihak yang turut serta mesukseskan acara seminar dan terbitnya Prosiding ini meskipun dalam masa tekanan pendemik covid-19. Akhir kata, semoga Prosiding SATIESP 2020 ini memberikan dampak seluas- luasnya serta memperoleh ridho dan catatan amal kebaikan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 2 Oktober 2020
Dekan FEB UNTAN,

Dr. Barkah, S.E., M.Si.
NIP. 196502201990032004

KATA PENGANTAR
KETUA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ijin-Nya Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 (SATIESP 2020) dapat dipublikasikan. Prosiding ini merupakan publikasi ke-3 yang telah diterbitkan dari rangkaian acara SATIESP tiap tahunnya. Pelaksanaan SATIESP 2020 kali ini istimewa karena dua hal, yang pertama kegiatan akademik ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Guru Besar Jurusan IESP FEB Untan, Prof. Hj. Asniar Ismail, S.E., M.M.yang memasuki masa purna tugas pada tanggal 1 Oktober 2020 setelah 47 tahun mengabdi. Kedua, tidak seperti biasanya, kegiatan akademik ini dilaksanakan secara daring sebagai bagian dari protokol kesehatan yang diterapkan dalam suasana pandemi Covid-19. Dua orang *keynote speakers* yang berkompeten di bidangnya yaitu Faisal Basri, S.E., M.A. (ekonom senior Indonesia) serta Malgorzata Szczepaniak, Ph.D dari Nicolaus Copernicus University di Polandia, dihadirkan pada kegiatan ini.

Pada SATIESP 2020 dipresentasikan 50 artikel penelitian dan PKM dosen/peneliti Jurusan IESP FEB Untan serta perwakilan dari perguruan tinggi lainnya. Pada Kegiatan Seminar, para dosen/peneliti menyampaikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang: Ekonomi Publik; Ekonomi Sumberdaya Manusia; Ekonomi Pertanian; Ekonomi Uang & Bank; Ekonomi Regional & Perbatasan; Ekonomi & Bisnis Islam; Keuangan & Perbankan Islam serta bidang lainnya dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Selain pemaparan artikel, diadakan pula lomba poster PKM terbaik dan pameran poster PKM secara daring. Juri pada kegiatan ini adalah Uray Ferry Andi, S.T., M.T. dari Prodi Arsitektur FT Untan dan Dr.Ari Widiantoro, S.Si, M.Si. dari Prodi Kimia FMIPA Untan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan FEB Untan beserta jajarannya, Pemakalah, Juri, Peserta, Panitia, Sponsor serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas kontribusinya dalam mensukseskan SATIESP 2020.

Sebagaimana kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan SATIESP 2020 maupun penerbitan Prosiding ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, Semoga Allah SWT berkenan memberikan ridho-Nya. Aamiin ya Robbal Alamin.

Pontianak, 2 Oktober 2020
Ketua Jurusan IESP FEB UNTAN

Nurul Bariyah, SE, M.Si, Ph.D
NIP. 196912011994032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ..... **i**

KATA PENGANTAR KETUA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

Integration and Portfolio Diversification of Islamic Banking in ASEAN Emerging Countries **1**
Helma Malini, Djihan Islahiyah, Edwin Suwantono

Human Development Index, Unemployment and Poverty Rate in Kalimantan Barat **12**
Erwan Wahyu Hidayat, Rosyadi, Nurul Bariyah

Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia **24**
Sri Kurniawati

Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu **32**
M. Ali Nasrun

Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat **41**
Windhu Putra

Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat **56**
Helly Suharlina

Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat **73**
Ninuk Dwiastuti

Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia **92**
Yarlina Yacoub, Hana Mutiaradina

Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia **103**
Wahyudi

Strategi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pasca Pandemic COVID-19 Dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0 di Provinsi Kalimantan Barat **114**
Rini Sulistiawati

Kemampuan Pengangguran Menjelaskan Derajad Kesehatan Masyarakat (Bukti Empiris dari Data Panel Provinsi di Indonesia) **130**
Jumhur

Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat **143**
Asniar Ismail

Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur **160**
Nurlinda, Junus Sinuraya

Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 ..... **176**
Akhmad Yani

Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2019 ..... **197**
Restiatun

Determinan *Impulse Buying* pada Supermarket Islami **208**
Wenny Pebrianti, Septi Purnama Sari

Persepsi Konsumen Perkotaan Terhadap Beras Lokal Kalimantan Barat **223**
Ekawati, Sri Widarti, Donna Youlla, Ellyta, Rahmatullah Rizieq

Citra Perusahaan Sebagai Aset **230**
Sri Syabanita Elida, Aulia Berliana Putri

Dampak Investasi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak terhadap Pekerja Migran Indonesia **242**
Fariastuti Djafar

Perhitungan Ekonomi dan Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Pengolahan Nugget Nabati di Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas **249**
Sri Mulyati, Muslimah, Heriyansah

Dampak Covid-19 Terhadap Pedagang Produk Pertanian di Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak **260**
Fariastuti Djafar

Covid-19 dan Perilaku Masyarakat dalam Mempertahankan dan Melepas Rupiah **266**
Rosyadi, Yuga Casandri

Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak **277**
Erni Panca Kurniasih

Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat **290**
Sisi Amalia

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ... **305**
Muz'an Sulaiman

Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Capital Flight* di Indonesia Pendekatan Model Dinamis ... **328**
Afrizal

Analisis Neraca Pembayaran Indonesia Pendekatan Model ECM **345**
Afrizal

Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN **362**
Erni Panca Kurniasih

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Dependency Ratio* di Indonesia **371**
Meiran Panggabean

Penguatan UMKM Ditengah Pandemi: Solusi Masyarakat Bertahan Pada Resesi di Desa Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat **388**
Marsdenia

Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sebambang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas **399**
Sri Mulyati, Rini Fertiasari, Muslimah

Poster Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat **405**

1. Mitigasi Bencana Covid-19 Melalui Sosialisasi Perilaku Sehat dan Bantuan Alat Kesehatan **405**

2. Pemulihan Penguatan Peran UMKM Terdampak Covid-19 ..... **406**

3. Menata Ulang Objek Wisata Sejarah Makam Juang Mandor Kabupaten Landak **407**

4. Festival Mandor: Upaya Meningkatkan Pendapatan Rakyat Melalui Kenangan Perjuangan Kalimantan Barat **408**

5. Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) **409**

6. FEB UNTAN Connect Workshop Literasi Keuangan Bagi UMKM di Kota Pontianak **410**

7. Design Model Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Tangkap Melalui Pembangunan Rumah Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 ..... **411**

8. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid di Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ..... **412**

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Integration and Portfolio Diversification of Islamic Banking in ASEAN Emerging Countries

Helma Malini*
Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Djihan Islahiyah
Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Edwin Suwantono
Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The growth of Islamic banking industries in ASEAN shows that Islamicbanking in Indonesia is not only an international hub for banking industries in ASEAN but also as a place for investors to diversify investment portfolios. Globalization makes Banking in ASEAN connected to one another. However, opportunities for portfolio diversification of banks in this case; Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam are in questioned on whether there is integration between Islamic banking industries in those regions and whether there is a possibility of Diversification of banking Portfolios in the region. In this manner the study analyzed 25 banks' data across selected countries. In the present study, ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity) are used as measure of performance of diversification of banks. The number of credits and the amount of credits that banks let borrowers' use are employed as control variables. According to the result of the analysis showed ASEAN Islamic Banking Industries Integrates with varied level to each other based on the geographical proximity and bilateral trading relation with selected countries.

JEL: G21, P43
Keywords: Banking Industries, Integration, Portfolio Diversification, Risk and Return, Opportunities

1. INTRODUCTION

The nature of integration among banks conveys significant information for effective market diversification. First integration of banks essentially indicates the efficiency of the financial markets. In efficient banks, generally, bank integration will increase, since the movement of information between countries is higher due to the elimination of barrier such as prohibition of investing for foreign investor or improvement of trading facility. In the context of portfolio diversification, assets with similar expected returns due to the same risk exposure will offer no diversification benefit as the banks performance tend to be similar, in a risk return concept, each investor can increase return or reduce risk, or mixing strategy, but the impact or benefit will be less if the entire banks are fully integrated to each other.

* Email: helma.malini@ekonomi.untan.ac.id

In the implementation, fully integrated banks are not prohibiting investor for having their fund place in another banks in another region, since investor always seeks for portfolio that offering higher return and lower risk where the chance for having the exposure are quite minimal in their own countries, thus placing fund in another countries are best preferences (Aribi & Gao, 2011; Malini, 2020a; Masoodsup et al., 2009) In addition, gains from international portfolio diversification appear to be largest for countries with high country risk, since Indonesia is a country with high profile risk, thus making other differences across countries, such as size of the banking sector, and trade openness does not support to explain the differences in the benefit of international portfolio. For Indonesia banks, several factor influences integration with other banks, such as; number of banks, fixed regulation, separation of rules and system between the conventional and banks and the elimination of transaction cost. For Indonesia that considered as a country with a high risk profile creates the growth of banks becomes dependable to the volatility of risk. Risk in banking relates with risk term in banking sector that covered with uncertainty, volatility or loss that accepted by investor lead to banking industries becoming less integrated with conventional banks, thus eventually influence the integration of banks among countries (Karim & Karim, 2012; Majid et al., 2007)

In international concept, investment diversification through banking sector faced several constraints particularly the one that implemented by local government, the constraint would also apply to banks since this institution are in the same environment, however since banking has the advantages to offered investor stability and enduring toward crisis, portfolio diversification to banking industries in another region becoming other preferences towards other product in financial industry.

The strength of Islamic financial industry toward crisis leads banking industries becoming preferable choice for investor to diversify investment portfolio. Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam are ASEAN countries for the portfolio diversification. Those countries provide platform and contribute to the diversification of banking product in ASEAN region. Although, there are fundamental differences on operationalization between banks in those region particularly in term of capital and principle to follow, in the implementation banking industries able to replicate useful and non-contradictory functions between institutions to institutions (Masoodsup et al., 2009)

However, with recent rapid development of financial industry particularly Islamic banking industries does not necessarily attract the attention of researcher to research about banking industries integration and portfolio diversification, while integration in banking industries is essential to indicate level efficiency and transparency behavior of banks. Therefore, the integration and portfolio diversification in banking industries acted as reflection of all available information and as such, are consistent with the economic fundamentals (Beechey et al., 2000). In the context of banks integration, integrated banks have similar expected return due to the same risk exposure. Integrated banking industries suggesting that banks offer diversification benefits as banks performances tend to perform similar. In a risk-return framework, investor able to increase return or reduce risk or both, by having investment mix in banks among region which return are uncorrelated. Thus, the degree of banks integration suggests the potential portfolio diversification benefits potentially gained by investor.

The measurements of banking integration are important in asymmetric information. In terms of asymmetric information, banks that operate in efficient market must reflect the real condition of banks incorporated in the region. Meanwhile, efficiency information believed to be the main factor that can be used in answering the problem of integration in banking industries. Banking efficiency refers to the conditions under which banking operates fully reflects all available information. The process of creating banking integration begins with transparent process and a fair trading system to all investors who invest their funds in banking industries.

Despite numerous studies that examining banks integration among developed and emerging markets however only few studies explore the issue of Banks integration and portfolio diversification in banking industries (Asma'Rashidah Idris et al., 2011; Hung & Cheung, 1995; Majdoub & Mansour, 2014) Rapid growth of bank in ASEAN proves that banking industries in this region potentially able to become international hub for investor. The certainties of stability from of economics condition in ASEAN makes financial industry integrated. However, the chances of diversifying portfolio to other banks in the world is less due to question of whether banks among countries are integrated to each other, in this case (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam).

This research is very important to conduct because it will provide special treatment for banks integration on one hand and realize the core concepts of information efficiency and deciding best concepts for future bank integration to achieve efficiency of banks in ASEAN in terms of fairness, transparency, protection to investors and reduce systematic risk. The geographical proximity in ASEAN makes the concepts interconnected to be tested.

2. LITERATURE REVIEW

The integration of banks also described in the solidarity and brotherhood in Islam (Trihadmini & Pudjiastuti, 2011) asserted that the apparent disparities in terms of nationality, race, creed and color are artificial and have no place in Islam. The holy Quran dearly points that human beings were created as one nation (*ummah*) but become divided because of their differences (Although the integration of economy is the foundation of economic system, but in the implementation the integration among banks is in question (Asutay, 2012)

The removal of restriction on capital flow, floating exchange rate, improve communications system and new instruments are all factors that have contributed to the process of integration (Cooray & Wickremasinghe, 2007). Other factor that contributed to the process of integration is globalization (Goeltom, 2008), globalization has been major factor in influencing the movement and correlation between banks in one country to the others. Globalization of banks has further support the integration and correlation between two or more countries in term of flexibility of capital flow, strengthening rules towards the forming of bilateral organization and empowering more reliable supervisory framework, where all factors will lead to regional bank efficiency.

Information efficiency is an absolute factor to form transparent Islamic banks through accurate availability of information. One way to make sure regional market efficiency is providing information dissemination in each country to ensured that capital flow allocated into projects that resulting into highest expected return with necessary adjustment for risk, this process will create efficient pricing mechanism, economy's savings and investment allocated efficiently. Hence not

only that regional efficient bank provides opportunities to engage in profitable trading activities on a continuous basis but also creating a better platform for country integration and correlation with banks in another part of world (Al-Zoubi & Maghyereh, 2007).

Furthermore, one country that implementing open foreign investment policy will benefit from the integration of banks, since the level of bank integration will influence the level of benefits or profit of international investment, moreover bank integration between countries has important consequences in terms of return predictability, portfolio diversification, asset allocation, economics of scale and scope and long-term gain (Siraj & Pillai, 2012). The benefit of the increase bank integration between countries is the capabilities to decrease the cost of capital, increase investment opportunity set for local and foreign investor but also lead to significant welfare gains from higher saving and international risk sharing or diversification through the possibility of integration.

Diversification is the balancing act in which the tradeoffs between risk and return are adjusted in the light of the investor risk tolerance (Bank Investment Consultant 2006; 37). This statement also refers to the modern portfolio theory that sayings "do not put all of your eggs in the same basket". This theory developed by Harry Markowitz, his statement insists that through investing in diversified asset it will be possible for investor to diversify a portfolio and thereby reducing the volatility of the entire portfolio (Markowitz, 1959).

In order to minimize risk and increasing profit opportunities, more investors seek to diversify their portfolio to international territory. International portfolio makes it possible to expand efficient frontier and reduce systematic risk level below domestic securities. (Malini, 2020b; Samad & Hassan, 2006) have studied the benefits of international diversification and one of the benefits is to expand the efficient frontier and reduce systematic risk level below that of domestic securities alone. The reason is that structural and cyclical differences across economies makes the risk-reduction benefit possible. If one financial market is doing worse than expected it is likely that another financial market will do better than the expectations, hence risk is reduced and losses are offsets.

Several studies have been conducted to analyze the nature of integration and correlation among financial institutions within a particular territorial or countries. For Asia region, (Karim & Karim, 2012) focusing on eight banks in: Turkey, Egypt, Oman and Kuwait (representing the MENA region), while Indonesia, Malaysia, Bangladesh and Pakistan (representing the Asian region). This study assesses the degree of integration not only between developing banks but also with the world three largest banks, namely US, UK and Japan. The findings showed that based on the geographical proximity as the main factor for influencing integration between develop and developed banks, in particular, banks in the Asia region are found to be more responsive to shock in the Japanese market, while those in MENA region are more responsive to shock in the UK market.

Asma'Rashidah Idris et al. (2011) examine the integration using Risk Metrics, student-t APARCH and Skewed student-t APARCH, the result showed that Dow Jones Islamic Market is less risky than its respective benchmark. Very few studies have focused on the emerging financial markets of the organizations of Islamic countries (OIC)[*], which cover a wider geographical area. Geographical area also will influence the level of bank integration between countries. Country with

[*]The organization of the Islamic conference (OIC) is an inter-governmental organization which includes membership of 57 states spread over four continents. The organizations was established upon a decision of the historical summit which took place in Rabat, Kingdom of Morocco on 12th Rajab 1389 Hijra (25 September 1969) as a result of criminal arson of al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem (http://www.sesric.org/sesric-about.php).

the same economic grouping and geographically closed to each other tend to have strong integration to each other.

Masoodsup et al. (2009) & Yousef (2004) study the conditional correlations across US banks and a sample of five Islamic emerging markets, namely Turkey, Indonesia, Pakistan, Qatar, and Malaysia. The estimation results of the three models corroborate the stylized fact that the US and Islamic emerging equity markets are weakly correlated over time. Geographically far from each other contributes to the weak correlation, other than that is the fact that the number of foreign investor from and to the US and emerging equity is quite small although investor not too familiar with both market. However, the choosing of emerging markets as a research background needs adjustment to countries that represents wider geographical area, from Middle East, Asian and European countries.

Samad & Hassan (2006) studies the impact of 2007 global financial crisis on the integration of the Islamic financial market. Seven Islamic financial market are chosen based on country development and geographical closeness; Malaysia, Indonesia, Turkey, Kuwait, US, UK and Japan. The result of the study showed Islamic financial market is not spared from the global financial crisis as all the Islamic financial market included in this study was adversely affected by the financial crisis.

3. RESEARCH METHODOLOGY

ARDL Bound Testing Approach

To examine the long-term relationship of Islamic banking integration in the selected region, this study uses the ARDL-bound testing approach for co-integration which involves estimating the conditional error correction version of the ARDL model (Asutay, 2012). The choice of the ARDL approach in this study is based on consideration of an unbiased and efficient joint integration analysis given the fact that, first, it can be applied to small sample size studies and therefore conducting bound tests would be appropriate for this study. Second, estimating the short and long-term components of the model simultaneously, eliminating problems associated with omitted variables and autocorrelation. Finally, it can distinguish between dependent and independent variables.

In this study, the following estimates are the basic model:

$$INAt = \alpha 0 + \alpha 1MYt + \alpha 2tTHAIt + \alpha 3PHt + \alpha 4VIETt + €t \quad (1)$$

$$MYt = \alpha 0 + \alpha 1INAt + \alpha 2tTHAI + \alpha 3PHt + \alpha 4VIETt + €t \quad (2)$$

Where INA, MY, THAI, PH, JAP, VIET refer to banking in Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam, respectively, and € is the error term for the model.

The error correction version of the ARDL framework relating to the following equation :

$$\Delta INAt = \delta 0 + i\Delta INAt\text{-}1 + \phi i\Delta MYt\text{-}i + \phi i\Delta Thait\text{-}i + \Upsilon i\Delta PHt\text{-}i + \mu i\Delta Viet\text{-}i + \lambda 1INAt\text{-}1 + \lambda 2MYt\text{-}1 + \lambda 3Thait\text{-}1 + \lambda 4PHt\text{-}1 + \lambda 5Viett\text{-}1 + u1t \quad (3)$$

$$\Delta MYt = \delta 0 + i\Delta MYt\text{-}1 + \phi i\Delta INAt\text{-}i + \phi i\Delta Thait\text{-}i + \Upsilon iPHt\text{-}i + \mu i\Delta Viett\text{-}i + \lambda 1MYt\text{-}1 + \lambda 2INAt\text{-}1 + \lambda 3Malt\text{-}1 + \lambda 4Thait\text{-}1 + \lambda 5PHt\text{-}1 + \lambda Viet\text{-}1 + u1t \quad (4)$$

In the above equation, the term with the sum mark represents the dynamics of error correction while the second part (the term with λs) corresponds to a long-term relationship. Zero without co integration in a long-term relationship is determined by H0: $\lambda 1 = \lambda 2 = \lambda 3 = \lambda 4 = \lambda 5 = 0$ tested against alternative H1: $\lambda 1 \neq \lambda 2 \neq \lambda 3 \neq \lambda 4 \neq \lambda 5 \neq 0$ by F-test, however, the asymptotic distribution of F these statistics are non-standard regardless of whether the variable is I (0) or I (1) (Akaike, 1974) tabulated two sets of corresponding critical values. One set assumes all variables are I (1) and the other assumes that they are all I (0). This provides a limitation that includes all possible classifications of variables into I (1) and (I) 0 or even fractionally integrated. If the F-statistic is located above the upper boundary level, then zero is rejected, which indicates co integration. While if F-Statistics falls below the bound level, null cannot be rejected, this supports no joint integration. However, if it is included in the band, the results cannot be concluded.

Finally, to determine the optimal lag length included in the model and to select the ARDL model to be estimated, this study uses (Akaike, 1974) Information Criterion (AIC) with a maximum lag length considered 8. In this study, the akaike information criterion (1974) was used to determine the incorporation of lag length in all tests of this study. It is important to note that the GMM estimator must be identified; there must be at least Z instrumental variables because there is a parameter Θ. Following (Bartram & Dufey, 2001), this study uses lag explanatory variables as instrumental variables. These variables were chosen for use because of difficulties in finding other instrument variables, because this study uses daily data and for extended periods. These variables, however, are clear instruments and in many cases, must be included in the instrumental list. Another important aspect in determining GMM is the choice of a weight matrix to produce consistent and strong estimates.

$$\begin{bmatrix} \Delta IN \\ \Delta MY \\ \Delta THAI \\ \Delta PH \\ \Delta VIET \\ \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta 0 \\ \delta 1 \\ \delta 2 \\ \delta 3 \\ \delta 4 \\ \\ \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^{K} ri \begin{bmatrix} \Delta IN \\ \Delta MY \\ \Delta THAI \\ \Delta PH \\ \Delta VIET \\ \\ \end{bmatrix} t\text{-}k + \prod \begin{bmatrix} IN \\ MY \\ THAI \\ PH \\ VIET \\ \\ \end{bmatrix} t\text{-}1 + \begin{bmatrix} \nu 0 \\ \nu 1 \\ \nu 2 \\ \nu 3 \\ \nu 4 \\ \\ \end{bmatrix}$$

Data

ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity) are used as measure of performance of diversification of banks. The number of credits and the amount of credits that banks let borrower's use are employed as control variables.

4. RESULT AND DISCUSSION

Descriptive analysis provides initial description of the nature and volatility of banking integrity in selected countries. At the same time, this allows the comparison of basic performance indicators of banking enabling the observation of how they are respectful of one another. Table 1 provides a summary of bank returns statistics for selected Islamic banks in a country included in this study. In terms of the highest average daily returns, Malaysia shows the highest average daily returns of 0.38 percent, followed by Indonesia at 0.14 percent, Philippines 0.07 percent, Thailand and

Vietnam at 0.04 and 0.03 percent. In terms of return volatility reflected in standard deviations, Malaysia is the highest risk at 0.92, followed by Indonesia at 0.04, Philippines and Thailand offering the lowest risk of 0.01 percent. Regarding slope measurements, banks in Thailand, Philippines, and Bahrain shows a negative slope. Negative biases imply that the left tail in market distribution is longer (also known as left-leaning) and also as a sign of nonlinearity in the dynamics of integration in these countries.

Table 1. Descriptive Statistics of Selected Banks

Statistics	ID	MY	THAI	PH	VIET
Mean	0.1411	0.3872	0.0004	0.0003	0.0007
Median	0.4500	0.3700	0.0089	0.0033	0.0002
Maximum	0.4900	0.4800	0.0617	0.0833	0.0485
Minimum	0.0956	0.3300	0.6176	-0.0061	-0.0158
Std Deviation	0.0426	0.9224	0.0403	0.0226	0.0111
Skewness	0.0206	0.8608	-0.6438	-0.6711	-0.4949
Kurtosis	2.3836	3.0325	0.2373	3.1044	2.07115

In this case relating to investment returns and the ability of investors to gain momentum to diversify portfolios, a negative trend also means that investors tend to have only a few extreme losses and often make small profits. If the value is related to an investment perspective, investors rarely take the opportunity to move their capital although there are chances of higher profit. Maximum returns between countries vary where Indonesia and Malaysia have something in common in offering maximum returns, while minimum returns fluctuate between countries where Thailand, Philippines and Vietnam showed a tendency to offer negative minimum returns.

In conclusion, Banks that have the highest volatility are banks that able to adjust with global environment. The volatility of Malaysia banking can be explained as a result of socialized background of dual Banking in Malaysia which results in opportunities to benefit from diversification of the portfolio towards the adoption of different strategies of the banks (Haron et al., 1997). Meanwhile banking volatility in Indonesia can be explained as an investor response due to the lack of information about banks products in Indonesia. The lack of information can be in the term of information about the screening process, banks background and product types from banks.

Table 2. Relationship Between Banks in Selected Countries

	ID	MY	THAI	PH	VIET
ID	1.000				
MY	0.430	1.000			
IND	0.312	0.341	1.000		
QR	0.241	0.453	0.031	1.000	
BH	-0.222	-0.456	0.674	-0.765	1.000
JAP	0.431	0.789	0.563	0.876	0.765

Table 2 showed that during the observation period, the chosen banks show strong correlations with each other as reflected by strong correlation coefficients. The strongest correlation or the highest correlation value is recorded between the Philippines and Vietnam (0.876), followed by Malaysia and Vietnam (0.789) and Thailand and Vietnam (0.765). This strong correlation between banks proves that the major factors contributing to strong correlations, namely economic grouping

and geographical proximity, do not apply in this study, since countries that correlate with each other come from different regions, between Asia and central, east or between developed and developing countries. Furthermore, this section of the study did not find any correlation or weak correlation between Asian integration into Asia, which is also similar to previous research on Asian banking integration (Gupta and Guidi, 2012).

Vietnam banks shows a strong correlation with other selected bank in this study, although several Vietnam banks is considered relatively new in term of establishment, however Vietnam have bilateral trade between selected countries and resulting into a strong interdependencies between banks. Other banks also show strong correlations, except for the Philippine's and Indonesia with values smaller than 0.1. While Indonesia, Malaysia and Thailand showed the weakest correlation with a negative correlation value. The weak correlation between banks shows that there is no short-term co-movement between banks and indicates the possibility of short-term diversification benefits.

The benefits of diversification in several countries imply that these countries implement open market system where investors easily move their funds to that country and resulting into the possibilities for high speculative actions, specifically for countries with the weakest correlations; Thailand- Philippines (0.031), Indonesia-Philippine's (-0.222), Malaysia and Thailand (-0.456), Thailand and Philippine's banks. Weak economic interdependence can be the reason for the low correlation between Indonesia and Malaysia with other banks. While, Banks in Indonesia and Malaysia, where both countries have high correlation with each other with a value (0.430). The correlation between Indonesia and Malaysia due to its proximity, makes investors in both countries have flexibility in terms of liquidity, they tend to move and divert their investment.

Table 3. ARDL- F Statistic For Testing Existence of Co-Integration

Order of Lag	Model 1 (INA, MAL)	Model 2 (THAI, PH VIE)	Model 3 (INA, THAI, PH, VIET)	Model 4 (MAL,THAI, PH, VIET)	Model 5 (INA, MAL, THAI, PH, VIET)
1	1.217	2.117	1.9832	2.7652	0.2728
2	1.224	2.445	1.6322	2.7699	0.9823
3	1.321	2.321	1.6543	1.9202	0.7288
4	2.1150	3.431	2.6548	3.92829	0.6754
5	4.321	3.011	2.8903	1.90231	0.5632
6	1.321	3.221	2.9783	1.08299	0.7654

Notes: The relevant critical value bounds are taken from pesaran (2001): (i). Case iii: unrestricted intercept and no trend (number of regressors = 7), they are 2.96 – 4.26 at the 99%; 2.32-3.50 at the 95%; and 2.03 – 3.13 at the 90% significance levels respectively; and (ii) Case v: unrestricted intercept and unrestricted trend (number of regressors = 7), they are 3.34 – 4.63 at the 99%; 2.69-383 at the 95%; and 2.38 – 3.45 at the 90% significance levels respectively. * denotes that F-statistics falls above the 90% upper bound.

The point where banks integration correlation brings benefits to each other is when investment returns are higher thus exposure risk tends to increase and as a turning point the benefits of portfolio diversification are low, but that moment will give investors the opportunity to diversify their portfolios in all banks and get opportunities to reduce risk. In the context of integration, information should available to all investors. The correlation between countries showed that return of investment in several countries contain information about general stochastic trends, where the ability to predict return of one country can be used by another country. In its implementation, the movement of capital

depends on how much the interdependence of one country with other countries in terms of economic relations, bilateral trade and cultural equality (Suryana et al., 2013).

ARDL analysis determines the existence of a long-term equilibrium relationship between Islamic banks. Statistically, two or more banks are integrated with each other if the market offers long-term equilibrium relationship between two variables (Yousef, 2004). For banks integration, the concept of banks moving together in the long run is the result of arbitration activities. Arbitrage in investments is prohibited, because this action is a form of taking advantage of certain moments by taking advantage of the weaknesses of others. The existence of common long-term trends in bank integration proves empirically by a combination of F-Statistics generated by the estimation equation. Table 4.3 shows ARDL test results for the existence of long-term co-integration. Indonesia and Malaysia show weak co-integration (90 percent significance level) in the long lag 1, indicating that there is a long-term balance relationship. In model 2 (Thailand, Philippine's, Vietnam) also shows a long-term balance. When the integration of Indonesia and Malaysia is concluded in the model (Models 3 and 4). However, when Indonesia and Malaysia were included and connected to all selected (Model 5) these banks were found to be insignificant and not integrated with each other. The results also imply that co-integration is not related to geographical factors or economic grouping. In the context of portfolio diversification, investors can benefit by diversifying their chosen portfolio in this research.

Long-term equilibrium among selected countries eliminates institutional constraints consisting of taxation, foreign exchange control, bank regulations, transaction costs and foreign markets exposure to investors (Bartram & Dufey, 2001). Institutional constraints for Indonesia are in the form of lowering taxes for foreign investors, transparent regulations, reducing transaction costs such as brokerage fees and increasing liquidity. Meanwhile, institutional constraints for Malaysia are reducing taxes for foreign investors and open market policies to attract more foreign investors. Thailand institutional constraints are not in the form of taxation, because countries abolish taxes for foreign investors especially taxes for returns, flexible rules must be implemented especially in terms of transaction costs and brokerage fees. Institutional constraints to Philippine are related with eliminating high taxes and banking regulations to be more transparent for foreign investors to minimize risk. Vietnam institutional constraints are to introduce their banks to the world, because as an industrial country, conventional bank in Japan is more familiar to the world and its public.

5. CONCLUSION

Another aim of this part of the research is to examine whether or not integrated banks will have implications for portfolio diversification. However, if the market is fully integrated, the benefits of diversification will be very limited, because there is no opportunity to diversified portfolio to other countries. The nature of integration between banking in ASEAN conveys important information for effective banks diversification. The first integration of banking basically shows the efficiency of the financial markets. Therefore, the price of assets in an efficient banking industry fully reflects all available information and is therefore consistent with economic fundamentals (Beechey et al., 2000). In efficient information, generally, Islamic bank integration will increase, because information movement between countries is higher due to the removal of obstacles such as a prohibition on investing for foreign investors or improving trading facilities.

The implication of this research for investor to invest in selected Islamic banks is that there are huge potential benefits of international portfolio diversification across these countries. In term of their correlation coefficient, Indonesia and Malaysia is emerge and become a considerable portfolio diversification however Thailand, Phillipines, and Vietnam also attract foreign investor to diversified their portfolio, although with huge risk but also provide huge return.

Furthermore, to gain more benefit from portfolio diversification in ASEAN region, each countries should set up integrated financial policies that consist of regulation to strengthen the coordination between countries, the policy could be in form of removal trading barriers, implementing macro economy policy to stabilize domestic banking market and considering a policy for mutual coordination between countries to develop banks by coordinating on how to diversified Islamic bank product, strengthen rules in term screening process and investing mechanism.

REFERENCES

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *19*(6), 716–723.

Al-Zoubi, H. A., & Maghyereh, A. I. (2007). The relative risk performance of Islamic finance: a new guide to less risky investments. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, *10*(02), 235–249.

Aribi, Z. A., & Gao, S. S. (2011). Narrative disclosure of corporate social responsibility in Islamic financial institutions. *Managerial Auditing Journal*, *27*(2), 199–222.

Asma'Rashidah Idris, F. F. A., Asari, H., Taufik, N. A. A., Salim, N. J., Mustaffa, R., & Jusoff, K. (2011). Determinant of Islamic banking institutions' profitability in Malaysia. *World Appl. Sci. J*, *12*, 1–7.

Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, *11*(2), 93–113.

Bartram, S. M., & Dufey, G. (2001). International portfolio investment: theory, evidence, and institutional framework. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, *10*(3), 85–155.

Beechey, M., Gruen, D., & Vickery, J. (2000). *The Efficient Market Hypothesis: A Survey, Research Discussion Paper, Economic Research Department, Reserve Bank of Australia*.

Cooray, A., & Wickremasinghe, G. (2007). The efficiency of emerging stock markets: Empirical evidence from the South Asian region. *The Journal of Developing Areas*, 171–183.

Goeltom, M. S. (2008). The transmission mechanisms of monetary policy in Indonesia. *Participants in the Meeting*, 309.

Haron, S., Shanmugam, B., & Doran, H. (1997). *Determinants of Islamic bank profitability*.

Hung, B. W., & Cheung, Y. (1995). Interdependence of Asian emerging equity markets. *Journal of Business Finance & Accounting*, *22*(2), 281–288.

Karim, B. A., & Karim, Z. A. (2012). Integration of ASEAN-5 stock markets: A revisit. *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, *8*(2).

Majdoub, J., & Mansour, W. (2014). Islamic equity market integration and volatility spillover between emerging and US stock markets. *The North American Journal of Economics and Finance*, *29*, 452–470.

Majid, M., Yusof, R. M., & Razal, A. N. (2007). Dynamic Financial Linkages Among Selected Oic Countries. *Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries*, *28*(2).

Malini, H. (2020a). Determinants of Shariah Banking Performances in Indonesia Through the Perspective of Economic and Social Level. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, *9*(1), 47–57.

Malini, H. (2020b). Sharia Banks Integration and Diversification in Asian and Middle East Countries. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, *3*(4), 315–328.

Markowitz, H. M. (1959). Portfolio Selection, Cowles Foundation Monograph 16. *New York, New York: JohnWiley and Sons, 1959MarkowitzPortfolio Selection: Cowles Foundation Monograph*, *161959*.

Masoodsup, O., Aktan, B., & Chaudhary, S. (2009). An empirical study on Banks profitability in the KSA: A co-integration approach. *African Journal of Business Management*, *3*(8), 374–382.

Samad, A., & Hassan, M. K. (2006). The performance of Malaysian Islamic bank during 1984–1997: An exploratory study. *International Journal of Islamic Financial Services*, *1*(3).

Siraj, K. K., & Pillai, P. S. (2012). Comparative study on performance of Islamic banks and conventional banks in GCC region. *Journal of Applied Finance and Banking*, *2*(3), 123.

Suryana, S., Sekaran, U., Lee, S., Stearns, T., & Geoffrey, G. M. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *International Journal of Management*, *56*(8), 143–154.

Trihadmini, N., & Pudjiastuti, B. S. (2011). Dampak Multivariat Volatility, Contagion dan Spillover Efiect Pasar Keuangan Global terhadap Indeks Saham dan Nilai Tukar Rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *11*(2), 117–134.

Yousef, T. M. (2004). The Murabaha syndrome in Islamic finance: laws, institutions and politics. *The Politics of Islamic Finance*, 63–80.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Human Development Index, Unemployment and Poverty Rate in Kalimantan Barat

Erwan Wahyu Hidayat
Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, Indonesia

Rosyadi
Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Nurul Bariyah*
Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Poverty is a serious problem that occurs at the regional, national and international levels. The causes by are numerous and one of which is low quality of human resources that can be measured through the Human Development Index. The HDI only describes the quality of human resources in general, while a more comprehensive picture can be seen through its components, namely health, education and purchasing power. In addition to low quality of human resources, unemployment is also another contributing factor to poverty. This study aims to find out and analyse the effects of Health, Education, Purchasing Power and Unemployment on Poverty Rates in Indonesia, and the research locations is in 33 provinces in Indonesia. The data used are secondary data published by BPS in the form of Life Expectancy, Expected Years of Schooling, Mean Years of Schooling, Purchasing Power Parity, Open Unemployment Rate and Percentage of Poverty in 2010 to 2017. The analysis uses multiple regressions with fixed effect cross section-weights (EGLS) method. The result indicated that the influence of health, education and purchasing power on poverty rate is negative and significant. It means that increase in this variables, would decrease poverty rate in Indonesia, on the other hand, unemployment has a positive and not significant effect on the poverty rate in Indonesia.

JEL: I15
Keywords: health; education; purchasing power; unemployment; poverty rate.

1. INTRODUCTION

Poverty is still a development problem in Indonesia today and a priority that the government attempts to resolve through various programs. The National MDG target is to reduce poverty to 7.55% in 2015, but based on BPS publications the 2015 poverty rate nationally is only reduced to reach 11.22%. Indonesia is included in a developing country that is synonymous with poverty problems. Todaro and Smith (2006) pointed out that one of the causes of poverty is low quality of human resources (HR).

The quality of human resources can be measured by looking into the three basic components of the Human Development Index (HDI) comprising life expectancy at birth, knowledge and education, and standard of living. Another factor that also gives an effect on poverty levels is unemployment. High unemployment rate is a picture of low success of development in a country.

* E-mail: nurul.bariyah@ekonomi.untan.ac.id

There have been many studies on the relationship of HDI and poverty levels, but not so many have examined the relationship of the components of HDI as a whole to poverty levels, and for that reason the researchers are interested in testing whether greater HDI components (health, education and purchasing power) is related to reduced poverty. Then it will also be tested whether lower unemployment rate is related to high level of poverty.

Theoretically the results of this study are expected to contribute to the development of science (economic theory of development), and can also be used as a reference / reference source for academics to carry out deeper research and analysis related to policies in poverty alleviation. From the practical side, it is expected to be able to contribute to the government / local government in making policies related to planning in the fields of education, health, community economic empowerment and job creation.

2. LITERATURE REVIEW

Poverty

Central Agency of Statistic *(Badan Pusat Statistik* or *BPS)* understands poverty as an inability from the economic side to meet basic needs, both food and non-food, measured from the expenditure side conceptualized by the Poverty Line. Whereas the National Planning Board *(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* or *BAPPENAS)* (2015) defines poverty more comprehensively, by viewing poverty as a condition where a person or group of people, both men and women, are unable to fulfill their basic rights to maintain and develop a dignified life.

From the various theories available, it can be simplified, at least for the purposes of this study, that there are two major paradigms or theories (grand theory) about poverty that become the reference, namely: the neo-liberal and social-democratic paradigms.

1) Neo-Liberal Paradigm

Proponents of the Neo-liberal paradigm argue that poverty is only a partial or individual problem, caused by individual weaknesses in determining the choice in question. Poverty will be reduced even will disappear by itself if economic growth can be driven as high as possible and the market power can be expanded as much as possible.

2) Social-Democratic Paradigm

Proponents of the Social-Democratic paradigm say that the problem of poverty is not merely an individual problem, but rather a problem that is more structural in nature, namely where poverty is more caused by inequality, injustice and inequality in society caused by limited community access to various available sources.

Sharp, et.al (1996) in Mudrajad (2006) tried to identify the causes of poverty viewed from the economic aspect. Todaro and Smith (2006) made a statement that poverty which occurs in developing countries is largely due to low quality of human resources. Experts argue that the causes of poverty are actually multidimensional including low levels of education and low levels of health.

Human Development

As quoted from the UNDP report (1995), there are several important concepts regarding human development, namely: a). Development must prioritize the population as the center of

attention; b). Development is intended to enlarge choices for residents, not just to increase their incomes; c). There are four main pillars to support human development, namely productivity, equity, sustainability and empowerment; and d). Human development becomes the basis in determining development goals and in analyzing options for achieving them.

Human Development Index (HDI)

HDI is a composite index that is calculated as the simple average of three basic dimensions, namely long and healthy life, knowledge, and decent standard of living. In calculating the HDI, each component or indicator of the HDI must first be calculated in its index value. To facilitate the analysis, the index value is multiplied by 100.

$$HDI = \sqrt[3]{I_{health} + I_{education} + I_{expenditure}}\ x\ 100 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Health Index

Life Expectancy (LEX) is defined as the average of estimated number of years a person can take at birth. LEX is one instrument to measure and evaluate government performance in an effort to improve the welfare of the population in general and more specifically to measure and evaluate the degree of public health. To get the value from the Health Index or Life Expectancy Index the following formula is used:

$$I_{health} = \frac{LEX - LEX_{min}}{LEX_{max} - LEX_{min}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Education Index

The indicators used in the education dimension consist of Expected Years of Schooling (EYS) indicator and Average Years of Schooling (AYS) indicator. EYS is defined as the average length of schooling in units of years that are expected to be lived and felt by children at a certain age in the future. AYS is defined as the number of years spent by residents in attending or undergoing formal education. To get the value from the Education Index formula is used:

$$I_{EYS} = \frac{EYS - EYS_{min}}{EYS_{max} - EYS_{min}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

$$I_{AYS} = \frac{AYS - AYS_{min}}{AYS_{max} - AYS_{min}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4)$$

$$I_{education} = \frac{I_{EYS} + I_{AYS}}{2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5)$$

Expenditure Index

Dimensions of standard of living or known as expenditure dimensions is measured by the Adjusted Per capita Expenditures indicator or better known as Purchasing Power. The increasing purchasing power of a community shows an increase in the ability of the community to live properly. To get the value from the Expenditure Index this formula is used.

$$I_{expenditure} = \frac{\ln(expenditure) - ln(expenditure_{min})}{ln(expenditure_{max}) - ln(expenditure_{min})} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (6)$$

Unemployment

BPS defines unemployment as residents who are unemployed or looking for work, or are preparing a new job or business field, or people who are desperate because they feel it is no longer possible to get a job, or residents already have a job or even accepted to work but have not started

to work. Malthus's theory states that the population tends to increase indefinitely until it reaches the limit of food supply, and this problem causes humans to compete with each other. During this competition a number of humans may be excluded and unable to obtain food. This explanation can be interpreted that increasing number of population will create a greater workforce, and this is not in balance with available employment opportunities. Due to the small number of available employment opportunities, the labor force that does not get a job will become unemployed.

Effects of Health on Poverty Rate

Health is a vital element of human resources and is considered a requirement for increasing work productivity (Knapp, 2007). A person's physical ability to do work depends on the health status of the individual. Good degree of health will certainly increase work power, reduce work days and increase energy output. Therefore the level / degree of good health will negatively affect the level of poverty.

Then Lincolin (1999) explains that government intervention in improving health services is an important policy tool in poverty alleviation. The thought that underlies the policy is that by improving the health status of a community, it will increase the productivity of the community including the poor. Based on the relationship between these influences and referring to the results of previous studies, the first hypothesis (H1) was compiled, namely: Health has a negative and significant effect on poverty levels in provinces in Indonesia.

Effects of Education on Poverty Rate

Education is a very basic development goal, where education plays a very important role in shaping the country's ability to adopt modern technology and to develop capacity in an effort to accelerate growth and sustainable development. Tsai (2006) conducted a study regarding the determinants of economic and non-economic poverty, in 97 developing countries. The empirical results reveal that income levels, population growth and opportunities for secondary schools (education) are significant predictors of poverty reduction. So in general it can be concluded that the level of good education is very influential (negative effect) on poverty levels. Based on the relationship between these influences and in reference to the results of previous studies, the second hypothesis (H2) was: Education has a negative and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia.

Effect of Purchasing Power on Poverty Rate

According to Pawenang (2016), purchasing power is the ability of people as consumers to buy goods or services needed. *BPS* defines adjusted expenditure per capita (purchasing power) is the ability of people to spend their money in the form of goods or services. Purchasing power is closely related to income, where the higher a person's income, his purchasing power will also increase and vice versa. In relation to poverty, purchasing power is a measure of whether a person is categorized as poor or not, where when someone's per capita expenditure falls below the poverty line, that person is categorized as poor, and when one's per capita expenditure is above or greater than poverty line, then that person is categorized as not poor. So in general it can be concluded that high purchasing power has a negative effect on poverty levels. Based on the relationship of these influences and refer to the results of previous studies, the third hypothesis (H3), was: Purchasing Power has a negative and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia.

Effect of Unemployment on Poverty Rate

One important factor that determines the prosperity of a society is the level of income, Sukirno (2010). Decreasing the level of welfare of a society caused by unemployment will certainly have an impact on the community to be trapped in poverty. Unemployment raises a variety of problems, both economic problems and social problems, if viewed from an individual's point of view. Reduced or even no income causes the unemployed to reduce their consumption expenditure. So in general it can be concluded that unemployment has a positive effect on poverty levels. Based on the relationship between these influences and refer to the results of previous studies, the fourth hypothesis (H4), namely: Unemployment has a positive and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia.

3. RESEARCH METHOD

The conceptual relationship or relation between the independent concepts (variables) designated as X_1, X_2, X_3, and X_4 to the dependent concept (variable) designated as Y of the problem to be investigated can be described as follows:

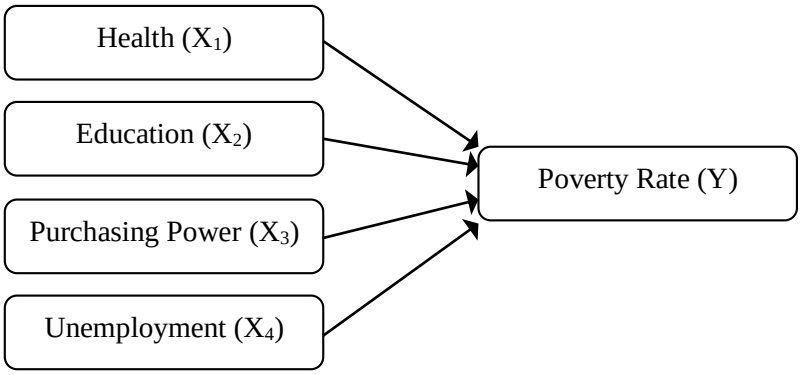

Figure 1. Research Conceptual Framework

Based on the purpose of the study, the researchers intended to test and analyze the effect of the components of the Human Development Index and Unemployment on the Poverty Rate in Indonesia, and then this type of research is based on explanatory research. The data used is secondary data in the form of panel data from 33 provinces in Indonesia (except North Kalimantan), with a period of 8 years (2010-2017).

Statistical method is used for the purpose of testing research hypotheses comprising:
H1 - Health has a negative and significant effect on poverty levels in provinces in Indonesia.
H2 - Education has a negative and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia.
H3 - Purchasing Power has a negative and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia.
H4 - Unemployment has a positive and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia.

The panel data analysis method used is multiple linear regressions which can be mathematically written in the following equation:

$$Y_{it} = \beta o + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

Then to estimate the regression coefficient, all variables are transformed into linear form using natural logarithms (Ln), so that the equation is obtained:

$$LnY_{it} = \beta o + \beta_1 LnX_{1it} + \beta_2 LnX_{2it} + \beta_3 LnX_{3it} + \beta_4 LnX_{4it} + e_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (8)$$

where:

Y = poverty rate
β_o = constant/intercept
$\beta_{1,2,3}$ = independent regression coefficient
X_1 = health
X_2 = education
X_3 = purchase power
X_4 = unemployment
e = effect of other factors
i = Province (i)
t = Year (t)

Panel data regression provides alternative models of Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM). CEM and FEM use the OLS approach, while REM uses GLS as its estimation technique. Then to get a good regression model that is truly capable of providing reliable and unbiased estimates, it is necessary to test the deviation of classical assumptions. The classic assumption test used in linear regression with the OLS approach includes tests of normality, multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity. However, not all classic assumption tests must be performed on every linear regression model using the OLS approach. Then the F test, t test and the coefficient of determination (R^2) test are also performed on the estimation results to see the accuracy of the regression function in estimating the actual value.

4. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

There are 81.8% (9 out of 11 provinces with higher HDI than the national HDI) that show relatively lower poverty rate compared to Indonesia's poverty level. Furthermore, 63.6% (14 out of 22 provinces with lower HDI than the national HDI) have relatively higher poverty rate compared to Indonesia's poverty level. In general it can be said that provinces with relatively high HDI show relatively low poverty rates, and vice versa.

Health Index (I_{health})

There are 66.7% (4 out of 6 provinces with relatively higher I_{health} average (good) than the average I_{health} Indonesia) that show relatively lower average poverty rate (good) compared to the average national poverty rate (11.64 %). Furthermore 51.9% (14 out of 27 provinces with relatively lower I_{health} average (worse) than the average I_{health} Indonesia) have average poverty rate that is relatively higher (bad) when compared to the average poverty rate of Indonesia. So in general it can be concluded that the majority of provinces that have a high average I_{health} (good) will have relatively low poverty rate (good), where the majority of provinces that have relatively low I_{health} average (bad) will have average high poverty rate (bad).

Education Index ($I_{education}$)

There are 66.7% of the regions (12 out of 18 provinces with relatively higher $I_{education}$ value (good) than the average Indonesian $I_{education}$), that show relatively lower average poverty rate (good) when compared to the average Indonesian poverty level. Then there are 66.7% (10 out of

15 provinces with relatively lower $I_{education}$ average (worse) than the Indonesian $I_{education}$ average), that have relatively higher average poverty rate (worse) when compared to the average Indonesian poverty level. So in general it can be concluded that the majority of provinces that have high $I_{education}$ (good) will have relatively low poverty rate (good), where the majority of provinces that have relatively low $I_{education}$ (bad) will have a poverty level that is high (bad).

Expenditure Index ($I_{expendture}$)

There are 80% (8 out of 10 provinces with higher $I_{expendture}$ value (good) than the average Indonesian $I_{expendture}$), that have relatively lower average poverty rate (good) when compared to the average Indonesian poverty level. Furthermore, there are 60.9% of the regions (14 out of 23 provinces with relatively lower (worse) average $I_{expendture}$ than the average Indonesian $I_{expendture}$), that have relatively higher average poverty rate (worse) when compared with the average Indonesian poverty level. So in general it can be concluded that the majority of provinces with high $I_{expendture}$ (good) will have relatively low poverty rate (good), where the majority of provinces that have relatively low $I_{expendture}$ (bad) will have a poverty level that is high (bad).

Open Unemployment Rate (TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka)

There are 61.9% (13 out of 21 provinces that have relatively lower TPT (good) than the average Indonesian TPT, that have a relatively higher (bad) average poverty rate when compared to the average Indonesian poverty level. Then there are 75% (9 out of 12 provinces with average TPT which is relatively higher (worse) than the average Indonesian TPT), that have an average poverty rate that is relatively lower (good) when compared to the average Indonesian poverty level. So in general it can be concluded that the majority of provinces that have low *TPT* (good) will have a relatively high poverty rate (bad), where the majority of provinces that have relatively high *TPT* (bad) will have a poverty level that is relatively low (good). This analysis shows a reverse compared to data for the other three independent variables (Health, education, and expenditure).

The explanation can be found if we look at the structure of employment in Indonesia. Almost half (44.97%) of unemployed people have high school education (educated unemployment), where generally they come from groups of people with middle and upper economic strata that enable them to continue to survive even without having jobs (unemployed). Educated unemployment is closely related to the problem of education in developing countries, which generally do not have an educational development plan that is in line with the development of employment needs, so that the graduates are not absorbed into the existing employment.

Based on the results of the model selection either by comparing the regression results in the 7 (seven) panel data regression models or by statistically testing (Chow test and Hausman test) shows that the best model is fixed effect Cross-section Weights. The model uses the EGLS (Estimated Generalized Least Square) approach, in contrast to the fixed effect - no weights model that still uses the PLS or OLS approach, so that the classic assumption test does not need to be done as a whole, but multicollinearity and heteroscedasticity testing still need to be done.

Multicollinearity Test

This test aims to see whether in the regression Model a correlation is found between independent variables. A good model should not have a high correlation between the independent

variables. The way to detect multicollinearity is to look at the Correlation Matrix values between independent variables. If the correlation value <0.75 means there is no multicollinearity in each variable, and vice versa. From the partial correlation output above, it can be seen that there is no correlation value between independent variables >0.75 so that it can be concluded that there is no multicollinearity between variables in this study.

Table 1. Multicollinearity Test

	Health (X1)	Education (X2)	Purchase Power (X3)	Unemployment (X4)
Health (X1)	1,000000	0,451144	0,663981	0,165235
Education (X2)	0,451144	1,000000	0,574750	0,262159
Purchase Power (X3)	0,663981	0,574750	1,000000	0,109099
Unemployment (X4)	0,165235	0,262159	0,109099	1,000000

Source: Eviews 10, processed

Heteroscedasticity Test

A good regression model must be tested for homoscedasticity (variance of constant residuals). There are several ways to test whether the regression model used passes heteroscedasticity, one of which is by using the Glejser Test which is to regress its absolute value with an independent variable. The criterion used is if the significance value (prob.) of the independent variable > 0.05 then it means there is no heteroscedasticity problem. Based on the results of the output, it can be seen that the significance value (prob.) of the 4 (four) independent variables is greater than alpha (>0.05) so that it can be concluded that no heteroscedasticity problem exists.

Table 2. Heteroscedasticity Test (*Glejser Test*)

Health (X1)	0,0696
Education (X2)	0,1089
Purchase Power (X3)	0,4911
Unemployment (X4)	0,1811

Source: Eviews 10, processed

Calculation Results of Test t Regression Model (Partial Test)

This test is used to determine the significance and influence of each independent variable on the dependent variable, where if the p-value <0.05, and if t arithmetic ≥ t table, then it can be concluded that there is a significant influence between the independent variables on the dependent variable. The result of the calculation is shown as follows.

Variable X_1 - Health: Prob. (0.00 < 0.05), $t_{Calculate}$ (5.055194) > t_{Table} (1.96917), and the regression coefficient is negative (-3.75). Thus it can be said that health has a negative and significant effect on poverty levels, so the first hypothesis (H1) is accepted. These results are in line with Janjua and Kamal's research (2014), Widyasworo's research (2014), Anggadini's research (2015), Finkayana and Dewi's research (2016), and Azwar and Subekan's research (2016).

Variable X_2 – Education: Prob. (0.01 < 0.05), tcount (2.534292) > tTable (1.96917), and the regression coefficient is negative (-0.51). Thus it can be said that education has a negative and significant effect on poverty levels, so that the second hypothesis (H2) is accepted. These results are in line with Olga and Vijayakumar's research (2012), Janjua and Kamal's research (2014), Primary research (2014), Finkayana and Dewi's research (2016), and Azwar and Subekan's research (2016).

Table 3. Result of Statistic Test t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Health (X1)	-3,754935	-5,055194	0,0000
Education (X2)	-0,517420	-2,534292	0,0119
Purchase Power (X3)	-0,814169	-2,592881	0,0101
Unemployment (X4)	0,033654	1,932355	0,0546

Source: Eviews 10, processed

Variable X_3 – Purchasing Power: Prob. (0.01 < 0.05), $_{tCalculate}$ (2.592881) > t_{Table} (1.96917), and the regression coefficient is negative (-0.81). Thus it can be said that purchasing power has a negative and significant effect on poverty levels, so the third hypothesis (H3) is accepted. These results are in line with Leasiwal's research (2013), Kakwani and Son's research (2015), Finkayana and Dewi's research (2016).

Variable X_4 – Unemployment: Prob. (0.054 > 0.050), $t_{Calculate}$ (1.932355) < tTable (1.96917), and the regression coefficient is positive (0.03). Thus it can be said that unemployment has a positive but not significant effect on poverty levels, so the fourth hypothesis (H4) is rejected. These results are not in line with previous studies, including research by Yacoub (2012) who found that the unemployment rate has a negative and significant effect on poverty levels. Aiyedogbon's research (2012), Anggadini's research (2015), and Ningrum's study (2017) stated that unemployment rate has a positive and significant effect on poverty levels. Then Azwar and Subekan's research (2016) suggested that unemployment has a negative effect which is not significant to the poverty variable.

F Test (Significance of Simultaneous Test)

The F test, also known as the simultaneous test, is used to see how the influence of all the independent variables together on the dependent variable (significant or not significant). H0 is accepted if $F_{Calculate} \leq F_{Table}$, or significance (prob.)> 0.05, and H0 is rejected (= H1 accepted) if $F_{Calculate} \geq F_{Table}$, or significance (prob.) ≤ 0.05.

Table 4. Result of Statistic Test F

R-squared	0,993029
Adjusted R-squared	0,991924
F-statistic	898,2524
Prob. (F-statistic)	0,000000
F-Table	2,406490

Source: Eviews 10, processed

From the regression results obtained significance value (prob.) F of 0.000000, where at a significance level of 5% (0.05), the F test was declared significant. Then the value of $F_{Calculate}$ (898.2524)> F_{Tabel} (2.406490), so the assumption fulfilled is H0 rejected H1 accepted. Then it can be concluded that all independent variables together (simultaneously) significantly influence the dependent variable (poverty level).

Test R^2 (Coefficient of Determination)

Based on the calculation of the coefficient of determination or goodness of fit in table 4 obtained a figure of 0.991924. The adjusted R2 coefficient value of 99.19%, this shows that the variables of health, education, purchasing power and unemployment together are able to explain the poverty level variable of 99.19%, while the remaining 0.81% is explained by other variables which is not included in the model.

5. CONCLUSION

Based on the results of the analysis, it can be concluded as follows: (1). The quality of human resources seen from the HDI components (health, education, and purchasing power) has a negative influence on poverty levels in Indonesia during the 2010-2017 period. The unemployment has a positive and not significant effect on the level of poverty in the same period. (2). Province which has relatively high health index, education index, and expenditure index compared to aggregate (Indonesia), will tend to have a better poverty rate (low) compared to aggregate poverty level. (3). Provinces with relatively low unemployment *(TPT)* compared to aggregate *TPT* (Indonesia), tend to have high poverty rates (bad) compared to aggregate poverty levels (Indonesia).

Based on the results of the analysis, the following recommendations can be made: (1) Health variable is a component of human resources (HDI) which has the greatest influence on reducing poverty levels, so that efforts can be made by the government to accelerate poverty reduction by increasing and expanding the provision of health services to the community. In addition, government support in the form of health budget allocation in the National Budget *(APBN)* and Regional Budget *(APBD*) can at least meet the provisions in accordance with applicable laws and regulations. (2) The purchasing power variable is the second largest component of human resources (HDI) which has an influence on poverty reduction. Efforts that can be made by the government (formal business sector) include reviewing the level of the minimum wage, which is still below the living standard *(Kebutuhan Hidup Layak* or *KHL)*. Government intervention (non-formal), carried out by optimizing the role of government agencies (logistics) in absorbing the output of the informal business sector. Then a review of import policies. (3) The education variable is a component of human resources (HDI) which has the lowest influence on poverty reduction. Investment in improving the quality of human resources, especially in the education sector requires quite a long time, so that in the short term it has not had an optimal impact on poverty reduction. The efforts that can be made by the government, namely increasing and expanding the scope of cheap and quality education services (from Grade School - University). In addition, government support in the form of education budget allocations in the national budget and provincial budget (*APBN* and *APBD)* can at least meet the provisions in accordance with applicable laws and regulations. The role of parents in motivating children to stay in school is another important contributing factor that should be encouraged. (4) Participation in the health

sector can be done by the community by utilizing existing health facilities. (5) The researchers predicted that unemployment has a positive and significant effect on poverty levels in the provinces in Indonesia, however, the result of statistical test shows otherwise. The reason for this is that almost half (44.97%) of the unemployed people have high school education or more, and in general they belong to middle and upper economic strata who can survive even without having a job. To reduce unemployment, the government should create employment in leading sectors other than Agriculture, namely by opening informal entrepreneurial employment in small (micro) businesses, especially in trade and service sectors. In rural areas, the government intervention can be done by directing Village Fund Allocation *(Alokasi Dana Desa* or *ADD)* to activities that recruit villagers in labor-intensive activities.

This research has a number of limitations, including: (1) the time span is relatively short, which is only eight years. Therefore it is unable to describe the effect of independent variables on the dependent variable in the long run. (2). the research site should ideally include all 34 provinces of Indonesia. However, because one province, North Kalimantan, was only formed in 2013 and data since 2013 down related to the variables used in this study was not available, the researchers did not include the Province of North Kalimantan in this study.

REFERENCES

Aiyedogbon, J.O. (2012). Poverty and youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011. *International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 20 (Special Issue – October 2012).*

Anggadini, F. (2015). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013. *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 7, Juli 2015 hlm 40-49.*

Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* Yogyakarta: BPFE.

Azwar, & Subekan, A. (2017). Analisis Determinasi Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuintabilitas Keuangan Negara, Vol. 2, No. 1, Juni 2016 hal 1-25.*

Badan Perencana Pembangunan Nasional. (2015). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia* 2014. Jakarta: BAPPENAS.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2018.* Diakses dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Tabel Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru).* Diakses dari http://ipm.bps.go.id/data/nasional.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2018.* Diakses dari https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html

Finkayana, I.P.A., & Dewi, M.H.U. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap, Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unv. Udayana Vol. 5, No. 7 Juli 2016 hal 861-881*.

Janjua, P. Z., & Kamal, U.A. (2014). The Role of Education and Health in Poverty Alleviation A Cross Country Analysis. *British Journal of Economics, Management & Trade. 4(6): 896-924.*

Kakwani, N., & Son, H.H. (2015). Global poverty estimates based on 2011 purchasing power parity: Where should the new poverty line be drawn? ECINEQ 2015 - 371, Agust 2015.

Knapp, D. (2007). *The Influence of Health on Labor Productivity: An Analysis of European Conscription Data (thesis).* Ohio: Ohio State University.

Kuncoro, M. (2006). Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Leasiwal, T.C. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomi, Jurnal Ekonomi Volume VII, No. 2, Desember 2013.*

Ningrum, S.S. (2017). Analisisi Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.*

Olga, B., & Vijaykumar, S. (2012). Poverty Incidence and Its Determinants In The Estate Sector Of Sri Langka. *Journal of Competitiveness, Vol. 4, Issue 1, pp. 44-55, March 2012.*

Pawenang, S. (2016). Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis, Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA.

Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Todaro. M. P. & Smith. S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Tsai, M.C. (2006). Economic and Non-Economic Determinants of Poverty in Developing Countries. *Canadian Journal of Development Studies. 2006; 27(3):267-285.*

United Nations Development Programme. (1995). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.

Widyasworo, R. (2014). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Angakatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.2, No.1.* Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Bahasa Indonesia, Jilid 1.* Jakarta: Erlangga.

Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 176-185.*

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia

Sri Kurniawati*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Sektor pertanian memiliki kecenderungan menjadi salah satu sektor basis ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto provinsi periode 2013 hingga 2017, meskipun cenderung menurun. Namun, tenaga kerja yang terserap pada sektor ini masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki andil dalam perekonomian. Kondisi ini menjadi dasar penelitian tentang pengaruh *share* sektor pertanian dan kesempatan kerja di sektor pertanian terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi wilayah di Indonesia yang memiliki *share* sektor pertanian kurang dari 20% dan *share* 20% lebih, menguji pengaruh *share* sektor pertanian terhadap kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja di provinsi dengan *share* kurang dari 20% dan *share* 20% lebih. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berbentuk data panel (5 tahun dan 34 provinsi di Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *share* sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di provinsi dengan *share* kurang dari 20% sepanjang 2013 hingga 2017, namun tidak berpengaruh di provinsi dengan share 20% lebih. *Share* sektor pertanian berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja di provinsi dengan *share* kurang dari 20%, namun berpengaruh negatif di provinsi dengan *share* 20% lebih.

JEL: O11, O13, O15
Kata Kunci: *Share* Sektor Pertanian, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang telah direncanakan, dilakukan secara terus menerus dan bertahap ke tingkat yang lebih maju dan menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan dilakukan di segala bidang, sektor maupun subsektor secara terprogram dan terencana.

Reformasi ekonomi pada sektor pertanian di Cina dimulai pada 1978 dengan membangun sistem tanggung jawab produksi keluarga, pergeseran unit manajemen produksi dasar, dari pertanian kolektif ke rumah tangga individu yang melibatkan pihak swasta dalam pemasaran komoditas dan terjadinya pergeseran tenaga kerja pedesaan ke industri lokal dan daerah perkotaan. Pertanian sebagai sektor ekonomi telah memberikan kontribusi yang begitu luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Berkembangnya sektor pertanian menyebabkan sektor industri semakin berkembang (Koo & Lou, 1997).

Pembangunan pertanian juga terjadi di Brazil, negara ini terkenal karena pengembangan pertanian tropisnya. Perjalanan reformasi pertanian sudah terjadi jauh sebelumnya, di mana

*E-mail: sri.kurniawati@ekonomi.untan.ac.id

pembangunan pertanian Brazil sudah dilakukan pada masa kolonial pertama pada awal abad ke-16. Hingga 1960, sektor pertanian memegang peranan penting terhadap perekonomian dengan kontribusi ekspor lebih dari 55% (Pedro, *et al*, 2012).

Di Indonesia, rata-rata terbesar kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB provinsi periode 2013-2017 ada di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Aceh. Namun, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian cenderung turun. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari 39,9 juta jiwa pada 2013 menjadi 35,8 juta jiwa pada 2017 atau mengalami penurunan tenaga kerja selama lima tahun terakhir sebanyak 4,1 juta jiwa, demikian juga yang terjadi pada penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kecuali Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan DI Yogyakarta (BPS, 2019).

Peningkatan penyerapan tenaga kerja relatif stabil terjadi pada sektor industri pengolahan kemudian diikuti sektor perdagangan besar, eceran, rumah dan hotel serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan di sektor pertanian penyerapan tenaga kerja terus mengalami penurunan empat tahun terakhir (SAKERNAS, 2017). Secara umum, jumlah pengangguran sebanyak 7,04 juta jiwa, 4,6 juta jiwa di perkotaan dan 2,4 juta jiwa di perdesaan.

Sektor pertanian memiliki kecenderungan menjadi salah satu sektor basis ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia, hal ini dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB Indonesia maupun dalam pembentukan PDRB provinsi. Meskipun kontribusi sektor pertanian cenderung meurun pada periode 2013 hingga 2017, namun tenaga kerja yang terserap pada sektor ini masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki andil dalam perekonomian. Kondisi ini menjadi dasar penelitian tentang pengaruh *share* sektor pertanian dan kesempatan kerja di sektor pertanian terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut teori W. Arthur Lewis (Todaro, 2000) mengemukakan bahwa perekonomian di negara berkembang memfokuskan proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Salah satu model teori perubahan struktur karya Arthur Lewis yang sangat terkenal adalah *teori two sektor surplus labor*.

Teori klasik Kuznets (Todaro, 2000) mengungkapkan bahwa sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional bagi negara berkembang. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk sumbangan produk, sumbangan pasar dan sumbangan devisa. Sumbangan faktor produksi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan mobilitas sektoral tenaga kerja.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang signifikan dalam meningkatkan nilai PDRB di Provinsi Riau, di mana kenaikan 1 juta rupiah nilai sektor pertanian menyebabkan nilai total PDRB meningkat sebesar 3,1 juta rupiah. Nilai elastisitas peranan sektor pertanian bersifat inelastis yaitu sebesar 0,97. Kemudian peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja juga signifikan, yaitu kenaikan 1 point PDRB sektor pertanian menyebabkan jumlah total penyerapan tenaga kerja (jumlah orang bekerja) di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,009. Elastisitas kesempatan kerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah 0,4 (Isbah & Iyan, 2016).

Fortunika, dkk (2017) mendukung hasil tersebut, peran sektor pertanian yang didominasi oleh subsektor tanaman bahan makanan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Banjarnegara, terutama nilai tambah bruto dan nilai ekspor bersih. Kemudian sektor pertanian memiliki nilai tertinggi untuk dampak angka pengganda dan kesempatan kerja. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Sarolangun, kontribusi sektor pertanian cukup tinggi dalam pembentukan PDRB, dengan rata-rata kontribusinya sebesar 46,44 persen per tahun. Penelitian lain juga menunjukan hasil yang sama di mana kontribusi sektor pertanian mampu mencukupi kebutuhan di Minahasa Selatan, bahkan memungkin untuk di ekspor (Ratag, dkk; 2016).

Kontribusi sektor pertanian juga dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jabung Barat, di mana kontribusi sektor pertanian untuk penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif, hal ini bisa dilihat dari rata-rata kontribusi sebesar 62,48 persen. Lebih dari ½ dari total keseluruhan penyerapan tenaga kerja di 9 sektor perekonomian, menunjukan bahwa bila terjadi kenaikan pada pertumbuhan PDRB sektor pertanian akan diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (Dewi, dkk; 2016).

Sementara itu kontribusi sektor pertanian juga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Nigeria (Oji, 2011). Penelitian yang sama di Nigeria juga menunjukan bahwa sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Namun pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap pertumbuhan pertanian, hal ini disebabkan kurangnya investasi di sektor pertanian menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian (Odetola & Etumnu, 2013).

Pada penelitian lain menunjukan bahwa ada saling keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dengan sektor pertanian dan sektor pertanian terhadap pembentukan PDB. Di mana pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian menunjukan signifikan, kemudian sektor pertanian akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB yang bisa dilihat dari pengeluaran per unit pertanian akan memberikan kontribusi lebih dari 101 unit terhadap PDB (Adhikari, 2015). Sementara itu penelitian dilakukan di Malaysia dan di China menunjukan hasil yang berbeda, di mana sektor pertanian kurang berkontribusi terhadap PDB riil (Hussin & Ching, 2013).

Penelitian tentang pengaruh tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dapat dilihat pada penelitian Arisessi & Utama (2017), hasil penelitiannya menunjukan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas petani di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Namun pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap pertumbuhan pertanian, hal ini disebabkan kurangnya investasi di sektor pertanian menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian (Odetola & Etumnu, 2013). Sementara itu penelitian dilakukan di Malaysia dan di China menunjukan hasil yang berbeda, di mana sektor pertanian kurang berkontribusi terhadap PDB riil (Hussin & Ching, 2013). Penelitian oleh Amelia (2017) menunjukan hasil yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produksi subsektor perkebunan di Sumatera Barat.

2.1. Pengaruh X1 terhadap Y

Penelitian ini dimulai dengan kajian empiris dan tinjauan pustaka tentang hubungan variabel bebas yaitu *share* sektor pertanian dengan variabel terikat yakni kesempatan kerja dan variabel bebas

share sektor pertanian dan kesempatan kerja dengan variabel terikat yakni produktivitas tenaga kerja, serta didukung dengan teori pembangunan ekonomi, toeri perubahan struktural, teori tenaga kerja dan konsep ekonomi pertanian. Sehingga dapat diperoleh kerangka konseptual yang bertujuan untuk menunjukan alur pemikiran, maka dapat disusun sebagai berikut:

H_1: *Share* sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20%.

H_2: *Share* sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% atau lebih.

H_3: *Share* sektor pertanian dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap produktivitas tenaga kerja di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20%.

H_4: *Share* sektor pertanian dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% atau lebih.

Gambar 1. *Share* sektor pertanian mempengaruhi kesempatan kerja

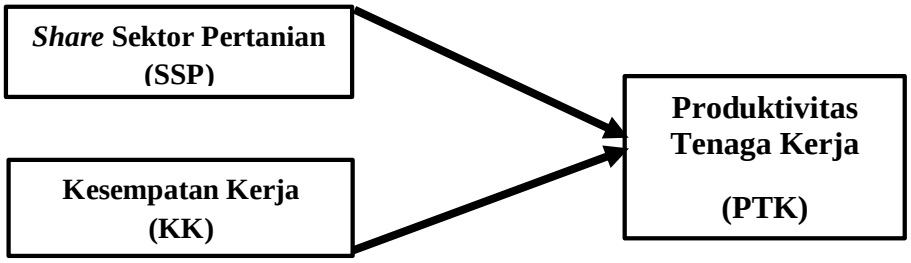

Gambar 2. *Share* sektor pertanian dan kesempatan kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kuantitatif berbentuk regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data panel. Data panel merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section*. *Time series* terdiri dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan *cross section* terdiri dari 34 provinsi di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut berupa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Kesempatan Kerja di sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja.

3.1. Model Regresi Sederhana

Model regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh *share* sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di dua kategori provinsi, yakni provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20% dan provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% atau lebih.

$$KK_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SSP_{it} + \varepsilon_{it} \quad \ldots\ldots (1)$$

dimana :
KK = Kesempatan kerja
SSP = *Share* sektor pertanian
α_1= parameter koefisien regresi

3.2. Model Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh *share* sektor pertanian dan kesempatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja di dua kategori provinsi, yakni provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20% dan provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% atau lebih.

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 SSP_{it} + \beta_2 KK_{it} + \epsilon_{it} \quad \ldots\ldots (2)$$

dimana :
PTK = Produktivitas tenaga kerja
SSP = *Share* sektor pertanian
KK = Kesempatan kerja
β_1, β_2= Parameter koefisien regresi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian model, ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Model

Model Regresi	Model Terbaik
Model Regresi Sederhana Pada Provinsi Dengan *Share* Kurang Dari 20%.	Random Effect
Model Regresi Sederhana Pada Provinsi Dengan *Share* 20% Lebih.	Random Effect
Model Regresi Berganda Pada Provinsi Dengan *Share* Kurang Dari 20%.	Common Effect
Model Regresi Berganda Pada Provinsi Dengan *Share* 20% Lebih.	Random Effect

Sumber: Data olahan

Setelah diketahui model terbaik, diperoleh hasil bahwa *share* sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20%, namun untuk provinsi lainnya, *share* sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Untuk regresi berganda, ditemukan bahwa di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20% dan 20% lebih, *share* sektor pertanian dan kesempatan kerja secara parsial memengaruhi penyerapan tenaga kerja. *Share* sektor pertanian berpengaruh positif, sedangkan kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja.

Sektor pertanian memang bukan basis ekonomi untuk provinsi dengan *share* kurang dari 20%. Namun sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan sebagai penyedia bahan baku bagi produk yang dihasilkan oleh sektor ekonomi lainnya. Hal ini mendorong berkembangnya sektor industri di Indonesia. Industrialisasi membutuhkan berbagai faktor pendukung salah satunya ketersediaan lahan untuk membangun pabrik, perumahan karyawan, infrastruktur dan lainnya.

Banyaknya lahan yang digunakan untuk keperluan industri membuat lahan pertanian terus berkurang, belum lagi alih fungsi lahan seperti membangun perumahan, perkantoran, pusat bisnis dan lainnya. Berkurangnya lahan pertanian akan mempengaruhi kesempatan kerja di sektor pertanian, jika lahan pertanian terus berkurang maka tenaga kerja di sektor pertanian akan berkurang.

Tabel 2. Hasil Regresi

Model Regresi	Wilayah	Variabel	Koefisien	Prob
Model Regresi Sederhana (Kesempatan Kerja)	$< 20\%$	*Share* Sektor Pertanian	0,67	0,01
	$\geq 20\%$	*Share* Sektor Pertanian	0,30	0,22
Model Regresi Berganda (Produktivitas Tenaga Kerja)	$< 20\%$	*Share* Sektor Pertanian	0,02	0,01
		Kesempatan Kerja	-0,03	0,00
	$\geq 20\%$	*Share* Sektor Pertanian	0,04	0,00
		Kesempatan Kerja	-0,03	0,00

Sumber: Data olahan

Teori Lewis dan teori Rostow yang mengatakan bahwa saat industri semakin berkembang, akan terjadi peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal ini akan mendorong terbentuknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hasil ini sejalan dengan yang terjadi Kabupaten Jabung Barat, di mana kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya, didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup luas dan tanah yang subur sehingga sebagian penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian (Dewi, dkk; 2016).

Untuk provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% lebih, *share* sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Hal ini disebabkan oleh sektor pertanian di provinsi-provinsi tersebut tidak lagi sebagai penyumbang dalam penyerapan tenaga kerja. Kinerja sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja, telah digantikan oleh sektor industri dan jasa. Hal ini merupakan akibat dari industrialisasi di Indonesia. Perkembangan penduduk yang bekerja di sektor pertanian di 19 provinsi di Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2017 terus turun. Perubahan orientasi usaha masyarakat serta membaiknya pendidikan masyarakat mengharuskan mereka keluar dari sektor pertanian yang dianggap tidak membutuhkan jenjang pendidikan tinggi (BPS, 2018).

Pengaruh positif *share* sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja terjadi di kedua kategori wilayah. Semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian membuktikan tenaga kerja mulai produktif dalam meningkatkan ouptut pertanian. Demikian pula ketika PDRB sektor pertanian tersebut turun menyebabkan produktivitas di sektor pertanian turun. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa masalah yang terjadi yaitu gagal panen, harga komoditi pertanian yang jatuh di pasaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah.

Kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja, baik di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20% maupun di provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% lebih. Hal ini karena ketika tenaga kerja di sektor pertanian turun menyebabkan produktivitas tenaga kerja naik, pergeseran inilah yang menyebabkan terjadinya pengaruh negatif. Daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja masih banyak, namun kesempatan kerja di sektor pertanian menunjukan terjadi penurunan. Ketika kesempatan kerja di sektor pertanian trennya terus turun, produktivias tenaga kerja menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mempengaruhi produktivitas di sektor pertanian. Ketersediaan tenaga kerja dan pemanfaatan jumlah tenaga kerja yang tepat sesuai dengan

kebutuhan produksi usaha tani mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Di Sumatera Barat, ditemukan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap produksi subsektor perkebunan. Pada awalnya peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan produksi, tetapi kemudian tambahan produksi yang diciptakan oleh tambahan tenaga kerja makin lama menjadi semakin berkurang (Amelia, 2017).

5. SIMPULAN

Share sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20%, namun untuk provinsi lainnya, *share* sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20% dan 20% lebih, *share* sektor pertanian dan kesempatan kerja secara parsial memengaruhi penyerapan tenaga kerja. *Share* sektor pertanian berpengaruh positif, sedangkan kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja.

Sektor industri berkembang pesat dan menjadi basis terhadap perekonomian, begitupun daya serapnya terhadap tenaga kerja sangat besar. Walaupun sektor pertanian bukan basis ekonomi, namun sektor pertanian memiliki peran dalam berkembangnya sektor industri di provinsi dengan *share* sektor pertanian kurang dari 20%. Kesempatan kerja di sektor pertanian juga masih tinggi meskipun terjadi penurunan. Sektor pertanian masih menjadi penopang perekonomian di provinsi dengan *share* sektor pertanian 20% atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, S. (2015). Contribution of Agriculture Sektor to National Economy in Nepal. *The Journal of Agriculture and Environment*. University of Tasmania. (16), 180-187.

Amelia, D. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Subsektor Perkebunan Sumatera Barat. *Jurnal Majalah Ilmiah*. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 24 (1), 121-128.

Ariessi, N.E., & Utama, M.S. (2017). Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Modal Sosial Terhadap Produktivitas Petani di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. *Jurnal PIRAMIDA*. Universitas Udayana, XIII (2): 97-107.

Badan Pusat Statistik. (2010). *Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja*. Diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2010/01/03/7f4d0e2535d4c06b9860d3be/perubahan-struktur-ekonomi-dan-kesempatan-kerja.html. September 2019.

Badan Pusat Statistik. (2012). *Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian*. Diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2012/11/19/19b9fb1c3bbcbd3 1b4a337ef/konsep-dan-definisi-baku-statistik-pertanian-2012.html. September 2019.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2013). Data *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*

_____ (2014). Data *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*

_____ (2015). Data *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*

_____ (2016). Data *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*

_____ (2017). Data *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.*

Badan Pusat Statistik. (2019). *Industri Besar dan Sedang*. Diakses dari https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html. September 2019.

Dewi, R.F., Prihanto, P., & Edy J.K. (2016). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *e-Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*. Universitas Jambi, 5 (1), 19-25.

Fortunika, S., Istiyanti E., dan Sriyadi. (2017). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Agribusiness and Rural Development Research.* Institut Pertanian Bogor, 3 (2), 120-127.

Hussin, F & Ching, C.W. (2013). The Contribution of Economice Sektors to Economic Growth: The Cases of Malaysia and China. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. Northern University Malaysia, 2 (2), 147-159.

Isbah, U, & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Universitas Riau. (19), 45-54.

Koo, W. W., & Lou J. (1997). *The Relationship between the Agriculture and Industrial Sektors in Chinese Economic Development. Departement of Agriculture Economics*: North Dakota State University.

Odetola, T & Etumnu, C. (2013*).* Contribution of Agriculture to Economic Growth in Nigeria. *Journal Economic Development. International Food Policy Research Institute,* (7), 3-28.

Oji, O. I. (2011). Analysis of the Contribution of Agriculture Sektor on the Nigerian Economic Development. *Journal World Review of Business Research*. Wuhan University of Technology, 1 (1), 191-200.

Pedro, A.A.P., Martha, G.N. Jr., Santana, A.M.C., & Alves, E. (2012). *The Development of Brazilian Agriculture: Future Technological Challenges and Opportunities*. Brazil.

Ratag, J. P. D., Kapantow, G. H.M., & Pakasi, C. B. D. (2016). Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Agri-Sosial Ekonomi*. Universitas Sam Ratulangi, 12 (2A), 239-250.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu

M. Ali Nasrun*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Diesease* 2019 (Covid-19) merebak di seluruh wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling mendapat perhatian setelah aspek kesehatan. Perekonomian Kapuas Hulu mengalami penurunan akibat pengaruh dari luar maupun keadaan di daerah sendiri. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan. Melalui kajian secara deskriptif kualitatif, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkan basis ekonomi di Kapuas Hulu untuk melakukan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Kapuas Hulu yang kaya akan sumber daya alam, serta masyarakatnya yang mayoritas sebagai petani dalam arti luas dan pertambangan, maka strategi pemulihan ekonomi adalah mengandalkan sektor pertanian dan usaha rakyat pada komoditi yang layak bisnis, mengembangkan perdagangan dan pasar lokal, penerapan teknologi informasi, serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai penguatan program pemulihan, harus ada kebijakan dan fasilitas dari pemerintah untuk menggerakkan dan memperlancar upaya pemulihan, serta harus melibatkan perusahaan besar yang ada di daerah untuk membantu pemberdayaan aspek bisnis pada usaha rakyat.

JEL: O20
Kata kunci: Covid-19, pemulihan ekonomi, strategi pembangunan daerah, Kapuas Hulu.

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Diesease* 2019 (Covid-19) yang mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 merebak di seluruh wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai dua pintu masuk, yaitu dari Kabupaten Sintang dan dari Lubuk Antu Serawak Malaysia. Covid-19 sejatinya merupakan kasus kesehatan. Namun dampaknya bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi yang justru mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan gerak masyarakat, baik pada keluar masuk wilayah kabupaten, maupun di dalam daerah sendiri. Akibatnya aktivitas perekonomian menjadi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Pengaruhnya, perekonomian Kapuas Hulu mengalami penurunan. Berhubung sudah berlangsung sejak dari awal tahun 2020, maka proses resesi tidak dapat dihindari. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan,

* E-mail: m.ali.nasrun@ekonomi.untan.ac.id

keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya (Sugiri, 2020; Herdiana, 2020; Todaro & Smith, 2015).

2. TINJAUAN TEORITIS

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi baru menjadi perhatian serius semenjak terjadinya *great depression* 1930-an. Kejadian bermula dari penerapan teori Klasik yang mengatakan bahwa penawaran selalu akan mencipta permintaannya sendiri (*Say's Law*). Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menerbitkan saham sebanyak mungkin. Hasilnya memang mengagumkan, produksi meningkat cepat. Namun, karena pendapatan buruh banyak dipergunakan untuk membeli saham, pendapatannya menjadi berkurang, akibatnya daya beli turun. Pendapatan tidak dapat untuk membeli seluruh hasil produksi. Akibatnya terjadi *over supply*. Stok barang meningkat, perusahaan mengalami kerugian. Akibat seterusnya, perusahaan harus mengurangi produksi. Karena itu, pemecatan buruh dan pegawai tidak dapat dihindari. Perekonomian kian merosot. Pada kondisi seperti ini, J.M. Keynes menawarkan solusinya dengan campur tangan pemerintah. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dan investasi pemerintah. Perekonomian berhasil dipulihkan (Blanchard & Johnson, 2017).

Penyebab terjadinya krisis ekonomi bisa dari berbagai hal. Krisis ekonomi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua dikarenakan seluruh negara kaya terlibat dalam perang. Akibatnya proses produksi, pasar, investasi di bidang ekonomi, dan perputaran keuangan terhenti. Anggaran negara banyak tersedot untuk membiayai perang. Krisis ekonomi pada 1970-an disebabkan oleh keadaan cuaca dunia. Kemarau yang panjang mengakibatkan hasil produksi pertanian banyak yang gagal. Situasi diperburuk lagi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak akibat embargo OPEC. Krisis ekonomi pada 1980-an lebih banyak disebabkan oleh kekakuan perdagangan internasional karena adanya embargo perdagangan internasional oleh Amerika Serikat. Krisis keuangan pada 2008 diawali adanya krisis *subprime mortage* di Amerika Serikat pada 2007. Gagal bayar pada lembaga keuangan merembet ke semua sektor, bahkan ke seluruh dunia berujud krisis ekonomi yang berkepanjangan (Blanchard & Johnson, 2017; Todaro & Smith, 2015).

Pada negara berkembang, dampak krisis ekonomi bisa lebih berat, jika kemampuan keuangan pemerintah tidak mencukupi untuk menanggulangi penurunan pada investasi, produksi, dan ekspor. Ketergantungan yang besar kepada negara maju, juga dapat memperparah dampak krisis di negara berkembang, karena krisis banyak terjadi pada negara maju (Todaro & Smith, 2015). Krisis ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan merosot. Jika tidak dapat ditanggulangi, maka krisis ekonomi yang berupa resesi akan berlanjut pada kondisi depresi. Kesigapan dan kemampuan menghentikan resesi akan menjadi kunci keberhasilan mengatasi krisis ekonomi. Dampak krisis dapat sedikit ditahan apa bila ada stimulus dari pemerintah. Pada negara berkembang mengatasi masalah krisis relatif lebih mudah dibandingkan kompleksnya perekonomian pada negara maju. Dengan adanya investasi yang relatif kecil, perekonomian negara berkembang dapat langsung menggeliat. Bila ditopang dengan kebijakan pemerintah dan ditambah stimulus yang tepat, pengusaha kecil dapat langsung bergerak (Todaro & Smith, 2015).

Ekonomi Pembangunan Daerah

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak krisis ekonomi dapat diawali dengan membuat perencanaan dan strategi pembangunan yang tepat (Arsyad, 2010). Dalam perencanaan, tahap pertama yang harus ditetapkan adalah prioritas pembangunan. Harus fokus untuk menyelesaikan masalah utama. Kedua, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan keadaan aktual. Ketiga, menetapkan strategi pelaksanaannya. Adanya kekhasan pada setiap daerah mendorong adanya konsep pembangunan daerah. Untuk itu, perlu terlebih dahulu diketahui mengenai karakteristik suatu daerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada apa yang dimiliki dan keadaan daerah, yaitu antara lain: sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan, infrastruktur, pasar, dan keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa teori pembangunan daerah yang relevan untuk menanggulangi krisis ekonomi di tingkat daerah. *Economic base theory* merupakan salah satu teori yang mengusulkan pembangunan daerah berdasarkan kepada apa sektor usaha atau produk yang paling banyak diminta oleh masyarakat dari luar daerah. Produksi didasari dengan potensi sumber daya yang ada di lokal. Berikutnya ada teori lokasi. Teori ini memperhitungkan suatu lokasi yang paling ekonomis untuk menjadi lokasi industri. Teori yang cukup menarik adalah *central place theory*, yaitu suatu tempat sentral ekonomi yang didukung oleh beberapa tempat di sekitarnya. Interaksi antar daerah akan menjadi suatu kekuatan ekonomi setempat. Kemudian ada teori model daya tarik. Para pelaku ekonomi akan berupaya memperbaiki diri jika ada subsidi dan insentif dari pemerintah. Dalam paradigma baru pembangunan daerah, diyakini bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan kepada mekanisme pasar. Peran pemerintah sangat sentral dan menentukan dalam pergerakan perekonomian daerah, terutama untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Peranan pemerintah sangat diperlukan karena belum tentu teori *spread effects* oleh Myrdal dan teori *trickling down effects* oleh Hirshman dapat berjalan dengan baik (Arsyad, 2010). Pembangunan daerah harus secara maksimal mendayagunakan potensi dan peluang usaha yang ada di daerah, sebagai strategi pembangunan berbasis lokal (Arsyad, *et al*, 2011).

Tinjauan Empiris

Singgih (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa UMKM merupakan basis perekonomian rakyat dan tempat bernaungnya sebagian besar pelaku ekonomi. Dalam pemulihan pasca krisis ekonomi, UMKM dapat lebih awal bergerak dengan kekuatan dan keadaan yang ada. Sehingga UMKM bertindak sebagai dinamisator perekonomian Indonesia. Hal itu dibuktikan pada saat dan pasca krisis ekonomi di Indonesia 1997. Peranan UMKM sangat strategis karena mampu menyerap sangat banyak tenaga kerja, sehingga dapat menjadi tumpuan untuk memperoleh pendapatan oleh sebagian besar rakyat. Pada umumnya, UMKM juga merupakan pemain lokal yang cukup dominan dan sering menjadi pioner dalam perluasan ekonomi daerah. Namun pengembangan UMKM tidaklah mudah. Ada berbagai keterbatasan yang melekat pada UMKM. Kelemahan yang paling utama adalah kekurangan modal dan rendahnya profesionalisme dalam berusaha. Informasi pasar menjadi hal sangat diperlukan oleh pelaku UMKM, karena berdasarkan informasi pasar, mereka akan menata usaha dan manajemen bisnisnya.

Penelitian Susilo dan Sutarta (2004) mengangkat permasalahan pada industri kecil pasca krisis ekonomi. Beberapa masalah yang mendera setelah krisis ekonomi antara mengenai mahalnya bahan baku. Akibatnya mereka harus menaikan harga. Dampaknya daya saing usahanya menjadi turun. Rentetan dampak berikutnya adalah penurunan produksi atau usaha. Upaya untuk mengatasi

permasalahan adalah dengan inovasi produk. Mereka harus menyiasati dengan kreatif membuat produk baru atau cara baru.

Rusastra (2011) menyimpulkan harus ada reorientasi paradigma dan strategi pengentasan kemiskinan sebagai dampak adanya krisis ekonomi. Pembangunan perdesaan inklusif merupakan solusinya. Pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pemberdayaan masyarakat rentan. Perpaduan agrobisnis dan agroindustri harus menjadi model pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat dan modernisasi pertanian. Upaya tersebut juga untuk mengembangkan UMKM di daerah. Untuk itu, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur, investasi, dan menjaga keadaan ekonomi. Pengentasan kemiskinan haruslah menjadi prioritas utama program pemerintah dan pembangunan daerah.

Lingkaran krisis ekonomi Indonesia diteliti oleh Salamah (2001). Krisis yang terjadi mulai 1997 diperkirakan tidak berakibat berat bagi perekonomian Indonesia, karena diyakini fondasi ekonomi makro yang kuat mampu menangkal krisis moneter. Namun faktanya, krisis moneter kemudian mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab, antara lain adanya *crony capitalism*, kepanikan masyarakat terhadap keadaan ekonomi, pengaruh eksternal ekonomi, struktur finansial dan ekonomi domestik rapuh. Upaya pemulihan dilakukan dengan menghambat arus modal keluar dan menguatkan nilai Rupiah. Pemulihan akan berjalan baik bilamana keadaan perpolitikan dan stabilitas nasional dalam keadaan yang kondusif.

Sunderlin, *et al* (2000) mengkaji mengenai dampak krisis ekonomi terhadap petani kecil dan tutupan lahan di luar Jawa. Mereka menemukan bahwa petani mengalami kerugian karena jatuhnya harga komoditi hasil pertanian mereka, yang pada umumnya merupakan komoditi ekspor. Walaupun ada juga komoditi yang justru meningkat harganya dengan adanya krisis ekonomi. Kedua kondisi tersebut, mendorong adanya diversifikasi usaha pertanian. Perluasan usaha pertanian berakibat semakin banyaknya perambahan hutan yang berarti luas penutupan hutan menjadi semakin mengecil. Untuk itu, sangat diperlukan adanya penyuluhan, bimbingan, dan bantuan kepada petani agar dalam perluasan usahanya tidak berakibat terjadinya deforestasi.

Sisi lain diungkapkan oleh Siburian (2002) dalam penelitian terhadap perekonomian rakyat perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia. Rakyat di sekitar Entikong Kalimantan Barat, mengalami peningkatan ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi 1998. Nilai rupiah yang turun atau kurs Ringgit Malaysia yang meningkat, mengakibatkan harga komoditas hasil pertanian masyarakat di sekitar berbatasan semakin tinggi, jika dihitung dengan Rupiah. Sebagian besar orientasi produksi pertanian sekitar perbatasan merupakan komoditas ekspor, karena mereka menjual ke Serawak. Usaha pokok pertanian rakyat berupa karet, hortikultura, peternakan, perikanan, padi, dan buah-buahan. Ketersediaan infra struktur berupa jalan dan transportasi umum, mempermudah rakyat menjual produknya ke perbatasan. Daya saing perdagangan di perbatasan juga sangat tinggi, karena harga komoditas dari wilayah Kalimantan Barat, bagi masyarakat Serawak jauh lebih murah dibandingkan dengan harga komoditas yang di wilayah Serawak, karena tingginya nilai Ringgit Malaysia.

Pengembangan usaha rakyat dengan mengembangkan kearifan lokal, promosi, teknologi informasi dan media sosial, dan bantuan modal (Ulya, 2020; Iskandar, et al, 2020; Pratiwi & Novianty, 2020; Hadi & Supardi, 2020; Mahriani, 2020).

3. METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu upaya untuk menggambarkan fenomena berdasarkan informasi yang detil dan mendalam dari objek penelitian (Leksono, 2013; Nugrahani, 2014; Tohardi, 2020). Objek penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada tahun 2020. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik dan publikasi pemerintah. Data primer bersumber dari informan berupa pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Metode analisis menggunakan analisis data model fenomenologi (Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani, 2014). Analisis ini menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang terkait. Informasi lapangan disusun menjadi resume yang sistematis. Pembahasan dengan cara membandingkan resume lapangan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.

4. HASIL KAJIAN

Potensi Ekonomi

Kabupaten Kapuas Hulu terbagi ke dalam 23 kecamatan, 4 kelurahan dan 278 desa. Luas seluruh wilayahnya 29.842 Km2, atau merupakan 20,26% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak 13,07% dari luas wilayah merupakan daerah perairan atau tergenang, dan 56,21% merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi. Kapuas Hulu termasuk dataran rendah dengan ketinggian 25 – 500 meter. Jumlah penduduk Kapuas Hulu sebanyak 246.772 jiwa (2019) dengan kepadatan 8,3 jiwa/km. Mayoritas penduduk berada di pedesaan. Sebanyak 69,73 % dari jumlah penduduk, merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Lapangan kerja pada sektor pertanian sebanyak 60,23 % dari total tenaga kerja 140.164 orang.

Hasil produksi (2019) produk unggulan Kapuas Hulu pada sub sektor pertanian: padi sawah 57.379 ton, ubi kayu 8.908 ton dan jagung 798 ton. Pada sub sektor perkebunan: sawit 911 ton (919 ha); karet 12.679 ton (47.316 ha); lada 11 ton (44 ha); kopi 4 ton (17 ha); dan kakao 25 ton (143 ha). Peternakan: daging sapi 272,5 ton; kambing 4,9 ton; babi 250,7 ton; ayam buras 120,3 ton; ayam ras 1.007,6 ton; itik 1,8 ton. Pada sub sektor perikanan menghasilkan 66.537,8 ton. Sektor industri terdiri dai tenun ikat, anyaman, tikar/lampit, kerupuk basah, dan kerupuk kering.

Komoditas yang belum seluruhnya didata dan dipublikasikan secara khusus oleh pemerintah adalah produksi dan lahan tanaman kratom atau purik (Mitragyna Speciosa Korth). Walaupun secara kasat mata sangat banyak masyarakat yang menanam dan berusaha kratom, bahkan penghasilan dari usaha kratom sangat mempengaruhi kehidupan keluarganya. Ada 21 juta batang kratom yang ditanam masyarakat. Demikian pula pada tambang emas milik rakyat, sarang burung walet, dan budi daya ikan Arwana (Silok).

Perkembangan 2020

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020. Namun tidak semua sektor yang terpuruk dalam. Hal ini dibuktikan dengan data perubahan beberapa komoditi pada kurun waktu tersebut di Kapuas Hulu.

Tabel Perubahan Komponen Ekonomi di Kapuas Hulu

Komponen Ekonomi	2019		2020	
	Trw I	Trw II	Trw I	Trw II
Luas lahan panen padi (ha)	7.705	39	7.170	43
Dana pihak ketiga di perbankan (T Rupiah)	5, 56	1,60	1,61	1,70
Penyaluran kredit perbankan (M Rupiah)	2.558	2.599	3.326	3.519

Sumber: Laporan BI Kalbar, Mei dan Agustus 2020.

Hasil wawancara dan pengamatan di beberapa kecamatan, kelurahan dan desa, menunjukkan bahwa sebagian besar usaha rakyat tidak mengalami penurunan yang berarti. Usaha rakyat tidak mengalami penurunan, seperti usaha pertanian (padi dan hortikultura), perikanan (tangkap dan tambak), budi daya Arwana, tambang emas rakyat, usaha kratom, pedagang eceran, toko bahan bangunan, usaha jas bengkel, dan sarang burung walet. Usaha rakyat yang mengalami penurunan, seperti jasa konstruksi, transportasi, perhotelan dan pariwisata. Media masa, berupa koran daerah Kalimantan Barat, tidak banyak mengungkapkan permasalahan, khususnya penurunan ekonomi di Kapuas Hulu.

Kebijakan pemerintah yang langsung berhubungan dengan dampak Covid-19 adalah adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada UMKM di Kapuas Hulu. Ada 133 UMKM yang menerima bantuan masing-masing sebesar 2,4 juta Rupiah. Di Kapuas Hulu ada 1.023 UMKM (Timotiusius, Antara 31 Agustus 2020). Di samping adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, ada juga bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pembahasan

Perkembangan sektor pertanian dalam arti luas, yang tidak mengalami penurunan, sedangkan kontribusinya dalam PDRB sebesar 21,96% (2019) dan laju pertumbuhan 5,05% (2019), menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat dijadikan andalan dalam masa pemulihan ekonomi. Demikian juga pada usaha perdagangan eceran, termasuk warung makan dan industri rumah yang membuat makanan seperti kerupuk basah dan kue. Juga pada usaha tambang rakyat emas.

Pemilihan usaha dan komoditas yang menjadi andalan berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Pemulihan ekonomi harus dirancang seawal mungkin, agar keadaan tidak semakin sulit (Herdiana, 2020). Arsyad (2010; *et al*, 2011) dalam rangka pemulihan ekonomi harus ada prioritas pembangunan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan keadaan aktual. Ketersediaan sumber daya alam dan budaya masyarakat dalam mengolah alam di Kapuas Hulu, mengharuskan pembangunan daerah lebih mengutamakan usaha-usaha yang terkait dengan sumber daya alam, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam menggerakkan perekonomian rakyat, harus mengutamakan UMKM (Singgih, 2007; Rusastra, 2011). Pola usaha harus meneruskan kearifan lokal (Pratiwi & Novianty, 2020). Keberadaan Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Serawak, harus dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha rakyat (Siburian, 2002).

Melengkapi upaya pemulihan ekonomi, harus ada faktor pendukung, pelancar, dan strategi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan harus terdiri dari strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang (Sugiri, 2020). Sesuai perkembangan zaman, maka usaha rakyat harus dikelola menggunakan digitalisasi, teknologi informasi, media massa, serta melakukan diversifikasi usaha (Pratiwi & Novianty, 2020; Ulya, 2020; Mahriani, 2020). Keadaan ekonomi yang terpuruk,

mengharuskan adanya tambahan modal bagi rakyat dan UMKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya (Iskandar, *et al*, 2020).

Secara khusus, usaha kratom pantas menjadi komoditi unggulan bagi Kapuas Hulu. Setelah terbitnya Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tanggal 3 Februari 2020 yang menjadi dasar hukum kratom sebagai produk legal, maka usaha kratom dapat menjadi komoditi andalan usaha rakyat dan program pembangunan daerah Kapuas Hulu. Kratom adalah tumbuhan liar di dataran rendah dan pantai sungai, bisa hidup di seluruh wilayah Kapuas Hulu, budi dayanya mudah dan relatif cepat dapat dipanen, pengolahan pasca panen yang mudah, harga jual yang cukup tinggi, pemasaran lokal sangat banyak, pemasaran ekspor ke banyak negara, termasuk negara maju dan kaya, serta masyarakat sangat menyukai mengusahakannya. Sehingga kratom sudah menjadi usaha rakyat hampir di seluruh wilayah Kapuas Hulu. Untuk memantapkan pengusahaannya, usaha kratom dapat menjadi unit usaha pada BUMDes dan koperasi. Sebagai induk badan usaha dapat dilakukan oleh BUMD. Keberadaan BUMDes, koperasi dan BUMD tidak harus mematikan usaha pribadi rakyat atau UMKM yang sudah ada. Justru dapat diorganisir sehingga menjadi suatu sistem usaha yang kuat. Peran BUMD yang perlu diwujudkan adalah membuat industri pengolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, serta menjadi eksportir langsung ke negara pembeli.

Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (*road map*) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggararan pemerintah maupun dari lembaga keuangan. Pemerintah harus mendorong pengusaha menengah dan besar yang ada di Kapuas Hulu untuk secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran ke kabupaten lain dan ke luar negeri. Juga memfasilitasi pengusaha atau investor dari luar yang bermaksud berinvestasi di Kapuas Hulu.

5. PENUTUP

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Strategi dalam pemulihan ekonomi di Kapuas Hulu adalah mengandalkan usaha rakyat, UMKM, koperasi dan BUMDes yang mengolah sumber daya alam dan merupakan usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya, (2) Perlu penguatan usaha berupa: permodalan, jaringan telekomunikasi, digitalisasi usaha, membentuk jaringan usaha, dan perluasan pemasaran, (3) Pemerintah harus membuat perencanaan dan peta jalan pemulihan ekonomi dan mengorganisir semua pihak yang terkait, dan (4) Kratom patut dijadikan sebagai produk unggulan dan usaha andalan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Agusyanti (2020) Mewaspadai Ancaman Krisis Ekonomi Panjang Imbas Pandemi Corona, katadata.co.id/telaah/2020/04/22, Diunduh 22 April 2020.

Arsyad, L. (2010) *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Arsyad, L., Satriawan, E., Mulyo, J.H., Fitrady, A. (2011) *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik (2020) *Kapuas Hulu Dalam Angka*, Putussibau: Badan Pusat Satistik Kapuas Hulu.

Blanchard, O., Johnson, D.R. (2017) Makroekonomi, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hadi, S. & Supardi, (2020) Revitalization Strategi for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Diesease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta, *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, Vol. XII, Issue IV (2020) p. 4068-4076.

Herdiana, D. (2020) Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung, *JUMPA*, Vol. 7, No. 1, Juli 2020.

Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K. (2020) Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i,* Vol. 7 No. 7 (2020) p. 625-638. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15544.

Jhingan, M.L., (2012) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: Rajawali Pers.

Leksono, S. (2013) Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, Dari Metode ke Metode, Jakarta: Rajawali Pers.

Mahriani, E. (2020) Model Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 Issue I, Juni 2020, p. 9-14.

Nugrahani, F. (2014) Metode Penelitian Kualitatif, dalam penelitian pendidikan bahasa, diunduh 26 Mei 2020 dari digilibfkip.univetbantara.ac.id.

Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020) Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pendemi Covid-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, Bandung, 26-27 Agustus 2020.

Rusastra, I.W. (2011) Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global, *Pengembangan Inovasi Pertanian* 4(2), 2011, p. 87-102

Salamah, L. (2001) Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No. 2, April 2001, p. 65-76.

Siburian, R. (2002) Entikong Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, *Antropologi Indonesia 67*.

Singgih, M.N. (2007) Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2007.

Sugiri, D. (2020) Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19, *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, Juli 2020.

Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E., dan Angelsen, A. (2000) Dampak Krisis Ekonomi Indonesia terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa, *CIFOR*, Occasional papar No. 28(1), June 2000.

Timotiusius, T (2020) Tahap Pertama 133 UMKM Kapuas Hulu Terima Bantuan Dari Pemerintah, *Antara*, 31 Agustus 2020.

Todaro, M.P., Smith, S.C. (2015), Economic Development. 12th ed. United States: The George Washington University.

Tohardi, A. (2019) *Pengantar Metode Penelitian Sosial + Plus*, Pontianak: Tanjungpura University Press, books.google.co.id.

Ulya, H.N. (2020) Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan agropolitian, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 (1), p. 80-109.

Yudistira, B. (2020) Antara 15 April 2020, Galamedianews.com/nasional/254245/krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19-sama-dengan-great-depression-tahun-1930-an.html. Diunduh 22 April 2020.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Windhu Putra*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi anggaran. Kedua, untuk mengetahui hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan efisiensi anggaran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui pendekatan analisis DEA (Data Envelopment Analysis) dan Pengujian Regresi Linier didapat hasil sebagai berikut: Pertama, terjadi perbandingan efisiensi antara kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran, dimana Kota Pontianak menjadi bencmark bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, terdapat hubungan yang significant yang positif antara besaran belanja dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, terdapat hubungan yang signifikan dan posistif antara efisiensi anggaran dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

JEL: E62
Kata Kunci: Efisiensi Anggaran Belanja Daerah, Perbandingan Efisiensi Kabupaten/kota.

1. PENDAHULUAN

Di beberapa negara, isu-isu efisiensi pengeluaran publik menjadi perhatian. Setidaknya ini tercermin dalam berbagai penelitian. Studi efisiensi belanja publik dalam kasus di negara-negara berkembang memfokuskan pada pengukuran belanja masyarakat. Seperti diteliti oleh (Gupta et al., 2001) bahwa yang melakukan pengungkuran efisiensi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Penelitian pada periode 1984-1995 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran dalam dua sektor tersebut tidak efisien. Hal ini juga terkait yang dilakukan oleh (Ouertani et al., 2018) di Arab Saudi selama periode 1988-2009. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja publik yang tidak menjamin peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Sementara di Indonesia, khususnya efisiensi (Pemkot) pemerintah daerah telah menjadi perhatian Menteri Keuangan. Pemerintah daerah seharusnya bisa menerapkan pengeluaran yang efisien untuk mendesentralisasi fiskal dengan merancang asumsi bahwa pemerintah daerah lebih sadar akan kebutuhan dan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa pendapatan mereka diharapkan dapat dihabiskan di masing-masing bidang sesuai dengan

* E-mail: windhuputra64@gmail.com

kebutuhan masyarakat melalui manajemen kebijakan desentralisasi, pengelolaan dan pengembangan mekanisme yang efektif dan efisien melalui kepatuhan yang lebih besar pada otoritas lokal.

Sehubungan dengan efisiensi belanja, terutama pengeluaran pemerintah daerah, Menteri Keuangan mengatakan bahwa alokasi dana dalam anggaran, masih banyak yang tidak efisien. Dia mengatakan banyak pemerintah daerah menghabiskan anggaran hanya untuk upah gaji atau biaya tenaga kerja. Pada tahun 2020 anggaran pemerintah pusat Rp 858,8 triliun sekitar 34 persennya untuk TKDD. Selain itu, dari 389 pemerintah daerah, sebagian besar mengalokasikan untuk pendapatan tambahan sangat bervariasi dan sering ditemukan tambahan untuk perangkat sipil negara di daerah yang tidak terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi (Syadullah, 2019).

APBD tahunan pemerintah daerah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan alat untuk melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi anggaran mudah dilakukan. Di sisi lain, anggaran dapat digunakan berbagai pihak untuk mengetahui baik dari segi pendapatan dan pengeluaran sisi.

Menurut Peraturan Nomor 21 tahun 2011, anggaran tahunan dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dimana didalam Anggaran tersebut disepakati beberapa kebijakan utama bagi pemerintah daerah untuk menentukan jumlah pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Ada beberapa elemen dari anggaran, yaitu: 1) Skema operasi dari suatu daerah, bersama dengan penjelasan rinci. 2) Sumber pendapatan minimum untuk menutupi kegiatan tersebut. 3) Adanya belanja maksimum dalam bentuk pengeluaran yang akan dilaksanakan. 4) Jenis kegiatan dan proyek-proyek dalam bentuk nilai angka dalam periode anggaran yang biasanya satu tahun. Belanja pemerintah merupakan sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan atau pendapatan.

Belanja pemerintah juga merupakan indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Indikator ini merupakan pendekatan jasa publik yang merupakan perlindungan sosial. Mengingat pentingnya hal ini maka dampak efisiensi belanja pemerintah pada indikator tersebut harus menjadi perhatian. Kebijakan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, pendekatan kinerja penganggaran lebih mengutamakan hasil (output) berdasarkan prinsip penganggaran yang direncanakan. Fenomena umum yang dihadapi oleh mayoritas pemerintah daerah di Indonesia dalam bidang keuangan daerah peran PAD yang relatif kecil dalam struktur anggaran daerah (APBD). Hal ini karena pendapatan daerah adalah refleksi dari potensi ekonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memposisikan PAD sebagai kriteria otonomi daerah. Dengan kata lain, berapa banyak kontribusi PAD terhadap seluruh penerimaan daerah (Harliza & Anitasari, 2017).

Sebuah pemahaman penuh dari sistem perencanaan dan penyusunan anggaran sangat penting, karena tidak hanya tentang pengeluaran yang direncanakan, tetapi juga pembuat kebijakan nasihat tentang kelayakan dan keinginan proposal anggaran tersebut, baik pada perspektif makro maupun mikro. Dengan kata lain, itu jauh lebih mudah untuk mengendalikan awal penyusunan anggaran daripada setelah pelaksanaan anggaran (The International Monetary Fund (IMF), n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Jenis belanja, pemerintah terdiri dari; 1) Belanja Tidak Langsung (Indirect Expenditures) dan Belanja Langsung (Direct Expenditures), pasal 36 dan 2) Pembiayaan Daerah (Local Government Financing) pasal 18.

Untuk dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah khususnya melalui pengadaan barang/jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap secara baik. Perlu dilakukan upaya untuk menjamin penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur dilakukan tepat waktu, mengingat hal ini sangat penting sebagai salah satu penentu kinerja ekonomi pemerintah. Hal lain yang masih menjadi sorotan utama publik yaitu terkait proporsionalitas alokasi belanja yang masih didominasi belanja konsumsi dibandingkan alokasi belanja investasi pembangunan dan infrastruktur dasar. Apalagi oleh banyak lembaga Internasional, minimnya kualitas belanja infrastruktur pemerintah sering dianggap sebagai barrier terbesar pembangunan yang belum optimal, salah satunya disebabkan oleh buruknya kinerja birokrasi dalam pengadaan barang/jasa khususnya dalam bidang pengadaan konstruksi infrastruktur (Azwar, 2016).

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan merupakan dana paling besar yang diterima dibandingkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Oleh karena itu daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat harus bisa mencari dan menggali potensi daerahnya dan sumber daya alamnya agar pendanaan pembangunan lebih terarah. Mencermati fenomena yang terjadi tersebut menjadi pertanyaan bahwa bagaimana menciptakan efisiensi pengeluaran belanja daerah sehingga dapat menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih maksimal?. Dalam upaya untuk mengkreasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan dana yang bersumber dari belanja pemerintah. Ketimpangan dalam belanja antara daerah tentu hal ini berpengaruh dalam menciptakan efisiensi dalam keuangan (Solihin & Lesatri, 2010).

Dampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu dapat mencerminkan tingkat pengelola keuangan daerah yang benar, yang mana akan berpengaruh kepada iklim yang kondusif dalam upaya masyarakat untuk melakukan peningkatan pendapatannya. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah kabupaten/kota (Deviani, 2016).

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk bagaimana setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat melakukan efisiensi dalam pengelolaan belanja sehingga mampu menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal. 2) Apakah ada dampak efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi anggaran. 2) Untuk mengetahui hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan efisiensi anggaran dalam menciptakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi: 1) Membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan untuk daerah Kabupaten dan Kota, 2) Memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan khususnya ilmu Keuangan Daerah

Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi anggaran telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti antara lain ; 1) Dari hasil penelitian (Sianturi, 2014) di Kota Batu, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 5,6%. Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif masih sangat kurang,

karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Hal ini disebabkan oleh ; (i) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi, (ii) sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai (iii) kompetensi sumber daya aparatur yang kurang. 2) Dari hasil penelitian (Nurabiah, 2018) tentang analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016. Populasi dari penelitian ini 10 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP di provinsi Nusa Tenggara Barat dan data yang digunakan yaitu data sekunder.

Analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keselaran, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan antara pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP menunjukkan rasio yang berbeda sehingga tingkat kinerjanya juga berbeda. 3) Penelitian juga pernah dilakukan oleh (Kusmila, Mukhzarudfa, & Yudi, 2018) yang bertujuan untuk membandingkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Menunjukkan bahwa seluruh kabupaten tidak terdapat perbandingan pada kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

Untuk mengetahui hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti antara lain ; 1) Dalam penelitiannya di Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah (Nugroho & Rohman, 2012) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. 2) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sula oleh (Soamole, 2013) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.63% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula

Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan efisiensi anggaran dalam menciptakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti antara lain ; 1) Hasil penelitian (Djohan, Hasid, & Setyadi, 2016) menunjukkan bahwa variasi Belanja pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kecil dan negatif, dan terhadap pendapatan tetapi tidak signifikan terhadap variasi dalam pertumbuhan ekonomi. 2) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rarung, 2016) sebagai berikut : Secara Parsial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dicapai oleh Pemerintah Kota Manado berpengaruh Signifikan. Hal ini berarti bahwa perkembangan PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan PAD yang terealisasi di Kota Manado.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap ini pemerintah tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated).

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, yaitu: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus menyediakan fasilitas yang menjadi tuntutan masyarakat akibat peningkatan pendapatan, seperti; keamanan, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbalik. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: (1) Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam tulisan ini kami telah melihat beberapa variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Undang-undang desentralisasi Indonesia di Indonesia 1999 telah mengubah pengaturan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sepenuhnya, dengan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab otonom untuk mengatur pengeluaran berdasarkan skema pembagian pendapatan baru.

Meskipun desentralisasi penuh ada pada tingkat kota / kabupaten, namun penelitian yang pernah dilakukan oleh (Adiwan, 2010) ini dapat memberikan wawasan singkat tentang desentralisasi fiskal dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia. Dalam temuan tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan Indonesia masih mengarah pertumbuhan ketimpangan, dengan provinsi miskin memiliki pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada kaya negara. Namun, kecepatan ketimpangan telah tertekan oleh krisis keuangan di Indonesia 1997 dan tidak berubah selama desentralisasi. Oleh karena itu, pengeluaran yang lebih tinggi untuk administrasi publik, termasuk lokal upah pemerintah, pelatihan, dan peningkatan layanan publik, harus dipertimbangkan untuk diberikan pemerintahan yang efektif di pemerintahan tingkat daerah.

Desentralisasi fiskal sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2001 selain bertujuan untuk mengurangi baik ketidakseimbangan fiskal vertikal, antara pusat dan pemerintah daerah, juga melihat ketidakseimbangan fiskal horizontal antar pemerintah daerah (Wibowo, n.d.). Dalam penelitian ini Otonomi fiskal disimpulkan, masih relatif lemah di Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan peran penting transfer pemerintah dari anggaran pusat ke daerah dalam mendukung pengeluaran daerah. Selain itu arus ada peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas pemerintah daerah untuk memaksimalkan kuantitas dan kualitas dalam sisi pengeluaran anggaran.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Affandi, 2014).

Metode dalam pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan pendekatan non parametrik yang tidak stokastik, berdasarkan penemuan dan observasi dari populasi dan mengevaluasi efisiensi relatif terhadap unit-unit yang diobservasi (Israwan, Surarso, & Frikhin, 2016). Pendekatan ini dikenal dengan nama *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA biasanya digunakan untuk teori produksi dalam Ilmu Ekonomi, selain itu digunakan pula untuk benchmarking (tolak ukur) dalam manajemen operasi untuk menghasilkan *Decision Making Unit* (DMU) / Unit Pengambil Keputusan (UPK) yang efisien.

Studi mengenai analisa belanja daerah yang diproksikan dalam rasio belanja terhadap PDRB, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja dan menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (Deviani, 2016). Dari pengujian yang dilakukan rasio belanja terhadap PDRB, dan rasio pertumbuhan belanja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun rasio belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dari hasil uji statistik terlihat bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan begitu juga dengan belanja daerah tidak ditemukan pengaruh tidak langsung antara belanja daerah dengan pendidikan melalui pertumbuhan ekonomi.

Implementasi melalui desentralisasi dapat memperluas kewenangan bagi pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi juga cenderung memberikan otoritas lebih besar bagi pemerintah daerah untuk

mengelola dan menangani wilayah daerahnya, termasuk manajemen keuangan sehingga mampu meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi anggaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Populasinya terdiri atas seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Teknik analisis yang digunakan adalah partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten/kota Jawa Timur: (1) desentralisasi anggaran memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (2) sebaliknya, anggaran desentralisasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) pertumbuhan ekonomi secara statistik memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) desentralisasi anggaran secara statistik memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pertumbuhan ekonomi (Samekto, 2012).

Artikel ini membahas hubungan teoritis dan empiris antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Analisis empiris wilayah Rusia untuk tahun 2005-2012 menunjukkan bahwa desentralisasi belanja yang berlebihan di wilayah tersebut, yang tidak disertai dengan tingkat desentralisasi pendapatan masing-masing, secara signifikan dan negatif terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional. Sebaliknya, ketergantungan regional pada transfer fiskal antar pemerintah dari pusat federal secara positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Yushkov, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam upaya melancarkan proses pembangunan. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda akan berupaya menciptakan stimulus baru dalam mengkreasi unsur pelayanan publik agar upaya peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) akan terasa manfaatnya di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika PEMDA ingin meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan jalan meningkatkan belanja modal, untuk itu PEMDA harus menggali sebesar- besarnya kemampuan keuangan yang ada di daerah.

Kerangka Konsep

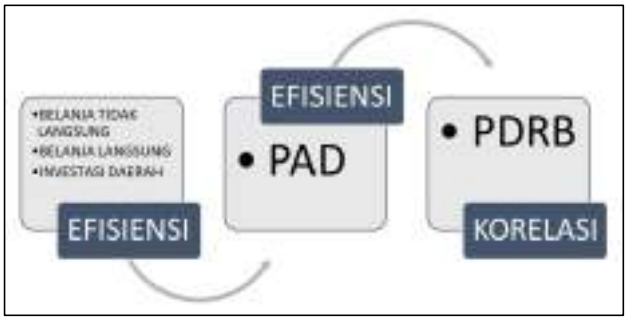

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Hipotesis Penelitian

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara besaran belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama untuk mengukur tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai variabel output, sedangkan variabel input adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah. Bentuk penelitian ini bersifat bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan dan menganalisis rasio efisiensi relatif dari beberapa daerah.

Tahap Kedua dengan melakukan penelitian eksplanasi asosiatif (explanatory research) yang menjelaskan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependent) secara kuantitatif dengan melalui pembuktian hipotesis, yaitu dengan cara melihat tingkat pengaruh Efisiensi Belanja Daerah sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan di Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu selama 4 bulan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan oleh pihak lain yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain berupa dokumentasi dan arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau publikasi lainnya, meliputi data yaitu; 1) Belanja Langsung, 2) Belanja Tidak Langsung, 3) Penyertaan Modal, 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 5) PDRB.

Definisi variabel

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD kabupaten/Kota. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; dan 3) belanja modal.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi basil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.

Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya: 1) Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir. 2) Retribusi daerah. 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu; a) bagian laba atas

penyertaan modal pada BUMD, b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan 3) bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya. Kemandirian APBD berkaitan erat dengan kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Karena dalam kenyataannya kondisi menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri.

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama penelitian ini, digunakan Data Envelopment Analysis atau disingkat DEA yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 oleh Charnes A, Cooper WW dan Rhodes E dalam jurnal Operational Research dengan judul "Measuring The Efficiency of Decision Making Units". Jurnal tersebut membahas pengembangan langkah-langkah pengambilan keputusan efisiensi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi Unit Pengambil Keputusan. DEA adalah teknik berbasis pemrograman linear untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari unit pengambilan keputusan, dengan cara membandingkan antara DMU satu dengan DMU lain yang memanfaatkan sumber daya yang sama untuk menghasilkan output yang sama dimana solusi dari model tersebut mengindikasikan produktivitas atau efisiensi suatu unit dengan unit lainnya. Tujuan akhir dari DEA dimaksudkan sebagai metode untuk evaluasi kinerja dan benchmarking (Israwan et al., 2016).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara input dan output atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Hasil dari perbandingan tersebut kemudian dibandingkan antara banyaknya kabupaten kota yang menjadi pembanding antara satu dengan yang lain. Dimana nilai yang paling efisien di antara kabupaten dan kota akan menjadi patokan untuk bagi yang lain. Sehingga nilai efisiensi relatif akan berada antara $0 < x < 1$, yang berarti apabila nilai rasio mendekati 1 semakin efisien dan demikian sebaliknya.

Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga dari penelitian ini dengan menggunakan Regresi Data Panel yaitu gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu ($t = 1,2,\ldots,T$) dan N jumlah individu ($i = 1,2,\ldots,N$), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu,

maka disebut *unbalanced panel*. Sedangkan jenis data yang lain, yaitu: data time-series dan data cross-section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data Belanja dan PAD melalui pendekatan *Data Envelopment Analysis* maka dapat dinilai seberapa besar nilai efisiensi keuangan pada setiap kabupaten/kota, sebagai berikut: dilihat dari nilai rata-rata efisiensi Kota Pontianak mempunyai nilai efisiensi yang relatif paling stabil yaitu bernilai 1 (satu). Untuk itu Kota Pontianak dapat dijadikan patokan (benchmarking) untuk menuju efisiensi bagi daerah lain. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik pendekatan output (Grafik 4-1) dimana Kota Pontianak dibandingkan dengan daerah lain paling efisien dalam memaksimalkan input yang ada. Dengan kata lain bahwa Kota Pontianak dapat memaksimalkan input yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 573.083.360.000,-, Belanja Langsung Rp. 419.114.160.000,- dan Penyertaan Modal Rp. 5.500.000.000,- untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kisaran sebesar Rp. 410,121.390.000,-.

Nilai efisiensi terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 0,22. Dengan kata lain bahwa Kabupaten Kayong Utara belum dapat memaksimalkan input yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 317.801.490.000,-, Belanja Langsung Rp. 392.406.110.000,- dan Penyertaan Modal Rp. 2.00.000.000,- untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kisaran Rp. 100 miliar ,-.

4.2. Pembahasan

Analisis Kemampuan Daerah Dalam Melakukan Efisiensi Anggaran

Apabila kita lakukan sorting terhadap anggaran belanja, maka nilai anggaran belanja tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang nilai nilai tertinggi rata-rata Rp. 1.980.855.150.000,- dan sedangkan nilai anggaran terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar Rp. 712.207.600.000,-

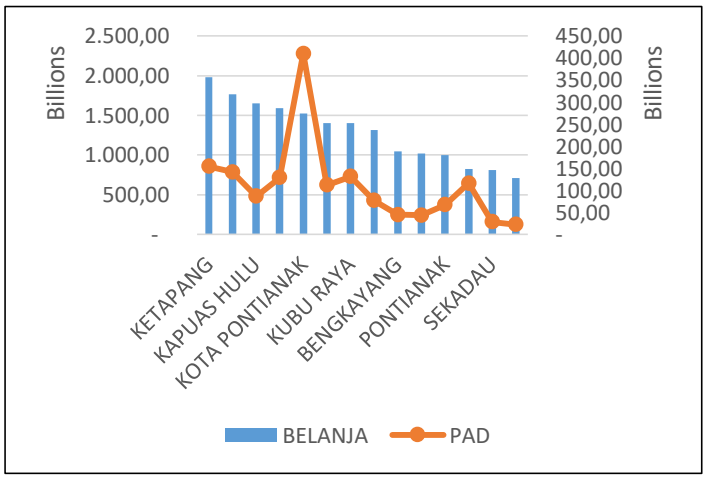

Sumber: Data Olahan APBD Tahun 2015-2018

Gambar 2. Grafik Perbandingan Besaran Belanja dengan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Apabila dilihat untuk kondisi sorting Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengikuti pola dari belanja daerah. Dimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di Kota Pontianak sebesar rata-rata Rp. 410.121.390.000,- dan terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar rata-rata Rp. 21.921.670.000,-. Sehingga hal ini bisa mencerminkan bahwa variasi anggaran yang belanja yang besar belum tentu mampu untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar pula. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djohan et al., 2016) yang selanjutnya mengadakan variasi dalam Belanja pemerintahan memiliki efek positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ini menunjukkan variasi dalam pengeluaran pemerintahan merupakan penentu peningkatan ketimpangan pendapatan di antara kabupaten/kota.

Dilihat dari perbandingan antara kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran yang paling efisien adalah Kota Pontianak dengan nilai efisiensi relative sama dengan 1(satu), dimana bisa dijadikan benchmark bagi daerah kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, adalah daerah Kabupaten Sambas yaitu dengan nilai efisiensi 0,83 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 100 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sambas mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 150 milyar. Ketiga, adalah daerah Kabupaten Ketapang yaitu dengan nilai efisiensi 0,80 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 150 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Ketapang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 200 milyar. Keempat, adalah daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan nilai efisiensi 0,69 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 125 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Kubu Raya mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 200 milyar.

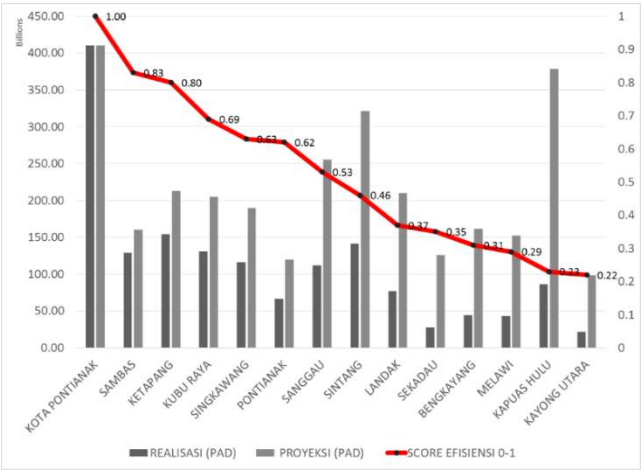

Sumber : Data Olahan APBD Tahun 2015-2018

Gambar 3. Grafik Rata-rata Perbandingan Realisasi dan Prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kelima, adalah daerah Kota Singkawang yaitu dengan nilai efisiensi 0,63 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 110 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kota Singkawang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 180 miliar. Keenam, adalah daerah Kabupaten Pontianak yaitu dengan nilai efisiensi 0,62 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 60 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Pontianak mampu

optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 120 miliar. Ketujuh, adalah daerah Kabupaten Sanggau yaitu dengan nilai efisiensi 0,53 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 110 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sanggau mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 250 milyar.

Kedelapan, adalah daerah Kabupaten Sintang yaitu dengan nilai efisiensi 0,46 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 140 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sintang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 300 milyar. Kesembilan, adalah daerah Kabupaten Landak yaitu dengan nilai efisiensi 0,37 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 75 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Landak mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 200 milyar. Kesepuluh, adalah daerah Kabupaten Sekadau yaitu dengan nilai efisiensi 0,35 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 25 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sekadau mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 125 miliar. Kesebelas, adalah daerah Kabupaten Bengkayang yaitu dengan nilai efisiensi 0,31 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 45 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Bengkayang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 150 milyar.

Keduabelas, adalah daerah Kabupaten Melawi yaitu dengan nilai efisiensi 0,29 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 45 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Melawi mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 150 milyar. Ketigabelas, adalah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan nilai efisiensi 0,29 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 75 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Kapuas Hulu mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 375 miliar. Keempatbelas, adalah daerah Kabupaten Kayong Utara yaitu dengan nilai efisiensi 0,22 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 20 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Kayong Utara mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 100 milyar.

Analisis Hubungan Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara besaran belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam hasil perhitungan Uji /t statistik sebagai berikut :

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0.319362	6.958780723	0.045893	0.963565
LnBelanja	0.895447	0.251366934	3.56231	0.000777

Persamaan: $y = 0{,}319 + 0{,}895x$

Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan Anggaran belanja sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar 0,895 persen. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Rohman, 2012) pada Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah, serta penelitian yang dilakukan oleh (Soamole, 2013) di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Analisis Hubungan Efisiensi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara efisiensi dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) . Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam hasil perhitungan Uji /t statistik sebagai berikut:

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	2.4854	0.1085	22.8993	0.0000
LNEfisiensi	0.6168	0.0990	6.2301	0.0000

Persamaan: y = 2,4854 + 0,6168x

Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan efisiensi sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran PDRB sebesar 0,6168 persen. Hasil penelitian ini tidak sesuai penelitian yang pernah dilakukan oleh (Sianturi, 2014) dan (Djohan et al., 2016). Tetapi penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh (Rarung, 2016) di Kota Manado.

5. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

Apabila kita lakukan perbandingan terhadap anggaran belanja, maka nilai anggaran belanja tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang nilai nilai tertinggi rata-rata Rp. 1.980.855.150.000,- dan sedangkan nilai anggaran terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar Rp. 712.207.600.000,-. Apabila dilihat untuk kondisi sorting Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengikuti pola dari belanja daerah. Dimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di Kota Pontianak sebesar rata-rata Rp. 410.121.390.000,- dan terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar rata-rata Rp. 21.921.670.000,-. Sehingga hal ini bisa mencerminkan bahwa variasi anggaran yang belanja yang besar belum tentu mampu untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar pula. Dilihat dari perbandingan antara kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran yang paling efisien adalah Kota Pontianak dengan nilai efisiensi relatif sama dengan 1(satu), dimana bisa dijadikan benchmark bagi daerah kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Terdapat hubungan yang significant dan positif antara Anggaran Belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan Persamaan; y = 0,319 + 0,895x. Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan Anggaran Belanja sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,895 persen.

Terdapat hubungan yang significant dan positif antara Efisiensi dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam hasil perhitungan Uji /t statistik sebagai berikut: Persamaan ; y = 2,4854 + 0,6168x. Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan efisiensi sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran PDRB sebesar 0,6168 persen.

Rekomendasi penelitian ini adalah harus ada upaya untuk maksimalisasi anggaran belanja bagi daerah kabupaten/kota yang belum efisiensi. Kota Pontianak dapat dijadikan model dalam upaya maksimalisasi anggaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat melalui : 1) memberikan motivasi/kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, (2) menyediakan serta mengoptimalkan sistem informasi dan teknologi yang tersedia (3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

Perubahan mindset dalam menjalankan Kebijakan Umum Belanja Daerah yang mengacu kepada peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom harus tetap disosialisasikan. Yang mana berdasarkan pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari input yang direncanakan, bukan pada prinsip yang lama yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan dana-dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwan, F. (2010). *The Impact of Government Budget shifts to Regional Disparities in Indonesia : Before and After Decentralisation*. Munich Personal RePEc Archive (25243).

Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2).

Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2).

Deviani. (2016). Analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. *Pekbis Jurnal*, 8(1), 1–13.

Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. (2016). Government Expenditure as Determinants of Economic Growth and Income Inequality of Inter-Province of the Islands in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(22), 148-158.

Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. (2001). *Public Spending on Health Care to the Poor*. IMF Working Paper.

Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 133–140.

Israwan, L. F., Surarso, B., & Frikhin, F. (2016). Implementasi Model CCR Data Envelopment Analysis (DEA) Pada Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 6(1), 76.

Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*.

Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel intervening. *Diponogoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–14.

Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067-100.

Ouertani, M. N., Naifar, N., & Ben Haddad, H. (2018). Assessing government spending efficiency and explaining inefficiency scores: DEA-bootstrap analysis in the case of Saudi Arabia. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–16.

Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Menado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 449–460.

Samekto, A. (2012). the Impacts of Budget Decentralization on Economic Growth and Local Government Performance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15(1), 157.

Sianturi, A. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 557–563.

Soamole, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula). *Governance*, 5(1), 90–94.

Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). Analisis Ketimpangan Fiskal Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*, (1), 20–35.

Syadullah, M. (2019). *Efisiensi Belanja Daerah*. Investor Dayly.

The International Monetary Fund (IMF). (n.d.). *Budget Preparation*.

Wibowo, H. (n.d.). *Measuring Fiscal Decentralisation in Indonesia*.

Yushkov, A. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirical Studies, And Russian Experience. *Voprosy Ekonomiki*, 2016(2), 94–110.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Helly Suharlina*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakat, adapun keberhasilan dalam pembangunan merupakan tujuan utama disetiap daerah hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu proses pembangunan terjadi hambatan dan halangan sehingga akan mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat, salah satu yang menjadi penghambat keberhasilan dalam pembangunan adalah kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan antara lain investasi yang rendah, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi, pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap kesejahteraar masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama lima tahun, dengan metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,serta kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

JEL: I30
Kata Kunci: Investasi, Pengangguran, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai apabila perekonomian mengalami peningkatan proses produksi barang dan jasa secara terus menerus diberbagai sektor atau kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Sadono bahwa Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi suatu daerah antara lain: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi maka sumber daya manusia, sumberdaya alam harus tersedia dan peningkatan efisensi penggunaan faktor produksi. Salah satu yang menjadi penghambat dari keberhasilan pembangunan suatu Negara adalah kemiskinan sehingga pemerintah daerah

* Email : helly.suharlina@ekonomi.untan.ac.id

ISBN: 978-602-53460-5-7

maupun pemerintah pusat berupaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan melalui program – program kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Program – program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan belum menunjukan hasi yang optimal karena lebih banyak program tersebut diprioritaskan pada proram yang bersifat sektoral untuk itu perlu adanya strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 - 2017 berfluktuatif, hanya pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat turun menjadi 8,07 %, kemudian terjadi lagi kenaikan tingkat kemiskinan sampai pada tahun 2017 sebesar 7,88 % . Hal ini di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat kesehatan yang masih rendah serta kualitas sumber daya manusia juga rendah

Kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat komplek dan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Upaya untuk mengentasan kemiskinan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dimana harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan pemerintah daerah perlu untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran dapat mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerintah dapat meprioritaskan pengalokasian dana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Pembangunan disetiap daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas masing - masing daerah agar kemiskinan terus menurun. Dengan adanya modal yang merupakan pendorong perkembangan ekonomi dan merupakan sumber untuk menaikkan tenaga produksi yang membutuhkan keahlian penduduk serta mengadakan investasi untuk mengolahnya.

Investasi merupakan pengeluaran yang menambah alat-alat produksi dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu ditentukan adanya pendorong untuk mengadakan investasi atas dana yang diperoleh dari masyarakat. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri menjadi sumber yang paling penting untuk daerah yang sedang berkembang dan yang dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang cukup besar untuk pembangunan.

Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat dari tahun 2013 – 2017 pada umumnya mengalami kenaikan setiap tahun, hanya pada tahun 2017 investasi mengalami menurunan di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi. Investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dimana suatu daerah menggunakan PDRB untuk investasi. Dengan tingginya investasi yang ditanamkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Peran investasi dalam pembangunan salah satunya adalah mengurangi jumlah pengangguran karena penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi dapat diartikan pengeluaran yang dapat menambah jumlah alat produksi dalam masyarakat sehingga akan menambah pendapatan serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, setiap Negara senantiasa akan berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat menarik atau menggairahkan investasi. Pengangguran berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia karena dengan jumlah pengangguran yang tinggi maka akan mengakibatkan pendapatan mereka berkurang.

Secara umum tingkat pengangguran tahun 2013-2017 Kabupaten/Kota setiap tahunnya berfluktuatif. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran yang tertinggi diatas Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,15 % terdapat di Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya, sedangkan tingkat pengangguran yang terendah dibawah Provinsi Kalimantan Barat terdapat di kabupaten Sekadau, kabupaten Kapuas Hulu,Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang. Hal ini dikarenakan dengan sistem pekerjaan yang sudah berubah, sekarang pekerjaan yang diganti dengan mesin, jadi mulai secara pelan – pelan tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Dengan demikian maka terjadi banyak pengangguran. Jika tingkat pengangguran disuatu daerah tinggi maka akan mengakibatkan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Pendidikan yang merupakan komponen dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberhasilan dalam pembangunan dari sektor pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Angka melek huruf (Pendidikan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2013 – 2017 berfluktuatif. Pada tahun 2015 angka melek huruf mengalami kenaikan antara lain Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten kubu Raya dan Kota Pontianak. Sedangkan pada tahun 2015 angka melek huruf terjadi penurunan adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Singkawang.

Angka melek huruf yang terendah adalah Kabupaten Melawi hal ini dikarenakan mereka banyak yang putus sekolah di tingkat pendidikan SMP dan belum banyaknya akses sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melek huruf menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendidikan suatu daerah karena semakin tinggi angka melek huruf maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangunan manusia yang menjadi sasaran dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila perekonomian mengalami peningkatan proses produksi barang dan jasa secara terus menerus diberbagai sektor atau kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara umum rata – rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berfluktuatif, pertumbuhan ekonomi yang yang tertinggi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang berada diatas pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terendah adalah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah kunci sukses pembangunan, pemerataan distribusi pembangunan maka perlu peningkatan dari sisi investasi yangakan menunjang pertumbuhan ekonomi. Investasi meningkat tentunya akan meningkatkan PDB pula dan jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran akan menurun sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan manusia dan juga cerminan kebijakan yang diambil pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini untuk membiayai sektor publik dan menjadi perioritas dalam meningkatkan sumber daya manusia yang akan tercermin pada

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan, keberhasilan dari pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan yang mendasar dapat diatasi, adapun permasalahannya antara lain kemiskinan, pengangguran, gizi buruk dan buta huruf. Berbagai ukuran untuk melihat pembangunan manusia antar wilayah atau antar Negara yaitu dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara umum rata – rata Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berfluktuatif. Kemudian tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota mengalami penurunan kecuali Kota Pontianak indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami kenaikan setiap tahunnya bahkan indeks pembangunan manusia Kota Pontianak dan Kota Singkawang lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian sebuah Negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu longevity/umur panjang dan sehat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, knowledge/pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata – rata lama sekolah, serta decent living standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kemiskinan

Umumnya suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya asset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relative rendah. Menurut Kuncoro (2000) Kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

2.2. Investasi

Investasi merupakan faktor yang paling penting guna mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomia suatu Negara dan wilayah. Dalam perekonomian dikenal istilah investasi dan setiap pelaku usaha akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Nurkse menyatakan bahwa “Masyarakat tidak menggunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal seperti perkakas, alat-alat mesin, fasilitas angkutan pabrik dan segala macam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif “. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2009) “ perusahaan – perusahaan mengadakan investasi agar memperoleh laba dan keuntungan “. Karena barang-barang modal berumur lebih dari sekedar satu tahun maka keputusan investasi tergantung pada:

- Tingkat permintaan atas output yang dihasilkan oleh investor baru.
- Tingkat suku bunga dan pajak yang mempengaruhi biaya investasi.
- Harapan dan pemikiran kalangan usahawan atas situasi ekonomi di masa depan.

Jadi dapat diartikan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran/pembelanjaan yang berupa barang modal, peralatan modal, bangunan dan barang – barang inventaris dimana gunanya sebagai penambahan produksi barang dan jasa serta untuk meningkatkan produktivitas kerja agar terjadi peningkatan output yang dihasilkan untuk masyarakat.

2.3. Pengangguran

Pengangguran sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam katagori angkatan kerja (*labor force*) tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja.

Menurut Sumarsono (2009) menyatakan bahwa "angka pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut pengangguran ". Menurut Sukirno (2011) menyatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Jadi pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat mengakibatkan dampak yang buruk, baik terhadap perekonomian maupun secara individu dan masyarakat.

2.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur sebagai modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang umumnya didapat dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan melalui pendidikan maka seseorang akan memiliki kemampuan guna meningkatkan kualitas diri demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa melalui pendidikan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperluas kemampuannya dan mengatur kehidupan secara wajar. Untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin baik kualitas seseorang hal ini karena mereka dapat menyerap informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat, karena pendidikan dapat memberikan kemampuan seseorang untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki pendidikan.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Menurut Suryana bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam

struktur perekonomiannya atau tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Menurut Todaro bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Simon Kuznet (Budiono 1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kafasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, instusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengukur capaian pembangunan manusia yang komponen dasarnya kualitas hidup, IPM dapat dilihat dari tiga komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Menurut Todaro bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka akan meningkatkan kesejahteraannya.

Namum kesejahteraan mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka cenderung akan menurunkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia, Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitas tersebut untuk kesejahteraannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan analisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2009 : 21). Hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menekankan analisisnya pada data – data numerik sehingga dapat diketahui hubungan yang signifikan pada variabel tersebut.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel dengan jangka waktu lima tahun mulai tahun 2013 sampai tahun 2017. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian data tersebut diolah dengan melalui program software economic views (E- views 9).

3.3. Analisis Data

1. Data Panel

Data Panel adalah gabungan dari data time series dan data cross section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun time series. Dalam penelitian ini yang menjadi data time series adalah kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sedangkan data cross section adalah data Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Barat.

2. Regresi Linier Berganda / Multipel

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Dimana :

Y = Kemiskinan
b_0 = Konstanta / intercept
b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
X_1 = Investasi
X_2 = Pengangguran
X_3 = Pendidikan
X_4 = Pertumbuhan Ekonomi
e = Error term

3. Regresi Linier / Regresi Sederhana

$$Y_{it} = a + bx + e \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Dimana :

Y = Kesejahteraan Masyarakat
a = Konstanta / intercep
b = Koefisien Regresi
X = Kemiskinan
e = Error term

Uji Statistika :

a. Uji t
   Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat kepercayaan/Keyakinan 95 %.
b. Uji F
   Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan/keyakinan 95 %.
c. Koefisien Determinasi (R^2)
   Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Regresi Linier Berganda / Multipel

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Prob.
C	7,389405	0,0000
Investasi (X_1)	0,215844	0,2579
Pengangguran (X_2)	0,071009	0,8090
Pendidikan (X_3)	-0,005767	0,0003
Pertumbuhan Ekonomi (X_4)	-0,025275	0,0350

Sumber : Data Olahan E-views.

Berdasarkan hasil regresi linier berganda maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7{,}389405 + 0{,}215844\ X_1 + 0{,}071009\ X_2 - 0{,}005767\ X_3 - 0{,}025275\ X_4$$

Hasil regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (C)
   Nilai koefisien konstanta (C) sebesar 7,389405 artinya jika investasi, pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan maka kemiskinan sebesar 7,389406 persen.
b. Investasi
   Nilai koefisien Investasi sebesar 0,215844 artinya jika investasi mengalami kenaikan satu persen maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,215844 persen dengan asumsi Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi tetap.
c. Pengangguran
   Nilai koefisien Pengangguran sebesar 0,071009 artinya jika pengangguran mengalami kenaikan satu persen maka Kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,071009 persen dengan asumsi Investasi, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi tetap.
d. Pendidikan
   Nilai koefisien Pendidikan sebesar -0,005767 artinya jika pendidikan mengalami kenaikan satu persen maka Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,004034 persen dengan asumsi Investasi, Penganggran dan Pertumbuhan Ekonomi tetap.
e. Pertumbuhan Ekonomi
   Nilai koefisien Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,025275 artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan satu persen maka Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,025275 persen dengan asumsi Investasi, Pengangguran dan Pendidikan tetap.

2. Uji Statistika

a. Uji t
   Uji t dilakukan untuk menguji apakah Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan pertumbuhan Ekonomi masing – masing secara parsial berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji t

Variabel	t - Statistic	Prob.	Keputusan
Investasi (X_1)	1,144847	0,2579	Tidak Signifikan
Pengangguran (X_2)	0,876103	0,8090	Tidak Signifikan
Pendidikan (X_3)	-4,243094	0,0003	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (X_4)	-5,943403	0,0350	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-Views.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Investasi (X_1)
   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota I Provinsi Kalimantan Barat.
b. Pengangguran (X_2)
   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.
c. Pendidikan (X_3)
   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.
d. Pertumbuhan Ekonomi (X_4)
   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah Investasi, Pengangguran, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara serempak atau simultan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai F – statistic sebesar 205,7577 dengan probabilitas 0,0000 hal ini bearti bahwa investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di provinsi Kalimantan Barat.

c. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,589013 artinya sebesar 58,9013 % dari variabel Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, sisanya 41,0987 % di pengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini.

3. Regresi Linier

Berdasarkan hasil olahan data regresi linier dengan menggunakan program E-views maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Linier

Variabel	Koefisien	Prob.
C	69,42572	0,0000
Kemiskinan (X)	-0,277748	0,0206

Sumber : Data Olahan E-views.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta (C)
   Nilai koefisien konstanta sebesar 69,42572 artinya jika Kemiskinan tidak mengalami perubahan maka Kesejahteraan masyarakat sebesar 69,42572 persen.
b. Kemiskinan (X)
   Nilai koefisien Kemiskinan -0,277748 artinya jika Kemiskinan mengalami kenaikan satu persen maka kesejahteraan Masyarakat akan mengalami penurunan 0,277748 persen.

4. Uji Statistika

a. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. Kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4. Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.	Keputusan
Kemiskinan	-2,349839	0,0206	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-views.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur besarnya kontribusi/sumbangan dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat maka hasil dari koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,547798 artinya sebesar 54,7798 % dari variabel kemiskinan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, sisanya 45,2202 % di pengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, dimana jika terjadi kenaikan investasi maka kemiskinan akan meningkat juga, hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika investasi mengalami kenaikan atau meningkat maka akan mengakibatkan kemiskinan turun.

Dengan meningkatnya investasi yang belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap kemiskinan, karena yang seharusnya dengan meningkatnya investasi akan dapat mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilianti yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Surabaya.

Hal ini dikarenakan nilai investasi yang ada di Kalimantan Barat sebagian besar bergerak pada sektor perkebunan yang lebih banyak bersifat padat karya sehingga akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya. Penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan ini pada umumnya berpendidikan rendah sehingga mereka digolongkan sebagai buruh kasar dan mendapat upah yang sangat rendah.

Dengan rendahnya upah yang diterima buruh tersebut maka akan mengakibatkan mereka tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga akan berdampak meningkatnya tingkat kemiskinan. Meningkatnya tingkat kemiskinan disebabkan beralihnya sebagian masyarakat dari usaha tani yang dulu digelutinya beralih pada komoditi baru yang dapat menjanjikan keberhasilannya. Akan tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang kecewa karena lahan yang dulunya telah memberikan kehidupan bagi masyarakat kini telah diganti dengan tanaman yang baru yang belum berproduksi dan masih sangat memerlukan biaya untuk pemeliharaan yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang terpaksa bekerja pada perusahaan tersebut sebagai buruh kasar

dengan bayaran upah yang rendah demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi peningkatan investasi di Kalimantan Barat pada sektor perkebunan hanya memberikan keuntungan pada segelintir orang saja tetapi tidak terlihat pada buruh perkebunan itu sendiri sehingga tingkat kemiskinan akan meningkat terus.

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut pendapat Sokirno bahwa pengangguran mempunyai efek buruk terhadap tingkat kesejahteraan seseorang karena seseorang akan turun kesejahteraannya dan terjebak dalam kemiskinan karena menganggur. Secara teori menyatakan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak mempunyai tingkat pengangguran yang paling tinggi dimana banyak sekali para pendatang yang berasal dari Kabupaten yang datang untuk mengubah nasib ke Kota sehingga bisa membuat tingkat pengangguran di Kota Pontianak mengalami peningkatan. Pada umumnya tingkat pendidikan para pendatang rendah dan lapangan pekerjaan yang belum dibuka guna menyerap tenaga kerja para pendatang tersebut sehingga akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Demikian juga di perkotaan karena banyaknya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi sehingga mereka menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan dengan penghasilan yang sesuai keinginannya, maka mereka akan menganggur selain itu juga karena tingkat pendapatan keluarga mereka yang tinggi sehingga dapat menopang hidup bagi keluarga yang menganggur.

Jadi mereka hanya akan mencari kerja sesuai dengan bidangnya dan mencari gaji yang benar – benar sesuai dengan bidangnya. Selain itu tidak semua pencari kerja atau menganggur itu semuanya miskin. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan ada juga yang membuka usaha sendiri.

Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penididikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu peran penting dalam pembangunan dan dengan kualitas pendidikan yang baik maka akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan seseorang yang dapat memberikan kemajuan untuk suatu daerah.

Dalam hal ini pendidikan adalah faktor utama dalam membangun perekonomian di suatu daerah, dengan meningkatnya pendidikan maka akan dapat meningkatkan kualitas pekerja sehingga nantinya para pekerja dapat diterima didunia kerja. Secara umum seseorang yang berpendidikan baik maka akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang harus dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putu dan Permana dan Arianti yang menyatakan bahwa pedidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan meningkatnya kualitas pendidikan maka akan menurunkan angka melek huruf yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Angka melek huruf dari tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Rata – Rata angka melek huruf yang tertinggi adalah di Kota Pontianak sebesar 96,32 %, Kabupaten Landak sebesar 93,65 %, Kabupaten Sanggau sebesar 93,16 % dan Kabupaten Sekadau sebesar 93,57 %, hal ini dapat

dikatakan bahwa perkembangan angka melek huruf sudah sangat baik di daerah tersebut dengan meningkatnya angka melek huruf yang tinggi maka akan menurunkan angka kemiskinan. Sedangkan rata – rata angka melek huruf yang terkecil adalah di Kabupaten Melawi daerahsebesar 89,43 % dan Kabupaten Kayong Utara sebesar 89,88 %. Sedangkan rata-rata angka melek huruf yang lebih tinggi dari Kalimantan Barat sebesar 92,85 % adalah Kabupaten Ketapang sebesar 92,97 %, Kabupaten Landak sebesar 93,65 %, Kabupaten Sanggau sebesar 93,16 %, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 93,05 %, Kota Singkawang sebesar 92,97 % dan Kota Pontianak sebesar 96,32 %, dalam hal ini masing-masing daerah tersebut sudah semakin baik tingkat pendidikan hal ini akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Peranan pendidikan sangatlah penting dalam mengatasi tingkat kemiskinan, kesadaran betapa pentingnya mengenyam pendidikan pada masyarakat miskin perlu ditingkatkanuntuk menambah pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan. Guna mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kerjasama antara pihak terkait dalam pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pendidikan di berbagai Negara sangatlah penting demi untuk menyelamatkan diri dari tingkat kemiskinan, hal ini dapat digambarkan pada masyarakat miskin mengharapkan dapat pekerjaan yang baik dan penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai pendidikan yang tinggi pula. Tetapi untuk mencapai hal tersebut masyarakat miskin belum mampu untuk membiayai pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti sampai kejenjang universitas agar dapat dikatakan bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan akan berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Darsana yang menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tetapi tidak serta merta lasung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu adanya target dari pemerintah agar pembangunan secara merata dilakukan dalam hal fasilitas sarana dan prasarana sehingga akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Rata-Rata pertumbuhan ekonomi yang terendah dibawah Provinsi sebesar 5,35 % adalah Kabupaten Bengkayang sebesar 4,97 % dan Kabupaten Sanggau sebesar 4,56 %, untuk itu perlu adanya pengembangan kegiatan ekonomi, pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja lebih banyak yaitu dengan membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor perkebunan serta lebih mengoptimalkan pada program pengentasan kemiskinan.

Sedangkan rata – rata pertumbuhan ekonomi tertinggi diatas Provinsi sebesar 5,35 % adalah Kabupaten Ketapang sebesar 6,09 %, Kabupaten Sekadau sebesar 6,07 % dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,47 %, Kabupaten Mempawah sebesar 5,66 %, Kabupaten Sintang sebesar 5,38 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 5,62 %, Kota Pontianak sebesar 5,51 % dan Kota singkawang sebesar 5,95 %. Hal ini akan dapat mendorong pengentasan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peranan pemerintah daerah sangatlah penting untuk menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi sehingga akan mengakibatkan berkurangnya kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya masyarakat bekerja di sektor primer kemudian adanya investasi yag berkembang di Kalimantan Barat yang banyak memerlukan tenaga kerja sehingga akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya terutama pada sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor pertambangan.

Salah satu kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat hal ini disebabkan karena meningkatnya sektor primer yang banyak memerlukan tenaga kerja sehingga banyak lapangan kerja yang tersedia, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan semakin besarnya pendapatan masyarakat maka daya beli akan meningkat maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar guna memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kuznet menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur – angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam suatu daerah maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan hal ini merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini kemiskinan sangat berpengaruh terhadap Indeks pembangunan manusia jika kemiskinan meningkat maka akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia turun, dimana dalam lingkaran kemiskinan terdapat tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli yang tidak mampu dicapai penduduk miskin dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan maka akan mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendah nya tingkat kesehatan maka akan memicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabakan produktivitas juga rendah. Tingkat produktivitas rendah akan mengakibatkan pendapatan rendah, dengan pendapatan rendah maka mengakibatkan kemiskinan, dengan kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu untuk perawatan kesehatan serta pendidikan.

Rata-Rata tingkat kemiskinan diatas rata –rata provinsi Kalimantan Barat sebesar 8,2 % adalah Kabupaten Landak 13,19 %, Kabupaten Ketapang sebesar 16,36 %, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 10,01 %, Kabupaten Melawi 12,77 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 10,07 % dan Kabupaten Sambas sebesar 9,18 %. Hal ini dikarenakan Kabupaten tersebut belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut kemiskinan sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, jika kemiskinan turun maka akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia meningkat. Dalam lingkaran kemiskinan ada tiga indikator pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli yang tidak mampu dicapai oleh masyarakat miskin. Ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan rata – rata tingkat kemiskinan dibawah rata – rata provinsi Kalimamtan Barat sebesar 8,2 % adalah Kabupaten Sanggau sebesar 4,56 %, Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,40 %, Kota Pontianak sebesar 5,36 %, Kabupaten Sekadau sebesar 6,47 %, Kota Singkawang sebesar 5,78 %, Kabupaten Mempawah sebesar 5,90 % dan Kabupaten Bengkayang sebesar 7,42 %. Rendahnya

angka kemiskinan disebabkan daerah tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan sehingga akan berdampak pada indeks pembanguanan manusia, dengan banyak dibukanya lapangan pekerjaan sehingga memerlukan tenaga kerja. Dalam suatu lingkaran kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga hal yaitu umur panjang, sehat, pengetahuan dan hidup yang layak. Umur panjang yang sehat dapat diukur angka harapan hidup pada suatu daerah, semakin tinggi angka harapan hidup maka akan mengakibatkan kesehatan masyarakat semakin baik sehingga berdampak pada produktivitas kerja.

Produktivitas kerja meningkat maka akan meningkatkan pendapatan maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Pada dimensi pengetahuan dapat dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kalau berjalan dengan baik maka akan menaikan kualitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia naik maka masyarakat mampu dalam memproduksi barang dan jasa sehingga berdampak pendapatan masyarakat sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hidup layak dapat dilihat dari pengeluaran perkapita, dalam hal ini apabila dalam suatu daerah rata-rata pengeluaran perkapitanya tinggi maka dapat menggambarkan daya beli masyarakat juga tinggi, dengan pendapatan masyarakat tinggi maka mengakibatkan turunnya angka kemiskinan. Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat cenderung menunjukan penurunan hal ini dikarenakan adanya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat fokus dalam menekan angka kemiskinan meskipun belum mencapai target sesuai yang diharapkan akan tetapi angka kemiskinan dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat meningkat maka dapat dilihat dari turunnya tingkat kemiskinan. Peranan pemerintah sangatlah penting terutama dalam meningkatkan pembangunan, dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

5. KESIMPULAN

Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, jika investasi meningkat maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Hal ini menunjukan investasi belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap kemiskinan. Investasi masih bergerak pada pada sektor perkebunan yang bersifat padat karya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja yang umumnya berpendidikan rendah.

Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, jika pengangguran meningkat maka kemiskinan juga meningkat. Hal ini dikarenakan banyak pendatang yang berasal dari Kabupaten yang datang untuk mengubah nasib ke Kota sehingga pengangguran di Kota mengalami peningkatan.

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, jika pendidikan meningkat maka kemiskinan akan mengalami

penurunan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendidikan maka akan meningkatkan kualitas pekerja sehingga para pekerja dapat diterima di dunia kerja. Secara umum seseorang yang berpendidikan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat masyarakatnya banyak bekerja di sektor primer dan investasi yang berkembang banyak memerlukan tenaga kerja sehingga akan membuka lapangan kerja.

Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, jika kemiskinan meningkat maka akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini dikarenakan daerah tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan sehingga akan berdampak pada Indeks Pemmbangunan Manusia. Produktivitas kerja meningkat maka akan meningkatkan pendapatan sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo. (2011). *Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*.

Anjuli, A.D. dan Fitrayati, D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 1 No. 3.

Aristia, Budhi, Wirathi dan Darsana. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*.

Arshanti, K.N dan I.G.A.P, Wirathi. (2015). Pengaruh Investasi Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol.04 No.05.

Astrini, N.M. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 02 No.08.

Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Brata, A.G. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Dumairy, MA.1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu. (2014). *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara tahun 2001-2010*.

Erlin, Sri Mulyani. (2007). *Metodelogi Penelitian Bisnis, Cetakan Pertama*. Medan: USU Press.

Gujarati, Damodar N, 2005, *Basic Econometrics*, New York : McGraw-Hill.

----------. (2002). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

Hendrati, I.M, dan Hera, A. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Pada Saat Krisis Di Kota Surabaya. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No.1.

Hermawan, I. (2012). Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal MIMBAR*, Vol.28, No.2.

Kuncoro, Mudrajat. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta.

----------. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga

Mangkoesoebroto, Guritno. (2000). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mankiw, N.G. (2008). *Makro Ekonomi, Edisi ketujuh*. Jakarta: Erlangga.

Nanga, Muana. (2001). *Makro ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Rasidin, S dan Bonar, S. (2009). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Bandung: Prisma.

Sugiyanto. (2010). Analisis Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen*, Vol.1, No.2, 202-203.

Sukirno, Sadono. (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. (2002). *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE- UGM.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordahus. (2001). *Ilmu Makroekonomi, Edisi Ketujuhbelas*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Suharto, E. (2014). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Saputra dan Ni Putu. (2015). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah*.

Pantjar, S dan saktyanu, KD. (2003). *Produk Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan*. Jakarta: Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

Permana dan Arianti. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2004-2009*.

Todaro, M. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

----------. (1995). *Ekonomi Untuk Negara Berkembang.* Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Toni dan Sudarsana. (2015). *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB, Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*.

Wibisono, Yusuf. (2005). Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.02.

Wong Desmiwati. (2009). *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.

Windia, W. (2015). Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan di Bali. *Jurnal Piramida*, Vol. XI, No.1.

Yustie, R dan Unggul H. (2012). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, XXIV, No.1.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Ninuk Dwiastuti*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Peranan perbankan sangat penting bagi masyarakat karena bank merupakan mitra yang berhubungan langsung pada masyarakat, sehingga bank dapat dikatakan penggerak perekonomian hal ini disebabkan peran perbankan sangat besar dalam menentukan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder selama tujuh tahun, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, Regresi linier, uji t dan uji F dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa kredit modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

JEL: I30
Kata Kunci: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM).

1. PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini sudah banyak lembaga – lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa dalam penyimpanan uang bagi masyarakat dengan aman dalam bentuk tabungan. Demikian juga untuk dunia usaha yang dapat meminjam atau kredit dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga – lembaga keuangan yaitu Bank. Dimana Bank sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga dapat menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat.

Untuk pemberian kredit dimana bank hanya memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati – hatian, masyarakat dan bank mempunyai hubungan yang sangat erat dimana masyarakat memerlukan dana dari bank, begitu juga bank yang memerlukan dana dari masyarakat. Pinjaman atau kredit bank dapat disalurkan kepada siapa saja yang memerlukan baik untuk individu maupun bagi dunia usaha.

* Email : ninuk.dwiastuti.r@ekonomi.untan.ac.id

Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha – usaha yang baru. Dalam kredit perbankan yang berperan dalam meningkatkan konsumsi salah satunya. Adapun penggunaan kredit perbankan dapat dikelompokan sebagai berikut:

- Kredit Konsumtif
- Kredit Produktif yang terdiri dari :
    - Kredit Investasi
    - Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja yang digunakan untuk menambah modal demi memperluas usaha bisnisnya yang digunakan untuk biaya operasional usaha bisnisnya. Dengan Kredit modal kerja ini dapat membantu usaha bisnisnya baik usaha berskala besar, berskala menengah maupun yang berskala kecil terutama yang membutuhkan dana yang cukup besar. Kredit Modal Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, hanya ada di tahun tertentu kredit modal kerja mengalami penurunan di beberapa Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dapat dilihat bahwa Kredit Modal Kerja pada tahun 2013 terjadi penurunan hanya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak dan pada tahun 2014 terjadi penurunan pada Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Pada tahun 2015 terjadi penurunan yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Singkawang dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 hanya di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak, hal ini dikarenakan perekonomian di daerah tersebut tidak berkembang dengan pesat dan prospeknya kurang menguntungkan sehingga tidak akan mendirikan usahanya di daerah tersebut. Adapun kredit modal kerja setiap tahunnya terus meningkat adalah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau, dimana kegiatan perekonomian di daerah masing – masing tersebut berkembang pesat dengan banyak dibukanya usaha – usaha baru yang pasti akan memerlukan banyak tenaga kerja maka otomatis perusahaan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Selain kredit modal kerja yang diberikan bank ada juga kredit investasi yang dikeluarkan oleh bank untuk perluasan usaha sehingga usaha yang sedang digeluti masyarakat menjadi tersebar luas dibeberapa tempat atau untuk pendirian usaha yang baru dari perluasan usaha tersebut maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga akan banyak memerlukan tenaga kerja. Kredit investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya sangat bervariasi atau berfluktuatif dari tahun 2012 – 2018 dimana setiap Kabupaten sangat bervariasi hal ini dapat dilihat satu persatu setiap tahunnya antar Kabupaten ada yang turun ada juga yang mengalami kenaikan di tahun – tahun tertentu.

Pada tahun 2014 kredit investasi yang mengalami penurunan adalah kabupaten Mempawah, Kabupaten sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten dan Kota Singkawang. Sedangkan pada tahun 2015 kredit investasi yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan tahun 2016 kredit investasi yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan prospek pada setiap Kabupaten tersebut kurang berkembang sehingga mereka tidak membuka usaha baru, lebih baik mereka membuka usaha

kecil yang hanya memerlukan modal yang tidak terlalu besar, akan tetapi prospeknya lebih menguntungkan. Adapun kredit investasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan adalah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan perekonomian berkembang sangat pesat, sektor – sektor usaha yang semakin beragam dan banyak dibukanya usaha – usaha yang baru sehingga akan memerlukan tenaga kerja yang otomatis akan mengurangi pengangguran karena banyak dibukanya lapangan pekerjaan.

Kredit Perbankan ada juga yang disalurkan untuk dikonsumsi secara pribadi yang dinamakan kredit konsumsi yang pemanfaatanya tidak untuk kegiatan usaha maupun untuk pendirian usaha baru. Kredit konsumsi ini banyak digunakan untuk keperluan pribadi saja oleh masyarakat. Kredit konsumsi Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 – 2018 pada umumnya setiap tahun mengalami kenaikan antara lain yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang, hal ini dikarenakan dikarenakan banyak masyarakat yang memanfaatkan kredit konsumsi ini untuk keperluan pribadi misalnya untuk membeli rumah, membeli mobil, membeli motor serta untuk merehap rumah pribadi mereka. Dengan adanya kredit konsumsi ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan kredit konsumsi yang mengalami penurunan hanya terjadi dibeberapa kabupaten Saja, pada tahun 2012 dan 2014 kredit konsumsi yang mengalami penurunan hanya pada Kabupaten Landak, kemudian tahun 2013 kredit konsumsi yang mengalami penurunan yaitu Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2016 kredit konsumsi yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau. Hal ini dikarenakan bunga kredit konsumsi terlalu besar sehingga mereka enggan untuk meminjam kredit konsumsi.

Kredit perbankan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini kredit yang disalurkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat ketimpangan yang terjadi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat berkembang lebih cepat, jika laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka dapat mengakibatkan pengangguran menjadi berkurang. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran merupakan dua indikator yang dapat memperlihatkan gambaran tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di suatu daerah maupun Negara.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 – 2018 setiap tahunnya berfluktuatif. Pada tahun 2016 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada Kota Singkawang dan pada tahun 2018 turun lagi, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunanan lagi pertumbuhan ekonomi yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Kemudian tahun 2015 terjadi penurunan lagi pertumbuhan ekonomi pada daerah kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak dan Kota Singkawang, pada tahun 2016 terjadi lagi penurunan pertumbuhan ekonomi hanya pada Kota Singkawang.

Setiap daerah maupun Negara berusaha keras untuk memcapai laju pertumbuhan ekonomi yang optimal dan dilain sisi berupaya menurunkan jumlah pengangguran. Hampir diseluruh negara di dunia ini menghadapi masalah pengangguran, permasalahan pengangguran telah menghambat. Pembangunan dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat ketimpangan yang terjadi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat berkembang lebih cepat, jika laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka dapat mengakibatkan pengangguran menjadi berkurang.

Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran merupakan dua indikator yang dapat memperlihatkan gambaran tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di suatu daerah maupun Negara. Setiap daerah maupun Negara berusaha keras untuk memcapai laju pertumbuhan ekonomi yang optimal dan dilain sisi berupaya menurunkan jumlah pengangguran. Hampir diseluruh negara di unia ini menghadapi masalah pengangguran, permasalahan pengangguran telah menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan adanya tambahan pendapatan yang dapat mempengaruhi daya beli terhadap barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebaiknya meningkat dari tahun ke tahun karena pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang penting dalam memberikan gambaran terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melihat angka tingginya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah atau Negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka dapat dikatakan bahwa pembangunan membaik, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu dibutuhkan banyak tenaga kerja.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap maka tingkat pengangguran menurun sedangkan disisi lain pendapatan masyarakat meningkat. Otonomi daerah yang sedang digalakan oleh pemerintah, maka pembangunan daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat tapi benar – benar daerah mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan potensi yang ada di daerahnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan. Salah satu indikator tentang kesejahteraan masyarakat yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 – 2013 mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2014 pada umumnya semua Kabupaten dan Kota Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan hanya Kota Pontianak saja yang tidak mengalami penurunan. Kemudian tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan hanya pada Kota Pontianak dan Kota Singkawang saja, sedangkan untuk tahun 2016-2018 pada umumnya indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota mengalami kenaikan. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi maka akan dapat mengukur capaian pembangunan manusia yang komponen dasarnya kualitas hidup.

Berbagai ukuran untuk melihat pembangunan manusia antar wilayah atau Negara dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara itu tergolong negara maju, negara berkembang dan negara terbelakang serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup

manusia yang dapat menjelaskan hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kredit Bank

Kredit yang berasal dari bahasa Yunani yaitu " *credere* " yang berarti kredit mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit bearti memperoleh. Unsur – Unsur didalam pokok perkreditan menurut Santoso mengandung resiko-resiko meliputi:

- Kepercayaan yaitu keyakinan bank atas uang yang dipinjamkan tersebut akan diterima kembali pembayaran pokok dan bunganya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- Waktu yaitu pertambahan nilai uang yang diterima saat ini dengan masa yang akan dating dimana tentunya nilai uang akan lebih tinggi dari pada nilai uang di waktu yang akan dating.
- Degree of risk yaitu resiko yang terjadi akibat kesenjangan waktu dari pemberian pinjaman tersebut. Asuransi resiko ini didasarkan pertimbangan bahwa dengan semakin lama kredit diberikan maka akan semakin tinggi tingkat resikonya karena kemampuan manusia untuk menerobos masa dating selalu ada unsure ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi pada masa sekarang. Dengan adanya unsure resiko ini maka diperlukan cover jaminan yang memadai.

Kredit merupakan salah satu modal perusahaan, penggunaan modal tersebut berdasarkan dari persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dipahami sebagai kebijakan kredit yang mengarah kepada kebijakan bank secara keseluruhan. Menurut Santoso diversifikasi pemberian kredit terutama yang menyangkut pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), pedagang komersial, investasi dan lain-lain ada beberapa faktor yaitu :

- Pembatasan limit bagi masing – masing sektor perdagangan. Posisi mismatch antara sumber dana masyarakat dengan jangka waktu pemberian kredit, terutama untuk kredit investasi di sektor property.
- Kebijakan yang menyangkut fee based income terutama pemungutan provisi kredit untuk menunjang operasional perbankan.
- Review secara periodik terhadap kebijakan kredit tersebut untuk mengantisipasi setiap perubahan faktor ekonomi makro.

Jadi fungsi dari kredit untuk merangsang kedua belah pihak dengan tujuan pencapaian kebutuhan dari bidang usaha maupun kehidupan sehari – hari. Adapun tujuan dari pemberian kredit dari pihak perbankan kepada masyarakat selain mencari keuntungan diharapkan mampu untuk menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia. Menurut kasmir tujuan pemberian kredit yaitu :

- Mencari Keuntungan
  Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- Membantu Usaha Nasabah
  Tujuan lainnya adalah untun membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- Membantu Pemerintah

ISBN: 978-602-53460-5-7

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- Penerimaan pajak dari keuntungan yang dieroleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- Menghemat devisa Negara.
- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur, kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor, bangunan dan lain – lain. Menurut pendapat Kasmir bahwa kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit ini ditujukan untuk nasabah yang kekurangan modal kerja untuk usahanya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal adalah tingkat penjualan dan perputaran modal kerja. Jika nasabah menginginkan kredit modal kerja berkesinambungan maka pihak bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja revolving yaitu kredit yang dapat diperpanjang masa berlakunya setelah jatuh tempo. Ada juga fasilitas kredit modal kerja transaksional yaitu kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh bank bagi nasabah yang tidak memerlukan kredit modal kerja secara terus menerus tetapi hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Menurut Riva'I manfaat dari kredit modal kerja yang diberikan bank adalah sebagai berikut :

- Modal awal untuk membangun sebuah usaha dari nol mulai dari pendirian usaha maupun keperluan – keperluan usaha.
- Modal bias disimpan sehingga bias digunakan sewaktu – waktu ketika dibutuhkan.
- Bunga kredit hanya dikenakan pada uang yang sudah ditarik sehingga besarnya pembayaran kredit bias diatur.
- Pembayaran secara bertahap dan bulanan yang relative ringan tetapi jika belum membayar setelah jatuh tempo maka akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati.

2.3. Kredit Investasi

Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk dipergunakan melakukan investasi dengan membeli barang – barang modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai pengadaan barang – barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek. Menurut Firdaus dan Aryanti bahwa kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang – barang untuk modal tetap dan tahap lama seperti tanah dan bangunan, mesin – mesin, kendaraan dan sebagainya. Contohnya untuk membeli mesin – mesin, membeli tanah, membangun tempat usaha maupun kendaraan yang menunjang keberlangsungan usaha. Adapun manfaat dari penggunaan kredit investasi bagi nasabah sebagai berikut :

- Membantu nasabah dalam penyediaan kebutuhan modal. Mengajukan kredit investasi ini untuk meringankan kebutuhan modal tambahan disamping modal sendiri yang sudah ada sehingga debitur memiliki modal yang cukup untuk mengelolah usahanya agar lebih berkembang.
- Perekonomian perusahaan lebih stabil. Keuntungan usaha yang masih dalam jumlah terbatas menjadi kendala ketika ada kejadian yang tidak diinginkan atau mendadak. Keuntungan yang relatif kecil namun jumlah pengeluaran usaha setiap tahunnya terus ada dan bahkan meningkat. Membuat pengusaha memutuskan untuk mengakhiri usaha tersebut secara bertahap tetapi dengan memperbaiki sektor keuangan perusahaan akan sangat terbantu melalui kredit investasi yang mampu menguatkan sektor keuangan dengan lebih baik untuk stabil.
- Membangun semangat mengembangkan usaha. Ketersediaan modal usaha yang terbatas membuat pengusaha tidak berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Pasrah dengan kondisi perusahaan yang stagnan dan besarnya keuntungan yang tidak banyak atau nyaris tidak ada dengan begitu secara perlahan akan membuat usaha mudah tutup. Namun ketika mengajukan kredit investasi maka kebutuhan dana akan dengan mudah terpenuhi. Kemudian kesempatan untuk memperbesar skala usaha semakin luas dan semangat mengembangkan usahanya semakin memuncak.
- Dapat melakukan inovasi produk yang lebih beragam. Dengan adanya kredit investasi pengusaha akan lebih mudah dalam berinovasi untuk memperbaiki kualitas dan jenis barang yang lebih beragam karena adanya tambahan modal untuk membeli keperluan lain yang dibutuhkan.

2.4. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Hal ini dikarenakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Menurut Bank Indonesia kredit konsumsi adalah pinjaman yang diberikan dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

Kemudian menurut Kasmir bahwa Kredit konsumsi ini bersifat tidak pruduktif karena tidak ada pertambahan dalam barang dan jasa yang dihasilkan sebab hanya digunakan oleh seseorang untuk keperluan pribadi sehingga suku bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah pada kredit untuk kegiatan konsumsi lebih besar dibandingkan dengan suku bunga kredit yang diberikan untuk tujuan usaha. Contoh penggunaan kredit konsumsi yaitu untuk membeli rumah, membeli kendaraan pribadi serta untuk membeli perabotan rumah tangga.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat.Menurut Sukirno (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi untuk masyarakat bertambah. Menurut Robinson Tarigan (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yangterjadi di daerah tersebut yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah dalam makro ekonomi yang sangat

berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah.perkembangan terhadap barang dan jasa sebagai akibat dari pertambahan faktor – faktor pruduksi dan tidak selalu diikuti oleh pertambahan pruduksi.

Ada beberapa macam teori pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- *Teori Shcumpeter*. Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi bahwa pengusaha akan terus melakukan pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Pembaharuan tersebut dapat berupa menciptakan barang – barang baru, meningkatkan efisiensi dalam memproduksi/inovasi tersebut, pengusaha akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang terbaru akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi Negara. Maka pendapatan masyarakat akan menjadi bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan – perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dan melakukan penanaman modal baru (Sukirno Makro Ekonomi Pengantar, 2015).
- *Teori Solow-Swan*. Pengaruh tingkat akumulasi modal atau tabungan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah/negara. Menurut Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa akumulasi modal dapat terjadi jika sebagian pendapatan yang diterima tersebut ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Model ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk , akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling beriteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat tetapi hanya sementara. Kenaikan dalam tingkat tabunagan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian memelihara tingkat tabungan tingginya, sekaligus perekonomian itu menjaga persediaan modal yang besar dan tingkat output tinggi tetapi tidak dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya.
- *Teori Keynes*. Pendapatan Nasional dan output yang dihasilkan bahwa investasi bruto merupakan komponen dari produk domestic bruto (PDB) dalam rumus PDB = C + I + G +NX dimana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran Pemerintah NX adalah Net ekspor. Dari rumus tersebut dapat dikaitkan dengan PDRB suatu wilayah yang mana investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan yaitu pengeluaran untuk membeli mesin pabrik yang baru dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Jika semua komponen itu berjalan dengan baik maka akan meningkatkan PDRB suatu daerah dan akan berdampak pada naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Ada tiga indikator indeks pembangunan manusia yakni: kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Menurut Todaro (2006) bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka akan meningkatkan kesejahteraannya, Namum kesejahteraan mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka cenderung akan menurunkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia, Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitas tersebut untuk

kesejahteraannya. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya.

Menurut Pendapat Tambunan (2001) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan sebutan *Human Development Indeks* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas hasil pembangunan manusia, yakni derajat perkembangan manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu Negara atau wilayah dapat menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali) dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli. Untuk menentukan kualitas hidup, Indeks Pembanginan Manusia (IPM) mempunyai tiga pendekatan dalam dimensi dasar, yang mencakup umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidup yang layak. Sedangkan untuk mengukur ketiga dimensi dasar tersebut adalah sebagai berikut;

- Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir.
- Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
- Untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

Adapun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 0 – 100, hal ini menunjukkan bahwa skala 0 berarti pembangunan manusia rendah dan nilai 100 menunjukkan bahwa pembangunan yang tinggi. Menurut Todaro (2006) Indeks Pembangunan manusia (IPM) dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

b. 0,00 - 0,499 dikatagorikan pembangunan manusia rendah
c. 0,50 -.0,799 dikatagorikan pembangunan manusia sedang
d. 0,80 – 1,000 dikatagorikan pembangunan manusia tinggi

Ada tiga komponen Indeks pembanguanan Manusia (IPM) yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir dan tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata – rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) dan tingkat kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dalah deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karekteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder selama tujuh tahun mulai tahun 2012 sampai tahun 2018. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian data tersebut diolah dengan computer melalui program software economic views (E- views 9).

3.3. Metode Analisis

- Data Panel

Data Panel adalah gabungan dari data time series dan data cross section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun time series. Dalam penelitian ini yang menjadi data time series adalah kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, sedangkan data cross section adalah data 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Barat.

- Regresi Linier Berganda / Regesi Linier Multipel

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

dimana :

Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi
b_0 = Konstanta / intercept
b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
X_1 = Kredit Modal Kerja
X_2 = Kredit Investasi
X_3 = Kredit Konsumsi
e = Error term

- Regresi Linier / Regresi Sederhana

$$Y_{it} = a + bx + e \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

dimana :

Y = Kesejahteraan Masyarakat
a = Konstanta / intercep
b = Koefisien Regresi
X = Pertumbuhan Ekonomi
e = Error term

Uji Statistika

a. Uji t
   Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat kepercayaan/Keyakinan 95 %.
b. Uji F
   Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan/keyakinan 95 %.
c. Koefisien Determinasi (R^2)
   Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel bebas (independen) terhadap naik turunnya variabel terikat (dependen). Gunanya koefisien determinasi

(R^2) adalah untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen) dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 maka kemampuan variabel bebas (independen) dalam memberikan informasi atau pengaruh akan semakin baik dan jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) amat terbatas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan program E-Views maka didapat hasil perhitungan regresi linier berganda data panel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Prob.
C	2,093602	0,2635
Kredit Modal Kerja (X_1)	0,538475	0,6924
Kredit Investasi (X_2)	0,085922	0,0332
Kredit Konsumsi (X_3)	0,092044	0,0027

Sumber : Data Olahan E-Views

Persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = 2{,}093602 + 0{,}538475\ X_1 + 0{,}085922\ X_2 + 0{,}092044\ X_3$$

Hasil Regresi Linier Berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta (C)
   Nilai koefisien konstanta (C) sebesar 2,093602 nilai tersebut memiliki arti bahwa jika kredit modal kerja, kedit investasi dan kredit konsumsi tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,093602 persen.
b. Kredit Modal Kerja
   Nilai koefisien kredit modal kerja sebesar 0,538475 artinya jika kredit modal kerja mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,538475 persen dengan asumsi kredit investasi dan kredit konsumsi tetap.
c. Kredit Investasi
   Nilai koefisien kredit investasi sebesar 0,085922 artinya jika kredit investasi mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,085922 persen dengan asumsi kredit modal kerja dan kredit konsumsi tetap.
d. Kredit Konsumsi
   Nilai koefisien kredit konsumsi sebesar 0,092044 artinya jika kredit konsumsi mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,092044 persen dengan asumsi kredit modal kerja dan kredit investasi tetap.

Uji Statistika

Uji t digunakan untuk menguji apakah kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing – masing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2. Uji t

Variabel	t- Statistik	Prob.	Keputusan
Kredit Modal Kerja	0,397095	0,6924	Tidak Signifikan
Kredit Investasi	2,706523	0,0332	Signifikan
Kredit Konsumsi	3,108384	0,0027	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-Views.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa: (1) kredit modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, (2) kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, (3) kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh secara simultan atau serempak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan perhitungan didapat nilai F-Statistik sebesar 2,673549 dengan Probabilitas sebesar 0,000850 hal ini menunjukan bahwa kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di provinsi Kalimantan Barat.

Koefisien Diterminasi (R^2) adalah untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel-variabel dependen. Hasil dari koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,769538 atau 76,9538% dari variabel kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi mampu menjelaskan pegaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sisanya 23,0462 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Regresi Linier/Regresi Sederhana

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Linier

Variabel	Koefisien	Prob.
C	12,32639	0,0706
Pertumbuhan ekonomi	4,239069	0,0096

Sumber : Data Olahan E-Views.

sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 12,32639 + 4,239069 X$$

Hasil regresi linier dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (C)
   Nilai konstanta sebesar 12,32639 artinya jika pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan maka kesejahteraan masyarakat sebesar 12,32639 point.
b. Pertumbuhan Ekonomi
   Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 4,239069 artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan satu persen maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 4,239069 point.

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4. Uji t

Variabel	t-Statistik	Prob.	Keputusan
Pertumbuhan Ekonomi	2,642926	0,0096	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-Views

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,967826 atau 96,7826 persen pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan sisanya sebesar 3,2174 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Kredit Modal kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kredit modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika kredit modal kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ika Syahfitria bahwa Kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kredit modal kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan kredit modal kerja pertumbuhannya setiap tahun kecil atau pertumbuhannya lambat disebabkan belum adanya ekspansi usaha dan investasi diakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga tertahannya ekspansi usaha. Kemudian kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh bank banyak digunakan dalam usaha yang berskala besar dan jarang yang menggunakan untuk skala menengah dan skala kecil serta UMKM antara lain untuk usaha pedagang kaki lima, usaha rumah tangga dan lain - lain yang bisa meningkatkan sektor riil serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk hal usaha menengah, kecil dan usaha mikro masyarakat kurang berminat untuk menggelutinya dikarenakan masyarakat kurang tertarik untuk melakukan pinjaman kredit dari bank karena besarnya resiko jika tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, jaminan mereka tidak punya dan masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari kredit modal kerja.

Perbankan menyalurkan kredit modal usaha dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menambah modal usaha atau untuk modal awal usaha. Kredit modal kerja dapat digunakan untuk pengadaan bahan baku, sebagai upah untuk karyawan serta untuk bahan pendukung. Dengan tingginya kredit modal kerja yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat maka akan membantu mengembangkan usahanya jika mereka kekurangan modal, sehingga masyarakat akan lebih bergairah dalam mengembangkan usaha yang berdampak pada omzet usahanya. Berdasarkan data tahun 2012 – 2018, rata-rata kredit modal kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang

tertinggi adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Hal ini dikarenakan masyarakat di daerah tersebut menggunakan kredit modal kerja untuk modal awal usaha atau sebagai penambahan modal kerja. Perkembangan kredit modal kerja di daerah tersebut menunjukan adanya peningkatan usaha sehingga akan meningkatkan omzet dan bila terjadi terus menerus maka secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kredit modal kerja yang terendah adalah Kabupaten Landak, Kabupaten sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara, hal ini dikarenakan di daerah tersebut perekonomiannya berjalan dengan sangat lamban sehingga akan memperlambat perkembangan sektor riil. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut perekonomiannya telah mengalami perkembangan ekonomi serta mencapai kemakmuran yang lebih tinggi.

Pengaruh Kredit Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kredit investasi berpengruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika kredit investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan Khairuna menyatakan bahwa kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Kredit investasi dikeluarkan oleh pihak bank untuk membantu masyarakat yang memerlukannya terutama untuk keperluan rehabilitasi atau perluasan usaha, pendirian pabrik atau usaha baru, dengan kredit investasi ini masyarakat dapat membeli atau melengkapi mesin – mesin untuk kegiatan produksi yang dihasilkanan penunjang usaha, melalui kredit investasi masyarakat membeli semua yang dibutuhkan untuk kegiatan usahanya. Berdasarkan data tahun 2012 – 2018, bahwa rata-rata kredit investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tertinggi adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang dan Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan kredit investasi menunjukan trend yang meningkat pada daerah tersebut dan peningkatan ini berdampak pada investasi yang menunjukan kinerja yang cukup baik.

Peningkatan kredit investasi terjadi pada sektor pertanian, kehutanan terutama subsektor perkebunan kelapa sawit, yang masih banyak permintaannya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri adalah kelapa sawit/CPO. Sedangkan rata-rata kredit investasi yang terendah adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi. Hal ini dikarenakan daerah tersebut perekonomiaan masih lambat sehingga berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tertinggi adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terendah adalah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang. Jadi umumnya kalau rata-rata kredit investasi besar maka rata-rata pertumbuhan ekonomi juga tinggi.

Dengan memperluas ruang usaha maka lebih banyak lagi produksi yang dihasilkan sehingga menimbulkan kegiatan produksi berskala besar sehingga akan banyak memerlukan tenaga kerja

otomatis akan membuka lapangan pekerjaan dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Perkembangan kredit investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 - 2018 menunjukan trend yang positif.

Pengaruh Kredit Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika kredit konsumsi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan khairuna bahwa kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kredit konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan penyaluran kredit ini bertujuan untuk konsumtif, kredit konsumsi ini ditujukan untuk individu atau perorangan dan kelompok bukan untuk kegiatan usaha tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang konsumtif. Kredit konsumsi setiap tahun mengalami peningkatan terutama digunakan oleh masyarakat untuk kredit rumah/apartemen dan kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan data tahun 2012 – 2018 bahwa rata-rata kredit konsumsi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tertinggi adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit ini untuk individu atau perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, yang paling banyak digunakan untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain - lainnya.

Selain itu kredit konsumsi juga dipengaruhi oleh adanya perayaan hari besar misalnya hari raya lebaran, hari natal, perayaan tahun baru dan lain-lain, sehingga masyarakat memerlukan uang tunai untuk membeli kebutuhannya. Sedangkan rata-rata kredit konsumsi yang terendah adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara.Untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya da Kota Singkawang. Hal ini dikarenakan daerah tersebut perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan sektor riil berjalan dengan lancar. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terendah adalah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang.

Tingginya permintaan kredit konsumsi ini karena terdorong bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri walaupun dengan mencicil mereka tidak lagi mengontrak rumah untuk tempat tinggal, karena banyak masyarakat lebih memilih untuk membeli rumah secara kredit dengan pinjaman di bank dari pada membeli rumah secara tunai yang sangat memerlukan waktu yang lama karena mereka harus menabung terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang terlalu lama dalam menyediakan uang yang cukup besar untuk membeli sebuah rumah.

Dengan adanya kredit perumahan ini sangat membantu masyarakat, hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama maka akan dapat memiliki rumah yang diinginkan jika pengajuan disetujui serta disepakati dengan syarat membayar angsuran setiap bulannya. Jadi masyarakat tidak perlu untuk menunggu terlalu lama untuk menabung untuk membeli rumah tetapi pada saat sekarang ini dalam membeli rumah bisa dilakukan secara kredit dengan meminjam uang di bank maka rumah akan didapat tetapi dengan syarat - syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh bank.

Kredit konsumsi ini sangat membantu untuk keperluan yang mendesak, dengan adanya kredit konsumsi ini maka permintaan barang akan meningkat hal ini menyebabkan produksi semakin tinggi sehingga berdampak pada semakin tinggi omzet maka akan banyak memerlukan tenaga kerja otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka luas. Dengan banyaknya permintaan maka produksi juga harus ditingkatkan hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka kesejahteraan masyarakat juga mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akan dapat memenuhi kehidupan yang baik, dari sisi yang lain jika pendapatan masyarakat meningkat maka akan berdampak pada pengangguran yang semakin berkurang.

Berdasarkan data tahun 2012 – 2018 bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tertinggi adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut perekonomiannya telah mengalami perkembangan ekonomi serta mencapai kemakmuran yang lebih tinggi. Semakintinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten sanggau, Kabupaten Bengkayang. Hal ini dikarenakan perekonomian didaerah tersebut masih berjalan sangat lambat. Angka pertumbuhan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemakmuran suatu daerah, bukan hanya karena daya beli masyarakat yang rendah tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 - 2018 yang tertinggi adalah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan indeks pembangunan manusia dalam suatu Negara maupun daerah menunjukan sejauh mana Negara atau daerah mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan antara lain angka harapan hidup, pendidikan dan tingkat konsumsi dan pengeluaran yang mencapai standar hidup yang layak. Rata-rata kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terndah adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sekadau. Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan dan hidup layak. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saling berkaitan satu sama lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi berpengaruh positif terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan saja dari tingginya pertumbuhan ekonomi namun masih perlu dibarengi dengan kebijakan yang lain yang mengarah pada terciptanya pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya.

5. KESIMPULAN

Kredit modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan kredit modal kerja pertumbuhannya lambat sehingga tertahannya ekspansi usaha dan investasi. Kredit modal usaha banyak digunakan dalam usaha berskala besar dan jarang digunakan usaha yang berskala menengah dan berskala kecil.

Kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan dengan penyaluran kredit investasi akan memperluas usaha maka lebih banyak lagi produksi yang dihasilkan sehingga menimbulkan kegiatan produksi berskala besar maka akan banyak memerlukan tenaga kerja otomatis akan membuka lapangan pekerjaan dengan demikian akan mengurangi pengangguran.

Kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit konsumsi untuk individu atau perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan yang paling banyak digunakan untuk pembelian rumah, kendaraan dan lain – lainnya. Dengan adanya kredit konsumsi maka permintaan akan meningkat sehingga produksi juga harus ditingkatkan maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik, dari sisi lain jika pendapatan masyarakat meningkat maka akan berdampak pada pengangguran yang semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A, Sudjana M. (2002). *Metoda Statistika*. Bandung: PT.Tarsito.

BPS Indonesia. (2007). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta.

Bank Indonesia. (2017). *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Vol. 15 No. 9.

Drs, Ismail, M.A. (2010). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Darman. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun. *Journal The Winners*, Vol. 14 No. 1, Maret 2013: 1-12.

Darryl Mario Agung. (2017). *Pengaruh Kredit Perbankan Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Unversitas Katolik Parahyangan.

Ekawarna & Fachruddiansyah. (2010). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada.

Firdaus, H.R & Aryanti, M. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Gujarati, D.N & Gilarso, D.T. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius.

Porter, D.C . (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasan, M. Iqbal. (2003). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasibuan, D.H. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ika Novita Wardhani. (2011). Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang (Periode 2001-2010). *Jurnal Ilmiah FEB Unversitas Brawijaya Malang*,Vol 1, No, 1.

Ika Syahfitri. (2013). *Analisis Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.

Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.

Khairuna, dkk. (2017). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Modal Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol 3 No 2 Tahun 2017.

Latumaerissa, J.R. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba Empat.

Mankiw, N.G. (2000). *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, N.Gregory. (2008). *Teori Makro Ekonomi*.Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Marcelina, Ayu Linda. (2012). *Analisia Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Semarang*. Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Nanga, Muana. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Raja Grafika Persada

Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Sugiyono, P.D. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Ruddy Tri. (2006). *Manajemen Kredit Bank*. Jakarta: PT. Gramedia.

Samuelson dan Nordhaus. (2001). *Ilmu Ekonomi Makro I*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Samuelson, Paul, et all. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi (terjemahan)*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Simanjutak, Payaman, J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

---------- (2007). *Metode Penelitian Bisnis.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

---------- (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

---------- (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi*.

Syafrizal. (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indoesia Bagian Barat. *Majalah Prisma*, No.3 Maret 1997, hal 27-38.

Sugiyanto. (2010). Analisis Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen*, Vol.1, No.2, 202-203

Sukirno, Sadono. (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Suryana, (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sumodiningrat, Gunawan. (2002). *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE- UGM.

Susetyo, Didiek. (2001). Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3 No.1.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordahus. (2001). *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi Ketujuhbelas*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Todaro, Michael. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

----------. (1995). *Ekonomi untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Wibisono, Yusuf. (2005). Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.02.

Wijaya, F & Soetatwo Hadiwigeno. (1999). *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia

Yarlina Yacoub*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Hana Mutiaradina
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kesejahteraan petani terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data skunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan data pooled pada 32 Provinsi di Indonesia tahun 2009 – 2019. Analisis data menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah riil buruh tani pedesaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia. Nilai tukar petani (NTP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di Indonesia. Upah buruh tani pedesaan dan Nilai tukar petani (NTP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia.

JEL: I30
Kata Kunci: Upah Buruh Tani, NTP dan Kemiskinan Perdesaan

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemiskinan masih merupakan masalah mendasar, karena jumlah penduduk miskin masih cukup besar (24,79 juta jiwa), dan sebagian besar tinggal di perdesaan. Data BPS (2020), di tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan 12,60% dan di perkotaan 6,56%. BPS juga mencatat sebanyak 49,41% Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis, apalagi dilihat dari RT miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan. Menurut Ruauw (2010), mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satu caranya adalah dengan bertani.

Sebagai negara yang mempunyai wilayah relatif luas dengan lahan pertanian cukup menjanjikan, semestinya penduduk desa yang tinggal di perdesaan dapat hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan khususnya para petani/buruh tani masih banyak yang Miskin (Warto, 2015). Saragih (2017) mengatakan bahwa petani memang selalu identik dengan kemiskinan. Todaro dan Smith (2011) juga membuat generalisasi valid tentang kemiskinan, bahwa sebagian besar orang miskin hidup di daerah pedesaan, dan aktivitas utama mereka berada pada

*E-mail: yyarlina@gmail.com

sektor pertanian. Dua pertiga orang miskin menjalani kehidupan dari pertanian subsisten, baik sebagai petani kecil atau sebagai buruh tani berupah kecil.

Kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan, penduduk yang miskin berarti tidak sejahtera. Kesejahteraan tergambar dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya daya beli. Habibullah (2020), mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia terutama kemiskinan pedesaan yaitu yang berhubungan dengan indikator kesejahteraan petani, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), upah yang diterima buruh tani, inflasi, pendapatan perkapita. NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan rasio atau perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase (BPS, 2019).

Suharyanto (2019) mengatakan upah buruh tani naik, angka kemiskinan turun signifikan. Data BPS menyebutkan upah nominal harian buruh tani pada bulan september 2018 naik 0,19%, sementara jumlah penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang dengan penurunan mencapai 0,28 juta orang atau menurun sebesar 0,16%. Menurut Habibullah (2020), berdasarkan data BPS, tercatat ada kenaikan upah buruh di bulan September 2019 sebesar 1,02% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2019. Jadi perubahan rata-rata upah buruh per hari atau kenaikan upah ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan di bulan September dari 9,41% menjadi 9,22%.

Menurut Habibullah (2020), NTP yang meningkat akan menurunkan kemiskinan. Tahun 2019 kemiskinan turun menjadi 9,22%, sementara NTP secara nasional berada di angka 104,16 atau melebihi 100. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Saragih (2017) mengemukakan, kemiskinan perdesaan meningkat walau NTP naik. Menurut Saragih, Rilis BPS Juli 2017 menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin untuk kurun waktu September 2016 - Maret 2017, dari angka 27.76 juta jiwa ke 27,77 juta jiwa. Dalam kurun waktu yang sama Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 100.65 atau naik 0.38 persen dibandingkan sebelumnya sebesar 100.53. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani naik sebesar 0,26 persen lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani sebesar 0,14 persen.

Hendriadi (2017) mengatakan NTP bukanlah satu-satunya indikator yang dapat menilai kesejahteraan petani. Upah buruh tani juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, karena upah buruh tani menunjukkan kemampuan daya beli petani. Simatupang & Maulana (2008) dan Warto (2015) mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan petani ditentukan juga oleh struktur pendapatan petani yang salah satunya tergambar dari upah yang diterima buruh dan keragaan tingkat daya beli rumah tangga petani.

Berdasarkan uruaian diatas, kesejahteraan petani di pedesaan yang tergambar dari upah buruh tani di perdesaan NTP dan yang seharusnya mempengaruhi kemiskinan di perdesaan. NTP yang meningkat kemiskinan pedesaan turun, upah buruh tani meningkat maka kemiskinan pedesaan turun. Fenomena yang terjadi dari data yang diamati di Indonesia, kondisi ideal tidak selalu terjadi. Pada tahun-tahun tertentu jelas tergambar mempunyai keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya sesuai dengan kondisi ideal, dan dalam tahun tahun tertentu tidak sesuai dengan kondisi ideal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut,

sehingga peneliti ingin menelaah lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi dengan judul: Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS (dikutif dari bps.go.id) menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen dalam Nanga (2006) menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*).

Upah adalah balas jasa baik berupa uang atau barang yang diberikan langsung kepada buruh untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan, dan ini merupakan upah nominal. Upah yang disajikan adalah upah yang diberikan dalam bentuk uang perorang perhari. Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan (BPS, 2019).

Nilai Tukar Petani (NTP) menurut BPS (bps.go.id), merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Secara teori, NTP adalah untuk mengukur kesejahteraan petani yaitu untuk melihat pendapatan dan pengeluran petani, jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran maka kesejahteraan petani akan bertambah, begitupula sebaliknya. Berdasarkan rasio ini, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi NTP maka semakin baik profit yang diterima petani, atau semakin baik posisi pendapatan petani, (Hendayana, 2002).

2.1. Pengaruh Upah Buruh Tani Perdesaan terhadap kemiskinan Perdesaan

Menurut Kurniawati A, dkk (2007), upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Jika efektif, upah minimum dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan karena dapat membantu penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Pendapat yang sama tentang upah minimum oleh Acemoglu (2001), upah minimum menggeser komposisi *employment* menuju pekerjaan dengan upah tinggi. Peraturan pasar tenaga kerja ini meningkatkan produktivitas rata-rata dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian tentang dampak pengurangan kemiskinan (Romich & Hill, 2018), UU upah minimum telah menghasilkan hasil yang beragam, paling tidak kenaikan upah minimum telah dikaitkan dengan penurunan kecil kemiskinan.

Pendapat lain mengenai upah minimun dan kemiskinan, bahwa kenaikan upah minimum akan mengakibatkan buruh kehilangan pekerjaan. Gindling dan Terrell (2010) berpendapat bahwa kekakuan upah di pasar tenaga kerja yang disebabkan oleh upah minimum, dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pada gilirannya memberikan kontribusi pada pengangguran dan kemiskinan. Sabia (2014) mempunyai pendapat yang sama, bahwa kenaikkan upah minimum mengakibatkan pada buruh yang mempunyai ketampilan rendah akan kalah bersaing dipasar tenaga kerja, akibatnya menganggur dan miskin.

H_1: X_1 (Upah buruh tani perdesaan) berpengaruh negatif terhadap Y (Kemiskinan Perdesaan).

2.2. Pengaruh Nilai Tukar Petani terhadap Kemiskinan Perdesaan

Secara teori, NTP adalah untuk mengukur kesejahteraan petani yaitu untuk melihat pendapatan dan pengeluran petani, jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran maka kesejahteraan petani akan bertambah, begitupula sebaliknya. Berdasarkan rasio ini, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi NTP maka semakin baik profit yang diterima petani, atau semakin baik posisi pendapatan petani, (Hendayana, 2002).

Perkembangan nilai tukar petani merupakan salah satu penentu tingkat pendapatan rill petani yang juga sering disebut sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani (Simatupang & Maulana, 2008), jika mengalami penurunan maka nilai tukar petani akan berpenagruh negatif terhadap pendapatan petani yang ia dapatkan. Menurut Ruauw (2000), semakin tinggi tingkat NTP maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kehidupan petani.

H_1: X_2 (NTP) berpengaruh negatif terhadap Y (Kemiskinan Perdesaan).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : NTP (X_1), Upah Buruh Tani Perdesaan (X_2). Sedangkan variabel dependennya adalah Kemiskinan Perdesaan (Y). Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis tuangkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat pada gambar 1.

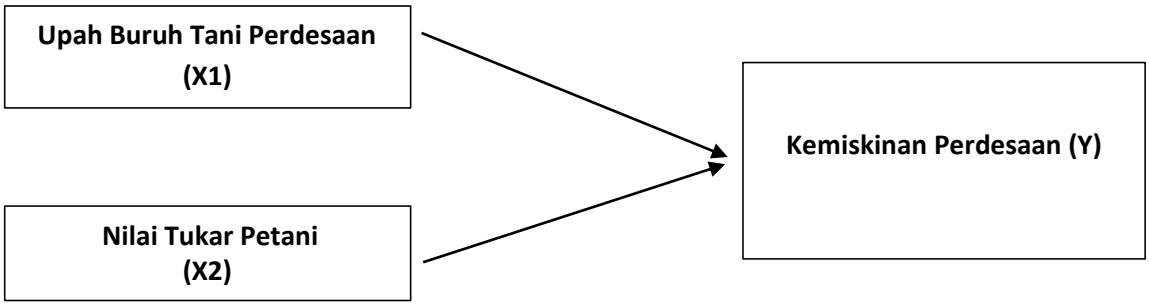

Gambar 1. Model Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian assosiatif. Penelitian assosiatif menurut Sugiyono (2012) adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian assosiatif ini digunakan untuk menemukan hubungan antara Upah Buruh Tani Perdesaan dan Nilai Tukar Petani terhadap Kemiskinan Perdesaan, yang dilakukan secara empiris pada 32 Provinsi di Indonesia, selama 11 tahun (2009-2019), dengan data skunder dari BPS Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel (*pooled data*).

3.1. Metode Analisis

Analisis data menggunakan regresi linear berganda:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad \ldots\ldots (1)$$

Keterangan :

Y = Kemiskinan Perdesaan Provinsi

β_0 = Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
X_1 = Upah buruh tani perdesaan Provinsi
X_2 = NTP Provinsi
i = *Cross Section* (Provinsi di Indonesia)
t = *Time Series* (Tahun 2009-2019)
e_{it} = *error*

3.2. Model Regresi

Untuk menganalisis data panel, ada tiga model regresi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut : *Model Common Effect/Pooled OLS, Model Fixed Effect dan Model Random effect.* Untuk pemilihan model data panel yang paling tepat maka diperlukan serangkaian pengujian secara ekonometrika dalam eviews 8 antara lain : *Redundant Fixed Effects Tests* atau Uji Chow dan Uji *Hausman.*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis model data panel dan uji signifikansi model untuk memilih model yang terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *random Effect Model*. Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 32 Provinsi di Indonesia selama periode 2009 – 2019 (11 tahun) ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi *Random Effect* Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.18328	3.057307	4.639142	0.0000
X1	-0.000102	1.34E-05	-7.636621	0.0000
X2	0.047096	0.024720	1.905216	0.0576
R-squared 0.172893				

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews 7 (2018)

Dari hasil estimasi di atas, maka dapat dibuat model analisis data panel yang di interprestasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 14.18328 - 0{,}000102X_{1it} + 0{,}0470967X_{2it}$$

Koefisien regresi memperlihatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta 14,18328 dapat diartikan bahwa, jika variabel Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) dan Nilai Tukar Petani (X_2) sama dengan nol atau tidak berubah maka Kemiskinan Perdesaan (Y) adalah sebesar 14,18328.

b. Apabila Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) berubah 1 satuan maka Kemiskinan Perdesaan (Y) akan turun sebesar 0,0000102. Nilai probabilitas X_1 sebesar 0,0000 < 0,05, artinya Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y).
c. Apabila Nilai Tukar Petani (X_2) berubah 1 satuan maka Kemiskinan Perdesaan (Y) akan naik sebesar 0,047096. Nilai probabilitas X2 sebesar 0,0578 > 0,05, artinya Nilai Tukar Petani (X_2) tidak signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y).
d. Berdasarkan nilai probabilitas F statistic, nilai 0,0000 < 0,05 artinya secara Bersama-sama Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) dan Nilai Tukar Petani (X_2) signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y).
e. Nilai R-squared menunjukkan Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) dan Nilai Tukar Petani (X_2) dapat menjelaskan hubungannya terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y) sbesar 17,29% sisanya dipengaruhi oleh variable lain di luar penelitian.

4.1. Pengaruh Upah Buruh Tani Perdesaan Terhadap Kemiskinan Perdesaan

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Upah Buruh Tani Perdesaan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Perdesaan. Apabila Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) berubah 1 satuan maka Kemiskinan Perdesaan (Y) akan turun sebesar 0,0000102. Nilai probabilitas X_1 sebesar 0,0000 < 0,05, artinya Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y).

Hal ini dilihat pada nilai koefisien regresi dalam uji t, yaitu X_1 memiliki t hitung sebesar -7.636621dan probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa jika kenaikan dan penurunan Upah Buruh Tani Perdesaan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia. Upah buruh tani pedesaan rendah atau turun maka kemiskinan pedesaan tetap tinggi atau meningkat, demikian sebaliknya, upah buruh tani pedesaan tinggi atau naik dan kemiskinan pedesaan rendah atau turun. Hal ini terbukti dimana propinsi dengan upah buruh tani pedesaan lebih tinggi dan kemiskinan pedesaannya rendah, seperti provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kelimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara. Beberapa provinsi dengan upah buruh tani pedesaan relative rendah tetapi tingkat kemiskinan lebih tinggi, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Papua Barat.

Kenyataan ini secara teori sesuai, karena apabila upah buruh tani pedesaan naik atau relative tinggi maka kemiskinan akan turun, demikian sebaliknya dengan upah buruh tani pedesaan rendah, maka kemiskinan pedesaan akan meningkat. Dan di Indonesia, secara rata-rata upah buruh tani pedesaan tergolong rendah, sehingga wajar sekali masih banyak provinsi di Indonesia tingkat kemiskinan pedesaan masih tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain seperti Kurniawati A,dkk (2007), Acemoglu (2001), Rahayu , dkk (2013), Hidir & Jonyanis (2017) dalam Nisa, dkk (2020)), penyebab utama kemiskinan suatu rumah tangga adalah rendahnya pendapatan yang mereka terima. Tetapi penelitian Tarrel (2010) dan Sabia (2014) berpendapat berbeda, yaitu dengan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan pengangguran, karena terbatasnya kesempatan kerja yang ditawarkan, akibat menganggur, maka kemiskinan akan meningkat.

Rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang petani berakibat pada rendahnya tingkat pengetahuan para petani untuk mengetahui secara luas produksi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Sartika dkk, 2016)

mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat Desa ialah kepemilikan sarana produksi yang masih sangat sederhana, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Yang pada akhrinya jumlah rumah tangga tani tidak semua sebagai pemilik lahan, sebagian adalah pengguna lahan bahkan buruh tani. Lalu pendapatan perkapita para petani yang masih dibawah UMR ataupun yang masih hidup dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pendapat Todaro dan Smith (2011) mengungkapkan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, yang hanya mempunyai mata pencaharian utama yaitu di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Yang sangat umum ialah rata-rata umur para petani yang memiliki umur yang sudah cukup tua dan mereka hanya bergantung pada sektor pertanian saja.

4.2. Nilai Tukar Petani Terhadap Kemiskinan Perdesaan

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Petani berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan. Apabila Nilai Tukar Petani (X_2) berubah 1 satuan maka Kemiskinan Perdesaan (Y) akan naik sebesar 0,047096. Nilai probabilitas X2 sebesar 0,0578 > 0,05, artinya Nilai Tukar Petani (X_2) tidak signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y).

Hal ini dilihat pada nilai koefisien regresi dalam uji t yaitu X_2 sebesar 1.905216 dan probabilitas sebesar 0,0578. Hal ini menunjukkan bahwa jika kenaikan dan penurunan Nilai Tukar Petani berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia. Hal ini terlihat pada data yang tersedia, yang memperlihatkan hubugan antara NTP dan kemiskinan pedesaan searah (tidak sesuai dengan teori). Provinsi-provinsi dengan NTP yang lebih tinggi ternyata tingkat kemiskinan pedesaan juga tinggi, seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi-provinsi yang NTP lebih rendah ternyata tingkat kemiskinan pedesaan juga lebih rendah, seperti Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Maluku Utara.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori umum yang berlaku, yang seyogyanya NTP yang meningkat atau tinggi maka kemiskinan pedesaan akan lebih menjadi rendah atau turun. Yang terjadi di pedesaan di Indonesia adalah daerah-daerah dengan NTP lebih tinggi kemiskinan pedersaan juga lebih tinggi dan daerah daerah dengan nilai NTP lebih rendah, maka kemiskinan juga rendah. Hal ini terjadi karena secara umum nilai tukar petani di Indonesia sebenarnya secara umum masih sangat rendah. Berdasarkan hasil pengamatan, perubahahan NTP selama 11 tahun (2009 sampai 2019) tidak mengalami perubahan yang berarti, malah banyak provinsi mengalami penurunan NTP. Ini menggambarkan bahwa secara rata-rata petani di Indonesia tidak sejahtera, dan walaupun mengalami kenaikkan NTP tidak menaikkan tingkat kesejateraan, karena NTP yang rendah, walaupun mengalami peningkatan nilainya masih rendah. Seperti hasil dari penelitian (Nurjihadi & Dharmawan, 2016) dilihat dari sisi penawaran yang rendah yang menyebabkan pendapatan rendah, penumpukan hutang petani dan kemampuan akumulasi modal yang sangat terbatas yang dipunyai oleh para petani.

Secara keseluruhan hubungan Nilai Tukar Petani dan Kemiskinan Perdesaan ini memiliki hubungan yang kuat, walaupun seharusnya berpengaruh negatif akan tetapi banyak faktor yang membuat hubungan antar 2 variabel ini positif. Seperti yang diketahui walaupun NTP mengalami

kenaikan akan tetapi Kemiskinan Perdesaan juga naik hal ini disebabkan beberapa faktor seperti, SDM yang kurang memadai hingga para petani yang belum mengenal teknologi yang berkembang pesat. Beberapa petani yang memiliki lahan akan tetapi lahan tesebut tidak begitu luas yang pada akhirnya mempengaruhi NTP, hal ini sejalan dengan penelitian dari (Palengkabu dkk, 2019) mengatakan petani yang tidak memiliki pekerjaan lain maka pendapatan yang diperoleh dari usahatani tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Petani yang setiap harinya bekerja 8 jam hingga lebih tetapi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk masa panen.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan mengurangi kemiskinaan perdesaan ialah mengurangi konversi lahan pertanian, seperti hasil penelitian dari (Setiyowati dkk, 2018) mengatakan bahwa peningkatan konversi lahan pertanian akan meningkatkan kemiskinan sektor pertanian, hal tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan di desa terutama dalam sektor pertanian. Peningkatakan produktivitas pertanian adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan perdesaan di sektor pertanian Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: Untuk menaikan harga produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai tukar petani tetapi hal ini pemerintah berperan penting dalam kenaikan harga produk pertanian tersebut. Peningkatan harga produk pertanian dapat dilakukan jika produk pertanian tersebut memiliki nilai ekspor yang tinggi dikarenkan hal ini dapat meningkatkan pendapatan para petani dan perlu meningkatkan kualitas produk tersebut. Begitupula dengan peningkatan produksi tani dalam hasil pertanian dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas SDM yang tersedia dengan melakukan pembimbingan atau program peningkatan kualitas SDM. Pengembangan bibit atau benih yang dapat membantu petani meningkatkan total produksi secara maksimal, sehingga petani dapat meningkatkan total produksi yang akan berdampak pada NTP dan hasil produksi. Hasil penelitian dari (Nashwari dkk, 2016) untuk mengurangi Kemiskinan Perdesaan salah satunya ialah meningkatkan infrastruktur seperti jalan yang sangat berpenpengaruh terhadap penurunan kemiskinan petani, begitupula dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan dana untuk simpan pinjam usaha para petani maupun masyarakat desa lainnya.

5. SIMPULAN

Upah Buruh Tani Perdesaan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Perdesaan. Apabila Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) berubah 1 satuan maka Kemiskinan Perdesaan (Y) akan turun sebesar 0,0000102. Nilai probabilitas X_1 sebesar 0,0000 < 0,05, artinya Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y). Nilai Tukar Petani berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan. Apabila Nilai Tukar Petani (X_2) berubah 1 satuan maka Kemiskinan Perdesaan (Y) akan naik sebesar 0,047096. Nilai probabilitas X2 sebesar 0,0578 > 0,05, artinya Nilai Tukar Petani (X_2) tidak signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y). Secara bersama-sama Upah Buruh Tani Perdesaan (X_1) dan Nilai Tukar Petani (X_2) signifikan terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y) dibuktikan dengan nilai probabilitas F statistic, nilai 0,0000 < 0,05. Dan besarnya pengaruh 17,29% (Nilai R-squared) dan sisanya (82,71%) dipengaruhi oleh variable lain di luar penelitian.

Secara umum upah buruh tani perdesaan di Indonesia masih sangat rendah, sehingga mengakibatkan kemiskinan pedesaan tetap tinggi, sehingga perlu adanya pengaturan upah buruh sampai kepada petani pedesaan. Upah minimum regional dan upah minimum sektoral harus dikawal pelaksanaan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Selain itu perlu upaya yang keras dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan terutama petani dipedesaan melalui peningkatan produktivitas, yaitu meningkatkan pendidikan petani, peningkatan ketrampilan petani,

Nilai tukar petani di Indonesia masih rendah, yang diakibatnya yang diterima petani lebih rendah dari pada yang dibayarkan petani, sehingga perlu adanya pendampingan kepada petani terutama dalam hal pengaturan harga jual ditingkat petani, diversivikasi produk pertanian, peningkatan mutu hasil pertanian, serta hilirisasi hasil pertanian. Penelitian ini masih mempunyai kelemahan, karena hanya menggunakan dua variable bebas yaitu upah buruh tani perdesaan dan nilai tukar petani yang mempengaruhi kemiskinan perdesaan, sehingga perlu bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan memperhatikan variable bebas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D. (2001). Good Jobs versus Bad Jobs. *Journal of Labour Economics*, Vol. 19 (1), pp 1-21.

Anggriawan, S.Y, Soelistyo,A, Susilowati,D. (2016). Pengaruh Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 14, No. 2.

Arifin, Bustanul. Ketua Forum Komunitas Statistik. (2020). *NTP Bukan Indikator Andalan Untuk Memotret Daya Beli Petani*, Bisnis.com, 28/1/2020.

Badan Pusat Statistik. (2009-2020). *Statistik Nilai Tukar Petani*. Retrieved from https://www.bps.go.id/.

Badan Pusat Statistik. (2009-2020). *Statistik Upah Buruh Tani di Perdesaan*. Retrieved from https://www.bps.go.id/.

Badan Pusat Statistik. (2009-2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi*. Retrieved from https://www.bps.go.id/.

Bappenas. (2013). *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019*. Jakarta: BAPPENAS-JICA.

Gindling, T. & Terrell, K. (2010). Minimum Wages, Globalization, and Poverty in Honduras. *Word Development*, Vol. 38 No. 6, pp. 908-918.

Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Habibullah, M, Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS. (2020). *Enam Faktor Yang mempengaruhi Kemiskinan Versi BPS*, Kontan.co.id, 6/2/2020.

Hendayana, R. (2001). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani* . Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekoomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Hendriadi, Agung, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementrerian Pertanian. (2017). *Indikator Kesejahteraan Petani Bukan Hanya NTP*, Bisnis.com, 20/3/2017.

Janjua, P. Z. (2011). The Role of Education and Income in Poverty. *The Lahore Journal of Economics,* 16(1), 143-172.

Nanga, M. (2006). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB.

Kariyasa, Ketut, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan. (2019). *Ketimpangan Pendapatan Warga Desa Turun*, Media Indonesia, 5/6/2019.

Kurniawati, A., Gunawan, B.T., & Indrasari, D.P.R. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen,* Vol 17 (2), hal. 233-252.

Nainggolan. M.C. (2012). *Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (studi Kasus Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor*. Thesis. Program Magister Ilmu Kesejahteraan Mayarakat, UI.

Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Petani Di Kawasan Perdesaan Pulau Lombok. *Jurnal Sosiologi Perdesaan*, 120-127.

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran,* 10, 1-11.

Rahayu, E.A., Badjuri, Sarwedi. (2016). *Analisis Nilai Tukar Petani sebagai Indikator Kesejahteraan Petani di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012 -2014.* Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/.

Rahayu, S., Darus, H. M., & Hasyim, H. (2013). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Petani Padi. Studi Kasus Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness,* Vol 2, N0. 10. Hal. 1-14.

Romich.J & Hill, H.D. (2018). *Boosting the Poverty-Fighting Effects of the Minimum Wage*. Focus. Institute for Research on Poverty. Institute Of Wisconsin-Madison.

Ruauw, E. (2010). Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan. *Jurnal Penelitian ASE,* 6(2), 1-8.

Saleh, C., Susilowati, S. H., & Rahmad, S. (2000). *Studi Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas Pertanian.* Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Kementrian Pertanian.

Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE),*Vol. 1, No.1, hal. 106-118.

Setiyowati, I. L., Sasongko, & Noor, I. (2018). Farmer Exchange Rate and Agricultural Land Conversion Analysis to Agricultural Sektor Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan,* Vol.10 .No.1.

Silalahi, Henry, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI). (2017). *Nilai Tukar Petani Naik, Namun Kemiskinan Meningkat,* Media Indonesia, 4/8/2017.

Simatupang, & Maulana. (2008). Kaji Ulang Konsep dan Pengembangan Nilai Tukar Petani 2003-2006. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,* Vol.5, No.2.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Suhariyanto, Kepala BPS Indonesia. (2019). *Upah Buruh Tani Naik, Angka Kemiskinan Turun Signifikan*, www.Warta Ekonomi.co.id, 17/1/2019.

Todaro, M. P.& Smith,S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Warda, N., Elmira, E., Rizky,M., Nurbani, R.I., Izzati, R.A.(2019). *Dinamika Ketimpangan dan Kehidupan di Pedesaan Indonesia, 2006 – 2016*. The SMERU Research Institute.

Warto. (2015). Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal PKS*, 14(1), Hal. 20 – 29.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Wahyudi*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk memfokuskan optimalisasi anggaran pada belanja urusan wajib (mandatory spending) dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, dan secara terus menerus untuk meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, dengan memperhatikan efek stimulusnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

JEL: I30
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Menurut Sukirno (2013), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka panjang. Tiga komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2015), yakni: (1) akumulasi modal; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.

Perekonomian nasional selama ini menunjukkan *trend* pertumbuhan positif. Tahun 2016, perekonomian nasional tumbuh 5,03 %, meningkat menjadi 5,07 % pada tahun 2017, dan tahun 2018 5,17 %. Berbeda dengan kondisi nasional, dalam dua tahun terakhir (2017-2018) beberapa provinsi mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 16 provinsi yang pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan, dan hanya 10 provinsi yang peningkatan pertumbuhan ekonominya melampaui nasional. Daerah yang peningkatan pertumbuhan ekonominya paling tinggi adalah Papua (2,69 %).

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban terhadap berbagai persoalan kesejahteraan, namun menjadi syarat keharusan dan kecukupan (*necessary and sufficient*

* Email: awankyudi@yahoo.com

condition) dalam mengurangi kemiskinan. Pengalaman di beberapa negara, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya jumlah penduduk miskin yang relatif besar (Berarzi dan Marzo, 2015).

Data statistik menunjukkan, persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan pada tahun 2015-2018. Penurunan penduduk miskin secara bertahap juga terjadi di beberapa provinsi. Namun masih cukup banyak daerah yang persentase penduduk miskinnya di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2018, diantara 16 provinsi yang persentase penduduk miskinnya sangat tinggi adalah Papua (27,43 %); Papua Barat (22,66 %); Nusa Tenggara Timur (21,03 %); Maluku (17,85 %), Gorontalo (15,83 %), dan Bengkulu (15,41 %).

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013).

Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam rangka mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi yang sangat tinggi terjadi di DKI Jakarta (Rp 8,01 Trilyun/tahun); Jawa Timur (Rp 2,30 Trilyun/tahun), Jawa Barat (Rp 2,11 Trilyun/tahun), Jawa Tengah (Rp 1,88 Trilyun/tahun), Sulawesi Selatan (Rp 897,69 Milyar/tahun), dan Papua (Rp 707,76 Milyar /tahun).

Dilihat dari sasarannya, secara umum pengeluaran pemerintah dibagi dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar manusia. *Kedua*, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan sasaran ini, pengeluaran pemerintah biasanya dialokasikan untuk membenahi infrastruktur karena seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan kondisi objektif yang dipaparkan di atas, dan mengingat bahwa pengeluaran pemerintah provinsi merupakan instrumen fiskal/kebijakan anggaran yang sangat efektif dalam menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka penelitian tentang pengeluaran pemerintah provinsi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi relevan untuk dilakukan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap

penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain untuk pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengeluaran pemerintah juga secara khusus ditujukan dalam upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensil. Misalnya pengeluaran pemerintah untuk pertanian, pembangunan industri, pengembangan kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk pengembangan sektor ekonomi potensial, maka pemerintah perlu menyediakan infrastuktur dasar yang memadai.

Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek multiplier dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya beli konsumen.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi, menurut Kuznet (Arsyad, 2010) adalah kenaikan kapasitas produksi dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas produksi ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi.

Teori pertumbuhan ekonomi lainnya dikemukakan oleh Keynes (Sukirno: 2013). Dasar pemikiran Keynes bertitik tolak pada pandangan klasik, yang beranggapan bahwa tanpa campur tangan pemerintah maka pembangunan ekonomi akan berjalan maksimal. Kenyataannya, pada tahun 1930-an terjadi pengangguran besar-besaran. Teori Keynes menggunakan pendekatan dari segi makro untuk mengatasi terjadinya pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran, menurut Keynes perlu menambah pengeluaran supaya pengusaha menaikkan investasi yang akan menaikkan permintaan tenaga kerja.

Gagasan dan pemikiran Keynes selanjutnya dikembangkan oleh Harrod. Pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan menunjukkan ciri pokok pada kerangka analisis Keynes. Perhatian Harrod terpusat pada pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terus menerus dalam keadaan keseimbangan yang stabil. Dalam hubungan ini, Harrod (Sukirno, 2013) memaparkan dua konsep laju pertumbuhan yang menjadi gagasannya, yaitu (1) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut pandang pengusaha/investor. Hal ini disebut sebagai *the warranted of growth.* Selain itu oleh Harrod juga menunjukkan adanya (2) *the rate of growth*, yang sifatnya berbeda dari *warranted rate*.

2.3. Teori Kemiskinan

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan terberat dalam proses pembangunan suatu negara. Oleh karenanya, agenda untuk mengatasi kemiskinan berkaitan dengan banyaknya faktor yang berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri. Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat di atasi.

Masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar dari kemiskinan adalah relatif. Ketika suatu negara mengalami peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah. Standar hidup masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan yang rendah, sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan konsep kemiskinan di atas, esensi utama dari kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Persoalan aksesibilitas menjadi penting karena kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana golongan miskin tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan ketika mereka tidak dapat meningkatkan sumber dayanya. Masyarakat miskin hidup dalam suatu lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung. Dalam lingkaran setan kemiskinan, terdapat tiga poros yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu: 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, 3) rendahnya tingkat pendidikan.

Mengingat semakin kompleksnya persoalan kemiskinan, menjadikan konsep tentang kemiskinan telah mengalami perluasan. Kemiskinan tidak lagi dianggap sebagai dimensi ekonomi, namun meluas pada dimensi sosial. Menurut Todaro dan Smith (2015), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: (1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat; (2) Pendapatan perkapita masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat; (3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata; (4) Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut; (5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit; (6)

Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

2.4. Tinjauan Empiris

Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, paling tidak ada dua sektor yang menjadi fokus pengeluaran pemerintah yaitu pendidikan dan kesehatan. Alokasi pengeluaran pemerintah pada kedua sektor ini untuk mengatasi rendahnya kualitas pembangunan manusia (Hongyi-Li dan Liang, 2010; Shivaranjani, 2010; Astri dkk, 2013; Olulu, 2014). Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan efek multiplier bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Srinivasan, 2013; Gemmell dkk, 2012, Kessides, 1993; Mudaki dan Masaviru, 2012; Fan, 2000).

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian awal, bahwa untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan. Instrumen kebijakan yang efektif mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud adalah melalui pengeluaran pemerintah. Adapun efektivitas pengeluaran pemerintah diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap kinerja pembangunan di telah banyak dikaji peneliti. Studi Abdullah dan Rusdarti (2017), Muhammed (2014), Olulu, dkk (2014), Srinivasan (2013), dan Alexiou (2009) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Ethiopia, Nigeria, India, dan negara maju di Eropa memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian Augustin (2010) di Asia, Eropa, Amerika dan Afrika menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor publik dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Di Indonesia, studi Yustie dan Heriqbaldi (2014) di Jawa Timur menemukan bahwa pengeluaran pemerintah/belanja modal memiliki pengaruh signifikan dengan penurunan kemiskinan.

Sebaliknya, studi Abu dan Abdullahi (2010) serta Mudaki dan Masaviru (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor publik di Nigeria dan Kenya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, studi oleh Al-Shatti (2014) di Yordania menemukan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Widodo, dkk (2011) di Jawa Tengah menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa indikator makroekonomi (pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan) dan indikator keuangan (APBD) Pemerintah Provinsi di Indonesia. Data sekunder yang dipergunakan tersebut bersifat runtut waktu *(time series)* dari tahun anggaran 2014 s/d 2018.

Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi non perilaku, yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen APBD. Sampel penelitian mencakup 34 provinsi *(cross section*). Adapun konsep analisis data menggunakan data panel (*pooled data*). Data panel atau panel data adalah gabungan dari data runtut waktu dan data antar individu.

3.2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2014 sampai 2018.

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda, dengan model estimasi sebagai berikut:

Model Regresi 1: $Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ ..... (1)

keterangan:
Y_1 = Pertumbuhan ekonomi
α = Konstanta
X_1 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan
X_2 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur
$b_1;b_2;$ = Koefisien regresi
e = error/ tingkat kesalahan

Model Regresi 2: $Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + + \beta_3 X_3 + e$ ..... (2)

keterangan :
Y_2 = Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)
α = Konstanta
X_1 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan
X_2 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur
$b_1;b_2;$ = Koefisien regresi
e = error/ tingkat kesalahan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2014-2018. Dengan menggunakan model regresi data panel, peneliti akan menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

4.1. Hasil Penelitian

Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi pendidikan dan kesehatan (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur

(X_2) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Regresi Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan, serta untuk Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16,29406	3,348661	4,865844	0,0000
LOG(X1?)	-0,256871	0,448271	-0,573026	0,5674
LOG(X2?)	-1,593301	0,674787	-2,361190	0,0194

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi pendidikan dan kesehatan (X_1) terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur (X_2) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Regresi Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan, serta untuk Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,408774	0,063166	6,471467	0,0000
LOG(X1?)	-0,009658	0,004674	-2,066222	0,0404
LOGX2?)	0,002764	0,010601	0,260762	0,7946

Sumber: Hasil Olahan, 2020

4.2. Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Olulu (2014) bahwa secara keseluruhan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari studi Lotto (2011) dan Al-Shatti (2014), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan studi Abu dan Abdullahi (2010), bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peranan pemerintah provinsi menjadi semakin besar seiring dengan semakin terkonsolidasinya pelaksanaan otonomi daerah. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tercermin pada seberapa besar alokasi anggaran yang disediakan bagi penyediaan barang publik. Oleh karenanya, pengeluaran sektor publik ini tetap menjadi skala prioritas sebagai pemenuhan standar dan alokasi belanja untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (*mandatory spending*).

Pada sisi lain, dukungan anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan merupakan wujud nyata dari investasi sumber daya manusia (*human capital investment)* untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan terus dipayakan relatif lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Alokasi anggaran sektor publik ini difokuskan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan termasuk peningkatan tenaga pendidikan dan kesehatan yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan memberi dampak secara langsung terhadap proses pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Al-Shatti (2014) dan Shivaranjani (2010) bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari studi Gemmel, dkk (2012), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Hal demikian mengindikasikan mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur diperlukan dalam mendukung proses pembangunan daerah/negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara makro, ketersediaan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Pada sisi lain, alokasi belanja pemerintah untuk infrasruktur memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak jarang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dijumpai pada wilayah/daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang relatif memadai. Ini berarti bahwa ketersediaan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas daerah/wilayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas anggaran pemerintah untuk infrastruktur dalam upaya meningkatkan askselerasi pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah di Indonesia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yustie dan Herigbaldi (2014) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan temuan Werner (2007) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dan mengurangi jumlah penganggur. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari studi Agustin (2010), bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor publik ternyata efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, sekaligus merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk peningkatan akses layanan publik yang semakin merata. Melalui pengeluaran pada kedua bidang tersebut, pemerintah membangun sarana prasarana dan sistem pendidikan dan kesehatan yang baik sebagai investasi jangka panjang

untuk meningkatkan produktivitas daerah, yang pada gilirannya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan distribusi pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Widodo, dkk (2011) bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada sisi lain, hasil penelitian ini justru bertolak belakang dengan temuan Augustin (2010) dan Werner (2007) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur, kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan dapat mengurangi kemiskinan.

Infrastruktur memiliki sifat eksternal positif yang tinggi, dikarenakan ketersediaan infrastruktur akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dan perkembangan sektor ekonomi, meningkatkan produktivitas wilayah, dan memperbaiki perbaikan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akseslerasi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pembangunan suatu daerah/wilayah, karena semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan, semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur jelas mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumber daya ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang diharapkan. Kondisi demikian menuntut pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk membangun dan menyediakan infrastruktur.

5. SIMPULAN

Temuan yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam studi ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk memfokuskan optimalisasi anggaran pada belanja urusan wajib (*mandatory spending*) dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Mengingat aktivitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, maka komposisi pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara terus menerus perlu ditingkatkan, dengan memperhatikan efek stimulusnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.A., Rusdarti. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*. Vol. 6 (No.1).

Abu, N. Abdullahi, U. (2010). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. *Business and Economics Journal*, Vol. 4.

Augustin, K.F. (2010). Inequality, Income and Poverty: Comparative Global Evidence. *Social Science Quarterly*. *Southwestern Social Science Association*. United Nations University-Institute for Development Economic Research, Vol. 91, No. 5.

Al-Shatti, A.S. (2014). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth in Jordan. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 10.

Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research,* 11(1).

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YPKN.

Berarzi, N., & Marzo, F. (2015). The Elasticity of Poverty with Respect to Sektoral Growth in Africa. *Jornal Wiley,*Vol. 63, No 1.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Dasar-dasar ekonometrika (basic econometrics, 5th ed.)* (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.

Ifa, A., Guetat, I. (2018). Does public expenditure on education promote Tunisian and Moroccan GDP per capita? ARDL approach. *The Journal of Finance and Data Science 4.*

Juanda, B. (2009). *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*. Institut Pertanian Bogor (IPB) Press.

Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* Terjemahan D. Guritno. Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mankiw, N.G (2012). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlangga

Muhammed, A. (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development,* Vol.5, No.9.

Olulu, R.M, Erhieyovwe, E.K, Andrew, U. (2014). Government Expenditures and Economic Growth: The Nigerian Experience. *Mediterranean Journal of Social Sciences,* Vol. 5,No 10.

Rosen, H.S. (2014). *Public Finance*, Tenth Edition, Global Edition, the McGraw-Hill Series in Economics.

Shivaranjani, V. (2010). *Size and Composition of Government Expenditure in India*: *Impact on Economic Growth*; Madras School of Economics Anna University.

Sukirno, S. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi.* Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Shahril, K. (2011). The Association between Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia. *Ritsumeikan Asia Pacific University*

Srinivasan, P. (2013). Causality between Public Expenditure and Economic Growth: The Indian Case. *Journal of Economics and Management*, Vol. 7, No. 2.

Todaro, M.P., Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition. United Kingdom: Pearson Addison Weasley.

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya* (*Dilengkapi Aplikasi Eviews*). Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.

World Bank. (2001). *Indonesia, Constructing a New Strategy for Poverty Reduction*.

World Bank. (2009). *Health and Growth. Commission on Growth and Development,* The International Bank for Reconstruction and Development Washington.

Yustie, R., Heriqbaldi, U. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga,* Vol.24, No.1.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Strategi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pasca Pandemic COVID-19 Dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0 di Provinsi Kalimantan Barat

Rini Sulistiawati*
Fakultas Ekonomi dan Bisinis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze employment indicators in West Kalimantan during 2015-2019, and compile a strategic scenario for workforce planning policies after the Covid 19 pandemic in the perspective of the Industrial Revolution 4.0. The labor indicators analyzed include the elasticity of employment opportunities, labor roductivity, and the sektoral share of labor absorption, which shows which major sektors with large numbers of workers and high levels of productivity should receive attention to maintain the stability of economic growth related to the Covid-19 pandemic. and the obligation to adopt new habitual adaptation patterns. The results showed that before the pandemic, the sektors with elastic average employment opportunities were the electricity, gas and water sektor; and the Industrial sektor. Meanwhile, the highest labor productivity is in the sektor 1) Financial Institutions, Real Estate, Rental Businesses and Corporate Services; 2) Industry; 3) Mining and Quarrying; and 4) Transportation, Warehousing and Communication. On the other hand, the sektoral share of employment in the agricultural sektor is still the largest compared to other sektor. Employment planning policy strategies that need to be implemented in relation to the elasticity of employment opportunities are 1) Expanding job opportunities and creating new job opportunities through government and private productive investment; 2) Mutualistic partnership between farmers and BUMN / BUMD; 3) maintaining production stabilization with a digitalized system in sektors with elastic employment opportunities. Increasing labor productivity can be carried out with policy strategies in the form of: 1) Facilitating hard skills and soft skills education; 2) Improve access and quality of advocacy training; 3) carry out re-orientation, re-vitalization and re-branding programs through the Work Training Center. The sektoral share of the workforce who is based in the agricultural sektor needs to be facilitated by creating work opportunities based on technology and digitization.

JEL: J64
Keywords: labor absorption elasticity, labor productivity, sektoral share of labor, workforce planning.

1. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 menciptakan banyak lapangan kerja baru dimana kehadiran teknologi akan menggantikan peran manusia. Namun Revolusi Industri tidak lantas memangkas lapangan kerja tetapi terjadi pergeseran kebutuhan pekerjaan di masa depan. Pandemi Covid-19 yang datang tiba-tiba dan melemahkan perekonomian dunia menyebabkan kebijakan pembangunan di hampir semua negara berubah haluan, begitu pula dengan kebijkan perencanaan tenaga kerja.

* E-mail: rini.sulistiawati@ekonomi.untan.ac.id

Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut. Sedangkan definisi pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, Tri, 2006). Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang akan disusun. Kualitas perencanaan yang disusun dengan baik maka pembangunan yang dilaksanakan akan mencapai sasarannya yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah angkatan kerja (penawaran) telah bertambah sebanyak 203.127 orang (8,57%), sedangkan yang Bekerja (permintaan) bertambah 209.734 orang (9,29%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bergerak di sekitar 4 %, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada pada angka 70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah Angkatan Kerja yang masuk ke pasar kerja semakin bertambah, namun masih terdapat sejumlah pengangguran walaupun jumlah dan persentasenya cenderung menurun (Tabel 1).

Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat Tahun 2015 s.d Tahun 2019

Jenis Kegiatan	Tahun/Jiwa				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Usia 15 tahun ke atas	3 351 634	3 414 720	3 477 633	3 539 465	3 600 816
Angkatan Kerja (Penawaran)	2 370 490	2 415 875	2 505 051	2 560 629	2 573 617
Bekerja (Permintaan)	2 257 293	2 305 125	2 399 373	2 454 289	2 467 027
Tidak Bekerja	113 197	110 750	105 678	106 340	106 590
Bukan Angkatan Kerja	981 144	998 845	972 582	978 836	1 027 199
% Bekerja Terhadap AK	95.22	95.42	95.78	95.85	95.86
TPT (%)	4.78	4.58	4.22	4.15	4.14
% AK Terhadap Penduduk usia kerja (TPAK)	70.73	70.75	72.03	72.35	71.47

Sumber: BPS, 2019. Keadaan Angkatan Kerja Di Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2019

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam suatu proses produksi. Pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Mankiw. 2003). Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi perusahaan itu (*derived demand*). Menurut teori Klasik (Sumarsono,2009; Deliarnov,1995), untuk memaksimumkan keuntungan, produsen akan mengunakan faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor yang digunakan akan menerima imbalan sebesar pertambahan marjinal dari faktor produksi tersebut. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mankiw (2006); Borjas (2010). Lewis dalam Todaro (2000), dan Jhingan (2002: 156). Di sisi lain penawaran tenaga kerja tergantung dari jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan kerja, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja, dan upah pasar (Borjas. 2010). Robert Solow (Mankiw. 2003) mengintrodusir pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi, sementara Harold Domar (Todaro, 2000) menggunakan pendekatan akumulasi modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 2. menunjukan penyerapan tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebanyak 57,81% atau 1.292.542 jiwa dari seluruh penduduk yang bekerja pada tahun 2015, dan turun menjadi 48,79 % pada tahun 2019, selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan , dan Jasa Akomodasi diurutan kedua dengan jumlah pekerja sebanyak 15,74 % pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 19,35 % pada tahun 2019. Sektor lainnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah Jasa Kemasyarakatan. Sosial dan Perorangan, yaitu sebesar 11,98% pada tahun 2015, namun turun menjadi 8,45 % pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian terus menerus menurun, sebaliknya penyeraan tenaga kerja di sektor Perdagangan, Rumah Makan , dan Jasa Akomodasi terus meningkat, sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor Perdagangan, Rumah Makan , dan Jasa Akomodasi adalah berfluktuasi.

Tabel 2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 sd 2019 di Kalimantan Barat

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun/Jiwa				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian. Perkebunan. Kehutanan. Perburuan dan Perikanan	1.292.542	1.112.674	1.192.196	1.195.545	1.155.932
Pertambangan dan Penggalian	37.312	50.845	35.799	36.230	53.462
Industri	86.893	125.090	127.325	146.307	142.528
Listrik. Gas dan Air	4.127	5.058	9.612	9.883	14.597
Konstruksi	104.753	143.606	144.758	151.211	150.300
Perdagangan. Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	351.887	412.111	362.134	378.009	458.474
Transportasi. Pergudangan dan Komunikasi	55.686	67.709	66.982	76.523	68.983
Lembaga Keuangan. Real Estate. Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	34.874	49.808	41.164	43.577	124.500
Jasa Kemasyarakatan. Sosial dan Perorangan	267.813	320.922	323.228	309.596	200.239
Total	2.235.887	2.287.823	2.303.198	2.346.881	2.369.015

Sumber: BPS, 2019[a]

Revolusi industri akan menciptakan kondisi dimana industri adalah berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas dan berpendidikan, dengan demikian akan memberikan dukungan terhadap optimasi seluruh segmen pada industri (Crnjac, Ivica, and Nikola, 2017). Menurut Menteri Perindustrian Hartarto (beritasatu.com, 2018), revolusi industri 4.0 memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berinovasi, karena revolusi industri yang berfokus pada ekonomi digital itu menguntungkan Indonesia. Mengutip *Jobs Lost,Jobs Gained : Workforce Transitions in a Time of Automation,* yang dirilis McKinsey Global Institut (Desember 2017) dalam beritagar.id (2018), pada tahun 2030 sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru, karena digantikan oleh mesin. Oleh sebab itu strategi perencanaan tenaga kerja di Kalimantan Barat perlu disiapkan untuk mengantisipasi kondisi pasca Pandemi Covid 19 dalam perspektif Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan tenaga kerja di Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir ditinjau dari indikator ketenagakerjaan?, (2) Bagaimana Strategi Kebijakan Tenaga Kerja Pasca Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0 di Kalimantan Barat?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ketenagakerjaan melalui indikator ketenagakerjaan di Kalimantan Barat Tahun 2015- 2019 dan menyusun scenario strategi kebijakan perencanaan tenaga kerja pasca Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0 di Kalimantan Barat.

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan Pemerintah Indonesia umumnya dalam menyusun strategi kebijakan perencanaan ketenagakerjaan sehingga pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan, ketenagakerjaan. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pembanding studi serupa atau obyek yang berbeda dengan studi ini, serta dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat, serta dunia usaha dan instansi pemerintah dalam merencanakan kebutuhan akan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan tujuan perusahaan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kajian Teoritis

Harold Domar (Todaro, 2000) dari kelompok Keynesian menggunakan pendekatan akumulasi modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya . peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan cara memperbesar tabungan.Sementara itu Robert Solow (Mankiw. 2003) mengintrodusir pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Adanya kemajuan teknologi maka akan menyebabkan efisiensi penggunaan input tenaga kerja. Dengan memasukkan kemajuan teknologi kedalam fungsi produksi yangmenunjukkan hubungan antara modal (K) dan tenaga kerja (L) . maka fungsi produksi menjadi Y = F (K. L x E). dimana E adalah Efisiensi. Kemajuan teknologi yang menimbulkan efisiensi disebut sebagai tingkat kemjuan teknologi yang mengpoptimalkan tenaga kerja (labor augmenting technological proses) dan diberi symbol "*g".* Karena kemajuan teknologi. angkatan kerja L akan tumbuh sebesar "n" efisiensi dari setiap unit tenaga kerja E tumbuh pada tingkat "*g". maka jumlah pekerja efektif L x E tumbuh pada tingkat n + g*. Teori Marshall (Nicholson, 2002) menyatakan bahwa harga faktor produksi ditentukan oleh interaksi antara permintan dan penawaran atas faktor produksi tersebut.

Permasalahan yang selalu muncul dalam bidang ketenagakerjaan adalah ketidak seimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor)* dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) pada suatu tingkat upah (Kusumowidho.1981 dalam Subri.2003). Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labor)*.

Pasar tenaga kerja seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Mankiw. 2003). Sifat permintaan tenaga kerja adalah *derived demand*, yang artinya bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengusaha sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya (Borjas. 2010). Penentuan permintaan tenagakerja dapat

diturunkan dari fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenaga kerja (L) dan modal (K) sebagai berikut : TP = f(L. K). Di mana: TP adalah Produksi total (*output*), L adalah Tenaga kerja, dan K adalah Modal.

Menurut teori Klasik (Sumarsono,2009; Deliarnov,1995), untuk memaksimumkan keuntungan, produsen akan mengunakan faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor yang digunakan akan menerima imbalan sebesar pertambhan marjinal dari faktor produksi tersebut. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mankiw (2006); Borjas (2010), Lewis dalam Todaro (2000), dan Jhingan (2002: 156).

Penawaran tenaga kerja tergantung dari jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan kerja, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja, dan upah pasar (Borjas. 2010). Atas dasar deskripsi ini maka angkatan kerja (*labor force*) dianggap mewakili penawaran tenaga kerja atau *Supply of Labor* (Sumarsono.2009).

Transformasi Struktural (Stuctural Transformstion) dari A. Lewis yang kemudian di kembangkan oleh John Fei dan Gustav Ranis (Todaro & Smith, 2006), menyatakan bahwa akan terjadi aliran tenaga kerja dari sektor pertanian di pedesaan dengan produktivitas yang rendah ke sektor industri modern di perkotaan dengan produktivitas yang tinggi. Pengalihan tenaga kerja ini dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor industri modern yang di dukung oleh investasi dan akumulasi modal.

2.2. Kajian Empiris

Kajian tentang perencanaan tenaga kerja oleh Widajanti (2007) dan Kelejan.RA, VPK Lengkong, dan H.N.Tawas (2018) menemukan bahwa tedapat kesenjangan antara perencanaan SDM dan implementasi strategi SDM, namun perencanaan SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sementara kajian tentang elastisitas upah tenaga kerja oleh Lichter et.al (2014) menemukan bahwa 80 persen variasi model elastisitas tingkat upah pada permintaan tenaga kerja adalah elastis, sedangkan Chen & Desiderio (2014) menemukan bahwa angka pengangguran yang persisten tidak selalu merupakan hasil dari dis-ekuilibrium makro ekonomi atau sebagai elemen yang dapat menghalangi berjalannya mekanisme pasar tenaga kerja

Damanhouri dan Rana (2017) mendapati 10 indikator yang berpengaruh signifikan terhadap produktifitas tenaga kerja, yaitu metode, kondisi lingkungan kerja, teknologi, kendali, komunikasi, organisasi, motivasi dan keinginan bekerja, situasi pekerja yang saling mendukung, pemenuhan terhadap kebutuhan sosial, pengaturan situasi kerja dan kompromi diantara pekerja. Dari kedua kategori indikator fisik dan non fisik diatas, indikator fisik seperti metode, teknologi dan kendali merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja.

Revolusi industri akan menciptakan kondisi dimana industri adalah berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas dan berpendidikan, dengan demikian akan memberikan dukungan terhadap optimasi seluruh segmen pada industri. Kondisi ini merupakan temuan dari penelitian Crnjac, Ivica, and Nikola (2017). Studi Lavanya, Shylaja, dan Santhosh (2018) menemukan bahwa transformasi digital di era revolusi industri 4.0 akan memberikan manfaat bisnis antara lain : 1) mengurangi biaya operasional; 2) biaya pemeliharaan lebih rendah;3) Peningkatan pengambilan keputusan dimungkinkan dengan adanya perangkat lunak industri sehingga komunikasi antara pemasok, produsen, dan klien akan menjadi efektif; 4) kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Kopp, Jurgen, and Jurgen (2016) menganalisis bahwa pengalaman dari masa lalu dengan jelas menunjukkan bahwa

tidak ada paradigma desain berpusat pada teknologi atau berpusat pada manusia yang berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan jelas dalam daya saing, tetapi dalam beberapa situasi mereka bahkan mungkin memiliki dampak negatif. Sebaliknya, pendekatan yang berpusat pada organisasi untuk merancang sistem produksi telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan daya saing.

2.3. Kerangka Konseptual

Strategi kebijakan perencanaan tenaga kerja di Kalimantan Barat di susun berdasarkan hasil analisis terhadap elastisitas penyerapan tenaga kerja, produktivitias tenaga kerja, pangsa sektoral, dan tingkat pengangguran terbuka, sehingga kerangka konseptual pada studi ini adalah sebagai berikut :

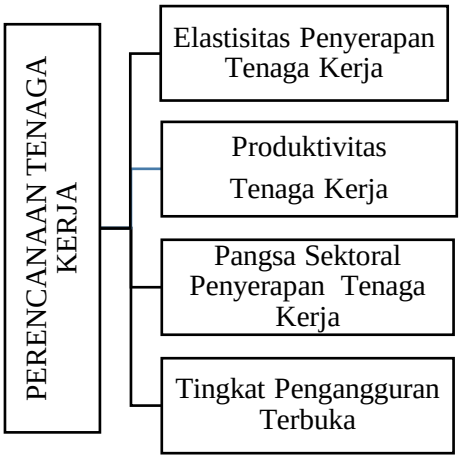

Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan waktu penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kalimantan Barat, dan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh sektor perekonomian (Lapangan Usaha) di Kalimantan Barat sebanyak 9 (sembilan) sektor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sesuai dengan bentuk penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif, maka analisis data dilakukan dengan menggunakan indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

3.1. Elastisitas Kesempatan Kerja

Yaitu perbandingan antara persentase perubahan kesempatan kerja dengan persentase perubahan dalam PDRB.

$$Ek = \frac{\%\Delta KK}{\%\Delta PDRB} \quad \text{.....} \quad (1)$$

Keterangan : Ek adalah elastisitas kesempatan kerja
% Δ KK adalah persentase perubahan kesempatan kerja
% Δ PDRB adalah persentase perubahan PDRB

3.2. Pangsa penyerapan tenaga kerja.

Yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja disalah satu sektor. dengan jumlah penduduk yang bekerja. dinyatakan dalam persen.

$$STKi = \frac{\Sigma TKi}{\Sigma TK} x100\% \quad \text{.....} \quad (2)$$

Keterangan : STKi adalah Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor i
ΣTKi adalah Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i
ΣTK adalah Jumlah penduduk yang bekerja

3.3. Produktivitas Penyerapan Tenaga kerja

Merupakan rasio output (PDRB) terhadap penggunaan input (Tenaga kerja), dinyatakan dalam persen.

$$Pv = \frac{Kontribusi\ Sektor\ Terhadap\ PDRB\ (\%)}{Distribusi\ Penyerapan\ Tenaga\ Kerja\ \ sektor\ (\%)} \quad \text{.....} \quad (3)$$

3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Yaitu perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen.

$$TPT = \frac{Pengangguran}{AK}\ x\ 100\% \quad \text{.....} \quad (4)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sektor Pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja, memiliki nilai koefisien elastistas penyerapan tenaga kerja sebesar -0,57 yang bermakna bahwa kenaikan 1 persen pada pertumbuhan ekonomi justru akan mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,57 persen di sektor tersebut. Kondisi ini menyiratkan bahwa kenaikan PDRB di sektor pertanian tidak lagi bertumpu pada penambahan input tenaga kerja, namun telah beralih ke penggunaan teknologi sesuai dengan tuntutan kebutuhan di masa revolusi industri 4.0 saat ini.

Sektor Listrik, Gas dan Air memiliki nilai elastisitas yang paling tinggi yaitu 9,26, yang mempunyai arti bawa kenaikan satu persen pada PDRB sektor ini akan membuka kesempatan kerja sebesar 9,26 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki nilai elastisitas kesempatan kerja sebesar 7,81 persen yang berarti bahwa kenaikan satu persen pada PDRB akan membuka kesempatan kerja sebesar 7,81 persen di sektor ini. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang bernilai negatif di sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif di sektor ini (-0,02) menghasilkan nilai elastisitas kesempatan keja sebesar 739 %, artinya penurunan satu persen pada PDRB sektor akan mengurangi penyerapan kesempatan kerja sebesar 739 persen.

Sepanjang tahun 2019, selain sektor pertanian, beberapa sektor lainnya yang juga mempunyai nilai elastisitas negatif adalah sektor industri, sektor konstruksi, sektor transportasi, dan sektor jasa kemasyarakatan. Kondisi ini sekali lagi menyiratkan bahwa kenaikan PDRB tidak selalu diikui

dengan penciptaan lapangan kerja, karena kenaikan PDRB lebih disebabkan karena adanya pergeseran pengunaan input dari tenaga kerja ke input teknologi/otomatisasi.

Tabel 3. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 s.d Tahun 2019 di Kalimantan Barat

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	0.21	-3.41	1.09	0.04	-0.57
Pertambangan dan Penggalian	-93.18	1.69	-16.62	0.15	7.81
Industri	1.86	9.95	0.67	5.61	-0.34
Listrik, Gas dan Air	-4.90	2.02	19.70	0.67	9.26
Konstruksi	-1.24	14.10	0.12	2.30	-0.82
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	2.10	4.39	-3.10	0.89	3.75
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.13	2.62	-0.10	1.99	-1.92
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-0.05	7.08	-3.43	0.93	739.00
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1.18	4.51	0.20	-0.84	-1.27
Total	0.09	0.45	0.13	0.37	0.19

Sumber : Diolah dari BPS. 2019[a] dan BPS. 2020[a]

Pangsa penyerapan tenaga kerja sektoral menunjukkan persentase jumlah penduduk yang bekerja disalah satu sektor terhadap jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor. Pangsa penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan distribusi penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor lapangan usaha. Selama 5 tahun berturut-turut, sektor pertanian mempunyai pangsa penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi persentasenya walaupun trendnya cenderung menurun. Tahun 2015 pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor ini sebear 57,81 persen dan turun menjadi 48,79 persen di tahun 2019. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yang pangsanya terus meningkat, yaitu dari sebesar 15,74 persen di tahun 2015 menjadi 19,35 persen pada tahun 2019. Sama halnya dengan sektor pertanian, penurunan pangsa penyeapan tenaga kerja juga terjadi di sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, yaitu dari 11,98 persen di tahun 2015 turun menjadi 8,45 persen pada tahun 2019. Penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut mengindikasikan telah terjadinya alih teknologi di dalam proses produksi, yaitu dari teknologi padat tenaga kerja beralih menjadi teknologi pada modal.

Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Industri memiliki produktivitas tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar lebih dari 4 persen (4,51 persen dan 4,06 persen). Pada tahun 2019 produktivitas di kedua sektor ini menurun cukup tajam yaitu menjadi 1.28 untuk sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan 2,71 untuk sektor industri, namun demikian produktivitas sektor industri di tahun 2019 masih relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, dan menempati urutan kedua setelah sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa terdapat 3 sektor Lapangan Usaha yang memiliki produktivitas sangat rendah (dibawah satu persen) yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, sektor Listrik, Gas dan Air, dan sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

Tabel 4. Pangsa Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2015 s.d Tahun 2019 di Kalimantan Barat

No	Lapangan Usaha	Tahun/Persen					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	57.81	48.63	51.76	50.94	48.79	51.59
2	Pertambangan dan Penggalian	1.67	2.22	1.55	1.54	2.26	1.85
3	Industri	3.89	5.47	5.53	6.23	6.02	5.43
4	Listrik, Gas dan Air	0.18	0.22	0.42	0.42	0.62	0.37
5	Konstruksi	4.69	6.28	6.29	6.44	6.34	6.01
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	15.74	18.01	15.72	16.11	19.35	16.99
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2.49	2.96	2.91	3.26	2.91	2.91
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.56	2.18	1.79	1.86	5.26	2.53
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	11.98	14.03	14.03	13.19	8.45	12.34
	Total	100	100	100	100	100	100.00

Sumber : BPS. 2019[a]. Keadaan Angkatan Kerja Kalimantan Barat Tahun 2015 sd 2019 .Diolah

Tabel 5. Produktivitas Sektoral Angkatan Kerja Tahun 2015 s.d Tahun 2019 di Kalimantan Barat

No	Lapangan Usaha	Tahun/Persen				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	0.36	0.42	0.39	0.40	0.41
2	Pertambangan dan Penggalian	2.93	2.53	3.52	3.60	2.48
3	Industri	4.06	2.95	2.92	2.58	2.71
4	Listrik, Gas dan Air	1.11	0.91	0.52	0.55	0.35
5	Konstruksi	2.79	1.98	2.03	1.94	1.94
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.09	0.94	1.05	1.02	0.86
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.12	2.69	2.85	2.62	2.93
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.51	3.24	3.92	3.83	1.28
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1.13	0.97	0.95	1.01	1.59
	PDRB	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber :Diolah dari BPS. 2019[a] dan BPS. 2020[a].

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Selama 5 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan trend yang menurun yaitu dari 4,78% di tahun 2015 menjadi 4,14 % pada tahun 2019. Persentase tingkat pengangguran menurut pendidikan menunjukkan bahwa

persentase pengangguran yang tertinggi adalah pada tingkat pendidikan SLTA dan yang terendah adalah pada tingkat Akademi/Universitas (SLTA ke atas). Kondisi ini menyiratkan bahwa kualitas SDM di Kalimantan Barat masih relatif rendah. Mereka yang tamat SLTA sudah masuk ke pasar kerja sementara kesiapan untuk bekerja masih minim dalam arti belum mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu. Akibatnya bidang pekerjaan yang diperoleh juga terbatas dan pada umumnya adalah sebagai sebagai tenaga kasar atau karyawan biasa.

Tabel 6. Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 s.d Tahun 2019 di Kalimantan Barat

No	Tingkat Pendidikan	Tahun/Persen				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	≤ SD	29.01	33.10	29.89	22.77	26.4
2	SLTP	19.2	12.87	13.64	13.87	18.13
3	SLTA	41.27	41.44	42.51	46.88	45.6
4	> SLTA	10.52	12.60	13.95	16.48	9.87
	Total	**100**	**100.0**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS, 2019[b] dan BPS, 2020[b]

4.2. Pembahasan

Strategi kebijakan perencanaan tenaga kerja perlu disusun dengan tujuan untuk merencanakan penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor atau lapangan usaha baik dari aspek komposisi maupun distribusi per sektor. Perencanaan penyerapan tenaga kerja dewasa ini menjadi sangat penting setelah perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat khususnya mengalami kontraksi karena adanya pandemi Covid-19. Sementara itu tuntutan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja (yang diukur melalui indikator elastsitas penyerapan tenaga kerja, pangsa tenaga kerja, produktivitas penyerapaan tenaga kerja, dan pengangguran terbuka) menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di era Rovulusi Industri 4.0 dengan berlakunya ekonomi digital yang berbasis Internet of Things (IoT).

Secara rata-rata selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 elastisitas penyerapan tenaga kerja untuk seluruh sektor lapangan usaha adalah sebesar 0,25 yang artinya kenaikan satu persen pada PDRB hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 0,25 persen saja. Secara sektoral, Listrik, Gas dan Air memiliki nilai elastisitas yang paling besar yaitu 4,62 yang mempunyai arti bahwa kenaikan satu persen pada DRB akan menciptakan lapangan kerja sebesar 4,62 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri dengan elastisitas 3.11, sementara sektor dengan elastisitas penyerapan tenaga kerja yang negatip di miliki oleh sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian.

Relatif rendahnya nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja secara total maupun di beberapa sektor lapangan usaha, dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa sub sektor pertanian, antara lain sub sektor perkebunan dan sub sektor pertambangan mulai menggunakan teknologi modern di dalam proses produksi untuk meningkatkan output, oleh sebab itu beberapa pekerjaan mulai dilaksanakan secara otomatisasi sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja.

2. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lain juga menyebabkan mengalirnya tenaga kerja di sektor ini ke sektor lain. Peningkatan output dilakukan secara intensifikasi melalui teknologi pertanian modern
3. Sektor industri menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang sangat pesat namun minim penggunaan tenaga kerja. Revolusi industri 4.0 yang serba digital (*internet of things*) lebih mengutamakan penggunaan teknologi dengan kecerdasan artifisial khususnya di industri yang berskala besar, akibatnya tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor ini lebih mempertimbangkan aspek kualitas daripada kuantitas. Namun demikian semakin tumbuhnya industri menengah dan kecil membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang semakin besar pula.
4. Beberapa sub sektor industri telah menggunakan teknologi modern, sementara masih ada beberapa subsektor yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja. Industri pengolahan berskala besar pada umumnya telah menggunakan teknologi modern namun juga masih menggunakan tenaga kerja dalam junlah besar, sedanka industri kecil dan industri rumah tangga masih mengunakan teknologi yang padat tenaga kerja.Oleh sebab itu nilai rata-rata elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri menunjukkan nilai yang positip (3,55), begitu juga nilai produktivitasnya relatif tinggi (3,04)

Tabel 7. Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja, Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi, dan Rata-Rata Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2015 s.d Tahun 2019 di Kalimantan Barat.

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Rata -rata 2015-2019			
				Elastisitas	
		PTK	PE	PTK	Produktivitas
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	-1.86	5.12	-0,36	0.40
2	Pertambangan dan Penggalian	-0.09	7.59	-0.01	3.01
3	Industri	12.92	4.15	3.11	3.04
4	Listrik, Gas dan Air	27.76	6.01	4.62	0.69
5	Konstruksi	6.02	4.27	1.41	2.14
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	8.73	4.92	1.78	0.99
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6.83	7.88	0.87	2.84
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.26	4.42	0.74	3.36
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	3.02	4.71	0.64	1.13
	Total	1.25	5.06	0.25	1.00

BPS. Diolah dari BPS. 2019[a] dan BPS. 2020[a]

Berkaitan dengan produktivitas, rata-rata produktivitas tenaga kerja selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha yang memiliki produktivitas tertinggi yaitu sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, sektor industri, dan sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai produktivitas lebih dari 3. Kondisi ini mempunyai arti bahwa peningkatan sebesar satu persen pada distribusi penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan kontribusi ke 3 sektor tersebut terhadap PDB sebesar 3.

Relatif tingginya produktivitas di sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor Industri, dan sektor Pertambangan dan Penggalian mengindikasikan adanya penggunaan teknologi modern yang memungkinkan output di produksi secara optimal. Penggunaan tenaga kerja di ketiga sektor ini lebih diutamakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Sektor pertambangan dan penggalian sudah jelas lebih padat teknologi, hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai elastisitasnya yang bernilai negatip (-20,03). Di sisi lain, sektor pertanian memiliki produktivitas yang paling rendah yang antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan sebagian besar pekerjanya. Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 83,81 persen tenaga kerja di sektor pertanian adalah berpendidikan SD, sementara yang berpedidikan tinggi hanya sebesar 12,12 persen saja (BPS,2019[b])

Tabel 8. Bidang Pekerjaan Dengan Permintaan Yang Meningkat Dan Menurun di Seluruh Industri

No	Bidang Pekerjaan	
	Increasing Demand	***Decreasing Demand***
1	Data Analysis and Scientist	Data Entry Clerks
2	Machine Learning Specialist	Administratif and Executif Secretaries
3	Big Data Specialists	Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
4	Digital Marketing and Startegy Specialists	Accountants and Auditors
5	Process Automation Specialist	Assembly and Factory worker
6	Business Development Profesionals	Business Services and Administration Manager
7	Digital Transformation Spacialists	Client Information And Customer Service Workers
8	Information Security Analysis	General and Operations Managers
9	Software and Application Developers	Mechanic and Machinery Repairs
10	Internet of Things Specialist	Material Recording and Stock Keeping Clerks
11	Project Managers	Financial Analysis
12	Business Services and Administration Manager	Postal Service Clerks
13	Datbase and Network Professionals	Sales Rep, Wholesale and Manuf, Tech and Sci Product
14	Robotic Engineers	Relationship Manager
15	Strategic Advisor	Bank Tellers and Related clerks
16	Management and Organization Analysis	Door to Door Service, News and Street Vendors
17	FinTech Engineers	Electronics and Telecomunication Installers and Repaires
18	Mechaniscs adn Machiner Repaires	Human Resources Specialists
19	Organization Developtment Spacialist	Training and Development Specialist
20	Risk Management Specialist	Construction Laborers

Sumber: World Economic Forum.2020

Revolusi industri 4.0 identik dengan teknologi dan otomatisasi serta kecerdasan buatan yang akan mengubah kinerja sektor industri menjadi lebih efisien dan produktif, karena pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan dengn cepat. Namun menurut McKincey (mckinsey.com)) tidak semua pekerjaan bisa di otomatisasi karena keberhasilan pemanfaatan teknologi tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru tetapi juga menggantikan beberapa pekerjaan lama serta mengubah

berbagai profesi. Dampak postitif otomatisasi bagi perekonomian Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja bagi 25 juta angkatan kerja baru pada tahun 2030 di Indonesia, meskipun beberapa pekerjaan mungkin tergantikan oleh otomatisasi, dan terdapat 10 juta pekerjaan baru yang belum ada saat ini sejalan dengan tren inovasi yang menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru. Pertumbuhan lapangan kerja kemungkinan akan mengubah komposisi berbagai sektor dalam perekonomian Indonesia. Riset McKinsey juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia yang berpendidikan menengah mungkin akan menghadapi perubahan terbesar dalam dunia pekerjaan di tahun 2030, namun persentase peluang terbesar akan diperoleh mereka yang berpendidikan tinggi atau pendidikan lanjut.

Pandemi Covid 19 menyebabkan resesi global dan menciptakan ketidak pastian di pasar kerja. Revolusi industri yang identik dengan otomatisasi di tambah lagi dengan pandemi Covid 19 menimbulkan efek gangguan ganda bagi pekerja. Survei oleh World Economic Forum tahun 2020 menempatkan beberapa bidang pekerjaan baru yang tinggi permintaannya dan bidang pekerjaan yang akan semakin menurun permintaannya.

4.2.3. Strategi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Di Kalimantan Barat.

Kehadiran revolusi industri 4.0 menghadirkan lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya, namun pada saat yang sama ada pula lini usaha yang terancam, profesi dan lapangan kerja yang tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan dan robot. Oleh sebab itu penyusunan perencanaan harus mempunyai strategi yang dapat mengakomodir kondisi tersebut dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Tabel 4.6 menunjukkan beberapa bidang pekerjaan baru yang akan hadir seiring dengan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0, sementara struktur perekonomian di Kalimantan Barat belum mengalami transformasi struktur.Sektor pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir, selanjutnya diikuti oleh sektor Industri, sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, dan sektor Konstruksi dengan kontribusi terhadap PDRB di atas 12 persen.

Berdasarkan analisis dan data terhadap Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja, Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, strategi kebijakan perencanaan Ketenagakerjaan yang perlu disusun berdasarkan indikator ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Elastisitas Kesempatan Kerja.
   Relatif rendahnya nilai elasisitas penyerapan Tenaga Kerja pada sebagaian besar Lapangan Usaha, memerlukan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang ada melalui:

a. Investasi sektor produktif baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi ini diyakini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan menggerakkan perekonomian dengan cepat. Pemerintah tidak akan mampu mengatasi pengangguran sendirian, maka diperlukan kontribusi swasta dalam penciptaan lapangan kerja
b. Kemitraan mutualistik antar petani dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor yang masih rendah antara lain sektor petani dengan mencegah pengalihan fungsi lahan dari non pertanian ke non pertanian, yang selanjutnya akan berimplikasi pada berkurangnya "*disguised unemplyment"* di sektor pertanian.
c. Kebijakan makro baik moneter maupu fiskal untuk mendorong dan melindungi tenaga kerja dan pelaku usaha mikro yaitu berupa kebijakan yang mendorong keterkaitan antara urban dan rural

area melalui kegiatan produktif sektor usaha skala mikro kecil dan menengah untk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

d. Menjaga stabilisasi produksi dengan sistem terdigitalisasi pada sektor dengan kesempatan kerja elastis.

2. Produktivitas Tenaga Kerja
   Berkaitan dengan produktivitas penyerapan tenaga kerja yang masih relatif rendah di beberapa sektor, maka strategi kebijakan ketenagkerjaan yang perlu di susun antara lain meningkatkan investasi *human capital* agar menjadi sumberdaya mansia yang kompeten dan berdaya saing tinggi untuk dapat bersaing di pasar global yang semakin ketat melalui *:*

a. Meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing dengan menetapkan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mensyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang, sehingga masyarakat mempunyai akses atau kesempatan untuk memiliki keterampilan (skill)
b. Pendidikan hardskill dan soft untuk menghadapi tantangan perubahan dunia kerja agar tenaga kerja mampu mengikuti perubahan, berdaya saing dan survive di dunia kerja di era revolusi ndustri 4.0
c. Melaksanakan program 3R yaitu Re-orientasi, Re-vitalisasi, dan Re-branding melalui Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat dan masifikasi produksi SDM yang kompeten di berbagai bidang kejuruan

3. Pangsa Tenaga Kerja dan Pengangguran
   Digitalisasi di era revolusi industri 4.0 akan menciptakan peluang lapangan kerja menjadi lebih inklusif oleh sebab itu Strategi Kebijakan perencanaan tenaga kerja yang perlun disusun adalah menciptakan peluang kerja yang berbasis teknologi dan digitalisasi (Internet of Things) melalui:

a. Mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor jasa dan ekpansi pasar dengan mengalihkan pola pasar tradisional tatap muka dengan menggagas platform digital
b. Membangun kerjasama inter-regional untuk membentuk sistem investasi, produksi, dan distribusi yang menyerap banyak tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas pasar.
c. Memperkuat infrastruktur, serta meningkakan kompetensi dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan rencana perluasan sektor-sektor.

5. SIMPULAN

Revolusi industri 4.0 menciptakan banyak lapangan kerja baru dimana kehadiran teknologi akan menggantikan peran manusia. Pada saat yang sama pandemi Covid-19 melemahkan perekonomian dunia menyebabkan kebijakan pembangunan di hampir semua negara berubah haluan yang berimbas pada kesempatan kerja. Oleh karena itu diperlukan skenario perencanaan tenaga kerja untuk mengatasinya.

Sepanjang tahun 2019, selain sektor pertanian, beberapa sektor lainnya juga mempunyai nilai elastisitas yang negatip (sektor industri, sektor konstruksi, sektor transportasi, dan sektor jasa kemasyarakatan). Kondisi ini menyiratkan bahwa kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, karena kenaikan PDRB lebih disebabkan karena adanya pergeseran pengunaan input dari tenaga kerja ke input teknologi/otomatisasi. Rata-rata nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,25.

Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rata-rata pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang tertinggi yaitu sebesar 51,59 persen, namun dengan produktivitas yang paling rendah (0,40 persen) dibandingkan sektor-sektor lainnya pada periode yang sama. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya sebagian besar kualitas sumber manusia di sektor ini.

Strategi kebijakan perencanaan tenaga kerja yang perlu disusun antara lain adalah dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang ada melalui investasi sektor produktif baik dari pemerintah maupun swasta, kemitraan mutualsitik antar petani BUMN/BUMD, kebijakan makro baik moneter maupun fidkal yang melindungi pelaku usaha mikro, dan menjaga stabilisasi produksi dengan sistem terdigitalisasi pada sektor dengan kesempatan kerja elastis, meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SD yang kompeten dan berdaya saing, mengalihkan pola pasar tradisional tatap muka dengan menggagas platform digital, memperkuat infrastruktur, serta meningkakan kompetensi dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan rencana perluasan sektor-sektor.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu perlu segera disusun strategi kebijakan perencanaan tenaga kerja untuk mengantisipasi dampak Pandemi Covid 19 dan memasuki era Revolusi Industri 4.0, perlu dipersiapkan investasi *human capital* untuk meningkatkan peoduktivitas tenaga kerja guna menghadapi munculnya lapangan kerja baru yang serba digital dan otomatisasi, serta dilakukan analisis lebih mendalam terhadap sektor-sektor lapangan kerja yang memiliki nilai elastisas negatip dan produktivitas rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2019)[a]. *Keadaan Angkatan Kerja Di Kalimantan Barat Tahun 2015 sd 2019*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.

----------. (2019)[b]. Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Tahun 2015 sd 2019. Pontianak: Badan Pusat Statistik

----------. (2020)[a]. *PDRB Kalimantan Barat Tahun 2015 sd 2019*. www.kalbar.bps.go.id

----------. (2020)[b]. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kalimantan Barat Tahun 2015 s.d Tahun 2019. www.kalbar.bps.go.id

Beritasatu.com. (2018). *Revolusi Industri 4.0 Ciptakan Lapangan Kerja* : http://id.beritasatu.com

Beritagar. (2018). Bersiaplah Memasuki Revolusi Industri 4.0 : *https://beritagar.id*

Borjas. George J. (2010). *Labor Economic*. New York : Mc Graw Hill

Chen,Siyan and Desiderio,Saul. (2014). Sticky Wages, Labour Demand Elasticity and Rational Unemployment. *Australian Journal of Labour Economic.Volume 17.Number 1. 2014.pp 55-65*

Crnjac, Marina, Ivica, and Nikola. (2017). From Concept to the Introduction of Industry 4.0. *International Journal of Industry Engineering and Management (IJIEM)*, Vol 8 No 1,2017,pp.21-30.ISSN 2217-2661

Damanhouri,Amal Mohammed Sheikh & Rana,Divya. (2017). Factors Influencing Labour Productivity-An Applied Study Of Non Oil Manufacturing Sektors in The Kingdom Of Saudi

Arabia. *Global Journal of Commerce & Management Perpective. Vol 6(6):60-71. ISSN:2319-7285*

Deliarnov. (2009). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Jhingan. M.L. (2002). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Kopp, Ralf., Juren & Jurgen. (2016). Why Industry 4.0 Needs Workplace Innovation: A Critical Look at The German Debate on Advanced Manufacturing. *European Journal of Workplace Innovation (EJWI), Vol 2 No.1.June 2016.pp 7-22*

Lavanya, Shylaja & Santosh. (2018). Industry 4.0 – The Fourth Industrial Revolution. *International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), Volume 6.Issue 6, June 2017.*

Kelejan,RA.,Victor.P.K.Lengkong.,Hendra.N.Tawas. (2018). Pengaruh Perencanaan Sumberdaya Manusia dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT.Air Menado. *Jurnal EMBA.Vol 6.No4.September 2018. Hal 1918-1927.*

Lichter,Andreas., Peichl,Andreas., Siegloch,Sebastian. (2014). The Own-Wage Elasticity of Labor Demand:A Meta Regression Analysis. *IZA Discussion Paper No 7958.*

Mankiw.N Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi* . Jakarta : Penerbit Erlangga.

----------. (2006). *Pengantar Ekonomi Mikro.* Jakarta : Salemba Empat.

McKinsey & Company. (2019). *Otomasi dan Masa Depan Pekerjaan Di Indonesia.* www. mckinsey.com

Nicholson. Walter. (2002). *Mikro Ekonomi Intermediate Dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Subri. Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sumarsono.Sonny. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia. Teori dan Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Todaro.P.Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Todaro.P.Michael & Stephen C.Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Widodo.Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widajanti, Erni. (2007). Perencanaan Sumberdaya Manusia Yang Efektif: Strategi Mencapai Keunggulan Kompetitif. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol 7 No 2. 105-114.*

Word Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report.* www.weforum.org

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Kemampuan Pengangguran Menjelaskan Derajad Kesehatan Masyarakat (Bukti Empiris dari Data Panel Provinsi di Indonesia)

Jumhur*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to examine the ability of unemployment to explain the degree of public health. This research also involves the variable of economic growth, government spending on health and the provincial minimum wage as control variables. Using the Ordinary Least Squares (OLS) method to process panel data with data spanning 8 years (2010-2017) and cross section data from 34 provinces in Indonesia (272 observations). This study found that the unemployment rate is able to explain the degree of public health in a negative and significant direction, the minimum wage is able to explain the degree of public health in a positive direction, while the economic growth and government budget for health have not been able to explain the degree of public health in Indonesia. Therefore, the government needs to take a policy to encourage investment in Indonesia to spur economic growth which is expected to create jobs to reduce unemployment and at the same time encourage wage increases in Indonesia. In addition, the central government needs to continue to require the implementation of a health budget of 10% of the total provincial budget and regional revenues for the health sektor, because there are still many regions whose health budgets are still below 10% of their total regional budgets and expenditures.

JEL: J11, J31, I38
Keywords: Unemployment, economic growth, health budget and minimum wage

1. PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara di dunia telah menyadari pentingnya kesehatan yang sekaligus merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak mungkin di cabut (Razmi, Abbasian, & Mohammadi, 2012). Peningkatan status kesehatan yang lebih baik karena adanya peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik sudah merupakan salah satu aspek mendasar dari pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, AHH Indonesia sebesar 69,81 tahun, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 71,06 tahun (BPS 2018). Sedangkan AHH berdasarkan provisi pada tahun 2017 berkisar antara 63,57 tahun sampai dengan 73,49 tahun dan provinsi yang memiliki AHH tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah 73,49 tahun, diikuti provinsi Kalimantan Timur 73,44 tahun, DKI Jakarta 72,19 tahun. Sedangkan provinsi yang memiliki AHH terendah adalah provinsi Sulawesi Barat yaitu hanya 63,57 tahun (BPS 2018).

Pengangguran kadang kala dikonseptualisasikan sebagai pengucilan sosial dan material dari masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan melalui tekanan emosional yang terkandung

* Email: jumhurie@yahoo.com

di dalamnya. Pengangguran dapat menyebabkan ketegangan finansial berupa margin kas yang rendah yang cenderung meningkatkan stres dan mengganggu kesehatan mental di antara para penganggur (Noordt et al., 2014), sehingga orang-orang yang menganggur memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap tekanan psikologis dan kesejahteraan jangka panjang (Daly & Delaney, 2013; Tumino, 2015; Mousteri et al., 2019). Jadi pengangguran selain memiliki dampak ekonomi, lingkungan dan psikologis, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia secara langsung dan tidak langsung (Lundin, 2011). Hasil riset sebelumnya menunjukkan hubungan yang jelas antara pengangguran dan masalah kesehatan, seperti kesehatan mental yang buruk, kecemasan dan depresi, tekanan darah tinggi dan kadar kortisol, penyakit jantung dan kematian (Noordt et al., 2014).

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 (1). Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji, (3) Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Berdasarkan data APBD 2017, dari 542 daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, daerah yang telah memenuhi kewajiban minimal 10 persen anggaran kesehatan baru 177 daerah (32,65 persen). Bila kondisi ini berlangsung terus maka akan berdampak terhadap derajad kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2010-2015 cendrung menurun hingga mencapai 4,79% pada tahun 2015, kemudian meningkat kembali menjadi 5,07persen tanun 2017.

Selama beberapa dekade terakhir upah minimum terus menjadi topik bahasan yang penting karena menyangkut berbagai kepentingan. Perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2016 terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut provinsi yang memiliki rata-rata kenaikan upah paling tinggi adalah provinsi DKI yang mencapai 19,03 persen, diikuti provinsi Gorontalo 18,04 persen dan yang ketiga provinsi Selawesi Utara yang mencapai 15,90 persen (BPS 2018).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terbukti bahwa baik temuan teoritis maupun empiris gagal memberikan penjelasan yang konprehensip mengenai dampak pengangguran terhadap derajat kesehatan masyarakat sehingga masih diperlukan studi lebih lanjut yang substansial. Riset ini mencoba untuk mengeksplorasi pengaruh tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan menganalisis data panel.

2. KAJIAN LITERATUR

Tinjauan Teoritis

Menurut model sosiologis klasik tentang teori perampasan ekonomi, orang yang menganggur akan memiliki lebih sedikit uang, dan lebih sedikit uang secara langsung maupun tidak langsung memperburuk prasyarat untuk kesehatan yang baik. Studi yang menggunakan model perampasan ekonomi mencakup sebagian besar studi historis periode antar-perang (Janlert & Hammarström, 2009). Orang-orang yang menganggur kekurangan makanan, perumahan dan pakaian yang memadai, Selama periode pengangguran pasca-perang, situasi ekonomi sangat berbeda, dan tunjangan pengangguran adalah aturan di sebagian besar negara. Selanjutnya adalah model stress yang dipopulerkan oleh Selye (1956). Model stres ini berusaha untuk menghubungkan rangsangan sosial dengan efek kesehatan pada manusia menggunakan mekanisme fisiologis sebagai faktor perantara. Model teoritis yang menguraikan hubungan antara rangsangan psikososial dan hasil kesehatan dalam kerangka teori stres dipresentasikan oleh French, J.R. and Kahn (1962). Dalam versi berbeda dari model ini telah disajikan oleh banyak penulis, termasuk oleh Kagan dan Levi (1975). Dalam model stres, rangsangan psikososial yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja bersama dengan masalah psikobiologis berupa efek dari faktor lingkungan dan genetik sebelumnya membangkitkan mekanisme stres, yang akan menghasilkan prekursor penyakit. Dalam perkembangan model yang lebih baru, dukungan sosial memainkan peran penting dalam memoderasi reaksi stress. Salah satu studi tentang stres ini dilakukan (Levi, 1997) tentang penutupan pabrik di Michigan tahun 1966 yang secara eksplisit menggunakan konsep stress.

Kajian Literatur

Pengangguran dan Derajad Kesehatan Masyarakat

Hubungan antara pengangguran dan kesehatan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Berbagai model penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh pengangguran pada kesehatan fisik dan psikologis. Laanani et al.(2015) menemukan bahwa tingkat bunuh diri secara statistik terkait dengan tingkat pengangguran di negara-negara Eropa Barat selama 2000-2010. Eva Mörk (2014) menemukan bahwa anak-anak dengan orang tua yang menganggur 17 persen lebih mungkin dirawat di rumah sakit daripada anak-anak lain akibat dari pengangguran orang tua di Swedia periode 1992-2007. Maruthappu et al., (2015) menemukan bahwa peningkatan pengangguran meningkatkan angka kematian akibat kanker prostat pada anggota OECD selama 1990-2009. Stroukal (2016), menemukan bahwa efek pengangguran pada orang sehat yang lebih miskin lebih besar di antara pria daripada wanita untuk Republik Ceko selama periode 2008-2011.

Pengeluaran Kesehatan dan Derajad Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Nnenna & Stanley, (2017) menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terhadap pengembangan sumber daya manusia di Nigeria, menggunakan uji model VAR menemukan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap derajad kesehatan. Nuhu et al. (2018) menemukan negara-negara yang memiliki Indek Pembangunan Manusa (IPM) lebih tinggi menghabiskan persentase lebih besar dari PDB mereka untuk bidang kesehatan, demikian sebaliknya. Edeme et al.(2017) menemukan pengeluaran kesehatan publik dan derajad kesehatan memiliki hubungan signifikan dalam jangka panjang di Nigeria. Mirahsani, (2016) menemukan bahwa pertumbuhan pengeluaran kesehatan telah menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia di Iran tahun 2000-2008. Ahmad & Hasan, (2016) menemukan bahwa ada hubungan jangka panjang yang stabil antara hasil kesehatan dan

tingkat pendapatan, pengeluaran kesehatan masyarakat, korupsi dan stabilitas pemerintah di Malaysia. Barenberg et al. (2015) menemukan bahwa pengeluaran publik untuk perawatan kesehatan mengurangi angka kematian bayi. Spesifikasi dasar menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan masyarakat sebesar 1% dari PDB tingkat negara bagian si India menyebabkan penurunan angka kematian bayi sekitar 8%.

Pertumbuhan Ekonomi dan Derajad Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya angka harapan hidup pada akhir abad ke-20 membawa konsekuensi positif pada ekonomi di seluruh dunia. Aghion & Howitt (2011) menemukan bahwa pertumbuhan derajad kesehatan masyarakat banyak tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan lain, hubungan antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan secara singkat dalam teori modal manusia yang memprediksi bahwa harapan hidup yang lebih tinggi meningkatkan investasi dalam keterampilan menghasilkan dan mengarah pada kinerja yang lebih baik oleh tenaga kerja (Oster et al.,2012). Hami (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Iran selama 1966-2013. Mahumud et al. (2013) menemukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpengaruh terhadap derajad kesehatan masyarakat yang lebih lama untuk Bangladesh. Ebenstein et al.(2015) menemukan hubungan positif yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan derajad kesehatan masyarakat di Tiongkok dari 1991-2012. Hansen et al.(2015) meneliti efek dari pertumbuhan ekonomi terhadap harapan hidup untuk 35 negara selama periode 1940-2000 dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menambah derajad kesehatan masyarakat selama abad ke-20 dan meningkatkan pertumbuhan populasi.

Upah dan Derajad Kesehatan Masyarakat

Literatur yang mempelajari dampak upah minimum terhadap kesehatan masih relative sedikit. Chen (2011) meneliti efek upah minimum pada indeks massa tubuh (BMI), menemukan adanya efek negative kenaikan upah minimum terhadap kesehatan periodel antara 1968- 2007 berhubungan dengan penurunan dalam BMI. Horn, Strain, & R (2017) menggunakan data dari faktor risiko perilaku sistem pengawasan menemukan kenaikan upah minimum berhubungan dengan peningkatan kesehatan. Kaestner (2018) mempelajari efek dari diperkenalkannya upah minimum nasional di Inggris pada tahun 1999, menemukan bahwa upah minimum berhubungan dengan peningkatan peringkat kesehatan yang ditandai dengan pengurangan stres keuangan karena adanya peningkatan pendapatan. Kaestner (2018) juga melaporkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan kesehatan populasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data panel menyangkut 34 provinsi dengan jangka waktu penelitian tahun 2010-2017 (274 observasi). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementrian Kesehatan Indonesia dan instansi lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Variabel derajad kesehatan masyarakat diproksi dengan angka harapan hidup, tingkat pengangguran diproksi dengan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi diproksi dengan pertumbuhan pruduk domestik regional bruto dan

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diproksi dengan belanja per urusan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap provinsi secara total untuk kesehatan.

Metode Analisis

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga pendekatan estimasi yaitu model *common effect, fixed effect* dan *random effect*. Model *common effect* diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan nilai intersep dan slope pada hasil regresi baik atas dasar perbedaan antar individu maupun antar waktu. Metode pendugaan parameter pada model *common effect* menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Secara umum, ersamaan model *common effect* ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{i=1}^{K} \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Untuk *i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K dengan*

Y_{it} adalah variabel respon pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

X_{kit} adalah nilai variabel bebas ke-k untuk *cross section* ke-I dan tahun ke-t

β_k adalah koefesien slope

β_0 adalah intersep model regresi

Uji Legrange Multiplier adalah sebuah pengujian untuk menentukan metode mana yang paling tepat, apakah *model common effect* ataukah *model random effect, d*engan hipotesis sebagai berikut:
H0 = Jika Chi Suare > 0,05, maka terima H0 yaitu MCE lebih tepat.
H1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H0, yaitu MRE lebih tepat

Metode pendugaan regresi data panel pada model *fixed effect* menggunakan Teknik penambahan variabel dummy atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV).* Terdapat dua asumsi yang terdapat pada model *fixed effect* yaitu sebagai berikut: Slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit individu

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{i=1}^{K} \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Untuk *i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K*

Slope konstan tetpi intersep bervariasi antar individu dan antara periode waktu

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{i=1}^{K} \beta_k X_{kit} + u_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

Untuk *i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K*

Bila pada *fixed effect* perbedaan antar individu dan waktu dicerminkan lewat intersep, maka pada random effect diakomodasi lewat error. Metode pendugaan regresi data panel pada model *random effect* menggunakan metode *Generalized Least Square (GLS*). Terdapat dua asumsi dalam *random effect* yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_i + \sum_{i=1}^{K} \beta_{ki} X_{kit} + u_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4)$$

Untuk *i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K*

Intersep dan slope berbeda antar individu dan antar waktu

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{i=1}^{K} \beta_{kit} X_{kit} + u_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5)$$

Untuk *i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K*

Penentuan model yang paling tepat diantara model *Common Effect, Fixed Effect* dan *Random Effect* terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1) Uji *Chow*

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah *model common effect* (MCE) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *model fixed effect* (MFE), denan hipostesisi;

H_0 = Jika Chi Suare > 0,05, maka yang diterima adalah MCE.

H_1 = Jika Chi Square < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FME

2) Uji Signifikansi *Random Effect*

Uji signifikansi *random effect* dilakukan untuk menentukan apakah model dengan pendekatan *random effect* lebih baik digunakan dari pada *model common effect*.

Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan dari pada model *random effect*, berdasarkan pada hipotesis berikut:

H_0 = Jika Chi Square > 0,05, maka terima H_0 yaitu MRE lebih tepat.

H_1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H_0, yaitu MFE lebih tepat

3) Uji *Breusch Pagan*

Uji *Breusch Pagan* dilakukan untuk melihat apakah terdapat efek individu, waktu atau keduanya pada *model fixed effect* dan *random effect*. Uji Legrange Multiplier adalah sebuah pengujian untuk menentukan metode mana yang paling tepat, apakah *model common effect* ataukah *model random effect* Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Jika Chi Square > 0,05, maka terima H_0 yaitu MCE lebih tepat.

H_1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H_0, yaitu MRE lebih tepat

Model regresi yang baik adalah model yang menghasilkan estimasi linier tidak bias (*Best Linier Unbiased Estimator*). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Model data panel memiliki potensi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kedua masalah asumsi klasik tersebut terjadi karena merupakan gabungan data yang bersifat *cross section* dan *time series* yang harus diatasi. Oleh karena itu, agar model dapat dianalisis dan memberikan hasil yang representatif, maka model harus memenuhi pengujian asumsi klasik yakni uji heteroskedatisitas dan uji autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada varian dari residual yang berbeda yang dapat membiaskan hasil yang telah dihitung. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara serangkaian data observasi yang diuraikan waktu (*time series*) dan individu (*cross section*). Namun menurut (Lestari & Setyawan, 2017) jika yang terpilihnya model *random effect*, maka tidak relevan untuk dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan model *random effect* menggunakan estimasi *Generalized Least Square* (GLS). Teknik GLS tetap menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*) walaupun data mengandung autokorelasi (Aziz, 2012).

Model Analisis Penelitian

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi *Ordinary Least Square* (*OLS)*. Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$DKM = \alpha + TPT_1X_1 + l_nUMP_2X_2 + \beta_3PE_3 + \beta_4lnPPBK_4 + \varepsilon \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(6)$$

Dimana DKM adalah derajad kesehatan masyarakat, α adalah konstanta, β1-β4 adalah koefesien regrasi, TPT adalah tingkat pengangguran, UMP adalah upah minimum provinsi, FE adalah pertumbuhan ekonomi dan PPBK adalah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan ε adalah variabel gangguan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian Uji Legrange Multiplier menunjukkan bahwa metode estimasi terbaik adalah *model random effect* karena dari hasil pengujian menunjukkan nilai Chi Square < 0,05. Dari hasil uji Chow yang dilakukan diperoleh nilai probabilitas *Chi-Square* 0,0000, < 0,05 dengan demikian *model fixed effect* yang lebih baik dibandingkan *model common effect*. Dari hasil uji Hausman diperoleh nilai *Chi-Square* 0.0231 < 0,05 artinya *model fixed effect* yang lebih tepat dibandingkan *model random effect*. Oleh karena itu, hasil analisis dengan *model fixed effect* dapat langsung dilakukan interpretasi.

Dari hasil pengujian multikolinearitas seperti terlihat pada Tabel 1 diperoleh koefisien korelasi antara variabel independen < 0,80 artinya tidak terjadi multikolineartias. Dari hasil *uji Glejser* pada tabel 2 terlihat tidak adanya pelanggaran heteroskedastisitas karena semua nilai prob lebih besar dari 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

	LNKES	LNUMP	PE	TPT
LNKES	1	0.0810	-0.1297	0.0596
LNUMP	0.0810	1	-0.2017	-0.0592
PE	-0.1297	-0.2017	1	-0.0807
TPT	0.0596	-0.0592	-0.0807	1

Sumber : *Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9*

Tabel 2. Hasil Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.088.414	3.063.600	1.008.100	0.3145
TPT	-0.018770	0.046442	-0.404156	0.6865
LNUMP	-0.089168	0.181991	-0.489958	0.6246
LNKES	0.013519	0.130449	0.103632	0.9176

Sumber : *Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9*

Berdasarkan data pada tabel 3 diperoleh F_{hitung} sebesar 1953.111 dan Prob (F-statistik) sebesar 0.0000. Dari hasil regresi tersebut probabilitas F_{hitung} (0.0000) lebih kecil dari level signifikan α = 5% artinya bahwa tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum provinsi secara bersamasama mempunyai pengaruh signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan tabel 3 yang signifikan adalah variabel tingkat pengangguran dan upah minimum provinsi karena memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05%. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki nilai probabilita yang lebih besar dari 0,05% menunjukkan variabel tersebut tidak signifikan mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan tabel 3 pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum provinsi terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia diperoleh nilai R^2 sebesar 0.996841. Hal ini berarti pengaruh variabel bebas terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia sebesar 99,68% sedangkan 0,32% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Tabel 3. Output Hasil Analisis Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.561.366	0.773538	7.189.521	0.0000
LNKES	0.040489	0.032294	1.253.754	0.2112
LNUMP	1.028.103	0.044928	2.288.324	0.0000***
PE	0.006595	0.004432	1.488.138	0.1381
TPT	-0.041682	0.011426	-3.648.044	0.0003***
R-squared	0.996841	F-statistic	1.953.111	
Adjusted R-squared	0.996331	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: *Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9*
*Catatan: ***, signifikansi 1%. **, signifikansi 5%. *, signifikansi 10%.*

Pengaruh Pengangguran terhadap Derajad Kesehatan Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia. Signifikannya pengaruh pengangguran terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia dikarenakan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur tidak memiliki pendapatan, sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan fisik mereka secara normal ditambah lagi dengan status social sebagai pengangguran yang kurang baik di tengah masyarakat. Kondisi ini akan medorong orang tersebut untuk lebih cepat stres yang dapat menganggu kesehatan baik secara fisik mapun non fisik sehingga akan berdampak besar terhadap derajad kesehatan mereka.

Temuan empiris ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Schmitz (2011), yang menemukan pengangguran berkorelasi negatif dengan kesehatan di Jerman. Pharr et al.(2012) menemukan pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesehatan mental orang yang diteliti, Marcus (2012) menemukan kesehatan mental pasangan menurun apabila pasangan hidupnya merupakan orang yang menganggur di Jerman. Farré et al.(2015) menemukan bahwa peningkatan tingkat pengangguran sebesar 10 persen menyebabkan peningkatan gangguan mental pada populasi yang teliti sekitar 3 persen dalam krisis keuangan di, Laanani, Ghosn, Jougla, & Rey (2015) menemukan bahwa tingkat bunuh diri secara statistik terkait dengan tingkat pengangguran di negara-negara Eropa Barat, Maruthappu et al., (2015) menemukan bahwa peningkatan pengangguran meningkatkan angka kematian akibat kanker prostat pada anggota OECD. Stroukal (2016), menemukan bahwa efek pengangguran pada orang sehat yang lebih miskin lebih besar di antara pria daripada wanita untuk Republik Ceko.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajad Kesehatan Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia. Tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat di Indonesia bisa juga dipengaruhi oleh kondisi ketimpanan pendapatan di Indonesia yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan Hami (2016) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Iran periode 1966-2013, Mahumud et al. (2013) menemukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpengaruh signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat yang lebih lama untuk Bangladesh. Ebenstein et al.(2015) menemukan pengaruh positif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan derajad kesehatan masyarakat di Tiongkok periode 1991-2012. Hansen et al.(2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menambah derajad kesehatan masyarakat selama abad ke-20 dan meningkatkan pertumbuhan populasi untuk 35 negara selama periode 1940-2000.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintan Bidang Kesehatan terhadap Derajad Kesehatan Masyarakat.

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap derajad keehatan masyarakat di Indonesia. Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia karena sebagian besar dana bidang kesehatan banyak digunakan untuk biaya aparatur. Disamping itu, investasi dibidang kesehatan juga memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup besar, sehingga ada kemungkinan pengeluaran pemerintah yang besar dibidang kesehatan akan berpengaruh terhadap derajad kesehatan masyarakat memerlukan waktu yang panjang.

Walaupun riset ini menemukan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak signifikan mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat, namun proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ini perlu terus ditingkatkan dengan terus merupaya meningkatkan pembangunan infparstruktur kesehatan, terus menambah tenaga ahli dibidang kesehatan, penambahan gizi masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan dan sebagainya, sehingga kedepan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ini benar-benar bisa membantu untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat masyarakat di Indonesia.

Temuan empiris penelitian ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Edeme et al. 2017; Nnenna & Stanley, 2017) yang membuktikan bahwa pengembangan derajad kesehatan masyarakat di Negeria sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Nuhu et al. (2018) menemukan negara-negara yang memiliki IPM lebih tinggi menghabiskan persentase lebih besar dari PDB mereka untuk layanan kesehatan. Mirahsani, 2016) bahwa pertumbuhan pengeluaran kesehatan di negara-negara ini telah menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia. Ahmad & Hasan, (2016) mengungkapkan bahwa pengeluaran kesehatan masyarakat dan korupsi mempengaruhi hasil kesehatan jangka panjang dan jangka pendek di Malaysia. Barenberg et al. (2015) peningkatan pengeluaran kesehatan masyarakat sebesar 1% dari PDB tingkat negara bagian menyebabkan penurunan angka kematian bayi sekitar 8%. Studi ini juga menemukan bahwa melek huruf dan urbanisasi perempuan juga mengurangi tingkat kematian bayi.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Derajad Kesehatan

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi derajad kesehatan mastarakat di Indonesia. Signifikannya pengaruh upah minimum terhadap derjad kesehatan masyarakat menandakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang dimilki masyarakat maka tingkat pendapatan mereka akan semakin tinggi. Karena dengan tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan meraka untuk menikmati makanan yang lebh bergizi, lingkungan yang lebih bersih dan mampu membiayai pengeluaran kesehatan mereka yang lain. Temuan empiris ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Chen (2011) yang menemukan adanya efek positif kenaikan upah minimum terhadap kesehatan. Horn, Strain, & R (2017) menemukan untuk pria, kenaikan upah minimum berhubungan dengan peningkatan kesehatan, sementara bagi wanita penurunan upah minimum berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Kaestner (2018) menemukan bahwa upah minimum berhubungan dengan peningkatan peringkat kesehatan yang ditandai dengan pengurangan stres keuangan karena adanyapeningkatan pendapatan. Kaestner (2018) juga melaporkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan kesehatan populasi.

5. KESIMPULAN

Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat, upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh dan positif namun tidak signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini berhasil menggambarkan membawa untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat pemerintah perlu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan tingkat upah. Oleh karena itu konsekwensi kepada pemerintah agar terus berpaya menarik investasi dengan membuat kebijakan yang mampu memberikan bebagai kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya diharapkan mampu membuka lapangan kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Demikian pula pemerintah pusat perlu terus mewajibkan penerapan anggaran kesehatan sebesar 10% dari total anggaran dan pendapatan daerah untuk bidang kesehatan pada setiap provinsi dan kabupeten kota, karena masih banyak daearah yang anggaran kesehatannnya masih berada di bawah 10% dari total anggaran dan pendapatan belanja daerah mereka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, *pertama* hanya menggunakan metode *Ordinary Least Squares* yang merupakan teknik estimasi sederhana, *kedua* hanya menggunakan variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum sebagai variabel independent yang mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk itu studi kedepan diperlukan metode pengukuran lain diluar model tersebut, dengan memasukkan variabel lain seperti, infrastruktur, ketidakstabilan politik, sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia dan perpajakan untuk lebih memastikan eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat sehingga memberikan hasil yang lebih konprehensif. Variabel-variabel penting ini tidak dimasukkan dalam riset ini karena tidak tersedianya data.

DAFTAR PUSTAKA

Aghion, P., & Howitt, P. (2011). The Relationship Between Health and Growth : When Lucas Meets Nelson-Phelps. *Review of Economics and Institutions*, *2*, 1–24. https://doi.org/10.5202/rei.v2i1.1

Ahmad, R., & Hasan, J. (2016). Public Health Expenditure , Governance and Health Outcomes in Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, *50*(1), 29–40.

Aziz, S. A. (2012). Metode Generalized Least Square (GLS) Untuk Mengatasi Kasus Autokorelasi Data Runtun Waktu. *Tesisi UNY*, 2.

Barenberg, A., Basu, D., & Soylu, C. (2015). The Effect of Public Health Expenditure on Infant Mortality : Evidence from a Panel of Indian States , 1983-84 to 2011-12 Infant Mortality : Evidence from a Panel of by. *Economics Department Working Paper Series*.

Chen, D. O. M. and Z. (2011). *The Impact of Minimum Wage Rates on Body Weight in the*.

Daly, M., & Delaney, L. (2013). Social Science & Medicine The scarring effect of unemployment throughout adulthood on psychological distress at age 50 : Estimates controlling for early adulthood distress and childhood psychological factors. *Social Science & Medicine*, *80*, 19–21.

Ebenstein, B. A., Fan, M., Greenstone, M., & He, G. (2015). Growth , Pollution , and Life Expectancy : China from 1991 – 2012. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, *105*(5), 226–231.

Edeme, R. K., Emecheta, C., & Omeje, M. O. (2017). Public Health Expenditure and Health Outcomes in Nigeria. *International Journal of Dual Diagnosis*, *2*(1), 1–7. https://doi.org/10.11648/j.ijdd.20170201.11

Eva Mörk, A. S. and H. S. (2014). Parental unemployment and child health. *Working Paper*,.

Farré, L., Fasani, F., & Mueller, H. (2015). The Effect of Unemployment on Mental Health in the Great Recession. *IZA Discussion Paper*.

French, J.R. and Kahn, R. L. (1962). Health, A Programmatic Approach to Studying the Industrial Environment and Mental. *Journal of Social Issues*, 1–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1962.tb00415.x

Hami, M. (2016). Economic Growth And Life Expectancy : The Case Of Iran. *Studies in Business and Economics*, *11*(11), 80–87. https://doi.org/10.1515/sbe-2016-0007

Hansen, C. W., And, & Lønstrup, L. (2015). The Rise of Life Expectancy and Economic Growth in the 20 th Century. *Discussion Papers on Business and Economics*, 1–20.

Horn, B. P., Strain, J. C., & R., M. M. (2017). Minimum Wage Increases Influence Worker Health ? *IZA*, (10479), 1–36.

Janlert, U., & Hammarström, A. (2009). Which theory is best? Explanatory models of the relationship between unemployment and health. *MC Public Health*, *9*, 1–9. https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-235

Kaestner, G. W. D. D. R. (2018). Effects Of The Minimum Wage On Infant Health. *NBER Working Paper Series Effects*, 1–42.

Laanani, M., Ghosn, W., Jougla, E., & Rey, G. (2015). Impact of unemployment variations on suicide mortality in Western European countries (2000 – 2010). *Labour Market, Unemployment and Health Impact*, 103–109. https://doi.org/10.1136/jech-2013-203624

Lestari, A., & Setyawan, Y. (2017). Analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belanja daerah di provinsi jawa tengah. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, *2*(1), 1–11.

Levi, L. (1997). Psychosocial environmental factors and psychosocially mediated effects of physical environmental factors. *Scand J Work Environ Health*, *23*(3), 47–52.

Lundin, A. (2011). Unemployment And Mortality And Morbidity – Epidemiological Studies. *Karolinska Institutet*.

Mahumud, R. A., Rawal, L. B., Hossain, G., Hossain, R., & Islam, N. (2013). Impact of Life Expectancy on Economics Growth and Health Care Expenditures : A Case of Bangladesh. *Universal Journal of Public Health 1(4):*, *1*(4), 180–186. https://doi.org/10.13189/ujph.2013.010405

Marcus, J. (2012). Does job loss make you smoke and gain weight? *The German Socio-Economic Panel Study at DIW Berlin*.

Maruthappu, M., Watkins, J., Taylor, A., Williams, C., Ali, R., & Zeltner, T. (2015). Unemployment and prostate cancer mortality in the OECD , 1990 – 2009. *Ecancer*, 1–13. https://doi.org/10.3332/ecancer.2015.538

Mirahsani, Z. (2016). The relationship between health expenditures and human development index. *Journal of Research & Health*, 1–5. https://doi.org/10.7508/jrh.2016.03.011

Mousteri, V., Daly, M., Delaney, L., Tynelius, P., & Rasmussen, F. (2019). Social Science & Medicine Adolescent mental health and unemployment over the lifespan : Population evidence from Sweden. *Social Science & Medicine*, *222*(January), 305–314. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.12.030

Nnenna, C., & Stanley, K. (2017). Effect of Government Expenditure on Human Capital Development in Nigeria. *International Journal of Banking and Finance Research*, *3*(2), 1–14.

Noordt, M. Van Der, Ijzelenberg, H., Droomers, M., & Proper, K. I. (2014). Health effects of employment : a systematic review of prospective studies. *Review of Economic Studie*, 730–736. https://doi.org/10.1136/oemed-2013-101891

Nuhu, K. M., Mcdaniel, J. T., Alorbi, G. A., & Ruiz, J. I. (2018). Effect of healthcare spending on the relationship between the Human Development Index and maternal and neonatal mortality. *Int Health*, (January), 1–7. https://doi.org/10.1093/inthealth/ihx053

Oster, E., Shoulson, I., & Dorsey, E. R. (2012). Limited Life Expectancy, Human Capital And Health Investments: Evidence From Huntington Disease. *NBER Working Paper Series Limited*, 1–42.

Pharr, J. R., Moonie, S., & Bungum, T. J. (2012). The Impact of Unemployment on Mental and Physical Health , Access to Health Care and Health Risk Behaviors. *International Scholarly Research Network*, *2012*. https://doi.org/10.5402/2012/483432

Razmi, M. J., Abbasian, E., & Mohammadi, S. (2012). Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Investigating the Effect of Government Health*, (5).

Schmitz, H. (2011). Why are the unemployed in worse health ? The causal effect of unemployment on health. *Labour Economics*, *18*(1), 71–78. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2010.08.005

Selye, H. (1956). The Stress of Life. *New York: McGraw-Hill Books*.

Stroukal, D. (2016). A Longitudinal Analysis Of The Effect Of Unemployment On Health. *International Journal of Economic Sciences DOI:*, *V*(2), 55–68. https://doi.org/10.20472/ES.2016.5.2.004

Tumino, A. (2015). The scarring effect of unemployment from the early ‘ 90s to the Great Recession. *ISER Working Paper Series*.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat

Asniar Ismail*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta membandingkan Pola dan Struktur Ekonomi antar Daerah Kabupaten/Kota, melihat ketimpangan pembangunan ekonomi Serta membuktikan apakah hipotesis atau kurva kuznet berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. Data yang digunakan yaitu Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, data jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, Serta data Pendapatan perkapita Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat selama periode Tahun 2015-2019. Adapun analisis data yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Korelasi Pearson dan Menguji Hipotesis Kurva Kuznets. Hasil penelitian ini menunjukkan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang dikategorikan sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh perekonomiannya karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PDRB perkapita yang tinggi yang mana berada di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau dikategorikan sebagai daerah yang tergolong daerah yang sudah maju namun perekonomian masih dalam keadaan yang tertekan dikarenakan nilai PDRB Perkapita tinggi diatas rata-rata PDRB perkapita Provinsi, namun memiliki nilai pertumbuhan ekonomi berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara dikategorikan sebagai daerah berkembang cepat karena memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi, namun memiliki PDRB perkapita lebih rendah dari PDRB perkapita daerah provinsi. Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu, dikategorikan sebagai daerah yang relatif tertinggal dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapitanya berada dibawah angka rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita provinsi. Nilai Indeks Willamson dan Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah yaitu lebih mendekati angka nol. Hal ini menunjukkan pemerataan perekonomian di Kalimantan Barat masih tergolong merata dengan ketimpangan ekonominya masih sangat rendah tapi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat didukung dengan hasil korelasi pearson yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05 (5%) taraf signifikan yang digunakan. Artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil (ketimpangan ekonomi) terhadap nilai PDRB. Selain itu hipotesis Kuznet atau Kurva Kuznet U terbalik tidak berlaku dalam penelitian ini.

JEL: O11
Kata Kunci : PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Tipologi Klasen, Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Korelasi Pearson, Kurva Kuznet

* Email: asniar.ismail@ekonomi.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh masing-masing orang, daerah satu dengan lainnya maupun negara satu dengan negara lainnya. Penting bagi kita untuk dapat memilki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestik Produk (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada PDRB suatu provinsi, kabupaten dan kota. Namun muncul kemudian alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan income per kapita (pendapatan per kapita).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karateristik suatu wilayah menyebabkan kecendrungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (M.P.Todaro, 2000).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecendrungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Mudrajat Kuncoro, 2004). Berikut akan menunjukkan data produk domestic regional bruto di Kalimantan Barat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui daerah dengan nilai PDRB yang paling tinggi yaitu di Kota Pontianak yaitu dengan rata-rata PDRB sebesar 22.919,35 Juta Rupiah. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Kalimantan Barat yang mana tentunya lebih maju dibandingkan dengan daerah lain baik secara ekonomi maupun secara infrastruktur sehingga kegiatan ekonomi lebih terpusat di Kota Pontianak seperti perdagangan, hotel dan restoran. . Untuk melihat ada atau tidak nya ketimpangan kita perlu juga melihat dari jumlah penduduk suatu wilayah tersebut, berikut akan menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten / Kota yang ada di Kalimantan Barat.

Tabel 1. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Konstan di Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Dalam Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sambas	11.226,27	11.813,97	12.411,93	13.036,21	13.673,21	12.432,32
2	Bengkayang	4.649,50	4.889,16	5.163,90	5.441,00	5.725,63	5.173,84
3	Landak	5.763,42	6.067,56	6.381,21	6.706,04	7.042,25	6.392,10
4	Mempawah	4.175,72	4.425,72	4.685,37	4.958,28	5.246,19	4.698,26
5	Sanggau	11.047,18	11.636,87	12.157,88	12.698,85	13.244,93	12.157,14
6	Ketapang	13.529,10	14.607,93	15.661,14	16.912,52	18.049,45	15.752,03
7	Sintang	7.830,07	8.243,74	8.683,37	9.158,73	9.624,62	8.708,11
8	Kapuas Hulu	5.301,11	5.580,75	5.881,74	6.189,36	6.438,81	5.878,35
9	Sekadau	3.432,93	3.636,66	3.848,26	4.074,06	4.297,59	3.857,90
10	Melawi	2.809,30	2.942,66	3.081,20	3.246,84	3.408,25	3.097,65
11	Kayong Utara	2.062,07	2.185,47	2.302,84	2.418,21	2.540,00	2.301,72
12	Kubu Raya	14.493,65	15.416,53	16.424,30	17.347,93	18.357,92	16.408,07
13	Kota Pontianak	20.747,49	21.801,14	22.881,97	24.006,13	25.160,03	22.919,35
14	Kota Singkawang	5.639,57	5.930,95	6.250,02	6.543,52	6.839,80	6.240,77
Kalimantan Barat		112346,76	118183,27	124289,17	130589,02	137121,18	124.505,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kalimantan Barat (Tahun 2015-2019)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat kita ketahui jumlah persebaran jumlah penduduk di Kalimantan Barat lebih banyak di Kota Pontianak selanjutnya di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sanggau sedangkan daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit yaitu di Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi dan Sekadau dengan rata-rata di bawah 300.000 Perbandingan hasil PDRB dan Jumlah Penduduk masing-masing Kabupaten / Kota akan menunjukkan besar kecilnya pendapatan perkapita atau yang dikenal dengan PDRB Per-kapita di masing-masing Kabupaten/kota yang ada Kalimantan Barat. Berikut akan menunjukkan data PDRB- Perkapita untuk masing-masing Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Dalam Jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sambas	523115	526367	529684	532609	535725	529500
2	Bengkayang	238610	242788	247084	251320	255261	247013
3	Landak	357608	362734	367790	372609	377305	367609
4	Mempawah	251775	255132	258216	261299	264225	258129
5	Sanggau	444596	451211	457701	463995	470224	457545
6	Ketapang	475985	485118	495087	504008	512783	494596
7	Sintang	396392	402212	407901	413369	418785	407732
8	Kapuas Hulu	245998	250400	254712	258984	263207	254660
9	Sekadau	193391	195611	197683	199576	201578	197568
10	Melawi	195999	199119	202306	205298	208417	202228
11	Kayong Utara	105477	107268	109101	110899	112715	109092
12	Kubu Raya	545409	554811	562917	570914	579331	562676
13	Kota Pontianak	607618	617459	627021	637723	646661	627296
14	Kota Singkawang	207601	211508	215296	219061	222910	215275
	Kalimantan Barat	4789574	4861738	4932499	5001664	5069127	4930920

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kalimantan Barat (Tahun 2015-2019)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai PDRB-Perkapita di masing-masing Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019. Dimana dapat diketahui Kota Pontianak memiliki nilai rata-rata pendapatan perkapita yang paling tinggi dan diatas rata-rata PDRB Perkapita Provinsi. Banyak sekali yang sudah meneliti tentang ketimpangan pembangunan ekonomi dimana hasil yang didapatkan berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Seperti pada penelitian dilakukan oleh di Sri Isnowati (2007) di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa mengikut tren kurva kuznet yang berebentuk u terbalik dimana pada tahap awal kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti

naiknya tingkat ketimpangan, namun pada akhirnya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada periode waktu penelitian akan menurunkan tingkat ketimpangan. Hasil yang berbeda juga didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Oleh Maretha (2017) Di Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan cenderung berbentuk U, sehingga hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur, dan nilai korelasi pearson negatif dan tidak signifikan, sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi, ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimanatan Barat serta menguji apakah kurva kuznet berlaku pada penelitian ini.

Tabel 3. PDRB Perkapita Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Dalam Ribu Rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sambas	21.460,42	22.444,36	23.432,71	24.476,14	25.522,81	23.467,29
2	Bengkayang	19.485,77	20.137,57	20.899,37	21.649,69	22.430,49	20.920,58
3	Landak	16.116,59	16.727,30	17.350,15	17.997,53	18.664,61	17.371,23
4	Mempawah	16.585,13	17.346,79	18.145,16	18.975,50	19.855,01	18.181,52
5	Sanggau	24.847,68	25.790,31	26.562,93	27.368,51	28.167,28	26.547,34
6	Ketapang	28.423,37	30.112,12	31.633,11	33.556,05	35.199,00	31.784,73
7	Sintang	19.753,35	20.496,01	21.287,94	22.156,31	22.982,25	21.335,17
8	Kapuas Hulu	21.549,40	22.287,34	23.091,73	23.898,62	24.462,91	23.058,00
9	Sekadau	17.751,24	18.591,29	19.466,82	20.413,58	21.319,74	19.508,53
10	Melawi	14.333,24	14.778,40	15.230,39	15.815,25	16.353,03	15.302,06
11	Kayong Utara	19.549,95	20.373,92	21.107,41	21.805,52	22.534,71	21.074,30
12	Kubu Raya	26.573,91	27.786,99	29.177,13	30.386,24	31.688,14	29.122,48
13	Kota Pontianak	34.145,61	35.307,83	36.493,15	37.643,51	38.907,60	36.499,54
14	Kota Singkawang	27.165,43	28.041,26	29.029,89	29.870,77	30.684,13	28.958,30
Kalimantan Barat		23.456,52	24.308,85	25.198,01	26.109,11	27.050,26	25.224,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Data Olahan)

2. KAJIAN PUSTAKA

Kuznet mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya. Kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan zaman telah mengakibatkan kenaikan kapasitas tersebut. Todaro (2003) terdapat beberapa karakteristik pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets yang hampir semua negara maju yaitu:

(a) Tingkat pertumbuhan *output* perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
(b) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor produksi yang dipergunakan untuk membuat output tersebut.
(c) Tingkat transformasi struktural ekonomi, sosial dan ideologi yang tinggi.
(d) Adanya kecenderungan negara-negara maju atau mulai maju perekonomiaanya sehingga berusaha merambah bagian-bagian dunia lain sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
(e) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Menurut Sjafrizal (2008) ada beberapa unsur utama yang dipertimbangkan dalam pengelompokkan wilayah tersebut, secara umum terdapat empat bentuk wilayah yang banyak

digunakan dalam analisa ekonomi regional, yaitu: *Homogeneus Region, Nodal Region, Planning Region,* dan *Administrative Region.*

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Menurut Todaro (2003) Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain :

1). Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangkan nilai out put yang dihasulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupaan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

2). Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjymlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3). Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen–komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4). Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi:

$$PDRB = C + I + G + (X - M) \quad \text{.....} \quad (1)$$

Dimana C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pembentukan modal, G adalah pengeluaran pemerintah, dan (x - m) adalah selisih nilai ekspor dan impor. perlu disepakati bahwa I (investasi) dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). G adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.

Kuznet mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya. Kemajuan teknologi,

kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan zaman telah mengakibatkan kenaikan kapasitas tersebut (Lincolin Arsyad, 1999).

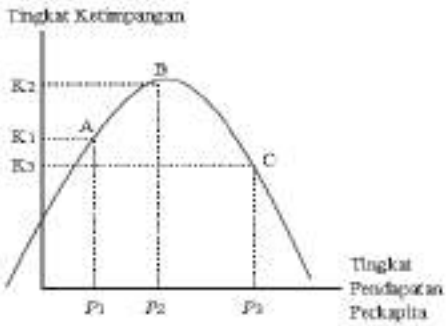

Gambar 1. Kurva Hipotesis Kuznets

Analisis Kuznets menggunakan pendekatan *test cross-section country*, dimana analisis ini dilakukan di banyak negara pada satu titik waktu tertentu, bukan membahas satu negara dalam kurun waktu yang panjang. Kurva U terbalik Kuznets ketika tingkat PDRB perkapita sebesar *P*1 terjadi ketimpangan pendapatan sebesar *k*1 (titik A). ketika tingkat PDRB perkapita meningkat menjadi P2 ketimpangan pendapatan juga meningkat menjadi *k2* (titik B), namun ketika tingkat PDRB perkapita meningkat menjadi *P*3 ketimpangan pendapatan menurun menjadi *k3* (titik C). apabila titik A, B dan C dihubungkan satu sama lain maka akan diperoleh garis lengkung yang disebut U terbalik.

3. METODOLGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder Penelitain juga merupakan penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda , yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta membandingkan Pola dan Struktur Ekonomi antar Daerah Kabupaten/Kota serta melihat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. (Sugiyono (2012:11) Adapun Penelitian ini dilakukan pada daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder yaitu data yang yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung baik melalui pihak kedua ataupun dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud digunakan sebagai data publikasi online dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. Data yang digunakan yaitu Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, data jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, Serta data Pendapatan perkapita Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah adalah Analisis Tipologi Klassen/Daerah (H. Aswandi dan Mudrajat Kuncoro, 2002). Kritera yang digunakan terdiri dari empat:

a) Kuadaran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high income and high growth) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat

b) Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (high income but low growth) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat
c) Kuadaran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (high growth but low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat
d) Kuadaran IV (keempat) adalah daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Daerah digunakan 2 jenis analisis yakni:

a) Indeks Ketimpangan Williamson (Syafrizal, 1997) yakni analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional (regional inequality) dengan rumusan sebagai berikut

$$IW = \sqrt{\sum \frac{(Y_i - Y)^2 \, f_i \, /n}{Y}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2)$$

Yi = PDRB per kapita di Kabupaten i
Y = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Kalimantan Barat
fi = jumlah penduduk di Kabupaten i
n = jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan yang makin melebar.

b) Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun rumusan dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut (L.G. Ying, 2000):

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_j}{Y}\right) x \; log \left[(\frac{y_j}{Y}) / (\frac{X_j}{X}) \right] \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (3)$$

I(y) = Indeks entropi Theil
Yj = PDRB per kapita kabupaten j
Y = rata-rata PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat
Xj = jumlah penduduk kabupaten j
X = jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan.

c) Korelasi Pearson. Dalam penelitian ini digunakan korelasi product-moment, dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua variabel. Rumus koefisien korelasi *product moment:*

$$r_{xr} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2 (N \sum Y^2 - (\sum Y)^2))}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4)$$

Keterangan:
r_{xr} : koefisien korelasi antara x dan y

N : Jumlah subyek
X : Skor item
Y : Skor total
∑X : Jumlah skor items
∑Y : Jumlah skor total
$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor items
$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor total

Dengan indikator bahwa apabila hasil pengujian menunjukkan angka signfikan maka akan hubungan dua arah variabel penelitian sangat kuat, dapat juga dilihat dari nilai nilai korelasinya semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat hubungan variabel yang diteliti (Sugiyono 2012:34).

d) Kurva U Terbalik oleh Kuznets. Dalam hal ini pembuktian kurva U-Terbalik digunakan sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004): Menghubungkan antara angka indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan Menghubungkan antara angka indeks Entropi Theil dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan indikator apabila kedua angka indeks tersebut menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets berlaku di Provinsi Kalimantan Barat sebaliknya apabila kedua angka indeks tidak menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets tidak berlaku di Provinsi Kalimantan Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tipologi Klasen

Untuk mengelompokkan daerah sesuai kuadran dapat kita lihat pada grafik 1 berikut ini yang menunjukkan perbandingtan pertumbuhan ekonomi dan perdapatan perkapita antara daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Barat selama periode penelitian Tahun 2015-2019.

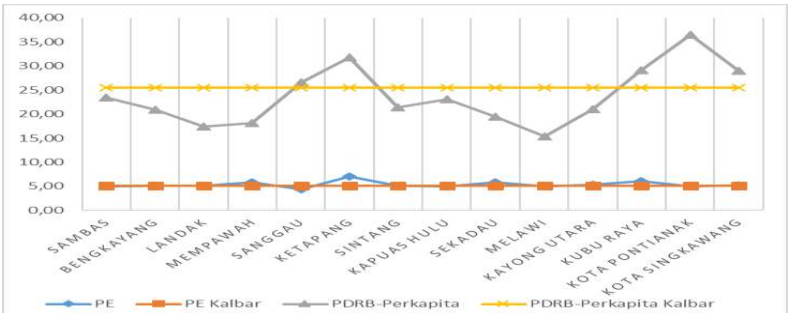

Sumber : Data Olahan BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Grafik 1. Perbandingan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dengan Nilai PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rupiah (Rp) dan Persen (%)

Berdasarkan grafik 1 di atas maka hasil dari analisis tipologi klasen dapat dibagi menjadi 4 kuadran seperti pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui daerah yang berada di Kuadran I yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. Dimana daerah yang berada di Kuadran I dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan PDRB perkapita yang tinggi yang mana berada di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapit Provinsi Kalimantan Barat. Ketiga daerah ini tergolong maju dan cepat tumbuh salah satunya dengan meningkatnya pengeluaran dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi daerah tersebut dimana ketiga daerah tersebut juga sudah memiliki pusat perbelanjaan besar seperti mall, di Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki transmart, di Kota Singkawang juga sudah memiliki mall, dan diketapang juga sudah memiliki mall hypermart. Hal ini juga menunjukkan daerah tersebut cepat maju dan cepat tumbuh.

Tabel 4. Pola dan Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

KUADRAN III	KUADRAN I
Pertumbuhan Ekonomi tinggi & PDRB Kapita Rendah (Berkembang Cepat)	Pertumbuhan Ekonomi Tinggi & PDRB Kapita Tinggi (Cepat Maju dan Cepat Tumbuh)
Landak, Mempawah, Sintang, Sekadau, Kayong Utara	**Ketapang, Kubu Raya, Singkawang**
KUADRAN IV	**KUADRAN II**
Pertumbuhan Ekonomi Rendah & PDRB Kapita Rendah (Relatif Tertinggal)	PDRB Kapita Tinggi & Pertumbuhan Ekonomi Rendah (Maju Tertekan)
Sambas, Bengkayang, Melawi, Kapuas Hulu	**Sanggau, Pontianak**

Sumber : Data Olahan BPS Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Sedangkan Daerah yang berada di Kuadran II yaitu Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak, dimana daerah ini dikategorikan daerah Maju tapi tertekan. Dimana daerah yang berada di Kuadran II dikategorikan sebagai daerah dengan PDRB Perkapita tinggi diatas rata-rata PDRB perkapita Provinsi, namun memiliki nilai pertumbuhan ekonomi berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Daerah yang berada di Kuadran III yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara dikategorikan sebagai daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi, namun memiliki pendapatan perkapita lebih rendah dari pendapatan perkapita daerah provinsi. Hal ini dikarenakan daerah yang ada dikuadran III memiliki peningkatan kondisi perekonomian namun masih belum mampu menyerap sebagain besar tenaga kerja nya sehingga munculah masalah seperti pengganggguran, tingkat kemiskinan yang mempengaruhi pendapatan perkapita penduduk daerah tersebut.

Daerah yang berada di Kuadran IV yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Daerah yang masuk pada kuadran IV yaitu daerah dengan kategori pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya berada dibawah angka rata-rata di provinsi.

Jika kita melihat secara keseluruhan di Kalimantan Barat yang menjadi penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB yang paling tinggi yaitu masih berada di Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, perburuan dan Perikanan. Dimana dengan menyumbang 22,94 % bagi PDRB Kalimantan Barat. Selain itu jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja tertinggi juga berada pada sektor tersebut yaitu dengan sumbangan 51,48 % dari tenaga kerja keseluruhan disemua sektor yang ada, artinya lebih dari setengah jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten/Kota yang

ada di Provinsi Kalimantan Barat masih menggantungkan nasib dengan menjadi atau bekerja sebagai Petani, Pekebun, Nelayan, atau Buruh Tani, Buruh Perkebunan, Atau Buruh Perikanan. Seperti yang kita ketahui sebagian besar yang bekerja sebagai petani berada di keluarga yang pra sejahtera atau dikategorikan sebagai keluarga dengan ekonomi lemah. Faktanya banyak petani atau nelayan yang menjual hasil panen atau tangkapan dengan harga yang murah, sehingga pendapatan yang mereka terima juga kecil. Belum lagi mereka yang bekerja sebagai buruh tani, perkebunan, atau nelayan yang hanya menerima upah yang sangat kecil pula. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani atau nelayan masih menggunakan teknologi yang tradisional atau sederhana. Ditambah dengan kecilnya atau menurunnya jumlah lahan yang mereka garap dikarenakan disalokasi atau pemindahgunaan lahan tentu akan berdampak pula pada hasil produksi yang dihasilkan.

Masalah lanjutan juga terjadi pada hasil produksi yang dihasilkan oleh petani atau nelayan. Sejauh ini yang diketahui tidak banyak petani atau nelayan yang mengolah hasil produksi berupa produk turunan lainnya atau produk kreatif lainnya dari hasil produksi mereka. Masyarakat yang berada di daerah pedalaman atau daerah yang kurang maju, cenderung kepada sesuatu pekerjaan yang cepat menghasilkan uang atau langsung bisa dinikmati hasilnya. Untuk lebih jelas dapat kita lihat di Grafik 2.

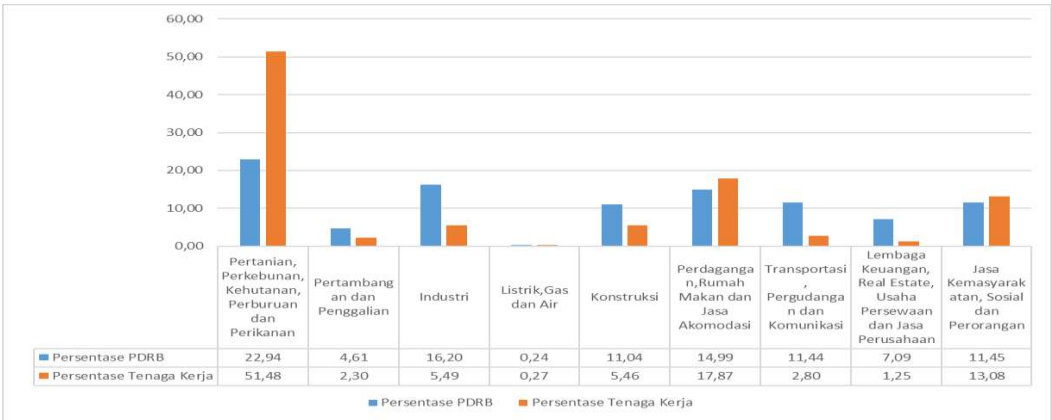

	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri	Listrik,Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan,Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
Persentase PDRB	22,94	4,61	16,20	0,24	11,04	14,99	11,44	7,09	11,45
Persentase Tenaga Kerja	51,48	2,30	5,49	0,27	5,46	17,87	2,80	1,25	13,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Grafik 2. Perbandingan Rata-Rata Persentase Sumbangan PDRB PerSektor dan Rata-Rata Persentase Penyerapan Tenaga Persektor di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Dalam %)

Berdasarkan Grafik 2 dapat diketahui perbandingan rata-rata PDRB persektor serta persentase tenaga yang terserap di setiap sektor tersebut. Dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar disektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih dari setengah dari jumlah tenaga kerja keseluruhan. Artinya masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Sebagian besar keluarga prasejahtera atau keluarga yang kurang mampu bekerja disektor tersebut sebagai petani atau nelayan. Dimana dari hasil produksi yang dihasilkan memang tinggi namun jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut tentu tidak sebanding. Jika kita lihat juga pada sektor yang lainnya angka persentase rata-rata hasil produksi yang dihasilkan dapat dikatakan lebih besar dari persentase rata-rata tenaga kerja yang bekerja disektor tersebut. Misalnya sektor pertambangan dan penggalian, Industri, Konstruksi dan sektor transportasi pegudangan dan komunikasi yang memberikan sumbangan PDRB yang tinggi.

4.2. Hasil Pengujian Indeks Williamson

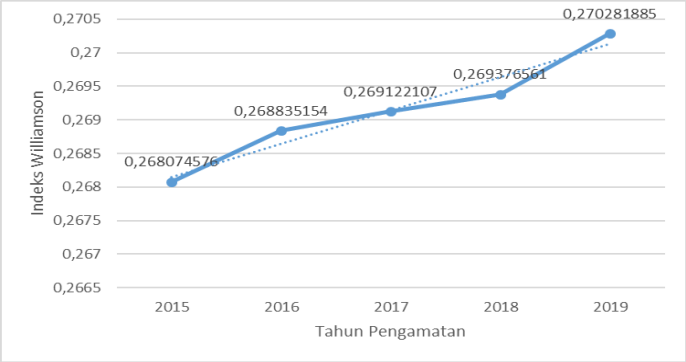

Sumber : Data Olahan BPS Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Grafik 3. Indeks Williamson di Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 3 dapat diketahui nilai indeks willamson di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah yaitu berada dibawah 0,35 atau lebih mendekati angka nol. Hal ini menunjukkan pemerataan perekonomi di Kalimantan Barat masih tergolong merata dan ketimpangan masih rendah. Seperti yang dilihat memang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terjadi tren kenaikan nilai Indeks Williamson namun masih berada dibawah 0,35 atau masih dapat dikatakan lebih mendekati angka nol. Selain itu untuk lebih jelasnya kita dapat juga melihat nilai indeks Williamson Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat berikut ini.

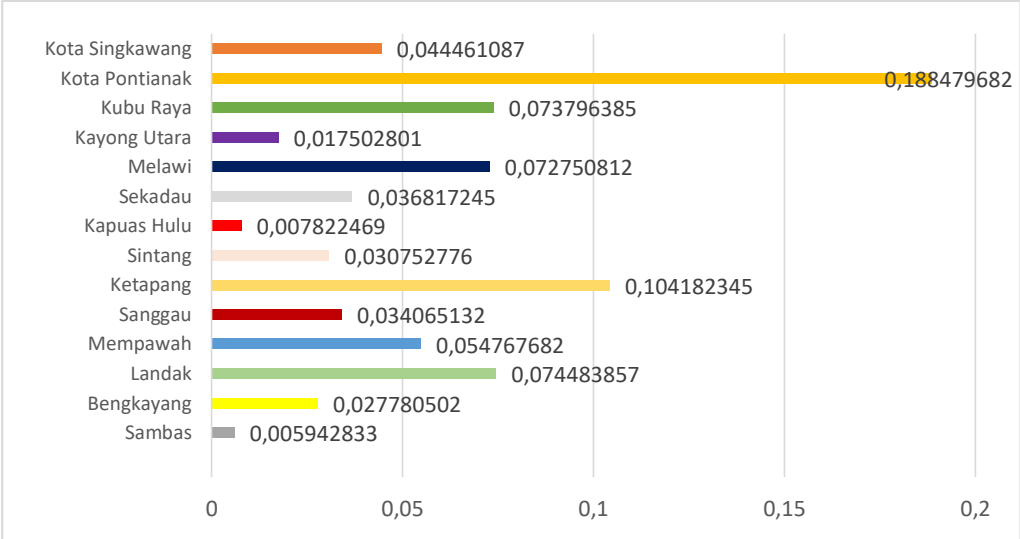

Sumber : Data Olahan BPS Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Grafik 4. Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Grafik 4 dapat diketahui bahwa nilai indeks willamson Kabupaten /Kota yang ada di Kalimantan Barat masih tergolong rendah yaitu berada dibawah 0,2 atau rata-rata lebiih mendekati angka nol, artinya dapat disimpulkan bahwa di Kalimantan Barat pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ketimpangan ekonomi yang sangat rendah, artinya sebaran pembangunan ekonomi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cukup merata di setiap daerah Kabupaten Kotanya. Dari rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 banyak juga Program-program pemerataan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ditujukan ke berbagai daerah yang masih tertinggal, sehingga dapat memacu pergerakan ekonomi daerah tersebut

dan pada akhirnya diharapkan bisa membantu masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada akhirnya juga dapat mengatasai permasalahan ketimpangan ekonomi antar daerah. Untuk memperkuat penyataan tersebut mari kita lihat korelasi pearson antara nilai Indeks Willamson dengan nilai rata-rata PDRB Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Pearson Antara Indeks Willamson dan PDRB Kab/Kota di Kalimantan Barat

		Indeks Williamson	PDRB
Indeks Williamson	Pearson Correlation	1	,684**
	Sig. (2-tailed)		,007
	N	14	14
PDRB	Pearson Correlation	,684**	1
	Sig. (2-tailed)	,007	
	N	14	14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26.1

Berdasarkan Tabel Uji Korelasi Pearson dua arah di atas, dapat diketahui nilai Signifikansi yaitu 0,007 atau kurang dari 0,05 (5%) taraf signifikan yang digunakan. Artinya dapat disimpulkan terdapat hubungan yang erat dan bersiifat positif antara Indeks Willamson dengan PDRB di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat. Artinya jika PDRB Rendah maka Indeks Willamson atau tingkat Ketimpangan juga rendah, begitu pula sebaliknyan jika PDRB tinggi maka nilai atau tingkat ketimpangan juga tinggi.

4.3. Hasil Pengujian Indeks Entrophi Theil

Berikut ini akan menujukkan.ketimpangan nilai Indeks Entropi Theil di Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2015-2019.

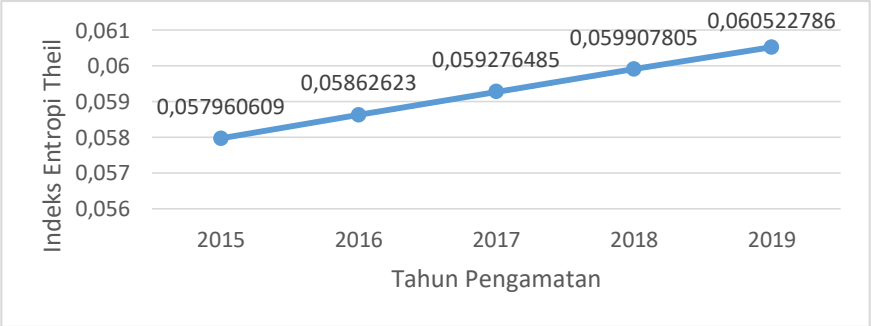

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Grafik 5. Indeks Entropi Theil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik 5 dapat diketahui nilai indeks entropi theil masih mendekati angka nol, namun menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Namun angka kenaikan tidak begitu signifikan dan masih rendah dan masih mendekati angka nol. Artinya dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian melalui indeks entropi theil menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 masih tergolong sangat

rendah. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat juga Indeks Entropi Theil masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

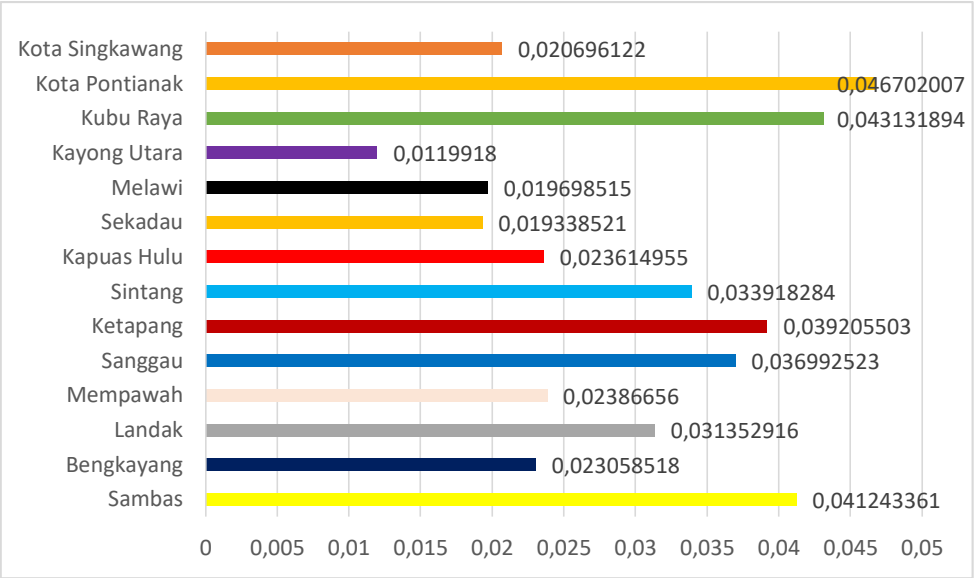

Sumber : Data Olahan 2020

Grafik 6. Indeks Entropi Theil di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantam Barat

Berdasarkan Grafik 6 di atas dapat diketahui nilai indeks entropi theil masing-masing Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang ditampilkan pada Grafik 6 nilai indeks entropi theil yang ada masih berada di bawah nilai 0,5 atau masih tergolong rendah atau mendekati angka nol. Artinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong sangat rendah. Dalam hal ini mungkin dibeberapa daerah misalnya saja Kota Pontianak memiliki angka Indeks entropi yang paliing tinggi dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lainnya. Tidak menutup kemungkinan nantinya Kota Pontianak akan mengalami ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat kelas atas, menengah dan kebawah. Artinya perlu kebijakan pemerintah Kota Pontianak untuk mengendalikan perekonomian dan pemerataan pembangunan baik disemua sektor yang ada di Kota Pontianak, dan tidak hanya fokus pada suatu sektor saja. Sebagai acuan dapat dilihat seberapa besar hubungan indeks entropi Theil dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat dilihat pad Tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Pearson Antara Indeks Willamson dan PDRB Kab/Kota di Kalimantan Barat

		PDRB	Indeks Entropi Theil
PDRB	Pearson Correlation	1	,928**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	14	14
\Indeks Entropi Theil	Pearson Correlation	,928**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	14	14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26

Berdasarkan Tabel Uji Korelasi Pearson dua arah di atas, dapat diketahui nilai Signifikansi yaitu 0,000 atau kurang dari 0,05 (5%) taraf signifikan yang digunakan. Artinya dapat disimpulkan terdapat hubungan yang erat dan bersiifat positif antara Indeks Entropi Theil dengan PDRB di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat. Artinya jika PDRB Rendah maka Indeks Entropi Theil atau tingkat Ketimpangan Juga Rendah, begitu pula sebaliknyan jika PDRB Tinggi maka nilai atau tingkat ketimpangan juga tinggi. Selain itu nilai korelasi juga menunjukkan angka yang mendekati 1 yaitu 0,928 atau dijadikan dalam satuan persen 92,8% hubungan yang sangat kuat antara PDRB dengan Indeks Entropi Theil. Dalam hal ini artinya uji Entropi yang dilakukan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 Kabupeten dan Kota

4.4. Analisis Kurva Kuznet Pada Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat

Menurut Simon Kuznets pada tahap awal pertumbuhan pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan merata. Penelitian ini yang kemudian dikenal dengan kurva Kuznets U terbalik. Berikut pada akan menunjukkan hasil analisis kurva kuznet dalam penelitian ini.

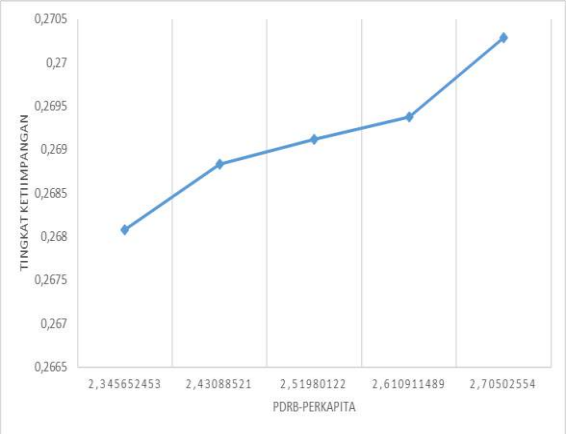

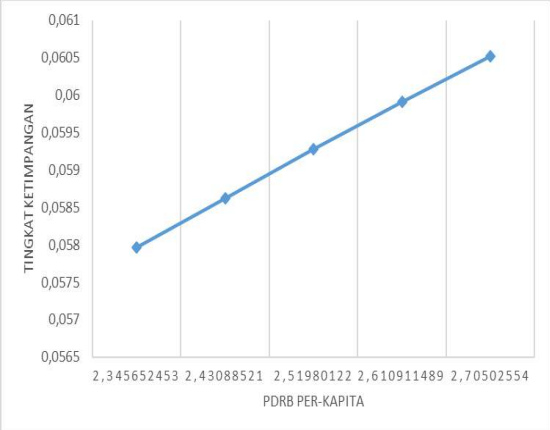

Sumber : Data Olahan 2020

Grafik 7. Hipotesis Kuznet Dengan Indeks Williamson (Kiri) dan Indeks Entropi Theil (Kanan)

Pada Grafik 7 dapat kita ketahui perubahan kecenderungan perubahan ketimpangan setiap tahunnya akan tetapi kecendrungan tersebut belum tentu dapat membuktikan hipotesis Kuznets denggan kurva u terbaliknya di Provinsi Kalimantan Barat. Dimana menurut Simon Kuznets pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan merata masih belum bisa dibuktikan di Penelitian ini.

Melihat dari Tren kenaikan tingkat ketimpangan setiap tahunnya akan menjadi kemungkinan dalam beberapa tahun lagi jika pemerintah tidak bisa mengatasi masalah perekonomian yang ada seperti pengangguran, kemiskinan insfrastruktur, masalah pendidikan dan kesehatan. Tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan pengentasan masalah perekonomi seperti pembangunan insfaratruktur yang menjadi penunjang kegiatan ekonomii suatu daerah. Selain itu, pemanfaatan secara maksimal program-program yang diberikan dari pemerintah

pusat bisa menjadi salah satu alternatif tambahan dalam upaya pemerintah menyelesaikan permasalah ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengatur dan pengelola kebijakan daerah Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caska dan RM. Riadi (2007) serta sejalan juga penelitian yang dilakukan oleh Maretha (2017). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda, M. R Kahirul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo (2013) dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Isnowati (2007).

5. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pola dan Struktur ekonomi antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian Tipologi Klasen dikelompokkan menjadi empat kuadran sebagai berikut:

a. Kuadran I yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. Dimana daerah masuk dalam Kuadaran I tergolong daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh perekonomiannya. dikategorikan sebagai daerah maju dan cepat tumbuh karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PDRB perkapita yang tinggi yang mana berada di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat.
b. Kuadran II yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau, Dimana daerah yang berada di Kuadran II yaitu daerah yang tergolong daerah yang sudah maju namun perekonomian masih dalam keadaan yang tertekan. dikarenakan nilai PDRB Perkapita tinggi diatas rata-rata PDRB perkapita Provinsi, namun memiliki nilai pertumbuhan ekonomi berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
c. Daerah yang berada di Kuadran III yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara dikategorikan sebagai daerah berkembang cepat karena memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi, namun memiliki PDRB perkapita lebih rendah dari PDRB perkapita daerah provinsi.
d. Daerah yang berada di Kuadran IV yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Daerah yang berada di Kuadran IV tergolong daerah yang relatif tertinggal dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapitanya berada dibawah angka rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita provinsi.

Berdasarkan analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil selama periode penelitian Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan: Nilai Indeks Willamson Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah yaitu lebih mendekati angka nol. Hal ini menunjukkan pemerataan perekonomian di Kalimantan Barat masih tergolong merata dan ketimpangan ekonomi masih tergolong sangat rendah di Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat didukung dengan hasil korelasi pearson yang menunjukkan nilai 0,007 atau kurang dari 0,05 (5%) taraf signifikan yang digunakan. Artinya ada hubungan yang Positif dan signifikan antara Indeks Williamson dengan nilai PDRB. Nilai Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah yaitu lebih mendekati angka nol. Hal ini menunjukkan pemerataan perekonomian di Kalimantan Barat masih tergolong merata dan ketimpangan ekonomi masih tergolong sangat rendah di Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat didukung dengan hasil korelasi pearson yang menunjukkan nilai 0,000 atau kurang dari 0,05 (5%)

taraf signifikan yang digunakan. Artinya ada hubungan yang Positif signifikan antara Indeks Entropi Theil dengan nilai PDRB.

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini maka hipotesis Kuznet atau Kurva Kuznet U terbalik tidak terjadi dalam penelitian ini dikarenakan selama peridoe penelitian terdapat hubungan atau tren positif antara ketimpangan ekonomi dan pendapatan perkapita.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

Caska dan RM. Riadi *"Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau* ". E-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Djojohadikusumo. (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Dasar Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Ekonomi Pembangungan. LP3ES.

Kuncoro, Mudrajad, & Aswandi, H. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2002, 27 – 45

_____.(2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta

_____. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta

_____. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta; Erlangga.

Majidi, N. (1997). *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma, LP3S.

Maretha Berlianantiya. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur. *E-Jurnal Equilibrium, Volume 5, Nomor 2.*

Maulana Arif. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *E-Jurnal* Vol.19 No.1.

Rama Nurhuda, M. R Kahirul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi kasus di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *E-Jurnal* Vol.1 No.4 Hal. 110-119.

Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

Sukirno. (2000). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika

Todaro, M.P. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1 Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFE.

_____(2000). *Economic Development, Seventh Edition*. New York: Addition Wesley Longman, Inc.

_____(2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.

Ying, L.G. (2000). China's Changing Regional Disparities during the Reform Period. *Journal Economic Geography*, XXIV (7).

http://www.bps.go.id di akses pada tanggal (11 Januari 2020: 12.00 P.m)

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur

Nurlinda*
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Junus Sinuraya†
Jurusan Komputer dan Informasi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the potential of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the economy during the Covid-19 pandemic. UMKM as a form of populist economy is a system based on the economic strength of the people. MSMEs have the potential to alleviate community poverty, level the economic level of the small people and provide foreign exchange income for the State, especially from the tax sektor. The potential of MSMEs is vulnerable to uncertain conditions such as during the Covid-19 pandemic. The performance of MSMEs during 2020 has decreased. Several factors that caused the performance of MSMEs to decline were due to decreased public demand, difficulty in finding raw materials and disruption of the distribution of raw materials as a result of supplier companies that closed or did not run their businesses, and difficulty accessing financing. This research is a qualitative research using secondary data. Collecting data using documentation through literature and literature review. Data were analyzed using descriptive analysis. The conclusion states that MSMEs are still a buffer for the movement of the people's economy during the Covid-19 pandemic even though its growth has decreased.

JEL: O10
Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Economic Potential, Social Economy

1. PENDAHULUAN

Merebaknya pandemic covid-19 menyebabkan terjadinya goncangan pada perekenomian dunia. Pelaksanaan kebijakan isolasi dan *social distance* (Ashraf, 2020) serta tetap tinggal dirumah (Donthu & Gustafsson, 2020) yang terpaksa harus diambil pemimpin dunia untuk mengendalikan penyebaran virus ini, pada akhirnya menjadi kebijakan tidak popular yang menyebabkan dunia usaha menjadi hancur (Sheth, 2020) (Ashraf, 2020) dan mengancam keberadaan banyak stratup yang inovatif (Kuckertz et al., 2020) hingga menyebabkan terjadinya krisis keuangan secara global (Shehzad et al., 2020). Dampak pandemic Covid-19 menyebar dari menurunnya harga saham di AS, Inggris, Spanyol, Hongkong dan Cina hingga harga saham turun sampai level ekstrim seperti yang terjadi di Jerman, Perancis dan Italia (Shehzad et al., 2020). Selain turunnya harga saham dunia industri di Amereka Serikat mengalami kondisi abnormal return terutama pada restoran, hotel dan motel yang memiliki negative return (Goodell & Huynh, 2020). Di Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020 IHSG jatuh 4,2% dan pada tanggal 13 Maret 2020 perdagangan saham dihentikan untuk

*nurlinda@polme.ac.id
†junus.sinuraya2012@gmail.com

pertama kalinya sejak Tahun 2008 (Soetjipto, 2020). Akan tetapi setelah keterpurukan tersebut IHSG di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan dan konsisten diata level 5.000 sejak Bulan Juli.

Di Swedia dampak Covid-19 mempengaruhi industri perhotalan, ritel dan jasa namun 30% UMKM akan optimis bertahan pada saat sulit, meskipun krisis mengganggu sumber daya bagi UMKM namun mereka akan menemukan pendekatan kreatif untuk menyebarkan sumber daya (Thorgren & Williams, 2020). Sebagian besar UKM yang menghadapai guncangan eksternal menunjukkan pengambilan keputusan UKM. Focus pada mengurangi arus kas negative daripada meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. UKM lebih memilih bangkrut daripada mendorong pada masalah keuangan di masa depan. UKM juga memilih strategi kelangsungan hidup dengan focus pada biaya bukan pada peningkatan pendapatan atau meningkatkan inovasi yang menyebabkan UKM mengabaikan alternative investasi dan cenderung mempertahankan sumber daya yang ada (Thorgren & Williams, 2020). Padahal dalam jangka panjang alternative insvestasi akan membantu UKM bertahan seperti investasi dalam teknologi terutama teknologi berbasis online

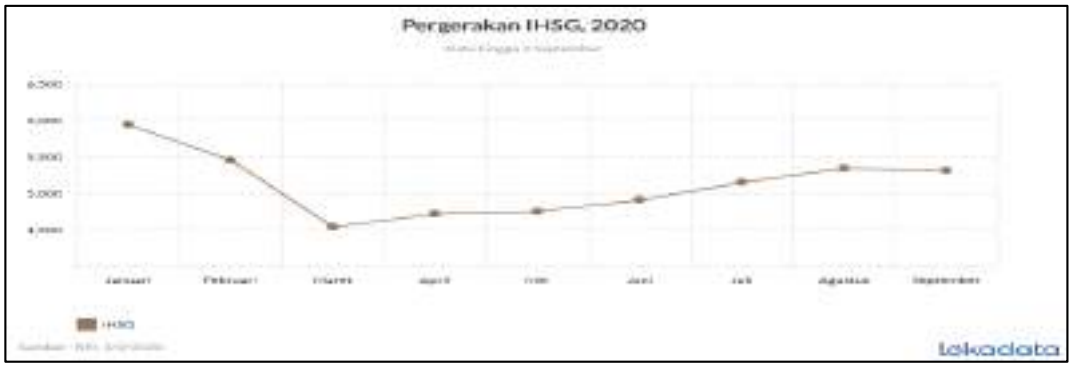

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 1. Pergerakan IHSG

IHSG yang menguat menunjukkan berjalannya perekonomian Indonesia. Akan tetapi pergerakannya masih belum mendongkrak kinerja ekonomi Indonesia.

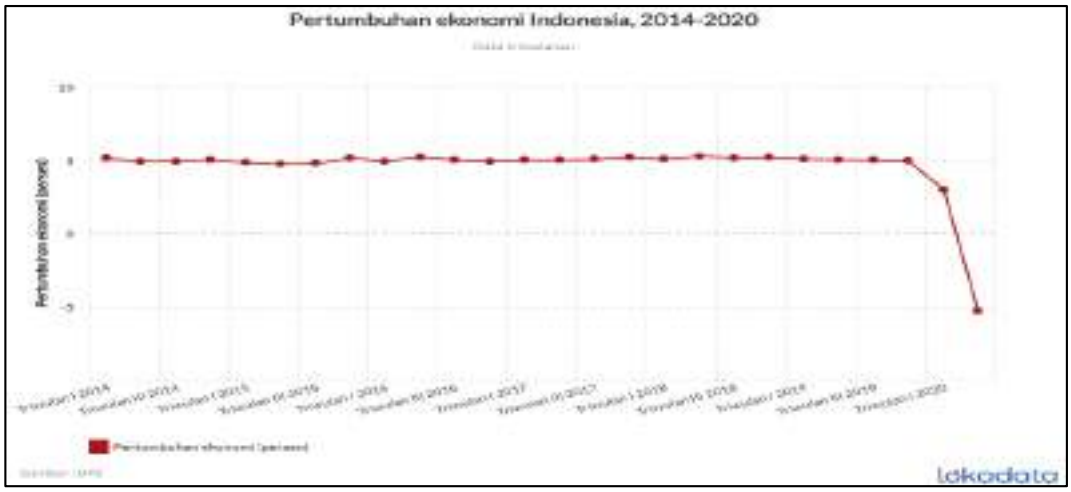

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan data BPS pada gambar 2 Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 berkontraksi 5,32% dari triwulan II 2019, dan berkontraksi sebesar 4,19% dari triwulan 1 2020. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh sektor usaha. Penurunan paling signifikan terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan mencapai 30,84%, disusul sektor penyedia akomodasi dan makan minum mencapai 22,02% . Namun demikian, walaupun sebagian besar investasi menunjukkan kinerja yang menurun, akan tetapi pada sektor social *enterpreneurship* masih tetap bertahan (Mirza et al., 2020).

Perkembangan ekonomi dunia yang turun juga berdampak pada Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar 2,97% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97% (www money.kompas.com). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 menurut Kepala BPS mengalami kontraksi -4.19%. Kontraksi ini terjadi karena investasi yang melemah dan penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga (www.bbc.com). Konsumsi rumah tangga yang turun pada akhirnya menyebabkan banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan, sebagai dampak daya beli masyarakat yang turun.

Banyaknya usaha yang memilih tutup atau bangkrut pada akhirnya menyebabkan kondisi perekonomian menjadi melemah. Di Indonesia pandemic Covid-19 berdampak pada sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, namun Sektor ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19 adalah rumah sektor industri tangga (Susilawati et al., 2020). Terganggunya system produksi serta rantai pemasok, transportasi dan distribusi secara global (Kumar et al., 2020) juga berdampak pada perekonomian di Indonesia ditambah lagi pendapatan yang turun. Meskipun banyak usaha yang bangkrut masih ada satu peluang yang dapat menjadi harapan bergulirnya ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM yang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah UMKM yang telah menerapkan dan tergabung dalam ekosistem digital, sehingga penting segera dilakukan adalah transformasi UMKM dari *offline* ke *Online*. Transformasi ini harus segera dilakukan mengingat adanya perubahan perilaku konsumen ke Online (www.liputan6.com). Penyebaran virus Corona pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, perubahan pasar langsung menjadi pasar *online* (Donthu & Gustafsson, 2020).

Pemanfaatan internet yang signifikan menunjukkan potensi untuk tumbuh kembang usaha dan bertahan dimasa pandemic covid-19 masih terbuka. Menurut publikasi *digital report* oleh *we are social* dan *Hootsuite* (2020) menunjukkan tren pengguna internet pada Januari 2020 mencapai 175,4 juta. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat perubahan perilaku konsumen.

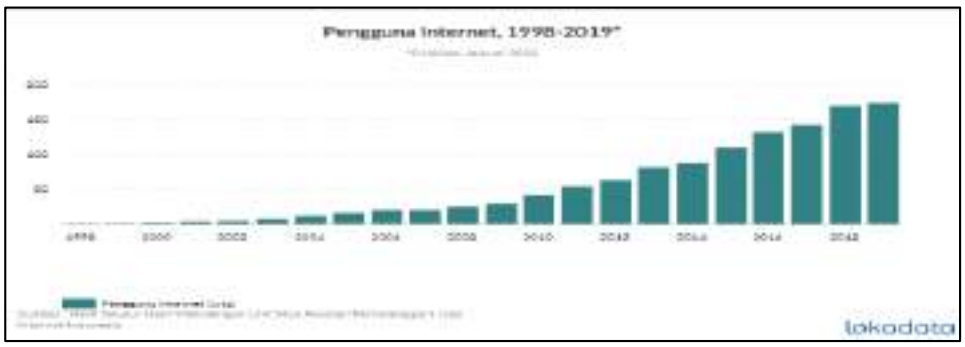

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 3. Pengguna Internet

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia juga ditunjukkan melalui survey yang dilakukan oleh *shopback* Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan gambaran dari tren bisnis online sepanjang tahun 2018 tersebut. Hasil survey diprediksikan bahwa akan terdapat perubahan seperti, 1) pola perilaku belanja bergeser ke *online*, 2) jasa pengiriman di hari yang sama jadi pilihan utama, 3) *installer* pindah ke lapak, 4) belanja online lebih diminati karena banyak promo yang ditawarkan, 5) pertumbuhan mobile wallet kian pesar, 6) penjualan tiket online meningkat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang ingin praktis dan cepat pada akhirnya membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Tentunya dengan memanfaatkan digital teknologi, UMKM masih memiliki peluang untuk menjadi pilar eknomi kerakyatan. UMKM sejak tahun 2016-2019 tumbuh sebesar 4,2% setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 50% sejak 3 tahun terakhir (Soetjipto, 2020). Akan tetapi menurut data center di Kementerian Koperasi dan UKM sejak mewabahnya pandemic Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan produk UMKM sebesar 57% (www.merdeka.com). Meskipun terdapat penurunan pendapatan, UMKM masih menjadi alternative bergeraknya perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan pada sifat UMKM itu sendiri yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha maupun menerapkan teknologi tepat guna, dan birokrasi sederhana. Alasan lainnya yang menyebabkan UMKM mampu bertahan adalah karena UMKM menghasilkan produk/jasa yang menjadi kebutuhan masayararakat, memanfaatkan sumber daya lokal (pekerja lokal dan bahan baku lokal). Merujuk pada penjelasan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai potensi UMKM menjadi ekonomi kerakyatan dimasa pandemic Covid-19

2. KAJIAN LITERATUR

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. UMKM dari segi omset mempunyai kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Usaha

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab II (Pasal 5) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,penciptaan lapangan kerja,pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Karakteristik UMKM merupakan "sifat atau kondisi fluktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya" (Rafinaldy, 2006). Kriteria UMKM dapat dilihat dari aspek komoditas yang dihasilkan dan aspek manajemen. Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik sebagai berikut;

1. Kualitasnya belum memenuhi standar
2. Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM.
3. Terbatasnya jenis produk,
4. Terbatasnya kapasitas dan price list produknya

Berdasarkan aspek manajemen karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

1. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
4. Sumber daya manusia "SDM" didalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mempuni.
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

Potensi UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa "Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi". Potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan).

Potensi internal yaitu (1) Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian; (2) Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian; (3) UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat; (4) Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber

daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan (5) Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.

Potensi Eksternal UMKM yaitu (1) Kepastian hukum bagi pengembangan UMKM; (2) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar; (3) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar); (4) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya; dan (5) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan melihat Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Potensi UMKM akan dilihat dari perspektif dalam menciptakan a) Potensi sumber pendapatan masyarakat (Jumlah Usaha/Perusahaan); b) Potensi penanggulangan penganguran (Jumlah Tenaga Kerja); c) Potensi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB); d) Potensi terhadap devisa negara; e) Potensi Investasi

.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan telaah literature. Jenis data menggunakan data sekunder berupa data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kajian pustaka. Objek penelitian ini adalah UMKM. Data dianalis menggunakan analisis deskriptif. Proses telaah data dimulai dengan identifikasi perkembangan UMKM dan permasalahannya, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran data dan menyajikannya secara naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia menunjukkan gambaran dari tren bisnis online yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Hasil survey diprediksikan bahwa akan terdapat perubahan seperti, 1) pola perilaku belanja bergeser ke online, 2) jasa pengiriman di hari yang sama jadi pilihan utama, 3) *installer* pindah ke lapak, 4) belanja online lebih diminati karena banyak promo yang ditawarkan, 5) pertumbuhan mobile wallet kian pesat, 6) penjualan tiket online meningkat.

Pesatnya perkembangan bisnis online dengan menawarkan berbagai kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi tenaga serta efisiensi biaya tentunya merupakan peluang yang baik bagi perkembangan usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif, bahkan di Indonesia sumber penghidupan bergantung pada sektor ini. UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral dan logam serta kuliner.

Walaupun dewasa ini UMKM memiliki potensi dalam menyokong perekonomian, namun UMKM ini bergerak dalam kondisi kompetitif dan ketidak pastian serta dipengaruhi ekonomi makro (Hapsari, 2014)**,** ditambah lagi lingkungan usaha yang buruk menyebabkan resiko kerugian lebih tinggi dari pada usaha besar. Permasalahan secara umum yang dihadapi UMKM adalah masalah finansial dan non finansial (Urata & Kawai, 2000), disamping masalah tersebut lebih lanjut Urata & Kawai (2000) menyebutkan bahwa penerapan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM, termasuk juga masalah perpajakan yang belum memadai, masih terjadi *mismatch* antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UKM, serta kurangnya *linkage* antar UKM sendiri atau antara UKM dengan industri yang lebih besar menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Disinilah peran pemerintah dan pihak terkait sangat penting untuk megembangan UMKM.

Upaya-upaya kongkrit merupakan amanah dari UU No.20/2008. UU No. 28/2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian kerakyatan, maka untuk mendukung peran strategis UMKM tersebut perlu dilakukan pemberdayaan UMKM secara komprehensif, sesuai amanat UU No.20/2008 tentang UMKM. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat) secara sinergis dalam bentuk iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya yang diamanahkan UU No. 20/2008 untuk meningkatkan potensi UMKM tersebut adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti: Penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan UMKM, Memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, dan Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Merujuk pada penjelasan maka langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah UMKM agar potensi ekonomi yang dimilikinya menjadi pilar ekonomi kerakyatan adalah 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif; 2) Bantuan permodalan dari Pemerintah; 3) Perlindungan Usaha; 4) Pengembangan Kemitraan; 5) Pemberikan Pelatihan; 6) Membentuk Lembaga Khusus; 7) Menguatkan Asosiasi; 8) Mengembangkan Promosi.

Ketika langkah-langkah kongkrit tersebut telah terlaksana maka Potensi UMKM dapat maksimal sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Jika di rinci maka UMKM berpotensi sebagai sumber pendapatan masyarakat, UMKM berpotensi mengatasi pengangguran, UMKM berpotensi pada PDB, Devisa Negara serta investasi.

1. Potensi UMKM Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat.

Potensi UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat dilihat dari banyaknya usaha yang tumbuh dan berkembang. Secara sederhana perbandingan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar terlihat sebagai berikut:

(Jumlah Usaha Kecil > Usaha Menengah > Usaha Besar) < Jumlah Usaha Mikro

Perbandingan diatas menunjukkan bahwa proporsi jumlah usaha kecil lebih banyak dari usaha menengah, jumlah usaha menengah lebih banyak dari usaha besar dan gabungan jumlah usaha kecil, menengah, besar jika dibandingkan dengan Jumlah usaha mikro maka lebih banyak usaha mikro. Merujuk perbandingan tersebut maka dapat dikatakan bahwa UMKM jauh lebih banyak semua total usaha. Oleh karenanya UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Gambar 4 menjabarkan jumlah UMKM yang tersebar di seluruh lapangan usaha.

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 4. Jumlah UMKM

Jumlah UMKM pada tahun 2018 tercatat sebanyak 64,2 juta unit, sedangkan pada Tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 5 persen menjadi 67,4 juta unit. Sepanjang kuartal II tahun 2020 menurut data BPS pertumbuhan lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif yakni sektor pertanian 16,24%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44% dan sektor pengadaan air 1,28%

2. Potensi UMKM untuk mengatasi penganguran

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi usaha yang cukup baik dimana semakin berkembang UMKM maka tingkat penyerapan tenaga kerja juga meningkat (Bustam, 2016). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) jumlah unit usaha UMKM sebesar 99.9% dengan tingat penyerapan tenaga kerja mencapai 97,22%. Perbandingan penyerapan tenaga kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

(Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Usaha Kecil > Usaha Menengah > Usaha Besar) < Penyerapan Tenaga Kerja usaha Mikro.

Perbandingan diatas menunjukkan bahwa proporsi penyerapan tenaga kerja usaha kecil lebih besar dari usaha menengah, penyerapan tenaga kerja usaha menengah lebih besar dari usaha besar dan gabungan penyerapan tenaga kerja dari usaha kecil, menengah, besar jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dari usaha mikro maka lebih banyak tenaga kerja yang terserap oleh usaha

mikro. Merujuk perbandingan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penyerapan jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM jauh lebih banyak dari usaha besar.

Potensi UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat disebabkan oleh efek dari terbukanya usaha baru. UMKM merupakan sektor usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat di masa krisis. UMKM merupakan salah satu alternative untuk menyerap tenaga kerja serta menekan angka penganguran saat ini melalui kewirausahaan, karena rata-rata UMKM mampu menyerap 3-5 tenaga kerja. Sifat Usaha UMKM yang fleksibel menyebabkan sektor usaha ini sangat mudah berkembang, terutama pada sektor perdagangan. Gambar 5 menunjukkan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sampai dengan tahun 2016 berdasarkan kode lapangan usaha.

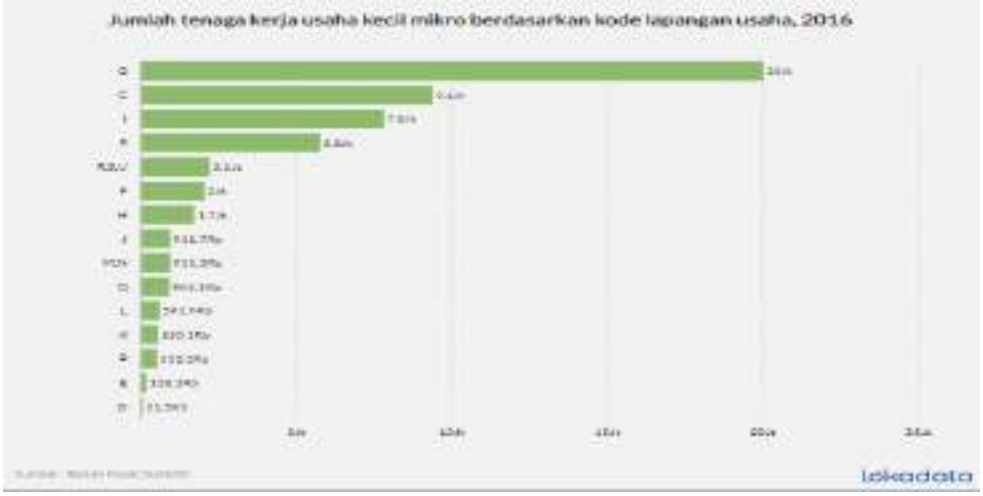

Sumber: www.lokadata.beritagar.id

Gambar 5. Jumlah Tenaga kerja UMKM

Pada Gambar 5 terlihat bahwa sejak tahun 2016 sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi sebesar 53,3 juta, ini berarti bahwa UMKM menjadi sumber pendapatan masyarakat yang tersebar pada beberapa lapangan usaha. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 adalah sebesar 116,4 jt 2018 sebanyak 117 juta sedangkan tahun 2019 diharapkan penyerapan tenaga kerja 97 % (Gambar 6).

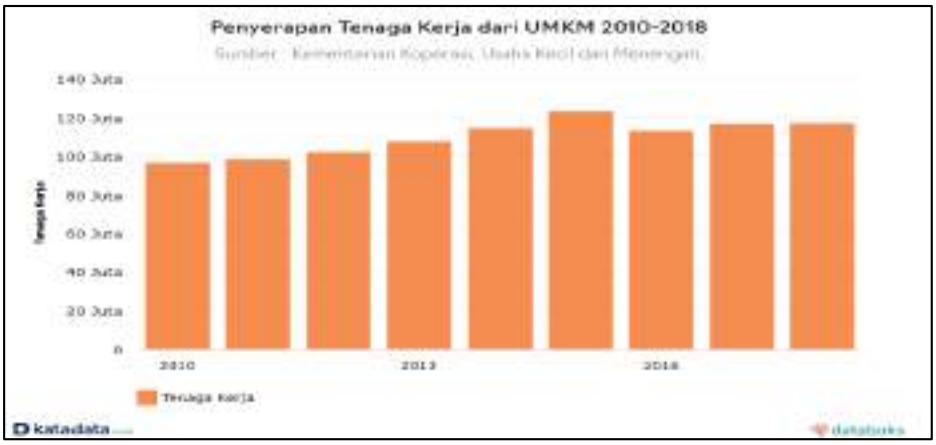

Sumber: databoks.katadata.co.id (2020)

Gambar 6. Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja UMKM berdasarkan Kode Lapangan

Kode	Keterangan	Jumlah	%
B	Pertambangan	532,1 Rb	1,0%
C	Industri Pengolahan	9,4 jt	17,7%
D	Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	61,5 Rb	0,1%
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbar, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi	168,3 Rb	0,3%
F	Konstruksi	2 Jt	3,8%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20 Jt	37,7%
H	Pengangkutan dan Pergudangan	1,7 Jt	3,2%
I	Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum	7,8 jt	14,7%
J	Informasi dan Komunikasi	938,7 Rb	1,8%
L	Real Estat	591,9 Rb	1,1%
M, N	Jasa Perusahaan	935,3 Rb	1,8%
P	Pendidikan	5,8 Jt	10,9%
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	905,1 Rb	1,7%
R,S,U	Jasa Lainnya	2,2 Jt	4,1%

Sumber: Data Diolah (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menyerap tenaga kerja paling tinggi sebesar 37,7% dari total keseluruhan total lapangan usaha pada sektor UMKM pada tahun 2016. Di masa pandemic Covid-19 lapangan usaha yang bertahan dan tumbuh masih menunjukkan pola yang sama yakni sektor perdagangan terutama sektor makanan/kuliner (Gambar 7).

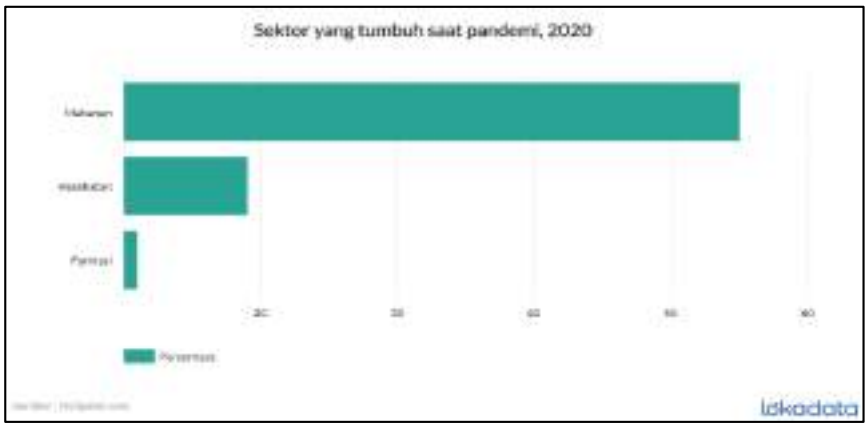

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 7. Sektor Usaha Saat Pandemi

Gambar 7 Menunjukkan sektor usaha yang bertahan dan tumbuh saat pandemi Covid-19. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan merupakan sektor UMKM yang paling tinggi di tumbuh sebesar 55% dan sektor kesehatan sebesar 19%. Penyerapan tenaga kerja di Tahun 2020 dimana kondisi perekonomian lesu akibat pandemic Covid-19, UMKM berpotensi dalam menyerap tenaga kerja, dimana banyaknya (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi pada usaha besar. Secara logika maka dalam kondisi ekonomi saat ini persentase penyerapan tenaga kerja UMKM cederung meningkat, sementara persentase penyerapan tenaga kerja Usaha Besar cenderung menurun. Potensi

ini tentunya menjadi angin segar dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kelaparan akibat dari Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang harus dilakukan dimasa pandemic Covid-19.

3. Potensi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Dari Sektor UMKM

Potensi PDB dari sektor UMKM dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kontribusi PDB oleh Usaha Besar < Usaha Kecil < Usaha Menengah = UMKM.

Secara umum potensi Usaha Kecil terhadap PDB didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Potensi Usaha Menengah terhadap PDB didominasi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Potensi Usaha Besar terhadap PDB didominasi oleh sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan target yang cukup tinggi terkait PDB dari sektor UMKM. Target yang tinggi ini menunjukkan besarnya Potensi PDB sektor UMKM pada perekonomian cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan besarnya target PDB dari sektor UMKM. Gambar 8 menunjukkan besarnya target tersebut.

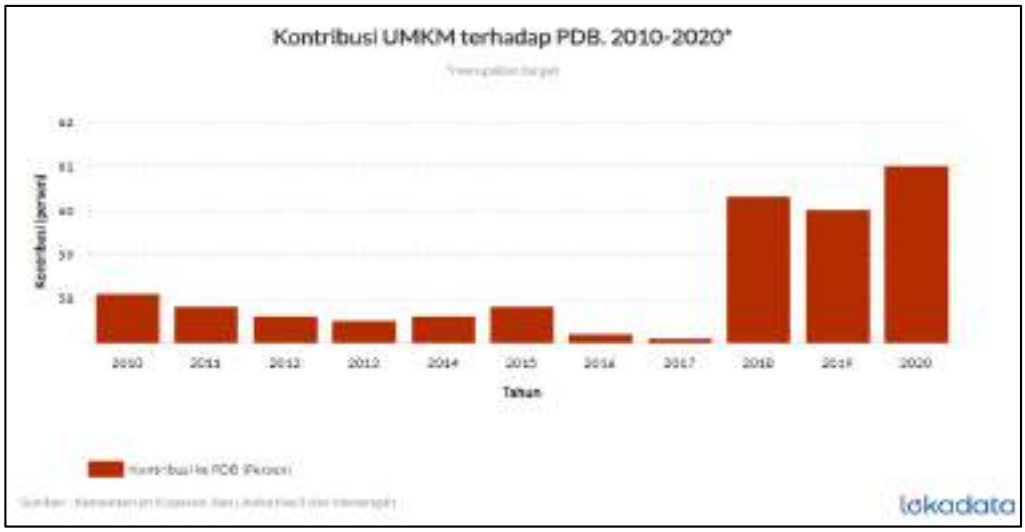

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 8. Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Pada masa krisis yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa sektor makanan tumbuh sebesar 55%. Sektor makanan ini banyak di dominasi oleh usaha kecil. Menurut data BPS pada kuartal II/2020 dari kelima sektor utama yakni, industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan mempengaruhi perekonomian sebesar 65%. Dari kelima sektor tersebut yang tumbuh positif hanya sektor pertanian sentor lainnya terkontraksi. Sektor pertanian di dominasi oleh UMKM. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling besar sebesar 29,22% diikuti dengan konstruksi sebesar 7,37% disusul perdagangan sebesar 6,71%, industri sebesar 6,49% dan pertambangan sebesar 3,75%. Tabel 3 Menjabarkan besarnya kontribusi sektor UMKM untuk memenuhi target PDB yang dibebankan dari tahun 2010 sd 2010. Kontribusi UMKM pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 61%.

Tabel 3 Menunjukkan bahwa UMKM menyumbang diatas 50% dari total PDB. Tentunya angka ini cukup signifikan. Data realisasi target ditunjukkan pada Gambar 9 total realisasi pada 2017 tercatat sebesar 57,08% , realisasi tahun 2018 tercatat 60,34% dan diprediksi meningkat sebesar 5%

pada tahun 2019. Merujuk pada target dan realisasi PDB, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM memegang peranan penting sumber PDB bagi Negara.

Tabel 3. Target PDB dari sektor UMKM

Tahun	Target (%)
2010	58,1
2011	57,8
2012	57,6
2013	57,5
2014	57,6
2015	57,8
2016	57,2
2017	57,1
2018	60,3
2019	60
2010	61

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020)

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 9: Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2010-2018

4. Potensi Devisa Negara dari Sektor UMKM

Berbicara mengenai devisa Negara maka tidak terlepas dari masalah ekspor. Perkembangan UMKM Indonesia cukup pesat. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Namun saat ini menurut data Kementerian Koperasi dan UKM kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14,5%. Kontribusi ini jika dibandingkan dengan todal ekspor nasional hanya berada pada kisaran 14%-15%. UMKM dominan bergerak pada sektor perdagangan kecil padahal devisi banyak disumbang oleh sektor industri. Rendahnya nilai ekspor UMKM menyebabkan devisa dari sektor ini tidak maksimal padahal jumlah UMKM sangat banyak.

Total jumlah devisa menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp 88,45 miliar. Pada tahun 2018 UMKM menyumbangkan devisa bagi negar sebesar Rp.

8.573,9 triliun kepada perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan usaha besar yang menyumbangkan devisa sebesar 5.464,7 triliun dengan total sebesar 62,9% juta.

5. Potensi Investasi pada UMKM

Berkembangnya UMKM pada akhirnya membuka peluang untuk menarik investor menginvestasikan dananya. Investasi dibutuhkan UMKM untuk membantu sektor permodalan. Urata & Kawai (2000) menyebutkan bahwa UMKM memiliki masalah utama yaitu permodalan yang akan digunakan dalam pengembangan usaha. Minat berinvestasi menurut Sukirno (2004) disebabkan oleh bunga, ramalan memperoleh keuntungan, tingkat pendapatan nasional, perusahaan memperoleh hasil keuntungan lebih, Kondisi politik, perkembangan politik, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Data dari kementerian koperasi dan UKM menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2018 sebesar 60,34%, menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17% dan nilai investasi sebesar 58,18%.

Berdasarkan penjabaran diatas UMKM saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian agar tetap bergerak. Walaupun UMKM menghadapi beberapa persoalan yang menghambat perkebangan UMKM seperti, kualitas SDM dan manajemen yang rendah, kurangnya finansial, dukungan institusi yang minim, inovasi dan teknologi yang belum tepat serta masalah segmen pasar dan bahan baku namun melihat perkembangan perilaku konsumen, sektor UMKM terutama pada sektor pertanian, makanan, dan kesehatan masih tumbuh. Selain itu merujuk data dari *Savills World Research* mengenai ekonomi digital Indonesia dari 2015 sampai dengan 2025 menunjukkan data bahwa ekonomi secara *online* akan terus berkembang dengan prediksi nilai mencapai $25 Miliar pada tahun 2025 untuk *online travel* sementara untuk *e-commerce* akan naik signifikan sebesar $82 miliar pada tahun 2025 (Gambar 10). Data ini tentu harus disikapi UMKM dengan segera menyiapkan usahanya untuk memanfaatkan teknologi *online* agar dapat tumbuh dan berkembang. Sudah waktunya UMKM menggunakan digital teknologi agar operasional bisnis sehari-hari dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, pengiriman hingga administrasi menggunakan teknologi digital.

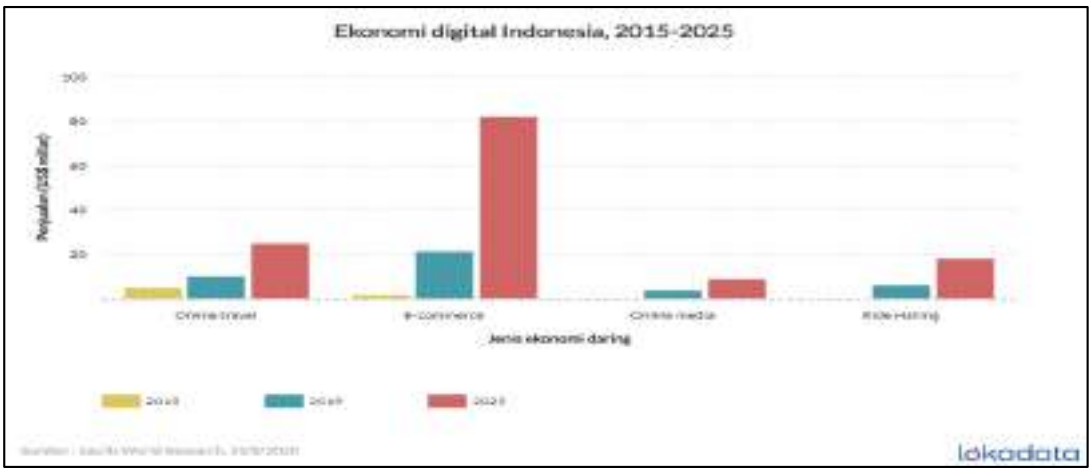

Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 10. Ekonomi Digital Indonesia

UMKM tidak akan mampu bertahan jika tidak membenahi sumber daya manusia dan melek teknologi. Beberapa penelitian menemukan hasil bahwa teknologi akan membantu kinerja UMKM [Nurlinda, Wardayani, et al. (2020); Nurlinda, Napitupulu, et al. (2020)]. Alasan utama mengapa UMKM harus menguasai teknologi adalah untuk memperluas wilayah bisnis dan menjangkau konsumen yang tidak dapat datang langsung ke toko, disamping itu aplikasi *online* ni ini menjadi sebuah media untuk pemasaran produk serta sebuah cara untuk meningkatkan omzet penjualan (Suryadi & Ilyas, 2018), untuk memanfaatkan teknologi *e-commerce* memenuhi strategi pemasaran produk yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan (Mumtahana et al, 2017).

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan penguasaan teknologi tidaklah cukup. UMKM juga harus didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Pada masa Covid-19 ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung UMKM seperti pemberian stimulus pada UMKM seperti a) pemberian restrukturisasi kredit perbankan atau perusahaan pembiayaan; b) subsidi bunga kredit; c) penundaan angsuran; d) hingga insentif perpajakan. Penguatan dari dalam dan dukungan dari luar akan semakin menguatkan UMKM untuk menyokong perekenomian mengingat keunggulan yang dimilikinya seperti kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi. Jika ditinjau potensi UMKM berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 maka UMKM berpotensi mengentaskan kemiskinan mengingat tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM; UMKM berperan dalam pemerataan ekonomi masyarakat, mengingat UMKM memiliki fleksibilitas dalam memilih lokasi usaha di berbagai tempat di seluruh Indonesia baik di kota maupun desa yang akhirnya berdampak pada pemerataan ekonomi; UMKM berpotensi sebagai sumber devisa Negara. Melihat kondisi ini tentunya ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk mengisi kas pemerintah melalui sektor pajak yang dapat ditarik dari penghasilan UMKM tersebut. mengingat keberadaan sektor UMKM memberikan sumbangsih yang berarti untuk pertumbuhan ekonomi (Resyniar, 2013).

5. SIMPULAN

UMKM berpotensi dalam menyangga perekonomian dimasa pandemic Covid-19. Potensi ini terlihat pada peran UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkontribusi pada PDB, Devisa Negara serta investasi. Potensi ini sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dimasa pandemic bisa bertahan dan tumbuh ketika memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital. Penelitian lebih lanjut dapat menggali secara kuantitatif potensi yang dimiliki UMKM sehingga dapat dilihat besaran potensi yang dimiliki oleh UMKM sebagai penopang perekonomian kerakyatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bantuan dana hibah penelitian yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and*

Experimental Finance, *27*, 100371. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371

Bustam, N. H. (2016). Pengaruh jumlah unit, PDB dan investasi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 2009-2013. *Jurnal Kutubkhannah*, *19*(2), 250–261.

Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, *117*(June), 284–289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008

Goodell, J. W., & Huynh, T. L. D. (2020). Did Congress trade ahead? Considering the reaction of US industries to COVID-19. *Finance Research Letters*, *April*, 101578. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101578

Hapsari, I. M. (2014). Identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh UKM Dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM. *Permana*, *V*(No. 2), 43–47.

Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Morales Reyes, C. A., Prochotta, A., Steinbrink, K. M., & Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis – A rapid response to the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Venturing Insights*, *13*(April). https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169

Kumar, A., Luthra, S., & Kumar, S. (2020). *COVID-19 impact on sustainable production and operations management*. *1*(May), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.susoc.2020.06.001

Mirza, N., Naqvi, B., Rahat, B., & Rizvi, S. K. A. (2020). Price reaction, volatility timing and funds' performance during Covid-19. *Finance Research Letters*, *April*, 101657. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101657

Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, *3*(1), 6. https://doi.org/10.23917/khif.v3i1.3309

Nurlinda, N., Napitupulu, I., Wardayani, W., Azlina, A., Andina, A., Ulfah, A., & Supriyanto, S. (2020). *Can E-Commerce Adoption Improve SME's Performance? (Case Studies on Micro, Small and Medium Enterprises with Gojek Services in Indonesia)*. https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2290850

Nurlinda, Wardayani, & Muda, I. (2020). Factors Affecting e-Commerce Adoption on Micro , Small and Medium Enterprises in Medan City Factors Affecting e-Commerce Adoption on Micro , Small and Medium Enterprises in Medan City. *ICOSTEERR 2018 - International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches*, *August*, 1301–1311. https://doi.org/10.5220/0010072313011311

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Tahun 2015-2019

Rafinaldy, N. (2006). Memeta Potensi dan Karakteristik UMKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru. *Infokop*, *22*((29)), 32–37.

Resyniar, G. (2013). Persepsi Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Brawijaya*.

Shehzad, K., Xiaoxing, L., & Kazouz, H. (2020). COVID-19's disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? *Finance Research Letters*, *April*, 101669. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101669

Sheth, J. (2020). Business of business is more than business: Managing during the Covid crisis. *Industrial Marketing Management*, *88*(April), 261–264. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.028

Soetjipto, H. N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*.

Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Perkasa.

Suryadi, D. F., & Ilyas, M. I. F. (2018). Adopsi Online Food Delivery Service Bagi Wirausaha Pemula. *Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora*, *2018*, 75–80.

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, *3*(2), 1147–1156. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954

Thorgren, S., & Williams, T. A. (2020). Staying alive during an unfolding crisis: How SMEs ward off impending disaster. *Journal of Business Venturing Insights*, *14*(May), e00187. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00187

Urata, S., & Kawai, H. (2000). The determinants of the location of Foreign Direct Investment by Japanese small and medium size enterprises. *Small Business Economics*, *15*, 79–103.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2008).

https://bps.go.id

http://www.depkop.go.id/

https://money.kompas.com/read/2020/06/09/113500126/pertumbuhan-ekonomi-masa-pandemi-8-negara-indonesia-paling-tinggi?page=all

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-523227533

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277806/banyak-umkm-indonesia-akan-bangkrut-di-desember-2020

https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-targetkan-2-juta-umkm-go-digital-hingga-akhir-tahun-2020.html#:~:text=Pemerintah%20Targetkan%202%20Juta%20UMKM%20Go%20Digital%20Hingga%20Akhir%20Tahun%202020,-%2Dcommerce.&text=Merdeka.com%20%2D%20Staf%20Khusus%20Menteri,digital%20hingga%20akhir%20tahun%202020.

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-15862513122

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia

https://mediaindonesia.com/read/detail/311965-pasca-covid-19-umkm-tulang-punggung-pemulihan-ekonomi

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

Akhmad Yani*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Macroeconomic indicators are very important as a basis for making improvements, enhancing and strengthening the economic performance of Sintang District in the future. The purpose of this study is to develop Macroeconomic Indicators to use for the development planning process in Sintang District. There are 3 data analyzes, namely quantitative analysis and qualitative analysis and trend analysis. This research has found that the contribution of the agricultural, forestry and fisheries sectors as well as the wholesale and retail trade, car and motorcycle repair sectors continues to decline. During the period of observation, the construction sektor decreased drastically. The rate of growth of the component of fixed capital formation has fallen dramatically. There is an increasing trend in the growth rate of imported components during both the observation period and the trend analysis period. The multiplier figure for household consumption expenditure is relatively small and the multiplier rate for government expenditure tends to increase and the multiplier figure for investment spending is increasing. The lower the ICOR number both in the observation time period and the trend analysis time period. The Sintang District Government is able to control the inflation rate at a level below 6 percent. The tendency for labor force participation rate to decrease, the open unemployment rate tends to increase and the Depency ratio rate tends to increase. The level of sectoral inequality which is categorized into relatively moderate inequality, and relatively low income inequality, however, the poverty rate continues to increase.

JEL: E66
Keywords: Indikator Makro Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya indikator ekonomi dalam proses pembangunan, maka perlu disusun indikator-indikator ekonomi secara komprehensif, lengkap, dan kontinyu. Penyusunan indikator-indikator ini dimaksudkan untuk mencapai visi pembangunan daerah yang sudah dibuat serta menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap indikator ekonomi daerah diharapkan penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dapat memfokuskan pada pengembangan ekonomi Kabupaten Sintang yang lebih baik agar sasaran-sasaran yang ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Selama ini indicator makro ekonomi belum secara optimal digunakan sebagai dasar untuk dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perekonomian Kabupaten Sintang. Bahkan analisis atas implikasi kinerja perekonomian tidak secara mendalam dilakukan. Tambahan pula variable yang dijadikan sebagai indicator makro ekonomi relative masih sedikit. Selain itu hasil monitoring, evaluasi dan analisi implikasi dari indicator makro ekonomi belum secara optimal

* Email: akhmad.yani@ekonomi.untan.ac.id

dijadikan sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan kebijakan perekonomian. Oleh karena itu analisis indikator makro ekonomi sangat penting dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar melakukan perbaikan, peningkatan dan penguatan kinerja perekonomian Kabupaten Sintang di masa mendatang. Tujuan Penelitian ini ini adalah untuk menyusun Indikator-Indikator Makro Ekonomi yang akan digunakan untuk proses (perencanaan, monitoring, dan evaluasi) pembangunan di Kabupaten Sintang dengan rincian: 1) Menentukan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian; 2) Menghitung indikator-indikator tersebut dengan data yang tersedia; 3) Melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan tersebut; 4) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian Kabupaten Sintang. Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Sintang untk mendapatkan data factual atas kinerja perekonomian Kabupaten Sintang yang digunakan sebagai salah satu cuan dasar dalam membuat perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang di masa mendatang terutama pembangunan ekonomi.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Perekonomian Daerah

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan kerangka berpikir aliran melingkar perekonomian seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Empat agen pelaku ekonomi regional yang menentukan perkembangan ekonomi daerah meliputi rumah tangga, produsen, perbankan dan pemerintah ataupun masyarakat internasional. Keempat pelaku tersebut saling berinteraksi dan saling melakukan transaksi ekonomi di suatu wilayah daerah. Transaksi-transaksi tersebut kemudian menghasilkan pendapatan, tabungan ataupun investasi. Namun, ada juga yang harus dikeluarkan dalam transaksi tersebut, seperti pajak dan belanja. Transaksi-transaksi tersebut menentukan pembangunan ekonomi di suatu daerah, sehingga dibutuhkan indikator-indikator ekonomi tertentu untuk mengukurnya dan merumuskan kebijakan yang tepat.

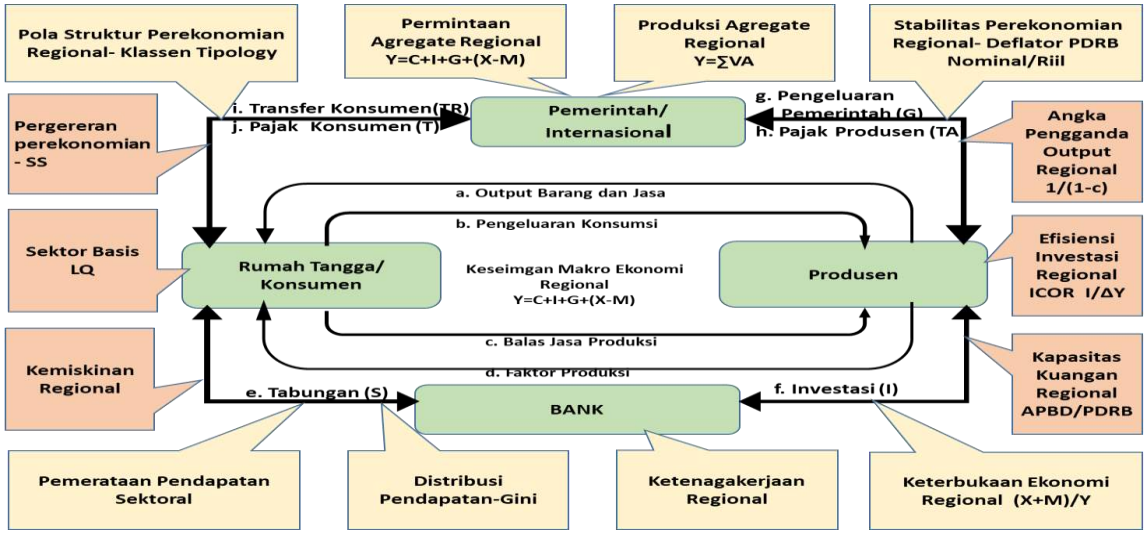

Secara konsepsional, dalam konteks makro ekonomi, pelaku ekonomi dalam sebuah perekonomian terbuka ada 4 (empat) yaitu produsen, swasta, rumah tangga, pemerintah dan luar negeri yang masing-masing memiliki aktivitas ekonomi. Seluruh aktivitas yang menjadi indicator

makro ekonomi sebagaimana yang tertera dalam gambar 2.1. di atas, merupakan arus yang dapat menghasilkan pendapatan ataupun pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, komponen pembentuk PDRB terdiri dari:

- Pengeluaran sektor rumah tangga: Konsumsi (*Consumption*, C)
- Pengeluaran sekor swasta: Investasi (*Investment*, I)
- Pengeluaran pemerintah: Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*, G)
- Sektor luar negeri/daerah: ekspor bersih (*net export*, NX)

Selain itu dalam pendekatan produksi, produksi regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan jumlah nilai tambah (*value added*, produk neto = output-input antara) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu yang tertentu (satu tahun). Mulai tahun 2010, ada perubahan dalam perhitungan PDB dan PDRB di Indonesia didasarkan pada 17 lapangan usaha atau sektor ekonomi setelah sebelumnya hanya didasarkan pada 9 sektor. Ke 17 lapangan usaha atau sektor ekonomi tersebut adalah:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
17. Jasa lainnya.

2.2. Angka Pengganda Output

Salah satu indikator makro ekonomi regional adalah Angka Pengganda Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB atau Pengeluaran Regional (*Regional Expenditure*), merupakan jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Angka pengganda (*multiplier*) output menunjukkan berapa kali output akan naik jika terdapat kenaikan pengeluaran otonom (konsumsi, transfer, investasi dan pengeluaran pemerintah). Untuk mendapatkan angka pengganda tersebut kita cukup melakukan turunan parsial (*partial derivative*) dari persamaan output keseimbangan tersebut:

1. Angka pengganda konsumsi otonom : $\frac{\partial Y^*}{\partial \bar{C}} = \frac{1}{1-c}$
2. Angka pengganda investasi otonom : $\frac{\partial Y^*}{\partial \bar{I}} = \frac{1}{1-c}$

3. Angka pengganda pengeluaran pemerintah otonom : $\frac{\partial Y^*}{\partial \bar{G}} = \frac{1}{1-c}$

2.3. Efisiensi Investasi

Indikator ekonomi lainya yang digunakan untuk melihat Indikator Makro Ekonomi suatu Negara atau daerah adalah Konsep *incremental capital-output ratio* (ICOR) atau sering disebut koefisien modal menunjukkan hubungan antara besarnya tambahan investasi (modal) dengan tambahan nilai output. Pentingnya ICOR ini akan tampak ketika kita menguji konsistensi antara target pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal yang mungkin akan terkumpul dari investasi yang sedang berjalan. Dengan demikian, ICOR dapat dipakai untuk menentukan laju pertumbuhan suatu perekonomian. Rumus yang digunakan untuk menentukan ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta PDRB} = \frac{I}{\Delta Y} \quad \text{..... (1)}$$

di mana: K adalah persediaan modal, Y adalah output (PDB atau PDRB), dan I adalah investasi.

2.4. Indeks Ketimpangan Sektoral

Pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi salah satu persoalan ekonomi. Setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan seringkali memasukkan dimensi pemerataan pembangunan. Sehingga pemerataan pembangunan menjadi salah satu Indikator Makro Ekonomi. Dalam konteks ini, Indeks Ketimpangan Sektoral digunakan untuk melihat tinggi rendahnya ketimpangan yang terjadi dari hasil pembangunan suatu daerah. Untuk menghitung ketimpangan sektoral, digunakan sebuah formula, yaitu Indeks Ketimpangan Sektoral (IKS). Indeks tersebut mengukur tingkat ketimpangan antar sektor dalam PDRB. Indeks dihitung dengan formula seperti berikut:

$$IKS = \left[\frac{\sum_{i=1}^{n}|Y_i - \bar{Y}|}{2(n-1)\bar{Y}}\right] x\ 100 \quad \text{..... (2)}$$

dimana Y adalah PDRB dan i adalah sektor.

Nilai IKS berada pada interval 0 dan 1. Nilai 0 (tidak ada ketimpangan) berarti PDRB terdistribusi secara merata ke seluruh sektor dan 100 (timpang sempurna) berarti PDRB hanya terdistribusi sepenuhnya pada satu sektor.

2.5. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *demand-pull inflation* dan *cost -push inflation*. *Demand-pull inflation*, atau inflasi tarikan permintaan, adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa pada saat tertentu. Sedangkan *cost-push inflation*, atau inflasi dorongan penawaran, adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Inflasi sering dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan PDRB deflator. Secara matematis bentuk formula inflasi adalah:

$$\text{Inflasi} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} x100\% \quad \text{..... (3)}$$

Dasar harga yang dipergunakan dalam perhitungan inflasi adalah harga konsumen (*consumer price index*, CPI), indeks harga produsen (*producer price index*, PPI) atau deflator PDRB. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur

tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Data dua indeks pertama kebanyakan tidak dimiliki oleh daerah, sehingga perhitungan inflasi sering dilakukan dengan menggunakan PDRB deflator. PDRB deflator memiliki nilai lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari satu. Nilai deflator PDRB lebih besar atau sama dengan satu berarti harga-harga umum mengalami peningkatan atau paling tidak sama. Sebaliknya, nilai deflator PDRB lebih kecil dari satu berarti harga-harga umum mengalami penurunan. Deflator PDRB dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Deflator PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{\text{Harga Berlaku}}}{\text{PDRB}_{\text{Harga Konstan}}} \quad \text{.....} \quad (4)$$

PDRB deflator adalah rasio antara PDRB nominal (atas harga berlaku) dan PDRB riil (atas harga konstan). PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah diukur dengan harga berlaku saat itu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB = \sum_i^n P_i Q_i \quad \text{.....} \quad (5)$$

dimana harga P_i yang dipakai untuk perhitungan adalah harga berlaku saat output diproduksi (tahun berjalan). Sementara itu, PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Dalam perhitungan PDRB harga konstan, faktor perubahan harga telah dikeluarkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB = \sum_i^n \overline{P_i} Q_i \quad \text{.....} \quad (6)$$

dimana harga $\overline{P_i}$ yang dipakai untuk perhitungan adalah harga tahun dasar (*base year*). Dengan demikian:

$$deflatorPDRB_t = \frac{PDRBnominal_t}{PDRBriil_t} \; x \; 100\% \quad \text{.....} \quad (7)$$

Dengan menggunakan indeks ini, inflasi dapat dirumuskan:

$$INF_t = \frac{deflatorPDRB_t - deflatorPDRB_{t-1}}{deflatorPDRB_{t-1}} \; x100\% \quad \text{.....} \quad (8)$$

2.6. Kesempatan Kerja

Ada tiga indikator yang umum digunakan untuk mengukur kesempatan kerja di suatu daerah, yaitu: Rasio Ketergantungan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio, DR*) adalah rasio antara jumlah penduduk usia produktif (NUP) dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (NUTP). Dengan demikian, rasio ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$DR = \frac{NUTP}{NUP} \quad \text{.....} \quad (9)$$

Semakin tinggi rasio ketergantungan, berarti semakin banyak jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif. Sebagai contoh, apabila rasio ketergantungan sama dengan 20, maka artinya setiap penduduk usia produktif menanggung 20 penduduk usia tidak produktif. Pada kenyataannya, terdapat penduduk yang masuk dalam usia produktif tetapi tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, tidak semua

penduduk usia produktif yang bekerja. Angkatan kerja, disimbolkan AK, (*labor force*) adalah penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase jumlah penduduk usia produktif yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan (AK) terhadap total jumlah penduduk usia produktif (NUP). Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$TPAK = \frac{AK}{NUP}\ x100\% \quad \text{.....} \quad (10)$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (*Open Employment Rate, OUR*). Pengangguran terbuka terdiri dari: (1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Jika jumlah penduduk usia kerja yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan kita simbolkan dengan (NUPTB) dan jumlah penduduk usia kerja yang sudah bekerja kita simbolkan seperti di atas (AK), maka tingkat pengangguran terbuka dapat dirumuskan sebagai:

$$OUR = \frac{NUPTB}{AK}\ x100\% \quad \text{.....} \quad (11)$$

2.7. Pemerataan Pendapatan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di Indonesia. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dicermati karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pemerataan pembangunan biasanya sangat terkait dengan kemiskinan karena semakin rendah tingkat kemerataan berarti semakin lebar jurang atau *gap* antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, maka secara logika kemiskinan semakin meluas. Ada beberapa cara untuk mengukur kesenjangan dan distribusi pendapatan, namun alat analisis yang sering digunakan adalah Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

3. METODA PENELITIAN

3.1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat sekunder yang seluruhnya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang.

3.2. Alat Analisis

Tahap analisis data dapat dilakukan setelah data yang dibutuhkan dalam proses penelitian didapatkan secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis analisis akan menentukan keakuratan dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat dua macam analisis data, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini meliputi beberapa alat analisis yang secara umum digunakan untuk melihat kinerja perekonomian ditampilkan dengan berbagai statistika deskriptif yang relevan. Analisis Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting untuk dijadikan sebagai sebuah deskripsi yang utuh dan komprehensif dari hasil analisis yang mendalam

terhadap Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang. Analisis Trend digunakan untuk mencari trend dengan menggunakan metode kudrat terkecil (Least Square Methods), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

3.3. Variabel Indikator-Indikator Ekonomi

Indikator-Indikator makro ekonomi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Indikator pendapatan perkapita
2. Indikator laju pertumbuhan PDRB
3. Indikator kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha
4. Indikator kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan
5. Indikator angka pengganda konsumsi rumah tangga
6. Indikator angka pengganda pengeluaran pemerintah
7. Indikator angka pengganda investasi
8. Indikator ICOR
9. Indikator tingkat inflasi
10. Indikator pengangguran terbuka
11. Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja
12. Indikator dependency ratio
13. Indikator tingkat ketimpangan sektoral
14. Indikator tingkat ketimpangan pendapatan
15. Indikator tingkat kemiskinan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendapatan Per Kapita

Jika diamati dari PDRB kapita, selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019, PDRB Bruto perkapita Kabupaten Sintang, relative lebih rendah dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kalimantan Barat. Sekalipun menunjukkan trend yang meningkat, namun ada kecenderungan kenaikan PDRB Bruto perkapita Kabupaten Sintang lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan PDRB perkapita Kalimantan Barat. Pada tahun 2015 PDRB Bruto perkapita Kabupaten Sintang sebesar Rp. 19.753.340,-, sementara PDRB Bruto perkapita Kalimantan Barat pada tahun yang sama sebesar Rp. 23.460.000,-.. Selain itu trend 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2020-2024 juga menunjukan PDRB Bruto perkapita Kabupaten Sintang, mengalami peningkatan yang lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan PDRB Bruto perkapita Kalimantan Barat. Jika dilihat dari rata-rata pertahun selama periode waktu pengamatan, pendapatan perkapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp 21,335,166,-, sementara itu rata-rata pendapatan perkapita per tahun Kalimantan Barat selama periode waktu pengamatan adalah sebesar Rp 25,226,000,-.

4.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama periode 2015 -2019, relative cenderung sedikit mengalami kenaikan. Hal ini dilihat dari data, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mencapai angka sebesar 4,57 persen, naik menjadi 5,28 persen pada tahun 2016 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing mencapai angka 5,33 persen dan 5,47 persen. Namun arah pertumbuhan yang

meningkat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mengalami penurunan pada tahun 2019 turun menjadi 5,09 persen. Sementera itu trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2020 hingga pada tahun 2024 memperlihatkan arah yang positif. Hasil perhitungan telah mendapatkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 5,15 persen per tahun.

4.3. Kontribusi dan Laju pertumbuhan sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha

Analisis kontribusi dan laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Sintang menurut lapangan usaha dilakukan dengan memilih 5 (lima) sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB yang dlanjutkan dengan melihat kinerja laju pertumbuhannya. Dipilihnya 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Sintang, karena total kontribusi 5 (lima) sektor terbesar telah mencapai angka melebihi 70 % dari nilai PDRB Kabupaten Sintang selama periode 2015-2019 dari total 17 (tujuh belas) sektor .

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dan strategis dalam PDRB Kabupaten Sintang. Rata-rata kontribusi sektor pertanian selama 5 (lima) tahun periode waktu pengamatan yaitu dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 25,78 persen. Terjadi penurunan kontribusi sektor ini sejak dari tahun 2015 yang semula sebesar 26,95 persen, pada tahun 2019 turun menjadi 25,36 persen.. Hasil perhitungan analisis trend mendapatkan bahwa kontribusi sektor pertanian juga cenderung menurun. Sebaliknya laju pertumbuhan sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir ini mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 3,03 persen. Diilhat dari arah perkembangannya, trend laju pertumbuhan sektor pertanian ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga terus mengalami kenaikan cukup signifikan.

Sektor perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor ini memberi kontribusi kedua setelah sektor pertanian. Rata-rata kontribusi per tahun sektor ini selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 18,00 persen dan relative stabil. Kestabilan kontribusi sektor perdagangan dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor juga terjadi pada analisis trend untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berbeda dengan kontribusinya, pertumbuhan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda mobil selama periode waktu pengamatan cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 5,29 persen. Hasil analisis trend dalam 5 (lima) tahun ke depan memperlihatkan kecenderungan terjadi penurunan.

Sektor Konstruksi. Sektor kontruksi merupakan sektor yang memberikan kontribusi ketiga terbesar pada PDRB Kabupaten Sintang. Rata-rata kontribusi per tahun sektor ini selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 12,45 persen dan selama 5 (lima) tahun periode waktu pengamatan, kontribusi sektor kontruksi ini serta trendnya dalam 5 (lima) tahun ke depan terus mengalami kenaikan.. Namun jika dilihat dari angka laju pertumbuhannya selama periode waktu pengamatan, pertumbuhan kontribusi sektor kontruksi ini cenderung menurun. Penurunan laju pertumbuhan sektor kontruksi ini selama periode waktu pengamatan, ternyata tidak diikuti oleh hasil analis trend selama 5 (lima) tahun ke depan, yang memperlihatkan adanya kecenderungan terjadi sedikit kenaikan laju pertumbuhan sektor ini. Namun rata-rata angka pertumbuhan pertahun sektor kontruksi selama periode pengamatan dari tahun 2015-2019 masih relative tinggi yang mencapai angka sebesar 9,41 persen.

Sektor Industri Pengolahan. Sektor industri pengolahan ini memberikan kontribusi keempat terbesar pada PDRB Kabupaten Sintang pada tahun 2015. Rata-rata kontribusi per tahun sektor ini selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 9,35 persen. Sementara itu selama 5 (lima) tahun periode waktu pengamatan yaitu 2015-2019 kontribusi sektor ini mengalami penurunan, namun masih relative moderat. Hal yang sama terjadi ketika dilakukan analisis trend kontribusi sektor ini dalam 5 (lima) tahun ke depan, yang menunjukkan pola yang sama terjadi penurunan kontribusi yang relatif moderat. Pada sisi lain, dilihat pertumbuhannya, terjadi fluktuasi pertumbuhan sektor ini yang mengarah pada peningkatan selama periode waktu pengamatan maupun periode waktu analisis trendnya.

Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor kelima terbesar yang memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Sintang selama periode waktu tahun 2015-2019. Rata-rata kontribusi per tahun sektor ini selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 7,03 persen. Bila diamati data yang ada, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian ini baik selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 maupun pada periode waktu analisis trend selama 5 (lima) tahun ke depannya adalah relative stabil. Sementara itu laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian selama periode waktu pengamatan relative berfluktuasi. Trend pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dalam 5 (lima) tahun ke depan juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.

4.4. Kontribusi dan Laju pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Rata-rata pertahun kontribusi komponen ini selama periode pengamatan adalah sebesar 53,69 persen. Pada tahun 2015 kontribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten Sintang adalah sebesar 53,73 persen, mengalami sedikit peningkat pada tahun 2019 menjadi 53,94 persen. Analisis trend kontribusi komponen ini juga memperlihatkan arah peningkatan yang tidak signifikan. Dilihat dari aspek pertumbuhannya selama periode waktu pengamatan, rata-rata pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga per tahun adalah sebesar 5,18 persen. Namun jika dilhat pertumbuhan per tahunnya, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga ini terjadi juga pada analisis trend.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) adalah salah satu komponen pengeluaran yang kontribusi pengeluaran ini relative kecil, dengan kontribusi rata-rata pertahun selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015-2019 mencapai angka sebesar 1,17 persen. Trend kontribusi komponen pengeluaran LNPRT selama peroide 5 (lima) ke depan menunjukan arah peningkatan. Berkaitan dengan pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan komponen LNPRT pertahun selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 7,65 persen dan cenderung meningkat secara signifikan. Searah dengan pola pertumbuhan selama periode pengamatan, analisis trend pertumbuhan komponen pengeluaran ini juga menunjukan kecenderungan peningkatan.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Rata-rata pertahun kontribusi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 12,81 persen. Jika dilihat kontribusi pertahunnya, ada kecenderungan kontribusi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah relative sedikit mengalami penurunan dan agak berfluktuatif namun menuju kearah yang stabil. Sama seperti pada periode waktu pengamatan, trend kontribusi komponen

pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung menurut dan sedikit mengalami fluktuasi. Sementara itu jika dilihat dari laju pertumbuhannya, secara rata-rata pertahun laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 3,29 persen. Tetapi jika dilihat per tahunnya, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pada 3 (tiga) tahun periode analisis mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Trend laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan juga berfluktuasi secara tajam dan cenderung mengalami kenaikan.

Pembentukan Modal Tetap Brutto. Komponen Pembentukan pembentukan modal tetap brutto memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Sintang selama periode waktu pengamatan dari 2015-2019 setelah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi pertahun adalah sebesar 36,55 persen. Namun jika dilihat pertahunnya, kontribusi Komponen pembentukan modal tetap brutto selama periode waktu pengamatan cenderung mengalami penurunan.. Bahkan trend 5 (lima) tahun ke depan memperlihatkan indikasi yang sama terjadi penurunan kontribusi komponen ini. Berkaitan dengan laju pertumbuhannya, selama periode waktu pengamatan darintahun 2015-2019 pertumbuhan komponen Pembentukan pembentukan modal tetap brutto ini mengalami fluktuasi dan juga cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan komponen ini pertahum selama periode pengamatan adalah sebesar 2,83 persen dan cenderung mengalami fluktuasi serta menurun. Fenomena yang hampir sama terjadi pada analisis trend terhadap pertumbuhan komponen Pembentukan pembentukan modal tetap brutto terus mengalami penurunan.

Perubahan Inventori. Komponen Perubahan merupakan salah satu komponen PDRB menurut pengeluaran dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap PDRB Kabupaten Sintang selama periode 2015-2019 adalah 0,94 persen. Kontribusi komponen perubahan inventori ini selama periode waktu pengamatan dan trend periode analisis sedikit berfluktuatif. Berkaitan dengan laju pertumbuhan komponen Perubahan Inventori ini, tidak dilakukan analisa, karena tidak tersedia data yang disajikan oleh BPS.

Export. Dilihat rata-rata kontribusi pertahunnya, komponen Expor memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Sintang selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 4,91 persen dan sepanjang periode waktu pengamatan ada sedikit mengalami fluktuasi namun masih relative stabil. Namun dalam 5 (lima) tahun ke depan trend kontribusi komponen ini relative mengalami penurunan. Berbeda dengan kontribusinya, selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015-2019, laju peetumbuhan komponen ini mengalami fluktuasi yang cukup tajam dan meningkat secara siginfikan. Dilihat dari rata-rata pertahun, pertumbuhan komponen ekspor selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 4,03 persen. Sementara itu hasil analisis trend pertumbuhan komponen ekspor dalam 5 (lima) tahun ke depan memperlihat terjadinya fluktuasi serta cenderung meningkat.

Import. Kontribusi komponen impor rata-rata pertahun selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015-2019 mencapai angka 5,24 persen dan cenderung mengalami penurunan. Fenomena agak sedikit berbeda pada kontribusi komponen impor terhadap PDRB Kabupaten Sintang terjadi dalam trend 5 (lima) tahun ke depan yang cenderung stabil. Sementara itu jika dilihat dari pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan pertahun komponen impor selama periode waktu pengamatan adalah sebesar 4,20 persen dan sangat berfluktuatif serta mengalami penurunan. Namun sebaliknya trend pertumbuhan komponen impor dalam 5 (lima) tahun ke depan cenderung meningkat.

Net Ekspor Antar Daerah. Terkait dengan kontribusi Komponen Net Ekspor Antar Daerah, rselama periode waktu pengamatan dari tahun 201502019 rata-rata kontribusi pertahunnya adalah sebesar (-4,84) persen dan cenderung meningkat termasuk dalam analisis trendnya. Dilihat dari rata-ratanya selama periode pengamatan, angka pertumbuhan Komponen Net Ekspor Antar Daerah pertahunnya mencapai angka sebesar (-12,76) persen serta mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya dan makin menurun. Dalam analisis trend, hasil perhitungan memperlihatkan pertumbuhan Komponen Net Ekspor Antar Daerah terus mengalami penurunan.

4.5. Angka Pengganda Output

Angka Pengganda Konsumsi Rumah Tangga. Terkait dengan Angka pengganda konsumsi rumah tangga, hasil perhitungan mendapatkan rata-rata angka pengganda pertahun pengeluaran konsumsi rumah tangga selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 1,86 dan terjadi fluktuasi serta cenderung menurun. Fenomena penurunan angka pengganda pengeluaran konsumsi rumah tangga ini juga dialami dalam analisis trend 5 (lima) tahun ke depannya.

Angka Pengganda Pengeluaran Pemerintah. Rata-rata pertahun angka pengganda pengeluaran pemerintah selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 sebesar 4,69. Angka ini memberikan makna bahwa jika terjadi penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dalam jumlah tertentu pada suatu periode tertentu, maka akan mennyebabkan terjadinya penambahan atau pengurangan PDRB pada periode yang sama sebesar 4,69 kali dari besaran penambangan pengeluaran pemerintah tersebut. Trend dalam 5 (lima) tahun ke depan terlihat juga adanya peningkatan yang cukup signifikan dan positif dari anggka pengganda komponen pengluaran pemerintah ini.

Angka Pengganda Investasi. Rata-rata pertahun angka pengganda investasi selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 6,11 dan berfluktuasi serta cenderung menjngkat. Angka ini memberikan makna bahwa bahwa setiap kenaikan investasi dalam jumlah tertentu pada suatu periode yang sama, akan mampu mendorong peningkatan PDRB Kabupaten Sintang sebesar 6,11 kali dari jumlah tambahan investasi.

4.6. Efisiensi Investasi Dengan Pendekatan ICOR

Pada perekonomian Kabupaten Sintang, rata-rata pertahun angka ICOR selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 7,50. Angka ini memberikan pemahaman bahwa untuk menghasilkan tambahan satu satuan PDRB Kabupaten Sintang selama periode 2015-2019 membutuhkan investasi sebanyak 7 satuan. Sekalipun demikian selama periode waktu pengamatan, angka ICOR berfluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan investasi yang dilakukan di Kabupaten Sintang menuju ke arah efisien. Fenomena relative makin efisiennya investasi yang dilakukan, dapat dilihat dari Analisis trend 5 (lima) tahun ke depan juga menunjukkan angka ICOR pada perekonomian Kabupaten Sintang]eterus mengalami penurunan.

4.7. Analisis Inflasi

Pada perekonomian Kabupaten Sintang, rata-rata angka pertahun inflasi yang terjadi selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 4,27 persen, suatu angka inflasi yang dikategorikan ringan. Hal ini memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mampu untuk mengendalikan kestabilan perekonomian selama periode waktu pengamatan. Sementara itu,

bila diamati dari trend perkembangan tingkat inflasi yang terjadi selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, arah kecenderungan relative stabil dan sedikit mengalami penurunan.

4.8. Pengangguran Terbuka

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 2,49 persen, berfluktuasi dan cenderung meningkat. Angka ini memberikan makna bahwa dari jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan selama periode waktu pengamatan sebanyak 97, 51 persen terserap dalam sektor-sektor ekonomi dan sisanya 2,49 persen tidak terserap atau dengan kata lain menjadi penganggur. Analis trend perkembangan pengangguran Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun ke depan sedikit berfluktuasi dan juga cenderung meningkat

4.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, rata-rata per tahun selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 di Kabupaten Sintang adalah sebesar 72,72 persen dan cendeung menurun. Fenomena menurunnya angka TPAK ini juga ditunjukkan oleh trend selama 5 (lima) tahun ke depan.

4.10. Dependency Ratio

Terkait dengan angka *Dependency Ratio* di Kabupaten Sintang, rata-rata pertahun selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015 hingga 2019 mendapatkan angka Dependency Rationya adalah sebesar 50,92, berfluktuasi dan cenderung menurun. Fenomena yang sama terjadi pada periode waktu pengamatan, analisis trend 5 (lima) tahun ke depan angka Dependency Ratio cenderung menurun dan ada sedikit berfluktuasi.

4.11. Tingkat Ketimpangan Sektoral

Rata-rata angka indeks tingkat ketimpangan sektoral di Kabupaten Sintang, selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah sebesar 0,46 dan relative stabil baik selama periode waktu pengamatan dan pada analisis trend.

4.12. Pemerataan Pendapatan

Jika dlihat dari angka indeks gini ratio, rata-rata pertahun ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sintang pada periode waktu pengamatan tahun 2015-209 adalah sebesar 0,28 dan cenderung menurun. Analisis trend secara linier dalam 5 (lima) tahun ke depan, memperlihatkan tingkat ketimpangan juga cenderung menurun.

4.13. Tingkat Kemiskinan.

Rata-rata tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sintang selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 adalah 9,94 persen dan cenderung mengalami kenaikan.. Kenaikan tingkat kemiskinan pada periode pengamatan berpengaruh terhadap fenomena trend tingkat kemiskinan dalam 5 (lima) tahuh ke depan. Trend tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang terus meningkat, hal ini terlihat dari angka tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 10,79 persen, dan 4 (empat) tahun ke depan yaitu pada tahun 2024 meningkat menjadi 12,01 persen.

4.14. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Arah laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sintang selama peiode waktu pengamatan tahun 2015-2019, memperlihatkan bahwa arah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diikuti oleh arah peningkatan tingkat kemiskinan. Hal yang sama terlihat juga

penurunan laju pertumbuhan ekonomi diikuti oleh arah penurunan pada tingkat kemiskinan. Pada tahu 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang adalah sebesar 4,57 persen dengan tingkat kemiskinan yang terjadi adalah sebesar 9,33 persen. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun selanjutnya searah dengan kenaikan tingkat kemiskinan, sehingga ketika pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen, tingkat kemiskinan berada pada angka sebesar 10,35 persen. Bahkan ketika terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2018 sebesar 5,47 persen menjadi 5,09 persen pada tahun 2019, tingkat kemiskinan pada tahun yang sama semula sebesar 10,35 persen turun menjadi 9,76 persen. Analisis trend dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memperlihatkan adanya arah yang sama kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tidak diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sintang belum bisa memberikan solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

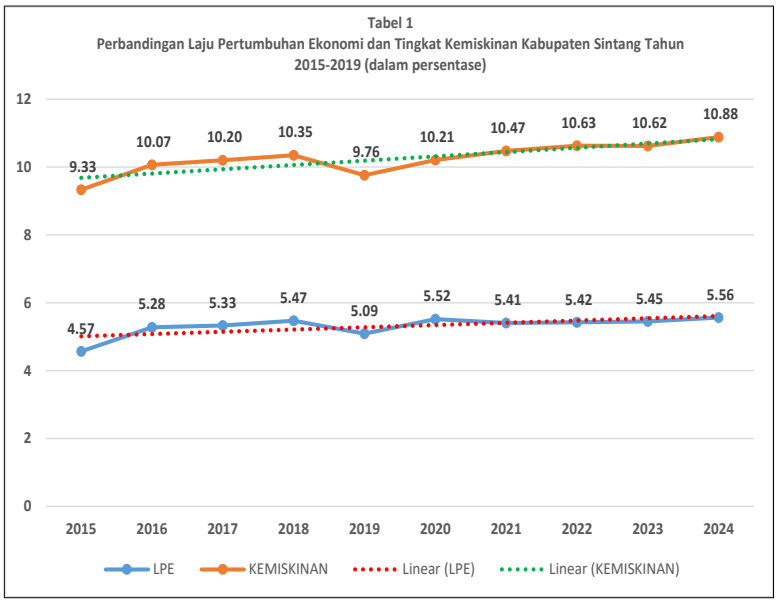

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2020

4.15. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Terkait dengan perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang di Kabupaten Sintang selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019, data yang ada menunjukan bahwa kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan terjadinya penurunan terhadap tingkat pengangguran. Bahkan pada tahun-tahun tertentu kenaikan laju pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya kenaikan pada tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sintang.berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 4,57 persen dan pada waktu yang sama tingkat pengangguran sebesar 2,48 persen. Ketika laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 naik menjadi 5,28 persen, data yang terkait dengan tingkat pengangguran tidak tersedia. Pada 2 (dua) tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 dan 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang naik masing-masing menjadi 5,33 persen dan 5,47 persen, tingkat pengangguran pada tahun yang sama berada pada angka 1,93 persen dan 2,34 persen. Bila mengamati perubahan yang terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi dan dan perubahan pada tingkat pengangguran pada tahun 2017 dan 2018,

hal ini memberikan indikasi bahwa kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi justru mendorong terjadinya kenaikan pada tingkat pengangguran. Namun jika memperhatikan perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran tahun 2018 dan tahun 2019, data yang diperoleh memperlihatkan bahwa penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 sebesar 5,47 persen menjadi 5,09 persen pada tahun 2019, justru menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran yang semula pada tahun 2018 sebesar 2,34 persen, naik menjadi 3,20 persen pada tahun 2019. Perubahan ini memberikan indikasi bahwa diduga ada pengaruh penurunan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Sintang. Hasil analisis trend mendapatkan bahwa kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi relative tidak memberikan pengaruh pada penurunan tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sintang. Pada tahun 2020 hasil perhitungan analisis trend mendapatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 5,52 persen dan pada waktu yang sama tingkat pengangguran sebesar 2,56 persen. Namun ketika tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan analysis trend mencapai angka 5,56 persen, tingkat pengangguran di Kabupaten Sintang naik menjadi 2,61 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang belum mampu untuk dapat memberikan upaya penurunan tingkat pengangguran yang terjadi.

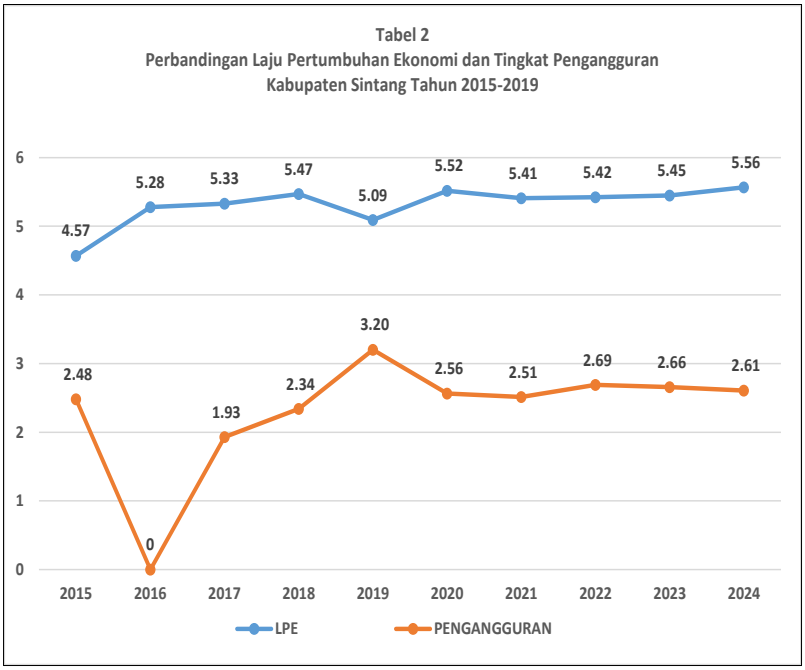

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2020

4.16. Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Terkait dengan gambaran perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Sintang, data yang diperoleh selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 bahwa kenaikan laju pertumbuhan ekonomi selama 4 (empat) tahun periode pengamatan tahun 2015 hingga 2017 diduga berpengaruh pada meningkatnya tingkat ketimpangan. Tetapi ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2018, justru tingkat ketimpangan pendapatan menurun. Namun fenomena yang agak berbeda terjadi pada tahun 2019, ketika laju pertumbuhan ekonomi menurun justru mendorong meningkatnya tingkat ketimpangan.

Pada tahun 2015 ketika laju pertumbuhan ekonomi Kabupatem Sintang sebesar 4,57 persen, pada waktu yang sama tingkat ketimpangan adalah sebesar 0,28. Dalam 2 (dua) tahun berikutnya yaitu tahu 2016 dan 2017, terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang masing-masing sebesar 5,28 persen dan 5,33 persen, kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan naiknya tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2016 dan 2017 yang besarnya masing-masing 0,30. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,47 persen, dan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan menjadi 0,26. Berbeda dengan tahun 2018, terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 menjadi 5,09 persen yang justru diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan menjadi 0,28.

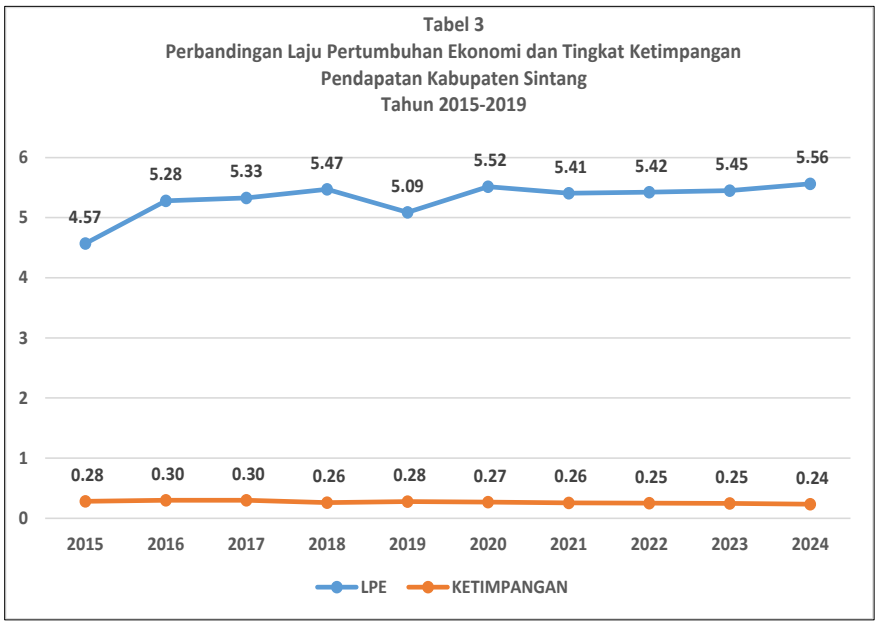

Dalam analisis trend tahun 2020, hasil analisis trend mendapatkan ketika angka laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen pada waktu yang sama tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,27 persen. Sekalipun pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,41 persen tingkat ketimpangan pada waktu yang sama tetap turun menjadi 0,26. Bahkan ketika terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun berikutnya sehingga pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,56 persen, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sintang turun menjadi 0,24. Bila memperhatikan fenomena hasil analisis trend selama periode waktu 2020-2024, pola hubuungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan, dapat dikemukakan bahwa pola yang hubungan yang membentuk huruf U terbalik sebagaimana hipotesis Kuznets. Disamping itu, ke depan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sintang relative dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan anta penduduk.

4.17. Pendapatan Perkapita dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Kenaikan pendapatan perkapita selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019, diikuti oleh arah kenaikan yang sama dari adanya kenaikan ketimpangan pendapatan antar penduduk sekalipun rekatif kecil. Namun selanjutnya hasil perhitungan trend yang memperlihatkan arah

kenaikan pendapatan perkapita tidak diikuti lagi dengan arah yang sama dari ketimpangan pendapatan tapi justru arah ketimpangan pendapatan berlawanan yaitu menunjukan trend yang makin relative rendah. Hasil analisis data yang diperoleh selama periode waktu pengamatan tahun 2015-2019 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 pendapatan pekapita Kabupaten Sintang sebesar Rp 19.750.000,- dan pada tahun yang sama tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk sebesar 0,28. Selanjutnya selama 2 (dua) tahun berikutnya pendapatan perkapita Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 tingkat pendapatan perkapita Kabupaten Sintang mencapai angka sebesar Rp 21.290.000,-. Pada saat yang sama tingkat ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2017 menjadi 0.30. Tahun berikutnya pada tahun 2018 kenaikan pendapatan perkapita sebesar Rp 22.160.000,- diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan menjadi 0,26. Tetapi pada tahun 2019 kenaikan pendapatan perkapita menjadi sebesar Rp 22.980.000,- diikuti dengan kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan menjadi 0.28.

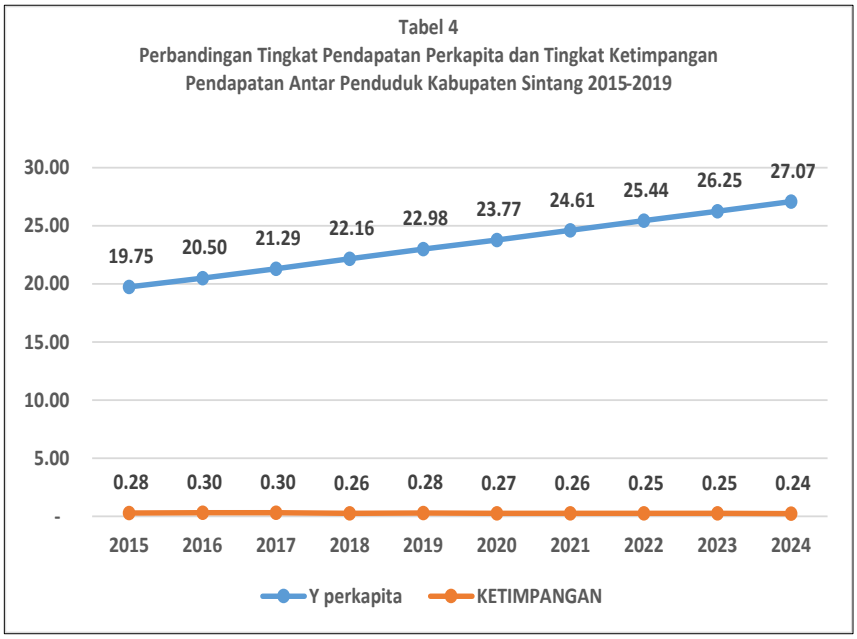

Pada sisi lain, hasil analisis trend selama periode waktu pengamatan yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, memperlihatkan kenaikan pendapatan perkapita Kabupaten Sintang diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2020 pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp 23.770.000,- dan pada tahun yang sama tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0.27 dan selanjutnya selama 4 (empat) tahun berikutnya pendapatan perkapita terus meningkat, sehingga pada tahun 2024 mencapai angka sebesar Rp 27.070.000,-, sementara tingkat ketimpangan pendapatan turun selama 4 (empat) tahun berikutnya terus menurun, sehingga pada tahun 2024 turun menjadi 0,24.

4.18. Tingkat Inflasi dan Pengangguran

Gambaran yang terjadi antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Kabupaten Sintang, data yang diperoleh memperlihatkan selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 ada kecendrungan penurunan tingkat inflasi mendorong terjadinya indikasi peningkatan pada tingkat pengangguran. Sebaliknya jika terjadi kenaikan pada Inflasi, ada indikasi terjadi kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2015 tingkat Inflasi di Kabupaten

Sintang mencapai angka sebesar 5,11 persen dan pada waktu yang bersamaan tingkat pengangguran sebesar 2,48 persen. Selama 3 (tiga) tahun berikutnya yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2018, penurunan angka inflasi cenderung menurunkan tingkat pengangguran. Pada tahun 2016 terjadi penurunan angka inflasi menjadi 4,15 persen, namun sayangnya data yang terkait dengan tingkat pengangguran tidak tersedia. Penurun angka inflasi terus berlanjut, sehingga pada tahun 2017 turun menjadi 4,10 persen dan pada waktu yang sama tingkat pengangguran turun menjadi 1,93 persen. Namun pada tahun 2018, ketika tingkat Inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 3,81 persen justru tingkat pengangguran naik menjadi 2,34 persen. Pada tahun 2019 tingkat Inflasi di Kabupaten Sintang naik menjadi 4,20 persen dan hal ini diikuti dengan naiknya tingkat pengangguran menjadi 3,20 persen. Fenomena yang berbeda terkait dengan analisis trend periode waktu tahun 2020 hingga 2024. Hasil perhitungan trend mendapatkan bahwa tingkat Inflasi di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah sebesar 3,62 persen dan pada waktu yang sama tingkat pengangguran berada pada angka 2,56 persen. Pada tahu 2021, trend inflasi menghasil angka sebesar 3,69 persen yang sedikit lebuh tinggi dibandingkan dengan trend tingkat Inflasi tahun 2020. Kenaikan angka trens Inflasi pada tahun 2021 ini diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 2,51 persen yang lebuh rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran tahun 2020. Selanjutnya dalam 3 (tiga) tahh setelah tahun 2021, trend angka Inflasi di Kabupaten Sintang cenderung turun, hal ini dapat dilihat dari trend angka inflasi pada tahun 2022 turun menjadi 3,59 persen yang lebih rendah dibandingkan dengan angka Inflasi pada tahun 2021. Turunnya angka trend Inflasi ini, justru menaikkan tingkat pengangguran menjadi 2,69 persen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tahun 2021. Sementara itu selama 2 (dua) tahun berikutnya yaitu angka inflasi tahun 2023 dan 2024 terus menurun dengan angka masing-masing sebesar 3,50 persen dan 3,29 persen. Penurunan angka inflasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sintang. Angka tingkat pengangguran di Kabupaten Sintang selama tahu 2023 dan 2024 turun menjadi sebesar masing-masing 2,66 persen dan 2,61 persen.

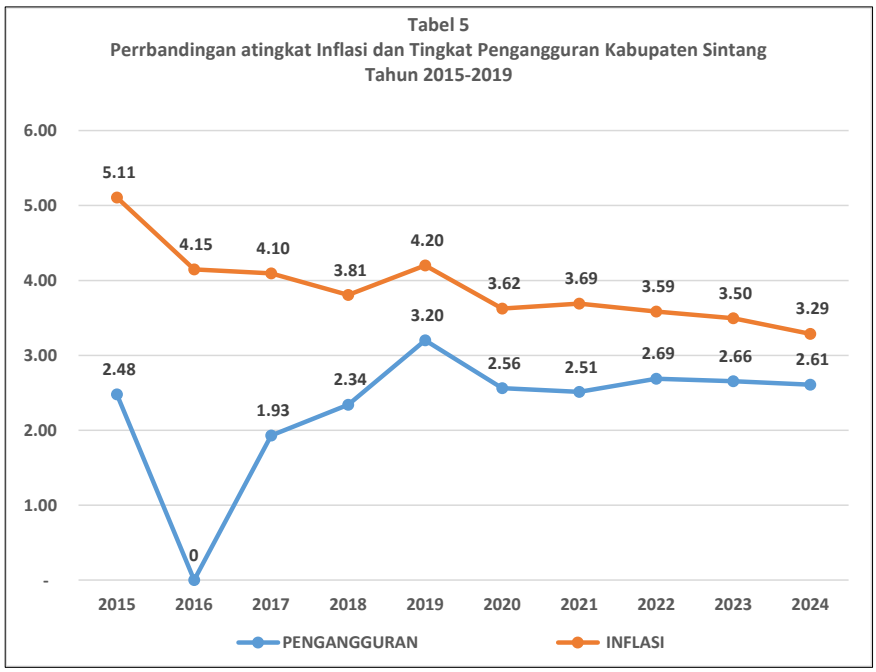

Memperhatikan analisis berdasarkan data yang diperoleh selama periode waktu pengamatan dari tahun 2015 hingga 2019 serta hasil analisis trend dari periode waktu tahun 2020 hingga 2024,

dapat dikatakan bahwa pola hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sintang tidak mengikuti pola sebagaimana yang dikemukakan dalam kurva Phillips. Oleh karena itu bagi Kabupaten Sintang, kebijakan dalam pengendalian inflasi belum tentu menimbulkan terjadinya kenaikan pada tingkat pengangguran. Sebaliknya upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran tidak secara otomatis menyebabkan tingkat inflasi meningkat.

4.19. Isu-Isu Pokok Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama periode waktu pengamatan dan trend 5 tahun ke depan memang relative stabil dengan kisaran angka 4 hingga 5,5 persen. Namun perlu dicermati dan diwaspadai ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dalam beberapa tahun ke depan, yaitu *pertam*a: (a) Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa nilai tambah produksi sektor ini dalam PDRB Kabupaten Sintang relative terus menurun. (b) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Sintang mengalami trend laju pertumbuhan yang semakin menurun. Secara implisit hal ini berarti laju pertumbuhan nilai tambah sektor ini terhadap PDRB makin kecil. (c) Sektor kontruksi yang memberikan kontribusi terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Sintang, sekalipun dalam perhitungan analisis trend pertumbuhan sektor kontruksi ini relative naik, namun selama periode waktu pengamatan laju pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan yang dratis. *Kedua,* (a) Komponen pembentukan modal tetap brutto yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Sintang menurut pengeluaran, mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sangat drastic. Bahkan hasil analisis trend pertumbuhan komponen ini pada tahun 2024 turun menjadi negatif. (b) Adanya kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan komponen impor baik selama periode waktu pengamatan maupun periode waktu analisis trend. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa perekonomian Kabupaten Sintang, masih tergantung pada hasil-hasil produksi dari luar daerah. *Ketiga,* Angka pengganda pengeluaran konsumsi rumah tangga, relative kecil dan memberikan indikasi semakin menurun ke depannya. Sementara itu angka pengganda pengeluaran pemerintah adalah merupakan angka pengganda terbesar dan cenderung makin meningkat ke depannya. Angka pengganda terbesar kedua adalah angka pengganda pengeluaran investasi yang juga memberikan indikasi semakin meningkat ke depannya. *Keempat*, Ada kecenderungan terjadi efisiensi investasi dalam perekonomian Kabupaten Sintang, hal ini ditunjukan olah makin rendahnya angka ICOR baik pada periode waktu pengamatan maupun periode waktu analisis trend. *Kelima*, Terkendalinya tingkat inflasi, hal ini dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian Kabupaten Sintang ke depannya. *Keenam,* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang semakin menurun, diikuti dengan semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu angka Depency ratio yang cenderung meningkat ini memberikan indikasi ke depannya beban perekonomian Kabupaten Sintang relative makin terbebani dengan banyaknya jumlah penduduk yang tidak produktif. *Ketujuh*, Sekalipun ketimpangan sektoral relative sedang dan ketimpangan pendapatan relative rendah, namun tingkat kemiskinan terus meningkat.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan penelitian ini yaitu: (1) Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa nilai tambah produksi sektor ini dalam PDRB Kabupaten Sintang relatif terus menurun. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Sintang mengalami trend laju pertumbuhan yang semakin menurun. Secara implisit hal ini berarti laju pertumbuhan nilai tambah sektor ini terhadap PDRB makin kecil. Sektor kontruksi yang memberikan kontribusi terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Sintang, sekalipun dalam perhitungan analisis trend pertumbuhan sektor kontruksi ini relative naik, namun selama periode waktu pengamatan laju pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan yang dratis, (2) Dalam kaitannya dengan PDRB menurut penggunaan, Komponen pembentukan modal tetap brutto yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Sintang, mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sangat drastic. Bahkan hasil analisis trend pertumbuhan komponen ini pada tahun 2024 turun menjadi negative. Sementara itu adanya kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan komponen impor baik selama periode waktu pengamatan maupun periode waktu analisis trend. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa perekonomian Kabupaten Sintang, masih tergantung pada hasil-hasil produksi dari luar daerah, (3) Angka pengganda pengeluaran konsumsi rumah tangga, relative kecil dan memberikan indikasi semakin menurun ke depannya. Sementara itu angka pengganda pengeluaran pemerintah adalah merupakan angka pengganda terbesar dan cenderung makin meningkat ke depannya. Angka pengganda terbesar kedua adalah angka pengganda pengeluaran investasi yang juga memberikan indikasi semakin meningkat ke depannya, (4) Berkaitan dengan aspek investasi, terjadi efisiensi investasi dalam perekonomian Kabupaten Sintang, hal ini ditunjukan olah makin rendahnya angka ICOR baik pada periode waktu pengamatan maupun periode waktu analisis trend, (5) Pemerintan Kabupaten Sintang mampu mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat di bawah 6 persen, hal ini dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian Kabupaten Sintang ke depannya, (6) Kecenderungan terjadinya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sementara itu pada sisi lain = tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat. Tambahan pula angka Depency ratio yang cenderung meningkat ini memberikan indikasi ke depannya beban perekonomian Kabupaten Sintang relative makin terbebani dengan banyaknya jumlah penduduk yang tidak produktif, dan (7) Terjadi tingkat ketimpangan sektoral yang dikategorikan ke dalam ketimpangan yang relative sedang, dan ketimpangan pendapatan relative rendah, namun tingkat kemiskinan terus meningkat.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan sektoral dan structural yang terjadi pada perekonomian Kabupaten Sintang adalah *pertama*, memprioritaskan pembangunan sektor pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta nilai tambah yang tinggi melalui program intensifikasi pertanian, menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing, pembangunan kawasan agropolitan dan pemanfaatan lahan tidur agar dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten perlu merumuskan kebijakan untuk mulai mengembangkan industri pengolahan yang berbahan baku dari sektor pertanian (memiliki beberapa keunggulan serta mensinergikan dengan sektor potesial lainnya agar menghasilkan multiplier effect terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien. *Kedua*, meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yang mampu mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa antar bebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sentra produksi sehingga dapat mengurangi cost of transportation. Selain itu, menggalakkan pembangunan infrastruktur ekonomi, berupa pasar desa dan revitalisasi pasar tradisional yang dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di pedesaan.

Peningkatan pengangguran terbuka serta jumlah rumah tangga miskin merupakan masalah yang harus menjadi focus bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk diberikan perhatian pada pembangunan di masa yang akan datang. Diperlukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro job dan pro poor. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dua masalah yang saling terkait tersebut adalah dengan meningkatkan aktivitas sektor informal, pemberdayaan perempuan, serta upaya-upaya yang dapat meningkatkan UMKM. Kebijakan ini dapat dilakukan misalnya dengan pemberian pelatihan ketrampilan bagi perempuan serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus lebih serius menunjukkan keberpihakannya kepada sektor ekonomi yang terbukti banyak menyerap tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Upaya ke arah tersebut bisa dimulai dengan memberikan sejumlah insentif yang menarik disertai dengan kebijakan afirmatif kepada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, industry kerajinan rakyat, UMKM serta juga kegiatan ekonomi di sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

Amponsah, William et.al. (1999). Global Trade Integration and Economic Convergence of Developing Countries. *American Journal of Agriculture Economics No. 5: 1142-1148.*

BPS. (2020). Kabupaten Sintang dalam Angka Dalam Angka 2020 Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

Grossman, G.M. and Helpman E. (1994). Endogenous Innovation in The Theory of Growth. *Journal* of *Economic Perspectives 8*, 23-44.

Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan*), Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kuznets, Simon. (1971). *Economics Growth of Nations*. Cambridge: Harvard University Press.

Leichenko, Robin M. (2000). Export, Employment and Production: A Causal Assessment of US and Regions. *Economics Geography Vol.76 No.4, Oktober*, 303-325.

Mankiw, N.G. (2000). *Makroekonomi Edisi ke Enam*. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, N. G. (2003). Teori Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, N. G. (2011). *Principles of Economics, Sixth Edition*. South-Western Cengage Learning.

Ravallion M, Datt G. 1996. How important to India's poor is the sektoral composition of economic growth?. *The World Bank Economic Review,* 10(1):1-25.

Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Everages. *World Development*, Vol.29 No. 11

Render, B, et al. (2006). *Quantitative Analysis for Management*, Australia: Pearson Prentice Hall

Saaty, TL. (1990). *Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex Word*, USA: University of Pittsburgh.

Sukirno Sadono. (2008). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Widodo, T. (2006) *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Wijono, W. (2005). Mengungkapkan Sumber-Sumber Pertumbuhan Eonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Manajemen dan Fiskal*, No. V.

Yamit, Z. (1994). *Manajemen Kuantitatif untuk Bisnis (Operation Research)*. Yogyakarta: BPFE

Zikmund, W.G. (2001). *Business Research Method*. Forth Word: Harcourt Inc.

Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
ISBN: 978-602-53460-5-7

Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2019

Restiatun*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Di era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang lebih luas dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah pada pengembangan potensi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam proses pembangunan ekonomi memerlukan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang membutuhkan indikator-indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang sangat concern dengan proses pembangunan daerahnya. Mengingat pentingnya indikator ekonomi dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Sekadau, maka perlu disusun indikator-indikator ekonomi secara komprehensif, lengkap, dan kontinyu. Indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi bagi proses pembangunan di Kabupaten Sekadau adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, IPM, Gini ratio, ICOR, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Angka pengganda output dan ketimpangan sektoral. Temuan dari kajian ini bahwa selama masa pengamatan tahun 2015 – 2019 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi turun, TPAK meningkat selama 2015 – 2017 kemudian turun hingga tahun 2019, tingkat pengangguran meningkat sejak 2017 hingga 2019, kemiskinan turun sejak 2017, nilai IPM meningkat, Gini ratio berfluktuasi tetapi dengan trend menurun, ICOR meningkat tatepi sejak 2018 menurun, pengeluaran baik konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah meningkat, tetapi pertumbuhan menurun terjadi pada pengeluaran investasi, serta indeks ketimpangan sektoral meningkat.

JEL: E00
Kata kunci: Indikator, Makroekonomi, Trend

1. PENDAHULUAN

Di era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang lebih luas dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah pada pengembangan potensi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah daerah dapat menentukan prioritas kebijakan dan arah program pembangunannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah-lah (provinsi dan kabupaten) yang paling mengerti potensi yang dimiliki daerah tersebut, sehingga dengan adanya desentralisasi ini diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal.

Proses pembangunan ekonomi memerlukan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang membutuhkan indikator-indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif memerlukan dukungan data makro regional yang dikeluarkan oleh instansi yang

* E-mail: hariestya@yahoo.com

berwenang, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan data-data yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berkaitan. Dengan kepemilikan data yang konsisten dan terintegrasi dalam perekonomian secara keseluruhan, maka hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung atas sebuah kebijakan.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang sangat concern dengan proses pembangunan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari visi yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sekadau yang maju mandiri dan berdaya saing". Mengingat pentingnya indikator ekonomi dalam proses pembangunan, maka perlu disusun indikator-indikator ekonomi secara komprehensif, lengkap, dan kontinyu. Penyusunan indikator-indikator ini dimaksudkan untuk mencapai visi tersebut serta menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sekadau. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap indikator ekonomi daerah diharapkan pelaku ekonomi baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat dapat menyusun perencanaan pengembangan ekonomi Kabupaten Sekadau yang lebih baik agar sasaran-sasaran yang ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan kapasitas pemerintah lokal merupakan salah satu faktor penting dalam transformasi suatu negara menuju sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan para pembuat kebijakan lokal (birokrat dan politisi) untuk menyediakan pelayanan public dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi wajibnya. Amponsah (1999) mengemukakan bahwa terdapat hal-hal fundamental yang harus dipenuhi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Good governance dan privatisasi.
   Kualitas pemerintah dalam perekonomian diyakini akan menentukan efektivitas dan kesinambungan reformasi ekonomi yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi.
2. Kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia.
   Investasi pada sektor pendidikan dan human capital akan meningkatkan ketrampilan dan efisiensi dalam proses produksi melalui adopsi dan pembangunan teknologi baru. Sedangkan dampak pertumbuhan penduduk akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan tekanan terhadap sumberdaya yang terbatas bagi penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Stabilitas makroekonomi.
   Dengan kondisi makroekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan investasi dan tabungan.
4. Kebijakan perdagangan terbuka.
   Kebijakan ini akan meningkatkan pertumbuhan dan kecepatan proses konvergensi.

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan kerangka berpikir aliran melingkar perekonomian seperti ditunjukkan pada gambar. Empat agen pelaku ekonomi regional yang menentukan perkembangan ekonomi daerah meliputi rumah tangga, produsen, perbankan dan pemerintah ataupun masyarakat internasional. Keempat pelaku tersebut saling berinteraksi dan saling melakukan transaksi ekonomi di suatu wilayah daerah. Transaksi-transaksi tersebut kemudian menghasilkan pendapatan, tabungan ataupun investasi. Namun, ada juga yang harus dikeluarkan dalam transaksi tersebut, seperti pajak dan belanja. Transaksi-transaksi tersebut menentukan

pembangunan ekonomi di suatu daerah, sehingga dibutuhkan indikator-indikator ekonomi tertentu untuk mengukurnya dan merumuskan kebijakan yang tepat.

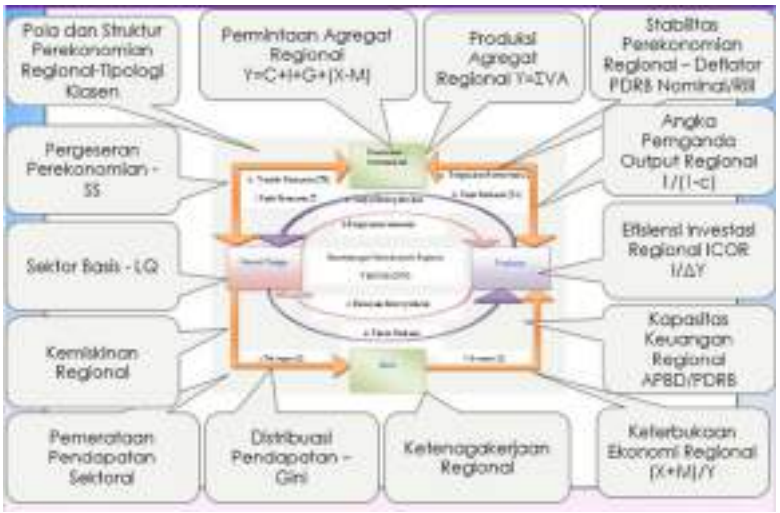

Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan suatu daerah, antara lain: PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB Menurut Pendekatan Produksi, Angka Pengganda Output, Efisiensi Investasi, Kapasitas Keuangan Daerah, Keterbukaan Ekonomi, Indeks Ketimpangan Sektoral, Inflasi, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat sekunder yang mayorias bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sekadau. Tahap analisis data dapat dilakukan setelah data yang dibutuhkan dalam proses penelitian didapatkan secara lengkap. Katajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis analisis akan menentukan keakuratan dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat dua macam analisis data, yakni analisis kuantitatif analisis kualitatif, dan analisis trend.

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini meliputi beberapa alat analisis yang secara umum digunakan untuk melihat kinerja perekonomian. Alat-alat tersebut adalah seperti tersebut yang dijelaskan pada kajian pustaka. Sedangkan Analisis data kualitatif dilakukan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data, memilah - milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Untuk analisis trend dilakukan dengan tujuan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan untuk mencari trend dengan menggunakan metode kudrat terkecil (Least Square Methods).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Taraf Hidup Masyarakat Kabupaten Sekadau

ISBN: 978-602-53460-5-7

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Sekadau dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat. Kemajuan perekonomian Kabupaten Sekadau dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah nilai PDRB. Berikut ini merupakan Grafik Nilai PDRB Kabupaten Sekadau Tahun 2014-2019 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sekadau memiliki kinerja pertumbuhan yang baik, karena sepanjang tahun pengamatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau menunjukkan angka yang positif, meskipun cenderung menurun. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi riil Sekadau sepanjang tahun 2014 – 2019 sebesar 5,77% dan 10,52% untuk pertumbuhan nominal, serta terdapat kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun sepanjang tahun pengamatan, baik pertumbuhan riil maupun pertumbuhan nominal.

Gambar 1. PDRB Kabupaten Sekadau Berdasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data PDRB tahun 2014 – 2019, baik berdasar harga konstan maupun harga berlaku, dapat disusun trend besaran nilai PDRB Kabupaten Sekadau selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2020 – 2025.

Gambar 3. Trend Nilai PDRB Kabupaten Sekadau Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2020 – 2025

Gambar 4. Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2025

Gambar di atas menyajikan trend nilai PDRB Kabupaten Sekadau dan pertumbuhan ekonominya, berdasar harga konstan maupun harga berlaku. Berdasar grafik tersebut terlihat adanya trend kenaikan nilai PDRB Kabupaten Sekadau selama tahun 2020 - 2025, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung menurun. Adapun trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau selama lima tahun ke depan memiliki rata-rata sebesar 9,71% untuk tingkat pertumbuhan nominal dan 5,29% untuk pertumbuhan riil.

Tingkat kesejahteraan masyarakat, selain ditentukan oleh tingkat pendapatan juga ditentukan oleh tingkat harga. Given pendapatan, jika terjadi kenaikan tingkat harga secara umum atau dengan kata lain tingkat inflasi tinggi maka akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Semakin tinggi inflasi, maka akan menggerus daya beli masyarakat. Berikut ini disajikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Sekadau sepanjang tahun 2015 – 2019. Rata-rata tingkat inflasi Kabupaten Sekadau sepanjang tahun pengamatan sebesar 4,49%.

Gambar 5. Tingkat Inflasi Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2025

Gambar 6. Trend Tingkat Inflasi Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Berdasar gambar di atas terlihat bahwa tingkat inflasi tertinggi sepanjang tahun 2014 – 2019 terjadi pada tahun 2015 (4.89%) dan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 (4,15%). Berdasar data inflasi Kabupaten Sekadau tahun 2014 – 2015, disusun trend tingkat inflasi untuk tahun 2020 – 2025. Hasil analisis trend menunujukkan bahwa inflasi Kabupaten Sekadau untuk tahun 2020 – 2025 menurun. Trend inflasi ini termasuk kategori rendah, karena berada pada level di bawah 5%, dengan rata-rata inflasi sepanjang masa pengamatan sebesar 3,58%.

Salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sekadau adalah untuk mengurangi pengangguran terbuka. Karena pengangguran merupakan salah satu penyebab terjadinya beberapa permasalahan dalam kehidupan masyarakat, di antaranya masalah kemiskinan, masalah kriminalitas, masalah rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sekadau berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui upaya-upaya yang dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Gambar 7. TPAK Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019

Gambar 8. Trend TPAK Kabupaten Sekadau 2020 – 2025

Sepanjang tahun 2015 – 2019, TPAK Kabupaten Sekadau meningkat selama tahun 2015 – 2017, tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan TPAK dan kembali meningkat pada tahun 2019. Tetapi jika dilihat trend selama lima tahun ke depan (2020 – 2015) terjadi trend penurunan TPAK di Kabupaten Sekadau. Dan jika hal ini tidak diantisipasi dengan mempersiapkan strategi untuk mengatasinya sejak dini maka hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan pembangunan

lainnya. Tinggi rendahnya TPAK berkorelasi negative dengan tingkat pengangguran terbuka. Semakin tinggi TPAK suatu daerah, maka semakin rendah tingkat penganggurannya.

Upaya-upaya yang dapat meningkatkan TPAK dan pengurangan pengangguran terbuka mutlak harus dilakukan karena keberhasilan dalam peningkatan TPAK dan penurunan tingkat pengangguran salah satunya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau. Selama tahun 2014 – 2019 di Kabupaten Sekadau terjadi trend penurunan jumlah jumlah penduduk miskin dan jika dilihat trend nya sampai dengan tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau akan terus mengalami penurunan. Sepanjang masa pengamatan rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 12.368, 6 jiwa penduduk miskin. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah derah untuk dapat menciptakaan program-program pembangunan daerah yang pro-poor yakni untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan menyusun strategi pembangunan daerah yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan (pro-job).

Gambar 11. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2019

Gambar 12. Trend Penduduk Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Keberhasilan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan manusia dapat dilihat dari nilai IPM. Sepenjang masa pengamatan, terjadi kenaikan nilai IPM Kabupaten Sekadau dan nilai rata-rata nilai IPM sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah sebesar 62,66. Adapun untuk trend nilai IPM Kabupaten Sekadau selama tahun 2020 – 2025 juga terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 65,59. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Sekadau membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Gambar 17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2018

Gambar 18. Trend Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Selain masalah kemiskinan, permasalahan lain yang menjadi prioritas untuk diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau adalah masalah kesenjangan pendapatan. Sepanjang tahun 2014 – 2018 terjadi fluktuasi dalam hal kesenjangan pendapatan di Kabupaten Sekadau. Adapun rata-rata indeks Gini sepanjang masa pengamatan sebesar 0,29. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sekadau relatif kecil sepanjang masa pengamatan. Sementara untuk trend pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Sekadau juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari nilai trend koefisien Gini yang semakin menurun sepanjang tahun 2019 – 2024. Hal ini disajikan pada gambar berikut.

Gambar 19. Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Sekadau 2020 – 2025

Gambar 20. Trend Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau menyadari pentingnya kegiatan investasi dalam proses pembangunan daerah. Perhatian bukan hanya diberikan pada besarnya investasi nominal tetapi juga pada efisiensi investasi yang dilakukan, metode yang dapat dilakukan untuk melihat efisiensi investasi dengan cara mencermati nilai ICOR. Pentingnya ICOR ini akan tampak ketika digunakan untuk menguji konsistensi antara target pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal yang mungkin akan terkumpul dari investasi yang sedang berjalan. Di bawah ini disajikan data ICOR Kabupeten Sekadau selama tahun 2014 – 2018. Dari tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata ICOR Kabupaten Sekadau sepanjang tahun 2015 – 2018 sebesar 3,24 dan sepanjang tahun pengamatan terlihat bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Sekadau fluktuatif. Tetapi meskipun nilai ICOR fluktuatif, terlihat bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Sekadau cukup tinggi karena memiliki rata-rata nilai ICOR di bawah 4. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sekadau masih perlu melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efisiensi atau minimal tetap mempertahankan nilai ICOR yang ada pengaruh investasi dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, di samping karena dari hasil penghitungan trend terjadi kenaikan ICOR pada lima tahun ke depan (2020 – 2025).

Jika pemerintah daerah Kabupaten Sekadau masih dengan strategi investasi yang ada, maka dapat dilihat trend ICOR selama 5 tahun ke depan seperti gambar di atas. Given strategi pembangunan dan strategi investasi, selama lima tahun ke depan hingga tahun 2025, tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Sekadau menurun, karena berdasar perhitungan trend, hingga tahun 2015 nilai ICOR Kabupaten Sekadau masih di atas 4.

Gambar 21. ICOR Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2018

Gambar 22. Trend ICOR Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

B. Analisis kinerja sektoral Kabupaten Sekadau

Secara teoritis dalam penghitungan pendapatan nasional ataupun pendapatan daerah dari sisi pengeluaran, terdapat beberapa jenis pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan eksport netto. Identifikasi jenis pengeluaran ini penting untuk dilakukan karena dari data tersebut akan dapat diketahui seberapa besar efek penggandanya terhadap perekonomian. Hal ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan jenis pengeluaran, table di atas menyajikan nilai PDRB berdasarkan Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2018.

Berdasar gambar di bawah ini terlihat trend peningkatan untuk semua jenis pengeluaran, tetapi sepanjang tahun pengamatan total pengeluaran konsumsi mendominasi dari seluruh pengeluaran. Jenis pengeluaran kedua tertinggi setelah pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran investasi dan yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penggerak utama perekonomian daerah Kabupaten Sekadau adalah aktivitas konsumsi. Secara teoritis, dalam jangka pendek tingkat pengeluaran konsumsi yang tinggi akan berdampak positif bagi perekonomian, tetapi dalam jangka panjang jika tingginya tingkat konsumsi yang diikuti dengan trend kenaikan tidak dibarengi dengan peningkatan investasi maka hal ini dapat memicu terjadinya hyper inflasi. Untuk menekan potensi inflasi, maka kegiatan yang sifatnya konsumtif harus diikuti kegiatan yang sifatnya produktif.

Gambar 23. PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2018

Gambar 24. Trend PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Gambar 26. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2018

Gambar 27. Trend Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Untuk melihat efek pengganda dari masing-masing jenis pengeluaran terhadap perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penghitungan angka pengganda output yang terdiri atas angka pengganda konsumsi, angka pengganda investasi, dan angka pengganda pengeluaran pemerintah. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan angka pengganda output Kabupaten Sekadau selama tahun 2015 – 2018 serta prediksi trendnya untuk tahun 2020 – 2025.

Dari data yang disajikan berikut, selama masa pengamatan sepanjang tahun 2015 – 2018 pengeluaran pemerintah memiliki rata-rata angka pengganda tertinggi, diikuti oleh pengeluaran investasi dan konsumsi. Hal ini mungkin disebabkan pengeluaran pemerintah dilakukan melalui alokasi dana desa sehingga mampu menggerakkan perekonomian bahkan pada level desa, sehingga secara agregat hal ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah. Jika dibandingkan dengan total pengeluaran konsumsi, rata-rata pengeluaran pemerintah ini dengan besaran di bawah pengeluaran konsumsi, tetapi kenyataannya pengeluaran pemerintah lebih mampu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dibanding pengeluaran lain. Dan angka pengganda konsumsi menduduki urutan terendah meskipun rata-rata total pengeluaran konsumsi menempati urutan tertinggi sepanjang tahun 2015 – 2018.

Gambar 28. Angka Pengganda Output berdasarkan pengeluaran Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2018

Gambar 29. Trend Angka Pengganda Output berdasarkan pengeluaran Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Pembangunan di Kabupaten Sekadau dilaksanakan di semua sektor agar tidak terjadi ketimpangan antar sektor. Untuk mengukur ketimpangan output antar sektor dalam perekonomian

digunakan Indeks Ketimpangan Sektoral (IKS). Berdasar tabel di bawah ini terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Sektoral (IKS) Kabupaten Sekadau sepanjang tahun 2015 – 2019 tinggi dengan rata-rata sebesar 0,49. Artinya terdapat perbedaan yang tinggi dalam tingkat output untuk masing-masing sektor dalam perekonomian. Adapun secara grafis IKS Kabupaten Sekadau sepanjang masa pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 30. Indeks Ketimpangan Sektoral Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019

Gambar 31. Trend Indeks Ketimpangan Sektoral Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau harus mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang memiliki tingkat output rendah selanjutnya sektor tersebut harus mendapatkan dorongan yang kuat dari pemerintah daerah sehingga sektor tersebut dapat mengejar (catch up) sektor perekonomian yang memiliki tingkat output tinggi sehingga ketimpangan output sektoral dapat dikurangi.

5. KESIMPULAN

Indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi bagi proses pembangunan di Kabupaten Sekadau adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, IPM, Gini ratio, ICOR, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Angka pengganda output dan ketimpangan sektoral.

Temuan dari kajian ini bahwa selama masa pengamatan tahun 2015 – 2019 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi turun, TPAK meningkat selama 2015 – 2017 kemudian turun hingga tahun 2019, tingkat pengangguran meningkat sejak 2017 hingga 2019, kemiskinan turun sejak 2017, nilai IPM meningkat, Gini ratio berfluktuasi tetapi dengan trend menurun, ICOR meningkat tatepi sejak 2018 menurun, pengeluaran baik konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah meningkat, tetapi pertumbuhan menurun terjadi pada pengeluaran investasi, serta indeks ketimpangan sektoral meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Amponsah, William et.al. (1999). Global Trade Integration and Economic Convergence of Developing Countries. *American Journal of Agriculture Economics*, No. 5: 1142-1148.

BPS. (2019). *Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2019*. Sekadau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau.

Grossman, G.M. and Helpman E. (1994). Endogenous Innovation in The Theory of Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8, 23-44.

Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan), Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Leichenko, Robin M. 2000. Export, Employment and Production: A Causal Assessment of US and Regions. *Economics Geography* Vol.76 No.4, Oktober, 303-325.

Mankiw, N. G. (2011). *Principles of Economics, Sixth Edition*. South-Western Cengage Learning.

Render, B, et al. (2006). *Quantitative Analysis for Management*. Australia: Pearson Prentice Hall.

Saaty, TL. (1990) *Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex Word*. USA: University of Pittsburgh.

Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yamit, Z. (1994). *Manajemen Kuantitatif untuk Bisnis (Operation Research)*. Yogyakarta: BPFE

Zikmund, W.G. (2001). Business Research Method, Forth Word: Harcourt Inc.